



Katalog BPS: 4104001

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA



2014



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA



2014

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2014

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

ISSN : 2086-1036
Nomor Publikasi : 04220.1502
Katalog BPS : 4104001
Ukuran Buku : 29,7 x 21 cm
Jumlah Halaman : xxii + 264 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Penanggung Jawab Umum : Teguh Pramono, MA

Penanggung Jawab Teknis : Ir. Meity Trisnowati, M.Si.

Editor : Dwi Susilo, M.Si.
Amiek Chamami, SST, M.Stat.
Nur Budi Handayani, SST, M.Si.

Penulis Naskah : Andhie Surya Mustari, M.Si.
Yeni Rachmawati, SST
Sigit Wahyu Nugroho, A.Md.

Pengolah Data : Andhie Surya Mustari, M.Si.

Tata Letak : Sigit Wahyu Nugroho, A.Md.

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Dicetak Oleh:

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia, 2015

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Sejak tahun 2004, Badan Pusat Statistik telah menerbitkan secara berkala Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia. Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2014 merupakan publikasi kedua belas. Informasi yang disajikan mencakup struktur demografi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, kegiatan ekonomi, kondisi sosial, dan perlindungan social para lansia berdasar hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2014.

Publikasi ini diharapkan bermanfaat bagi pengguna data terutama sebagai masukan pemerintah pusat/daerah dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan/program-program pembangunan terkait masalah lansia. Kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan publikasi ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi serupa di masa datang sangat diharapkan.

Jakarta, November 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK



Dr. SURYAMIN, M.Sc.

DAFTAR SINGKATAN

1. ART: Anggota Rumah Tangga
2. ASKESKIN: Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin
3. ASLUT: Asistensi Sosial Lanjut Usia
4. BPS: Badan Pusat Statistik
5. Jamkesda: Jaminan Kesehatan Daerah
6. Jamkesmas: Jaminan Kesehatan Masyarakat
7. JSLU: Program Jaminan Sosial Lanjut Usia
8. KRT: Kepala Rumah Tangga
9. KUR: Kredit Usaha Rakyat
10. Lansia: Lanjut usia
11. MA: Madrasah Aliyah
12. MI: Madrasah Ibtidaiyah
13. MSBP: Modul Sosial Budaya dan Pendidikan
14. MTs: Madrasah Tsanawiyah
15. ODR: *Old Dependency Ratio* (Rasio ketergantungan lansia)
16. OPK: Operasi Pasar Khusus
17. PNPM: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
18. PT: Perguruan Tinggi
19. Pustu: Puskesmas Pembantu
20. Raskin: Beras untuk Masyarakat Miskin
21. RTS: Rumah Tangga Sasaran
22. Sakernas: Survei Angkatan Kerja Nasional
23. SD: Sekolah Dasar
24. SDM: Sumber Daya Manusia
25. SMA: Sekolah Menengah Atas
26. SMP: Sekolah Menengah Pertama
27. SMK: Sekolah Menengah Kejuruan
28. Susenas: Survei Sosial Ekonomi Nasional
29. TPAK: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
30. TD: Titik Distribusi
31. TB: Titik Bagi
32. UEP: Usaha Ekonomi Produktif
33. UU: Undang-undang

<http://www.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proporsi penduduk lanjut usia (lansia) yang semakin besar membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dalam pelaksanaan pembangunan. Usia 60 tahun ke atas merupakan tahap akhir dari proses penuaan yang memiliki dampak terhadap tiga aspek, yaitu biologis, ekonomi, dan sosial. Secara biologis, lansia akan mengalami proses penuaan secara terus menerus yang ditandai dengan penurunan daya tahan fisik dan rentan terhadap serangan penyakit. Secara ekonomi, umumnya lansia lebih dipandang sebagai beban daripada sumber daya. Secara sosial, kehidupan lansia sering dipersepsikan secara negatif, atau tidak banyak memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Negara perlu memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada lansia sehingga keberadaannya tidak menjadi beban pembangunan, melainkan dapat berpartisipasi secara aktif dan positif.

Untuk mempertajam arah dan sasaran pembangunan pemberdayaan lansia, dibutuhkan berbagai data statistik mengenai kondisi dan potensi lansia di Indonesia. Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran makro mengenai kondisi lansia dilihat dari berbagai aspek, yaitu struktur demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kondisi sosial, dan perlindungan sosial. Sumber data yang digunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2014. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden rumah tangga terpilih. Indikator-indikator statistik yang disajikan merupakan angka estimasi yang ditentukan menggunakan suatu nilai penimbang tertentu (*weighted*). Ulasan yang diberikan menggunakan analisis deskriptif sederhana yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

Kondisi Demografi Lansia

Berdasarkan data Susenas 2014, jumlah rumah tangga lansia sebanyak 16,08 juta rumah tangga atau 24,50 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Rumah tangga lansia adalah yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas. Jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03 persen dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2014. Jumlah lansia perempuan lebih besar daripada laki-laki, yaitu 10,77 juta lansia perempuan

dibandingkan 9,47 juta lansia laki-laki. Adapun lansia yang tinggal di perdesaan sebanyak 10,87 juta jiwa, lebih banyak daripada lansia yang tinggal di perkotaan sebanyak 9,37 juta jiwa.

Nilai rasio ketergantungan lansia sebesar 12,71 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 13 orang lansia. Rasio ketergantungan lansia di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan, berturut-turut 14,09 dibanding 11,40. Dibedakan antara lansia laki-laki dan perempuan, lebih banyak lansia perempuan yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Ketergantungan lansia perempuan (13,59) lebih tinggi daripada lansia laki-laki (11,83).

Sebagian besar lansia tinggal bersama dengan keluarga besarnya. Sebanyak 42,32 persen lansia tinggal bersama tiga generasi dalam satu rumah tangga, yaitu tinggal bersama anak/menantu dan cucunya, atau bersama anak/menantu dan orangtua/mertuanya. Sebanyak 26,80 persen lansia tinggal bersama keluarga inti, sementara yang tinggal hanya bersama pasangannya sebesar 17,48 persen. Hal yang patut mendapat perhatian adalah mereka yang tinggal sendirian dalam satu rumah, atau rumah tangga tunggal lansia. Sebanyak 9,66 persen lansia tinggal sendirian dan harus memenuhi kebutuhan makan, kesehatan, dan sosialnya secara mandiri.

Pendidikan, Kesehatan, dan Kegiatan Ekonomi Lansia

Bekal pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi kehidupan lansia, supaya tetap produktif dan berperan aktif dalam masyarakat. Kemampuan baca tulis, tingkat ijazah yang dimiliki, serta pengalamannya menempuh pendidikan formal, dapat menjadi ukuran kesiapannya dalam menjalani hari tua. Pada umumnya lansia 2014 memiliki pendidikan rendah. Sebanyak 21,03 persen lansia tidak dapat membaca dan menulis dan menurut tingkat pendidikannya, lebih dari setengah (56,85 persen) penduduk lansia tidak memiliki ijazah pendidikan apapun. Sementara itu, yang memiliki ijazah SD/ sederajat sebesar 25,68 persen, sisanya sebesar 17,47 persen memiliki ijazah SMP/ sederajat atau lebih. Angka rata-rata lama sekolah lansia juga mengindikasikan hal yang sama, rata-rata lama sekolah sebesar 4,27 tahun artinya bahwa secara rata-rata lansia putus sekolah di kelas 5 SD/ sederajat.

Dalam aspek kesehatan diketahui semakin bertambah tua umurnya, maka lansia yang mengalami keluhan kesehatan akan semakin banyak. Sebanyak 37,11 persen penduduk pra lansia (45-59 tahun) pernah mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, sementara lansia muda (60-69 tahun) sebesar 48,39 persen, lansia madya (70-79 tahun) sebesar 57,65 persen, dan lansia tua (80-89 tahun) sebesar 64,01 persen yang mengeluhkan kondisi kesehatannya. Selanjutnya, ditilik

dari angka kesakitan (*morbidity rates*) lansia yaitu terganggunya kegiatan sehari-hari sebagai akibat dari keluhan kesehatan yang dideritanya. Angka kesakitan lansia tahun 2014 sebesar 25,05 persen, berarti bahwa sekitar satu dari empat lansia pernah mengalami sakit dalam satu bulan terakhir.

Pelayanan kesehatan harus diberikan secara maksimal untuk memenuhi hak lansia dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sehingga dapat memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sosialnya supaya dapat berfungsi secara wajar. Sebanyak 59,24 persen lansia dengan keluhan kesehatan masih mengobati penyakitnya sendiri, baik menggunakan obat modern (66,01 persen), obat tradisional (11,60 persen), maupun kombinasi kedua obat tersebut (21,20 persen). Lansia yang mengatasi keluhan kesehatannya dengan cara berobat jalan sebesar 51,24 persen. Terbanyak mereka berobat jalan di praktek tenaga kesehatan (33,71 persen), praktek dokter (31,70 persen), dan puskesmas (27,05 persen).

Dari sisi kegiatan ekonomi lansia, data sakernas 2014 memperlihatkan bahwa sebesar 47,48 persen lansia masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Proporsi lansia laki-laki yang bekerja (63,81 persen) lebih besar daripada lansia perempuan (32,88 persen). Sementara itu, proporsi lansia bekerja di perdesaan (54,84 persen) lebih besar daripada perkotaan (38,90 persen). Sebanyak 84,92 persen lansia bekerja tersebut berpendidikan rendah, yaitu tidak pernah menamatkan pendidikan formal atau hanya memiliki ijazah SD/ sederajat.

Sebagian besar lansia bekerja pada sektor pertanian (59,95 persen), diikuti sektor perdagangan (18,58 persen), jasa (8,20 persen), industri (6,95 persen), dan sektor lainnya (6,31 persen). Menurut jabatan/jenis pekerjaannya, sebesar 74,10 persen sebagai pekerja kerah biru, sebesar 23,61 persen pekerja kerah abu-abu, dan hanya 3,35 persen sebagai pekerja kerah putih. Menurut status pekerjaannya, sebagian besar lansia bekerja dengan dibantu buruh (42,11 persen), kemudian berusaha sendiri (25,66 persen), pekerja tidak dibayar (13,16 persen), pekerja bebas (10,39 persen), dan sebagai buruh/karyawan (8,68 persen). Rata-rata jumlah jam kerja lansia sebesar 32,71 jam, dengan rata-rata upah/pendapatan hanya sebesar Rp. 1.648,24,- per bulan.

Kondisi Sosial dan Program Perlindungan Lansia

Informasi tentang kondisi sosial lansia yang tersedia pada data Susenas 2014 adalah keadaan tempat tinggalnya, status ekonomi rumah tangga, kebiasaan bepergian, serta pengalaman lansia menjadi korban kejahatan. Menurut status ekonominya, sebesar 46,33 persen lansia tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi rendah dan hanya 16,13 persen lansia dengan status ekonomi rumah tangga yang tinggi. Sebesar 5,51 persen lansia tinggal di rumah tidak layak huni, sementara

lansia yang menempati rumah hampir tidak layak sebesar 11,98 persen. Tingkat kelayakan rumah tempat tinggal tersebut ditentukan melalui tujuh indikator perumahan yang telah disepakati oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Hampir seluruh lansia tinggal di rumah sendiri atau milik anggota rumah tangga yang tinggal bersama, tepatnya yaitu sebesar 92,40 persen lansia.

Dari kebiasaan bepergian, hanya sebesar 7,46 persen lansia yang pernah bepergian dalam tiga bulan terakhir. Tujuan utama bepergian adalah untuk mengunjungi teman atau keluarga (62,66 persen), berlibur (12,05 persen), dan acara keagamaan (10,93 persen). Adapun lansia yang mengaku pernah menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir sebesar 1,23 persen, baik sebagai korban pencurian, penipuan, perampokan, maupun kejahatan lainnya.

Lansia termasuk ke dalam kelompok penduduk rentan yang berhak atas jaminan perlindungan sosial untuk pengembangan dirinya secara utuh, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan sosial dibutuhkan untuk keamanan penghasilan bagi lansia yang umumnya sudah tidak produktif lagi secara ekonomi. Rumah tangga lansia yang telah memiliki jaminan sosial baru sebesar 6,66 persen, dimana proporsi terbesar adalah jaminan pensiun. Adapun rumah tangga lansia yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 52,75 persen. Jamkesmas adalah merupakan jenis jaminan kesehatan utama yang dimiliki lansia. Jaminan kesehatan tersebut memberikan kemudahan bagi lansia untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara aman dan berkualitas.

Program pemberdayaan masyarakat yang juga menyentuh rumah tangga lansia adalah penyaluran beras miskin (raskin) dan kredit usaha kecil. Sebesar 59,99 persen rumah tangga lansia telah menerima atau membeli raskin pada tahun 2014. Mereka rata-rata memperoleh 5,73 kg raskin per bulan, dengan harga rata-rata Rp. 2.151,56,- per kilogram. Adapun rumah tangga lansia yang memperoleh bantuan kredit usaha melalui PNPM dan program lainnya mencapai 6,68 persen dari seluruh rumah tangga lansia.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Singkatan	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Kondisi Demografi Lansia	vii
Pendidikan, Kesehatan, dan Kegiatan Ekonomi Lansia	viii
Kondisi Sosial dan Program Perlindungan Lansia	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Tabel Lampiran	xvii
Daftar Tabel <i>Sampling Error</i>	xxi
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Sistematika Penyajian	4
2. METODOLOGI	7
2.1 Sumber Data	7
2.2 Ruang Lingkup	8
2.3 Kerangka dan Pemilihan Sampel	8
2.4 Metode Pengumpulan Data	9
2.5 Metode Estimasi	9
2.6 Kualitas Data	9
2.7 Konsep dan Definisi	10
2.8 Metode Analisis	16
3. STRUKTUR DEMOGRAFI	19
3.1 Piramida Penduduk Indonesia	19
3.2 Komposisi dan Distribusi Penduduk Lansia	22
3.3 Rasio Ketergantungan Lansia	23
3.4 Status Perkawinan	25
3.5 Peran Lansia dalam Rumah Tangga	26

3.6 Status Tinggal Bersama Lansia.....	28
4. PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	33
4.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	33
4.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	36
4.3 Rata-rata Lama Sekolah	38
4.4 Fasilitas Teknologi Informasi.....	39
5. KESEHATAN	45
5.1 Keluhan Kesehatan.....	46
5.2 Angka Kesakitan Lansia.....	49
5.3 Lama Sakit	51
5.4 Cara Berobat.....	52
6. KEGIATAN EKONOMI	59
6.1 Partisipasi Lansia dalam Angkatan Kerja.....	60
6.2 Karakteristik Lansia Bekerja.....	65
6.3 Lapangan Usaha.....	68
6.4 Jabatan/Jenis Pekerjaan	70
6.5 Status Pekerjaan	72
6.6 Jumlah Jam Kerja.....	75
6.7 Pendapatan Lansia	77
7. KONDISI SOSIAL	83
7.1 Tempat Tinggal Lansia.....	83
7.2 Status Ekonomi Rumah Tangga.....	86
7.3 Lansia yang Bepergian.....	87
7.4 Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan.....	89
8. PERLINDUNGAN SOSIAL.....	93
8.1 Bantuan Sosial	94
8.2 Jaminan Sosial.....	95
8.3 Kebijakan Pasar Kerja.....	97
9. PROGRAM PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN LANSIA	101
9.1 Pihak-pihak yang Terlibat.....	102
9.2 Kebijakan Umum Pelayanan Kesejahteraan Lansia.....	103
9.3 Program-program Pelayanan dan Pemberdayaan Lansia	104
Daftar Pustaka	111
Tabel Lampiran	113
Hasil Penghitungan <i>Sampling Error</i>	235

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komposisi Penduduk Lansia Indonesia (persen) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014.....	22
Tabel 3.2	Rasio Ketergantungan Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	23
Tabel 3.3	Proporsi Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2014	25
Tabel 3.4	Perkiraan Jumlah (Ribuan) dan Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Tipe Daerah, 2014.....	26
Tabel 3.5	Proporsi Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2014	27
Tabel 3.6	Proporsi Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Tinggal Bersama, 2014	29
Tabel 4.1	Proporsi Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2014	34
Tabel 4.2	Proporsi Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	36
Tabel 4.3	Rata-rata Lama Sekolah Lansia (Tahun) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2014	39
Tabel 4.5	Persentase Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kepemilikan Akses Teknologi Informasi di Rumah, 2014	40
Tabel 5.1	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan Kesehatan, 2014	48
Tabel 5.2	Angka Kesakitan Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2014	50
Tabel 5.3	Proporsi Lansia Sakit Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Lamanya Sakit, 2014	52
Tabel 5.4	Persentase Lansia Sakit yang Berobat Sendiri dan Proporsi Jenis Pengobatannya, Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	53
Tabel 5.5	Persentase Lansia Sakit yang Berobat Jalan dan Tempat Berobat Jalan, Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	54
Tabel 5.6	Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2014	55
Tabel 6.1	Proporsi Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, Tahun 2014	66
Tabel 6.2	Proporsi Lansia Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Dalam Rumah Tangga, 2014	67

Tabel 6.3	Proporsi Lansia Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	68
Tabel 6.4	Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah, dan Lapangan Usaha, Tahun 2014	69
Tabel 6.5	Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, Lapangan Usaha, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	70
Tabel 6.6	Proporsi Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014	71
Tabel 6.7	Proporsi Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2014	73
Tabel 6.8	Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir, 2014	75
Tabel 6.9	Proporsi Lansia Bekerja Menurut Upah/Gaji/Pendapatan dalam Sebulan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014	77
Tabel 7.1	Proporsi Lansia menurut Kategori Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2011 – 2014	84
Tabel 7.2	Proporsi Lansia menurut Tipe Daerah dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2014	86
Tabel 7.3	Proporsi Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014	87
Tabel 7.4	Persentase Lansia yang Bepergian Tiga Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	88
Tabel 7.5	Proporsi Lansia Bepergian Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tujuan Utama Bepergian, 2014	88
Tabel 7.6	Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014.....	89
Tabel 7.7	Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kejahatan , 2014.....	90
Tabel 8.1	Karakteristik Penyaluran Bantuan Beras Miskin (Raskin) Kepada Rumah Tangga Lansia Menurut Tipe Daerah, 2014	94
Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga Lansia Yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial dan Tipe Daerah, 2014	96
Tabel 8.3	Persentase Rumah Tangga Lansia Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Tipe Daerah, 2014	97
Tabel 8.4	Persentase Rumah Tangga Lansia Yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah, 2014	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Piramida Penduduk Indonesia, 1994, dan 2014	20
Gambar 3.2	Struktur Umur Penduduk Indonesia, 2014	21
Gambar 3.3	Peta Kepadatan Penduduk Lansia, 2014	21
Gambar 3.4	Rasio Ketergantungan Lansia Menurut Tipe Daerah, 2011 – 2014	24
Gambar 4.1	Angka Buta Huruf Lansia Menurut Jenis Kelamin, 2011 – 2014	35
Gambar 4.2	Proporsi Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011 – 2014	37
Gambar 5.1	Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2014	47
Gambar 5.2	Angka Kesakitan Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011 – 2014 ..	49
Gambar 5.3	Rata-rata Lama Lansia Sakit (hari) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2011 – 2014	51
Gambar 6.1	Proporsi Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir dan Kelompok Umur, 2014	60
Gambar 6.2	Proporsi Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir, Kelompok Umur, dan Tipe Daerah, 2014	61
Gambar 6.3	Proporsi Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, 2014	62
Gambar 6.4	TPAK Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	63
Gambar 6.5	TPAK Lansia Menurut Provinsi, 2014	64
Gambar 6.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014	65
Gambar 6.7	Proporsi Lansia Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014	72
Gambar 6.8	Proporsi Lansia Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan, 2014 ...	74
Gambar 6.9	Proporsi Penduduk Lansia Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir dan Tipe Daerah, 2014	76
Gambar 6.10	Rata-rata Jumlah Jam Kerja Dari Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2014	76

Gambar 6.11 Rata-rata Besarnya Upah/Gaji/Pendapatan (Ribuan Rupiah) dari Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2014	78
Gambar 6.10 Rata-rata Besarnya Upah/Gaji/Pendapatan (Ribuan Rupiah) per Bulan dari Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014	79
Gambar 7.1 Proporsi Lansia menurut Tipe Daerah dan Kategori Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2014	85

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel 1.1	Proporsi Penduduk menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014	115 - 119
Tabel 1.2.1	Persentase Rumah Tangga Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	120
Tabel 1.2.2	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	121
Tabel 1.3	Rasio Ketergantungan Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	122
Tabel 1.4	Proporsi Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014	123 – 127
Tabel 1.5	Proporsi Lansia menurut Provinsi dan Status Anggota Rumah Tangga, 2014	128 – 132
Tabel 1.6	Proporsi Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2014	133 – 137
Tabel 2.1	Proporsi Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2014	138 – 142
Tabel 2.2	Proporsi Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	143 – 147
Tabel 2.3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014	148 – 152
Tabel 2.4	Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi di Rumah menurut Provinsi dan Jenis Akses, 2014	153 – 157
Tabel 3.1	Persentase Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	158
Tabel 3.2	Angka Kesakitan Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	159
Tabel 3.3	Rata-rata Lamanya Lansia Sakit (Hari) menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	160
Tabel 3.4	Proporsi Lansia Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, tahun 2014 ...	161
Tabel 3.5	Persentase Lansia Sakit yang Pernah Mengobati Sendiri Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	162
Tabel 3.6	Proporsi Lansia Sakit yang Mengobati Sendiri menurut Provinsi dan Obat/Cara Pengobatan Sendiri, 2014	163
Tabel 3.7	Persentase Lansia Sakit yang Pernah Berobat Jalan Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	164

Tabel 3.8	Persentase Lansia Sakit yang Berobat Jalan menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2014	165
Tabel 3.9	Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	166
Tabel 4.1	Proporsi Lansia menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir, 2014	167 – 171
Tabel 4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	172
Tabel 4.3.1	Proporsi Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014 ..	173
Tabel 4.3.2	Proporsi Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Status Anggota Rumah Tangga, 2014	174
Tabel 4.3.3	Proporsi Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	175
Tabel 4.4	Proporsi Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2014	176 – 180
Tabel 4.5	Proporsi Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014	181 – 185
Tabel 4.6	Proporsi Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2014	186 – 190
Tabel 4.7	Proporsi Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seminggu, 2014	191 – 195
Tabel 4.8	Rata-rata Jumlah Jam Kerja dari Lansia Bekerja menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	196
Tabel 4.9	Proporsi Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji Selama Sebulan, 2014	197 – 201
Tabel 4.10	Rata-rata Jumlah Pendapatan/Upah/Gaji Dari Lansia Bekerja menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	202
Tabel 5.1	Proporsi Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2014	203 – 207
Tabel 5.2	Proporsi Lansia menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2014	208 – 212
Tabel 5.3	Proporsi Lansia menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014	213 – 217
Tabel 5.4	Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	218
Tabel 5.5	Proporsi Lansia Bepergian menurut Provinsi dan Tujuan Bepergian, 2014 ..	219
Tabel 5.6	Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	220
Tabel 5.7	Proporsi Lansia Menjadi Korban Kejahatan menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan, 2014	221
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima/Membeli Beras Miskin Menurut Provinsi Dan Tipe Daerah, 2014	222

Tabel 6.2	Rata-rata Kilogram Beras Miskin yang Diterima/Dibeli Rumah Tangga Lansia Per Bulan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	223
Tabel 6.3	Rata-rata Harga Per Kilogram Beras Miskin yang Dibeli Rumah Tangga Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	224
Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial menurut Provinsi Dan Tipe Daerah, 2014	225
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Sosial, 2014	226 – 228
Tabel 6.6	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi Dan Tipe Daerah, 2014	229
Tabel 6.7	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2014	230 – 232
Tabel 6.8	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha Setahun Terakhir menurut Provinsi Dan Tipe Daerah, 2014	233
Tabel 6.9	Persentase Rumah Tangga Lansia Penerima Kredit Pengembangan Usaha menurut Provinsi dan Jenis Kredit, tahun 2014	234

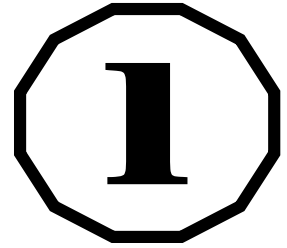
DAFTAR TABEL *SAMPLING ERROR*

Tabel A.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Perkotaan Tahun 2014	237
Tabel A.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Perdesaan Tahun 2014	238
Tabel A.3	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Perkotaan + Perdesaan Tahun 2014	239
Tabel B	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi, Tahun 2014 .	240
Tabel C.1	<i>Sampling Error</i> Angka Buta Huruf (ABH) Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	241
Tabel C.2	<i>Sampling Error</i> Angka Buta Huruf (ABH) Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014	242
Tabel D.1	<i>Sampling Error</i> Rata-rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	243
Tabel D.2	<i>Sampling Error</i> Rata-rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014	244
Tabel E.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	245
Tabel E.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014	246
Tabel F.1	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	247
Tabel F.2	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014	248
Tabel G.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	249
Tabel G.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014	250
Tabel H.1	<i>Sampling Error</i> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	251
Tabel H.2	<i>Sampling Error</i> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014	252
Tabel I.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Tinggal Sendiri Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	253

Tabel I.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Tinggal Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014	254
Tabel J.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bepergian Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	255
Tabel J.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Bepergian Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014	256
Tabel K.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	257
Tabel K.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014	258
Tabel L.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Ekonomi Bawah Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	259
Tabel L.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Lansia Ekonomi Bawah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014	260
Tabel M	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia Membeli/Memperoleh Beras Miskin (Raskin) Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	261
Tabel N	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	262
Tabel O	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014	263

<http://www.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di berbagai bidang telah memperbaiki kualitas kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum. Angka harapan hidup (*life expectancy*) Indonesia telah meningkat secara nyata. Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia memiliki harapan untuk hidup hingga mencapai usia 70,7 tahun. Hal tersebut jauh lebih baik dari angka harapan hidup tiga atau empat dekade sebelumnya, yaitu di bawah 60 tahun. Meningkatnya angka harapan hidup telah menambah jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dan merubah struktur penduduk Indonesia.

Peningkatan jumlah penduduk lansia memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dalam pelaksanaan pembangunan. Terdapat dua kategori penduduk lansia, yaitu lansia potensial maupun lansia tidak potensial. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 dijelaskan bahwa lansia potensial adalah lansia yang masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan biasanya tidak bergantung kepada orang lain. Sementara itu, lansia tidak potensial adalah lansia yang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan biasanya bergantung kepada orang lain. Lansia tidak potensial inilah yang dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, berbagai kondisi lansia tersebut perlu dikaji sehingga program pembangunan yang dijalankan mampu melindungi dan memberdayakan lansia.

Untuk mempertajam arah dan sasaran pembangunan perlindungan dan pemberdayaan lansia, dibutuhkan berbagai data statistik mengenai kondisi dan potensi lansia di Indonesia. Informasi makro tentang kondisi demografi penduduk lansia berguna sebagai data dasar. Informasi tersebut dilengkapi dengan status pendidikan lansia, kondisi kesehatan, potensi ekonomi, keadaan sosial,

serta akses lansia terhadap berbagai fasilitas program pemberdayaan masyarakat. Arah pemberdayaan yang dibutuhkan tidak hanya berfokus pada lansia saja, namun dapat dikembangkan lebih luas lagi, yaitu pada rumah tangga lansia serta masyarakat secara umum.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah menyajikan gambaran makro mengenai situasi dan kondisi lansia Indonesia dilihat dari berbagai aspek, yaitu struktur demografis, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kondisi sosial, dan perlindungan sosial.

Gambaran situasi dan kondisi lansia Indonesia dalam publikasi ini disajikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi, dibedakan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Diharapkan penyajian publikasi ini berguna terutama bagi peneliti, perencana, dan pengambil keputusan di bidang sosial dan kependudukan, khususnya yang menaruh perhatian pada lansia.

1.3 Sistematika Penyajian

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2014 disajikan dalam sembilan bagian. Pada bagian pertama (Bab I) berisi latar belakang penyusunan publikasi; maksud dan tujuan; serta sistematika penyajian. Pada bagian kedua (Bab II) dijelaskan metodologi yang meliputi sumber data; ruang lingkup; konsep dan definisi; kualitas data; serta metode analisis.

Tujuh bagian berikutnya menyajikan gambaran situasi dan kondisi lansia di Indonesia, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa kajian mengenai struktur demografis lansia, bagian keempat (Bab IV) mengenai kemampuan baca tulis, pendidikan tertinggi yang ditamatkan lansia, dan fasilitas teknologi informasi, bagian kelima (Bab V) terkait kajian kesehatan lansia; bagian keenam (Bab VI) menyajikan partisipasi lansia dalam kegiatan ekonomi, diantaranya karakteristik lansia bekerja, lapangan usaha, status pekerjaan, jumlah jam kerja, dan pendapatan lansia.

Bagian ketujuh (Bab VII) menggambarkan kondisi sosial lansia yang mencakup kelayakan tempat tinggal, peran dan kebersamaan dalam rumah tangga, perjalanan, korban kejahatan, serta kondisi ekonomi rumah tangga lansia; bagian kedelapan (Bab VIII) mengenai perlindungan dan bantuan sosial, jaminan sosial, dan kebijakan pasar kerja bagi lansia; dan bagian kesembilan (Bab IX) disajikan berbagai program pemberdayaan lansia yang telah dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga, baik di pusat maupun daerah.

<http://www.bps.go.id>

BAB III METODOLOGI



METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2014 adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor tahun 2014 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2014. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kor Susenas Tahun 2014, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi lansia dari sisi demografi, pendidikan, kesehatan, kondisi perumahan dan keadaan sosial ekonomi lainnya.
- b. Data Sakernas Tahun 2014, yang digunakan untuk melihat gambaran kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan penduduk lansia.

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, yaitu meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS telah melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Pada periode tahun 2011-2014, Susenas dilaksanakan secara triwulanan (triwulan I-IV) yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Susenas mengumpulkan data kor (keterangan pokok) dan modul (keterangan sasaran). Data kor dikumpulkan setiap tahun sedangkan modul dikumpulkan secara bergiliran setiap 3 tahun sekali.

Informasi yang dikumpulkan melalui Susenas Kor antara lain keterangan umum anggota rumah tangga (ART) yang mencakup hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, keterangan kesehatan, keterangan pendidikan, serta keterangan fertilitas untuk perempuan pernah kawin. Selain itu, Susenas Kor juga mengumpulkan informasi mengenai keterangan perumahan yang mencakup penguasaan tempat tinggal, luas lantai, sumber air minum,

fasilitas tempat buang air besar, dan keterangan teknologi komunikasi dan informasi. Keterangan sosial ekonomi lainnya yang juga dicakup dalam Susenas seperti pemanfaatan fasilitas program pemberdayaan masyarakat miskin (raskin, kartu sehat, dan sejenisnya), pemanfaatan fasilitas kredit, serta ketersediaan jaminan kesehatan dan aset.

2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup survei rumah tangga yang diselenggarakan oleh BPS, termasuk Susenas dan Sakernas, mencakup populasi penduduk yang tinggal di rumah tangga biasa. Adapun penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus seperti panti jompo, panti asuhan, barak polisi/militer, dan penjara tidak dicakup. Sampel Susenas Kor 2014 tersebar di seluruh provinsi dan 497 kabupaten/kota di Indonesia. Data hasil pencacahan setiap triwulan dapat disajikan baik untuk tingkat nasional maupun provinsi, sedangkan data kumulatif hasil pencacahan selama empat triwulan dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

2.3 Kerangka dan Pemilihan Sampel

Penarikan sampel Susenas menggunakan tiga tahap metode dengan tiga jenis kerangka sampel, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010.

Sampel Wilcah dipilih secara PPS (*Probability Proportional to Size*) dengan size banyaknya rumah tangga SP2010. Kemudian wilcah terpilih tersebut dialokasikan secara acak ke dalam 4 (empat) triwulan. Keseluruhan sampel wilcah diambil sebanyak 30.000 wilcah, masing-masing triwulan sebanyak 7.500 wilcah.

- Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar blok sensus (BS) pada setiap wilcah terpilih. Pemilihan BS dilakukan pada setiap wilcah terpilih untuk pelaksanaan Susenas Triwulan I, II, III dan IV.

- Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga biasa pada BS terpilih yang telah dimutakhirkan menjelang pelaksanaan survei. Rumah tangga biasa tidak termasuk rumah tangga khusus seperti panti asuhan, barak polisi/militer, dan penjara.

Dari setiap BS terpilih yang sudah dilakukan pemutakhiran rumah tangga, dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis. Pemilihan sampel rumah tangga di beberapa lokasi menggunakan program komputer yang telah disiapkan.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

2.5 Metode Estimasi

Indikator-indikator statistik penduduk lanjut usia yang disajikan dalam publikasi ini merupakan angka estimasi yang ditentukan menggunakan suatu nilai penimbang tertentu (*weighted*) yang dihitung berdasarkan hasil proyeksi penduduk per kabupaten/kota 2010-2035 yang telah dipublikasikan. Untuk data tahun 2011 dan 2012, dilakukan estimasi ulang (*backcasting*) menggunakan penimbang baru yang dihitung berdasarkan hasil proyeksi tersebut.

2.6 Kualitas Data

Kualitas data statistik hasil estimasi yang diperoleh dari setiap kegiatan survei selalu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu jumlah sampel (n), kesalahan bukan akibat dari teknik pemilihan sampel (*non sampling error*), dan kesalahan akibat dari teknik pemilihan sampel (*sampling error*). Secara umum, semakin besar jumlah sampel pada suatu survei akan memperbesar tingkat *non sampling error* dan memperkecil *sampling error*. Sebaliknya semakin kecil jumlah sampel akan memperkecil *non sampling error* dan memperbesar tingkat *sampling error*. Setiap desain survei harus mempertimbangkan ketiga jenis kesalahan tersebut untuk mendapatkan data yang lebih berkualitas.

(1) Jumlah sampel (n)

Semakin banyak atau semakin besar jumlah sampel dalam suatu survei, maka nilai estimasi yang dihasilkan akan semakin mendekati karakteristik populasinya.

(2) Kesalahan bukan akibat dari teknik pemilihan sampel (*Non Sampling Error*)

Non sampling error merupakan kesalahan yang muncul pada saat pelaksanaan survei dan atau saat pengolahan data sebagai akibat dari kesalahan petugas (*human error*). Contoh kesalahan dalam pelaksanaan survei antara lain:

- Penggunaan konsep dan definisi yang salah oleh petugas akibat kesalahan penyampaian dari instruktur ke petugas pencacah maupun pengawas,

- Kesalahan pengertian antara responden dan petugas pencacah pada saat wawancara, yang mengakibatkan kesalahan pada isian kuesioner, dan
- Tidak ditemukannya rumah tangga sampel, sehingga wawancara diwakili oleh pemberi informasi lain.

Sedangkan contoh kesalahan pada saat pengolahan antara lain:

- Kesalahan pada saat pemeriksaan dan perbaikan dokumen (*editing* dan *coding*), dan
- Kesalahan pada saat perekaman data ke media komputer (*entry data*)

Non sampling error dapat dikurangi melalui pengawasan ketat dan manajemen survei yang baik, akan tetapi tidak dapat dihilangkan sama sekali serta sulit untuk dievaluasi secara statistik.

(3) Kesalahan akibat dari teknik pemilihan sampel (*Sampling Error*)

Sampling error merupakan suatu kesalahan estimasi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan teknik pemilihan sampel tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* dapat ditunjukkan oleh besarnya angka galat baku atau *standard error* (SE). Untuk mengukur sejauh mana teknik pemilihan sampel yang digunakan sudah cukup menggambarkan keadaan populasi, digunakan nilai *relative standard error* (RSE), yaitu hasil pembagian nilai SE dengan nilai estimasi suatu indikator, yang dinyatakan dalam persentase (%). Penghitungan RSE dalam publikasi ini menggunakan metode *Taylor Linearization*, baik pada hasil estimasi total, rasio, maupun rata-rata.

Kesalahan *sampling* dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Estimasi yang diperoleh dari jumlah kasus yang sedikit cenderung menghasilkan nilai RSE yang besar. Kualitas data dan tingkat akurasi hasil estimasi suatu indikator bisa dilihat dari nilai RSE yang dihasilkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Jika RSE kurang dari atau sama dengan 25% ($RSE \leq 25\%$), maka estimasi dianggap akurat,
- Jika RSE lebih dari 25% dan kurang dari sama dengan 50% ($25\% < RSE \leq 50\%$), maka perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi, dan
- Jika RSE lebih dari 50% ($RSE > 50\%$), maka hasil estimasi dianggap tidak akurat.

2.7 Konsep dan Definisi

- Penduduk Lanjut Usia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas (Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

- b. **Angka harapan hidup (e_0)** adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
- c. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang didasarkan pada tiga variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.
- d. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
- Rumah Tangga Khusus** adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.
- Rumah Tangga Lansia** adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas.
- e. **Kepala Rumah Tangga (KRT)** adalah salah seorang dari anggota rumah tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
- Anggota Rumah Tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.
- Orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.
- Tidak termasuk anggota rumah tangga** yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).
- f. **Rasio Ketergantungan Lansia** adalah perbandingan antara jumlah lansia (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun). Menggambarkan seberapa besar beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk lansia.

- g. **Kawin** adalah mempunyai istri (bagi pria) atau mempunyai suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup. **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.
- h. **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu. **Buta Aksara atau Buta Huruf** adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf *Braille*. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.
- i. **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar. **Tidak Tamat SD** adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat. **SD/Sederajat** meliputi tamat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat. **SMP/Sederajat** meliputi tamat jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan, dan yang sederajat. **SMA/Sederajat atau lebih** meliputi tamat jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah, dan yang sederajat. Termasuk menamatkan pendidikan program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/ perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana

muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- j. **Keluhan Kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.
- k. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut/kronis maupun mengalami gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja sehari-harinya menjadi terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan ringan (misalnya masuk angin atau pilek) yang tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya dianggap tidak sakit.
- l. **Angkatan Kerja Penduduk Lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan sedang bekerja, sementara tidak bekerja, mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan Suatu Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/ melakukan aktivitas ekonomi,

baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).

- m. **Bukan Angkatan Kerja Lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Termasuk penduduk umur 60 tahun ke atas yang tidak melakukan kegiatan bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan.
- n. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia** adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja lansia terhadap jumlah penduduk lansia, dikali seratus. TPAK dinyatakan dalam persentase.
- o. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor/instansi tempat seseorang bekerja.
- p. **Status/kedudukan Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaannya, yang mencakup berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh dibayar, atau sebagai buruh/karyawan/pegawai.
- q. **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- r. **Rumah Tidak Layak Huni** didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008).

Suatu rumah tempat tinggal termasuk kriteria tidak layak huni jika memenuhi setidaknya dua dari tujuh kriteria berikut ini; (1) Luas lantai per kapita 7,2 m², (2) Jenis atap rumah terbuat dari daun/lainnya, (3) Jenis dinding rumah terbuat dari bambu/lainnya, (4) Jenis lantai tanah, (5) Tidak mempunyai fasilitas buang air besar, (6) Sumber penerangan bukan listrik, dan (7) Jarak sumber air minum utama ke tempat pembuangan kotoran/tinja kurang dari 10 m.

- s. **Korban kejahatan** adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perampokan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri atau jika

perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

- t. **Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)** adalah salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh BULOG dengan menjual beras dengan harga murah bersubsidi.

Titik distribusi beras raskin adalah titik distribusi yang resmi seperti kantor kelurahan/desa, pos RW atau tempat yang lebih dekat dengan masyarakat.

- u. **Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan:**

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Sasaran dari program Jamkesmas adalah masyarakat sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin/tidak mampu. Pengelola Jamkesmas adalah Kementerian Kesehatan RI dan PT Askes (Persero), sedangkan yang memberikan pelayanan kesehatan adalah puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk. Jamkesmas merupakan pengganti ASKESKIN (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin). Pemegang kartu Jamkesmas dibebaskan dari biaya pengobatan dan rawat inap di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang ditunjuk.

Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat daerah. Sasaran Program Jamkesda adalah seluruh masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas, ASKES dan asuransi kesehatan lainnya.

Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan

JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes) adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS/Veteran/Pensiunan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Askes (Persero).

JPK Jamsostek adalah jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerja swasta di sektor formal yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Jamsostek.

- v. **Kredit Usaha** adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha. Pada dasarnya jenis kredit usaha terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program pemerintah lainnya **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri** adalah program nasional dalam rangka menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksudkan kredit usaha yang diterima oleh masyarakat dari PNPM Mandiri adalah kredit usaha yang diterima dari program-program yang termasuk di dalam PNPM Mandiri, setelah tahun 2007 maupun sebelum tahun 2007.

2.8 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam publikasi ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel, visualisasi berupa gambar atau grafik, serta ulasan sederhana. Analisis yang disajikan menjelaskan perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu, disertakan pula analisis tren yang menjelaskan gambaran perkembangan lansia antar periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan lampiran tabel yang menyajikan data pada level provinsi dan hasil estimasi *sampling error* untuk menjelaskan kualitas data yang disajikan.

<http://www.bps.go.id>

BAB III

STRUKTUR DEMOGRAFI



STRUKTUR DEMOGRAFI

Demografi merupakan aspek yang tidak dapat ditinggalkan dalam penentuan suatu kebijakan. Gambaran mengenai jumlah, struktur/komposisi, dan distribusi penduduk lansia baik dari sisi umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan struktur rumah tangga lansia akan memudahkan pengembangan suatu kebijakan, penyediaan sarana prasarana, dan pemenuhan kebutuhan lansia lainnya. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dinyatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, untuk melaksanakan amanah UU tersebut, dibutuhkan informasi demografi lansia secara lebih spesifik.

3.1 Piramida Penduduk Indonesia

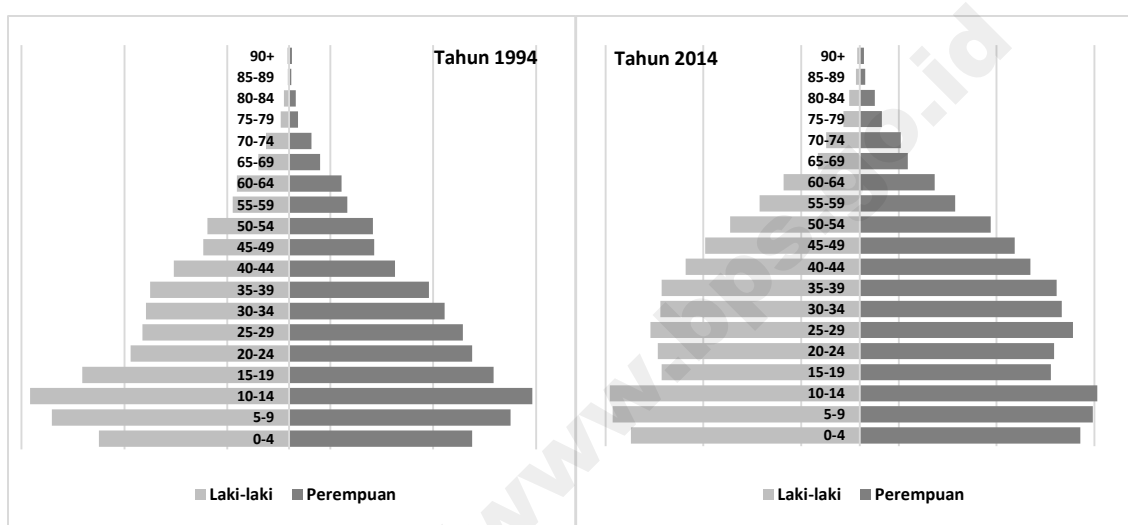
Berdasar hasil Sensus Penduduk (SP) yang dilaksanakan BPS sejak tahun 1961, pola komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dari dekade ke dekade berikutnya mengalami perubahan berarti. Awalnya jumlah penduduk 0-4 tahun lebih banyak daripada jumlah penduduk 5-9 tahun. Akan tetapi setelah SP 1990, terjadi sebaliknya jumlah penduduk 0-4 tahun lebih sedikit daripada jumlah penduduk 5-9 tahun. Selain itu, proporsi penduduk 10 tahun ke atas semakin bertambah.

Perubahan komposisi penduduk Indonesia tersebut merupakan hasil dari jerih payah Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan fertilitas melalui program Keluarga Berencana yang telah diterapkan sejak tahun 1970. Selain itu, didukung pula oleh keberhasilan dari program pembangunan di bidang kesehatan yang mampu menjadikan penduduk Indonesia dapat bertahan hidup lebih lama.

Program kesehatan tersebut diantaranya adalah program imunisasi, program pembangunan infrastruktur kesehatan, dan program jaminan kesehatan.

Hasil Susenas tahun 1994 juga memberikan gambaran struktur penduduk yang sama, yaitu jumlah penduduk berusia 0-4 tahun lebih kecil dibanding jumlah penduduk berusia 5-9 tahun. Begitupula jumlah penduduk usia kerja mengalami peningkatan ditandai dengan semakin besarnya badan piramida penduduk. Sepuluh tahun kemudian, hasil Susenas 2014 masih menunjukkan pola struktur penduduk yang sama dengan struktur penduduk 1994 (lihat Gambar 3.1).

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Indonesia, 1994 dan 2014



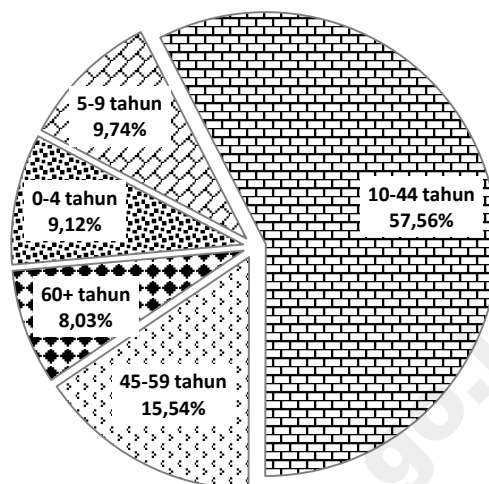
Sumber: BPS, Susenas 1994 dan 2014

Dari kedua piramida tersebut terlihat pula bahwa ujung piramida, yaitu dimulai dari kelompok usia 60 tahun ke atas, semakin melebar berarti terjadi peningkatan penduduk lansia. Penurunan angka kelahiran, peningkatan angka harapan hidup, dan bertambahnya jumlah penduduk lansia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa struktur penduduk Indonesia bertransisi ke arah struktur penduduk tua (*ageing population*).

Tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk, struktur penduduk tua juga dapat dilihat dari proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu. Suatu negara dikatakan berstruktur tua jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen (Soeweno, 2009). Gambar 3.2 memperlihatkan proporsi lansia di Indonesia telah mencapai 8,03 persen dari keseluruhan penduduk. Selain itu, terlihat pula bahwa proporsi penduduk 0-4 tahun lebih rendah dibanding proporsi penduduk 5-9 tahun. Sementara proporsi penduduk produktif 10-59 tahun terbesar jika dibandingkan kelompok umur

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan struktur penduduk menuju tua (*ageing population*).

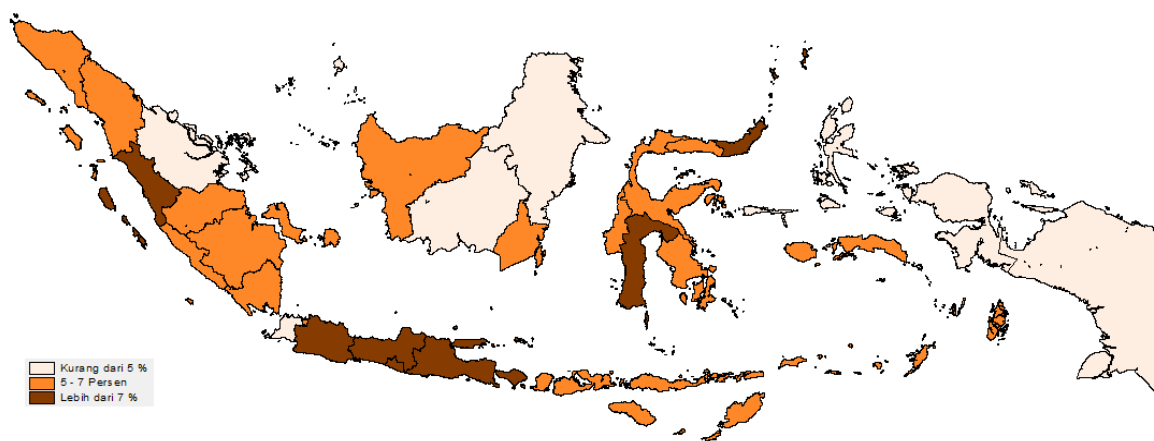
Gambar 3.2 Struktur Umur Penduduk Indonesia, 2014



Sumber: BPS, Susenas 2014

Namun demikian, belum seluruh provinsi Indonesia berstruktur penduduk tua. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3.3. Terlihat bahwa yang diarsir gelap (area dengan proporsi lansia lebih dari tujuh persen) hanya delapan provinsi. Artinya bahwa hanya 24,24 persen provinsi Indonesia yang memiliki struktur penduduk tua. Tiga provinsi dengan proporsi lansia terbesar adalah DI Yogyakarta (13,05 persen), Jawa Tengah (11,11 persen), Jawa Timur (10,96 persen), dan Bali (10,05 persen). Sementara itu, tiga provinsi dengan proporsi lansia terkecil adalah Papua (2,43 persen), Papua Barat (3,62 persen), dan Kepulauan Riau (3,75 persen). Tabulasi lengkap proporsi lansia menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.1.5.

Gambar 3.3 Peta Kepadatan Penduduk Lansia, 2014



Sumber: BPS, Susenas 2014

3.2 Komposisi dan Distribusi Penduduk Lansia

Secara teoritis angka harapan hidup wanita lebih tinggi daripada laki-laki sehingga keberadaan lansia perempuan akan lebih banyak daripada lansia laki-laki. Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat angka harapan hidup perempuan sebesar 71,74 tahun, lebih tinggi daripada laki-laki yang sebesar 67,51 tahun. Sesuai dengan teori, maka di Indonesia proporsi lansia perempuan akan lebih tinggi daripada proporsi lansia laki-laki. Fenomena ini juga ditunjukkan dari hasil Susenas 2014. Proporsi lansia perempuan pada tahun 2014 lebih tinggi 1.11% dibanding proporsi lansia laki-laki. Baik di perkotaan maupun di perdesaan, proporsi lansia perempuan lebih tinggi daripada proporsi lansia laki-laki. Lihat Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Komposisi Penduduk Lansia Indonesia (persen) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur Lansia (tahun)							
	Pra Lansia				Lansia			
	45-49	50-54	55-59	45-59	60-69	70-79	80+	60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan								
Laki-laki	40,78	33,37	25,84	9,15	65,05	26,45	8,50	6,91
Perempuan	41,09	34,21	24,70	8,78	59,21	29,96	10,83	7,92
Laki-laki + Perempuan	40,94	33,79	25,27	8,97	61,94	28,32	9,74	7,41
Perdesaan								
Laki-laki	39,68	34,09	26,23	9,34	62,89	27,34	9,77	8,05
Perempuan	40,17	34,45	25,38	9,22	57,58	30,07	12,36	9,25
Laki-laki + Perempuan	39,93	34,27	25,81	9,28	60,06	28,79	11,15	8,65
Perkotaan + Perdesaan								
Laki-laki	40,23	33,73	26,04	9,25	63,89	26,93	9,18	7,48
Perempuan	40,63	34,33	25,04	9,00	58,33	30,02	11,65	8,59
Laki-laki + Perempuan	40,43	34,03	25,54	9,12	60,93	28,57	10,50	8,03

Sumber: BPS, Susenas 2014

Penduduk lansia dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu lansia muda (60-69 tahun), lansia madya (70-79 tahun), dan lansia tua (80 tahun ke atas). Berdasarkan golongan lansia, khususnya pada kelompok lansia muda terlihat bahwa proporsi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Akan tetapi, pada kelompok lansia madya dan lansia tua proporsi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa lansia wanita lebih *survive* daripada lansia laki-laki.

Berdasarkan Tabel 3.1 juga terlihat bahwa lansia muda lebih tinggi proporsinya di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan, sebaliknya proporsi lansia madya dan lansia tua lebih

banyak di daerah perdesaan. Hal ini apakah ada kaitannya dengan migrasi ataukah faktor lingkungan perdesaan yang menyebabkan para lansia dapat hidup lebih lama di daerah perdesaan, tentunya perlu kajian yang lebih mendalam.

Selain memperhatikan keberadaan lansia saat ini, pemerintah perlu pula mengetahui para lansia di masa depan, yaitu penduduk 45-59 tahun atau selanjutnya disebut penduduk pra lansia. Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa proporsi lansia tahun 2014 adalah sebesar 9,12 persen. Keberadaannya lebih banyak di daerah perdesaan daripada di perkotaan, yaitu berturut-turut 9,28 persen dibanding 8,97 persen. Proporsi pra lansia laki-laki lebih tinggi daripada pra lansia perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ke depan penambahan penduduk lansia di daerah perdesaan mungkin akan lebih banyak dibanding perkotaan. Dengan demikian, perlu dirancang program pembangunan yang ramah lansia utamanya di daerah perdesaan.

3.3 Rasio Ketergantungan Lansia

Perubahan struktur penduduk ikut mempengaruhi besarnya rasio ketergantungan lansia. Rasio ketergantungan lansia (*old dependency ratio*, ODR) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk lansia terhadap jumlah penduduk produktif (15-59 tahun). Angka tersebut mencerminkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai lansia dengan asumsi bahwa lansia tersebut secara ekonomi bukanlah lansia yang produktif. Selain itu, angka tersebut mencerminkan pula ketersediaan tenaga kerja produktif. Semakin tinggi angka ketergantungan lansia semakin langka tenaga kerja produktif. Rasio ketergantungan lansia tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rasio Ketergantungan Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	10,62	12,19	11,40
Perdesaan	13,11	15,08	14,09
Perkotaan + Perdesaan	11,83	13,59	12,71

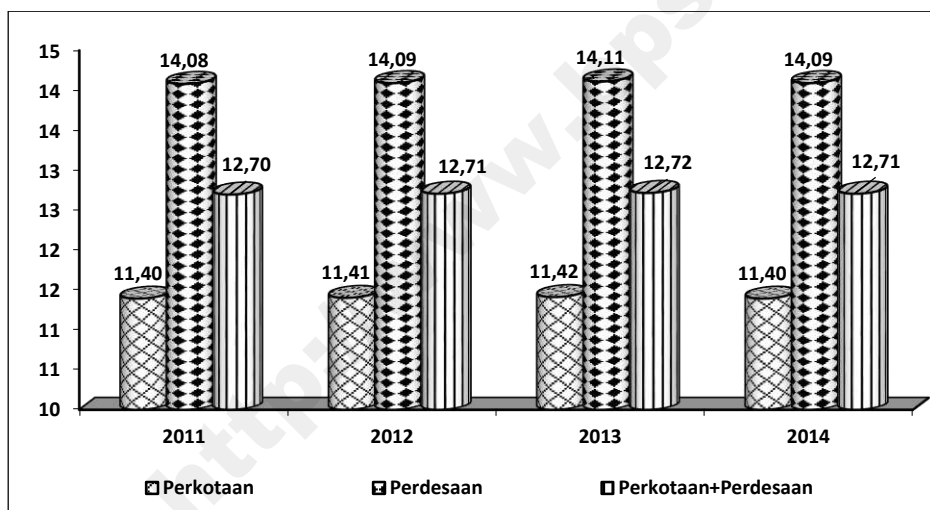
Sumber: BPS, Susenas 2014

Rasio ketergantungan lansia Indonesia pada tahun 2014 sebesar 12,71 (Lihat Tabel 3.2). Artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 13 orang lansia.

Dibanding daerah perkotaan, penduduk usia produktif lebih banyak menanggung kehidupan lansia. Hal ini terlihat dari rasio ketergantungan lansia di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan, berturut-turut 14,09 dibanding 11,4. Dikaitkan dengan keberadaan lansia perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki, maka akan lebih banyak lansia perempuan yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa rasio ketergantungan lansia perempuan (13,59) lebih tinggi daripada lansia laki-laki (11,83).

Perkembangan rasio ketergantungan lansia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 3.4. Selama empat tahun terakhir, tidak ada perubahan yang nyata pada angka rasio ketergantungan lansia, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Rasio ketergantungan lansia di perkotaan berkisar pada angka 11,40, di perdesaan berkisar 14,09, dan secara umum berkisar 12,71.

Gambar 3.4 Rasio Ketergantungan Lansia Menurut Tipe Daerah, 2011 – 2014



Sumber: BPS, Susenas 2011 – 2014

Besarnya angka rasio ketergantungan lansia menurut provinsi di Indonesia berada pada kisaran 3,84 terdapat di Provinsi Papua hingga 19,99 di Provinsi DI Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa beban penduduk usia produktif di Papua terhadap lansia lebih rendah daripada penduduk usia produktif di Provinsi DI Yogyakarta. Dibandingkan dengan rasio ketergantungan nasional, hanya delapan provinsi yang memiliki angka ketergantungan lansia lebih tinggi daripada angka nasional, yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya rasio ketergantungan lansia menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran publikasi ini, yaitu pada Tabel 1.3.

3.4 Status Perkawinan

Kebanyakan lansia menghabiskan waktu lebih banyak di dalam rumah. Oleh karenanya, keberadaan anggota rumah tangga lain utamanya pasangan hidup lansia sangat berarti untuk kesejahteraan lahir batin para lansia. Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 separuh lebih lansia masih memiliki pasangan hidup, yaitu sebesar 58,77 persen lansia masih berstatus kawin. Sementara sepertiganya telah ditinggal mati oleh pasangan hidupnya atau tepatnya 38,00 persen lansia berstatus cerai mati. Hanya sedikit lansia yang cerai hidup dan belum kawin. Pola komposisi status perkawinan tersebut terlihat baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 3.3 Proporsi Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status Perkawinan				Total
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Laki-laki	0,74	82,52	1,07	15,67	100,00
Perempuan	1,41	36,99	3,08	58,52	100,00
Laki-laki + Perempuan	1,10	58,30	2,14	38,47	100,00
Perdesaan					
Laki-laki	0,67	83,94	1,27	14,13	100,00
Perempuan	1,08	37,43	3,27	58,22	100,00
Laki-laki + Perempuan	0,89	59,18	2,33	37,60	100,00
Perkotaan + Perdesaan					
Laki-laki	0,70	83,28	1,18	14,84	100,00
Perempuan	1,23	37,23	3,18	58,36	100,00
Laki-laki + Perempuan	0,99	58,77	2,24	38,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Dari Tabel 3.3 terdapat pola komposisi perkawinan yang berkebalikan antara lansia laki-laki dan lansia perempuan, yaitu pola pada kelompok lansia kawin dan pola kelompok lansia yang bercerai. Pada kelompok lansia kawin, proporsi laki-laki yang kawin lebih tinggi daripada proporsi perempuan kawin, yaitu berturut-turut 83,28 persen dibanding 37,23 persen. Sebaliknya pada kelompok cerai mati, proporsi laki-laki yang berstatus cerai mati lebih rendah daripada proporsi perempuan yang cerai mati, yaitu berturut-turut 14,84 persen dibanding 58,36 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa lansia perempuan cenderung dapat hidup mandiri dibanding lansia laki-laki.

3.5 Peran Lansia dalam Rumah Tangga

Rumah tangga lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas. Dari hasil Susenas 2014, jumlah rumah tangga lansia adalah 16,08 juta rumah tangga atau hampir seperempat dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Bila dilihat wilayah tempat tinggalnya, rumah tangga yang beranggotakan lansia tinggal di perdesaan sebesar 26,18 persen, sementara yang tinggal di perkotaan sebesar 22,80 persen. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perkiraan Jumlah (Ribuan) dan Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Tipe Daerah, 2014

Rincian	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah rumah tangga	32 708,3	32 923,6	65 620,0
Jumlah rumah tangga lansia	7.457,5	8 619,4	16 076,9
Persentase rumah tangga lansia	22,80	26,18	24,50

Sumber: BPS, Susenas 2014

Dilihat dari distribusi rumah tangga lansia menurut provinsi, tiga provinsi dengan proporsi rumah tangga lansia tertinggi di Indonesia pada tahun 2014 adalah DI Yogyakarta (32,23 persen), Jawa Tengah (31,90 persen), dan Jawa Timur (31,64 persen). Pada provinsi tersebut rata-rata satu dari tiga rumah tangga ada anggota rumah tangganya berusia 60 tahun ke atas. Provinsi Papua memiliki proporsi rumah tangga lansia terkecil, yaitu hanya sebesar 7,45 persen. Informasi lengkap mengenai rumah tangga lansia menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 1.2.1 lampiran publikasi ini.

Terkait dengan keberadaan lansia dalam suatu rumah tangga perlu dikaji peranan lansia tersebut dalam rumah tangga. Peran lansia dalam rumah tangga pada dasarnya adalah sebagai agen transfer pengetahuan kepada generasi berikutnya dan seyogyanya peran tersebut tidak membebani para lansia. Dalam suatu rumah tangga terdapat beberapa peran lansia, yaitu sebagai kepala rumah tangga (KRT), istri/pasangan, orang tua KRT, atau famili. Dari peran tersebut peran sebagai KRT adalah yang paling berat sebab KRT adalah orang yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga. Kedudukan KRT juga sangat penting dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. KRT harus bertanggung jawab secara ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan seluruh anggota rumah tangga maupun harus mengatur, memimpin, serta berperan sebagai pengambil keputusan.

Sebagian besar lansia berperan sebagai KRT (61,69 persen) dan sebagian kecil yang berperan sebagai pasangan KRT (18,03 persen). Satu diantara lima lansia berperan sebagai mertua atau orang tua dari KRT. Pola yang sama terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Proporsi Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Total
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Laki-laki	90,64	0,27	7,77	1,32	100,00
Perempuan	37,52	33,63	25,00	3,85	100,00
Laki-laki + Perempuan	62,37	18,02	16,94	2,67	100,00
Perdesaan					
Laki-laki	89,95	0,27	8,42	1,35	100,00
Perempuan	35,75	33,66	26,72	3,87	100,00
Laki-laki + Perempuan	61,11	18,04	18,16	2,69	100,00
Perkotaan + Perdesaan					
Laki-laki	90,27	0,27	8,12	1,34	100,00
Perempuan	36,57	33,65	25,92	3,86	100,00
Laki-laki + Perempuan	61,69	18,03	17,59	2,68	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Menurut jenis kelamin, lansia laki-laki lebih cenderung berperan sebagai KRT. Sementara peran lansia perempuan dalam rumah tangga relatif lebih berimbang. Untuk peran lansia sebagai mertua/orang tua terlihat pada Tabel 3.5, proporsi lansia perempuan dalam peran tersebut jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Dikaitkan dengan pola status perkawinan lansia proporsi lansia perempuan lebih tinggi yang berstatus cerai dibanding proporsi lansia laki-laki, maka para lansia perempuan yang berstatus cerai tersebut cenderung tinggal dengan anak/mantunya daripada kawin lagi.

Pola peran lansia dalam rumah tangga di seluruh provinsi Indonesia mirip dengan pola nasional. Provinsi dengan proporsi lansianya tertinggi sebagai KRT adalah Provinsi Aceh, yaitu sebesar 75,10 persen. Sebaliknya yang terendah adalah Provinsi Bali, yaitu hanya 40,95 persen.

Lansia di Provinsi Bali memiliki nilai proporsi tertinggi sebagai mertua/orang tua. Data peran lansia dalam rumah tangga menurut provinsi disajikan lengkap pada Lampiran yaitu Tabel 1.5.1 – Tabel 1.5.5.

3.6 Status Tinggal Bersama Lansia

Menjadi tua merupakan fase kehidupan yang akan dialami oleh setiap manusia. Makin panjang usia seseorang, tubuh akan kehilangan kemampuan fisik maupun psikologis secara perlahan-lahan dan terus menerus. Ciri fisik yang terlihat diantaranya kulit yang keriput, berkurangnya fungsi telinga dan mata, cepat merasa lelah, rambut menipis atau memutih, serta berkurangnya daya tahan tubuh. Secara psikologis, lansia cenderung menjadi mudah lupa, emosi tidak stabil, serta mudah merasa bosan dan kesepian sebagai akibat dari berkurangnya interaksi dengan lingkungan sosial. Lansia yang berhenti bekerja, umumnya menderita *post power syndrome*, kehilangan kepercayaan diri karena berkurangnya peran dalam keluarga atau masyarakat.

Perubahan struktur sosial masyarakat dari pembentukan keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*), juga ikut membawa perubahan terhadap lansia. Jika sebelumnya lansia tinggal bersama dalam suatu keluarga besar, kini tinggal terpisah dengan anak-anak mereka. Jika sebelumnya menjadi penyokong utama ekonomi keluarga, kini cenderung dihindari dan dianggap sebagai beban. Padahal untuk dapat menikmati masa tua dengan bahagia serta meningkatkan kualitas hidupnya, lansia membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang terdekat. Tinggal bersama keluarga besar adalah salah satu cara untuk mendapatkan dukungan sosial berupa rasa aman, nyaman, dan jaminan perawatan.

Keberadaan lansia dalam suatu rumah tangga tidak hanya bermanfaat dari sisi lansia saja, akan tetapi juga kesejahteraan rumah tangga pada umumnya. Ketika lansia tinggal bersama dengan generasi berikutnya, dimungkinkan terjadi transfer pengetahuan antar generasi. Lansia dapat terhindar dari kepikunan dan generasi berikutnya memperoleh nilai-nilai hidup yang baik dari lansia. Status tinggal lansia dibedakan menjadi tinggal sendiri, bersama pasangan, bersama keluarga, tiga generasi, dan lainnya. Lansia dianggap tinggal bersama keluarga jika lansia tidak tinggal bersama pasangan namun tinggal bersama anak/menantu atau orang tua/mertuanya dalam satu rumah tangga. Sementara itu disebut tinggal dalam tiga generasi adalah ketika lansia tinggal dengan dua generasi dibawahnya (anak dan cucunya) atau lansia yang tinggal dengan satu generasi diatas dan satu generasi dibawahnya (orangtua/mertua dan anak/mantu).

Sebagian besar lansia di Indonesia masih tinggal dalam satu rumah tangga bersama dengan keluarga besarnya. Tabel 3.6 memperlihatkan bahwa sebesar 42,32 persen lansia tinggal bersama tiga generasi dalam satu rumah tangga dan sebesar 26,80 persen lansia tinggal bersama keluarga inti dalam satu rumah tangga. Hanya sekitar 10 persen lansia yang tinggal sendiri dan 17,48 persen yang tinggal bersama pasangannya. Pola ini berlaku baik perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 3.6 Proporsi Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Tinggal Bersama, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status Tinggal Bersama					Total
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga ¹	Tiga Generasi ²	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Perkotaan						
Laki-laki	3,80	20,31	36,54	36,75	2,61	100,00
Perempuan	12,66	11,81	23,69	46,47	5,37	100,00
Laki-laki + Perempuan	8,51	15,79	29,70	41,92	4,08	100,00
Perdesaan						
Laki-laki	4,25	25,08	30,11	38,48	2,09	100,00
Perempuan	16,27	13,55	19,18	46,33	4,67	100,00
Laki-laki + Perempuan	10,65	18,94	24,29	42,66	3,46	100,00
Perkotaan + Perdesaan						
Laki-laki	4,04	22,87	33,08	37,68	2,33	100,00
Perempuan	14,60	12,75	21,27	46,39	4,99	100,00
Laki-laki + Perempuan	9,66	17,48	26,80	42,32	3,75	100,00

- Keterangan: 1) **Bersama keluarga** artinya lansia tinggal bersama anak, atau menantu, atau orang tua, atau mertuanya dalam satu rumah tangga.
2) **Tiga generasi** artinya lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya, atau bersama anak/menantu dan orangtua/mertuanya dalam satu rumah tangga.

Sumber: BPS, Susenas 2014

Dikaitkan dengan status perkawinan dan peran lansia dalam rumah tangga, terlihat pada Tabel 3.6 bahwa lansia laki-laki cenderung tinggal bersama dengan orang lain baik pasangan, keluarga inti, maupun keluarga besar. Hanya satu diantara dua puluh lima lansia laki-laki yang tinggal sendiri. Sebaliknya, satu diantara enam lansia perempuan tinggal sendiri dan hanya 12,75 persen lansia perempuan yang tinggal dengan pasangan. Hal ini mendukung temuan sebelumnya bahwa proporsi lansia laki-laki yang berstatus kawin dan menjadi KRT lebih tinggi daripada lansia perempuan.

Disisi lain, terdapat hal yang patut mendapat perhatian dari data yang disajikan pada Tabel 3.6 yaitu masih banyaknya lansia yang tinggal sendiri. Rumah tangga yang hanya beranggotakan satu orang, biasanya disebut sebagai rumah tangga tunggal. Lansia yang tinggal dalam rumah tangga

tunggal berarti harus memenuhi kebutuhan makan, kesehatan, dan sosialnya secara mandiri. Proporsi lansia perempuan yang tinggal sendiri sebesar 14,60 persen lebih tinggi daripada proporsi lansia laki-laki yang tinggal sendiri sebesar 4,04 persen. Kondisi ini merupakan keterpaksaan yang tidak dapat dihindari. Harapan hidup perempuan yang lebih panjang menyebabkan peluangnya untuk hidup sendiri lebih besar daripada lansia laki-laki. Dibutuhkan peran aktif dari anggota keluarga lainnya dan lingkungan sekitar untuk ikut memberikan dukungan sosial bagi lansia yang tinggal sendiri.

<http://www.bps.go.id>

BAB IV
PENDIDIKAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI



PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pendidikan merupakan proses sepanjang hayat. Setiap orang, tidak mengenal usia, memiliki hak untuk terus belajar demi mengembangkan wawasan, pola pikir dan kemampuannya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Bab III Pasal 5 Ayat 2.d mengenai hak dan kewajiban lansia menyebutkan “sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, salah satunya dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan”. Berbekal pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan timbul kemandirian pada lansia sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Keberadaan lansia dengan pendidikan yang memadai juga diharapkan untuk pembangunan pendidikan. Para lansia yang berpendidikan dapat ikut andil dalam pendidikan generasi berikutnya melalui pendekatan intergenerasi, misal lansia mengajarkan baca tulis kepada anggota rumah tangga lainnya. Kegiatan intergenerasi ini juga memiliki manfaat bagi lansia, yaitu mencegah kepikunan. Hal ini menjamin pula adanya proses pendidikan sepanjang masa (*long life learning*).

4.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat bermanfaat bagi lansia. Dengan mampu membaca dan menulis lansia dapat mengakses ilmu pengetahuan, menjadikannya sebagai alat komunikasi baik lewat kertas maupun media elektronik, dan dapat pula membantu pengentasan buta aksara generasi penerus.

Lebih dari dua pertiga lansia di Indonesia mampu membaca dan menulis. Persentase lansia yang mampu membaca dan menulis huruf latin sebesar 35,81 persen, mampu membaca dan menulis huruf lainnya sebesar 14,64 persen, serta mampu membaca dan menulis huruf latin dan lainnya sebesar 28,52 persen. Sementara itu lansia yang sama sekali tidak mampu membaca dan menulis sebesar 21,03 persen. Lihat Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Proporsi Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kemampuan membaca dan menulis				Total
	Huruf latin	Huruf lainnya	Huruf latin dan lainnya	Tidak dapat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Laki-laki	39,04	5,90	42,66	12,40	100,00
Perempuan	33,12	16,73	30,42	19,73	100,00
Laki-laki + Perempuan	35,89	11,67	36,15	16,30	100,00
Perdesaan					
Laki-laki	41,66	10,16	29,08	19,11	100,00
Perempuan	30,53	23,39	15,69	30,39	100,00
Laki-laki + Perempuan	35,74	17,20	21,95	25,11	100,00
Perkotaan + Perdesaan					
Laki-laki	40,45	8,19	35,36	16,00	100,00
Perempuan	31,73	20,31	22,50	25,46	100,00
Laki-laki + Perempuan	35,81	14,64	28,52	21,03	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

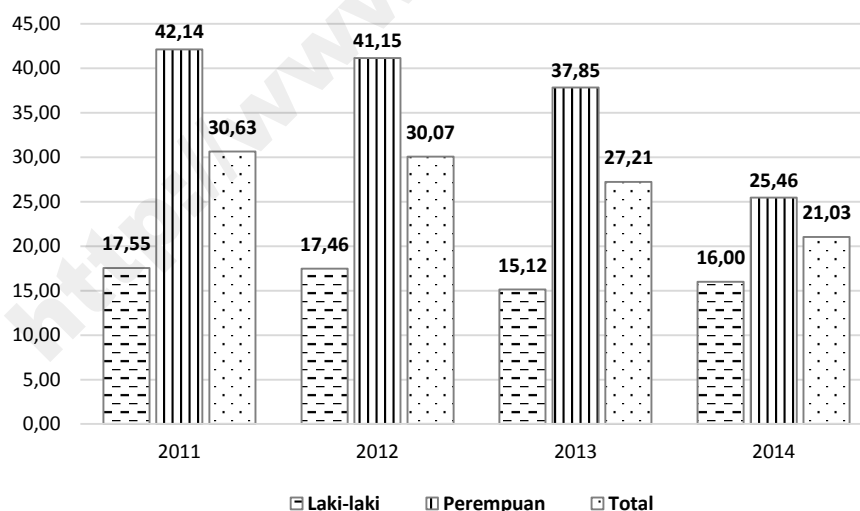
Dari Tabel 4.1 terlihat pula bahwa lansia di perkotaan lebih banyak yang mampu membaca dan menulis daripada lansia di perdesaan. Lansia di perkotaan yang mampu membaca dan menulis sebesar 83,70 persen terdiri dari 35,89 persen mampu membaca menulis huruf latin, 11,67 persen mampu membaca menulis huruf lainnya, dan 36,15 persen mampu membaca menulis huruf latin dan huruf lainnya. Sementara itu, lansia di perdesaan yang mampu membaca dan menulis hanya sebesar 74,89 persen terdiri dari 35,74 persen mampu membaca menulis huruf latin, 17,20 persen mampu membaca menulis huruf lainnya, dan 21,95 persen mampu membaca menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, kesenjangan yang cukup tinggi dalam kemampuan baca tulis terjadi antara lansia laki-laki dan perempuan. Persentase lansia perempuan yang tidak dapat membaca dan menulis lebih tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki. Persentase lansia perempuan

yang tidak dapat membaca dan menulis lebih tinggi 9,46 persen. Kondisi yang serupa juga terlihat apabila dibedakan menurut daerah tempat tinggal. Baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, persentase lansia perempuan yang tidak dapat membaca dan menulis lebih tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa campur tangan pemerintah dalam pendidikan lansia maupun pralansia perempuan masih sangat diperlukan terlebih menimbang usia harapan hidup lansia perempuan yang lebih lama dibanding laki-laki.

Pada dasarnya berbagai kebijakan pemerintah dalam pengentasan buta aksara di Indonesia secara nyata sudah dilaksanakan sejak lama. Salah satu program pemerintah dalam pengentasan buta huruf adalah pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Tujuan pendidikan keaksaraan ini pertama, untuk membebaskan penduduk dari buta aksara. Kedua, untuk memberikan bekal hidup berupa keterampilan, dan yang terakhir, untuk menanamkan pendidikan karakter agar masyarakat dapat hidup damai dan tenteram. Hasil dari program pemberantasan aksara dapat dilihat dari perkembangan angka buta. Gambar 4.1 menyajikan angka buta huruf dari tahun 2011-2014.

Gambar 4.1 Angka Buta Huruf Lansia Menurut Jenis Kelamin, 2011 – 2014



Sumber: BPS, Susenas 2011 – 2014

Secara umum angka buta huruf lansia menunjukkan pola yang cenderung menurun setiap tahun. Angka buta huruf lansia pada tahun 2011 sebesar 30,63 persen. Pada tahun 2012, angka tersebut menurun menjadi sebesar 30,07 persen, kemudian menjadi sebesar 27,21 persen di tahun 2013, dan menjadi 24,80 persen di tahun 2014. Pola yang sama juga terlihat baik pada lansia laki-laki

maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberantasan buta huruf dan program pendidikan lainnya berdampak positif terhadap penekanan angka buta huruf.

4.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Lansia yang bertahan sampai dengan saat sekarang adalah mereka yang menikmati masa muda pada awal masa kemerdekaan, dimana sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan pada masa tersebut masih sangat terbatas, kemiskinan masih membelenggu. Hal ini dimungkinkan menjadi penyebab rendahnya partisipasi pendidikan mereka.

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa sebagian besar lansia masih berpendidikan rendah. Terdapat satu diantara empat lansia yang tidak/ belum pernah sekolah. Sementara lansia yang tidak tamat SD sebesar 32,51 persen, dan tamat SD/ sederajat sebesar 25,68 persen.

Tabel 4.2 Proporsi Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
Laki-laki	8,92	24,13	29,00	11,60	26,35	100,00
Perempuan	26,30	28,38	23,78	8,66	12,88	100,00
Laki-laki + Perempuan	18,16	26,39	26,22	10,04	19,18	100,00
Perdesaan						
Laki-laki	16,63	38,50	33,20	5,61	6,06	100,00
Perempuan	41,11	37,15	18,18	2,02	1,54	100,00
Laki-laki + Perempuan	29,66	37,78	25,21	3,70	3,65	100,00
Perkotaan + Perdesaan						
Laki-laki	13,06	31,85	31,26	8,38	15,45	100,00
Perempuan	34,26	33,09	20,77	5,10	6,79	100,00
Laki-laki + Perempuan	24,34	32,51	25,68	6,63	10,84	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

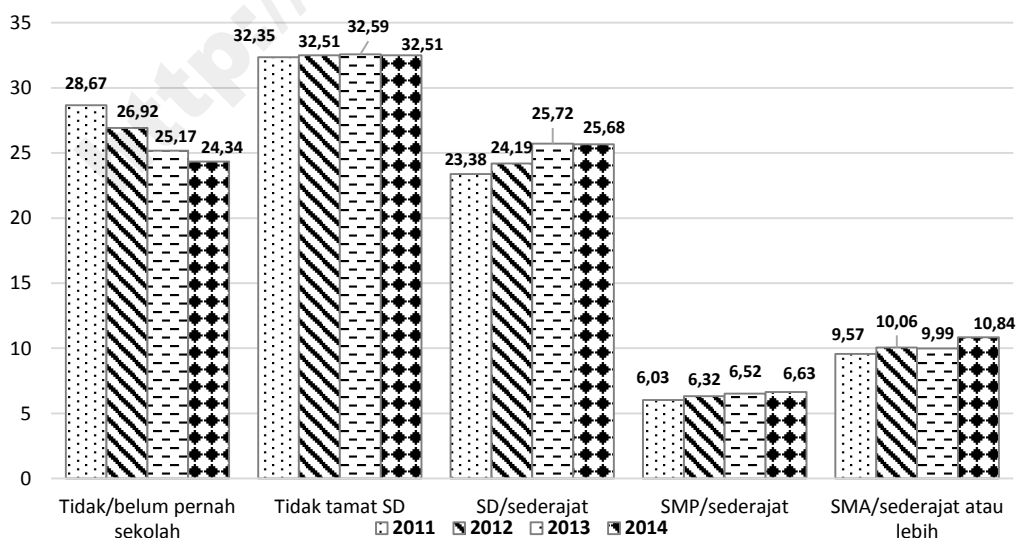
Akses lansia di perkotaan dalam dunia pendidikan tampak lebih baik dibandingkan dengan lansia di perdesaan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase lansia di perkotaan yang menamatkan lebih tinggi dibanding persentase lansia di perdesaan yang menamatkan pendidikan di jenjang tersebut. Persentase lansia di perkotaan yang menamatkan pendidikan SD/sederajat sebesar 26,22 persen sementara yang di perdesaan hanya 25,21 persen. Kemudian pada jenjang

SMP/ sederajat, persentase lansia di perkotaan yang menamatkan pendidikan SMP/ sederajat sebesar 10,04 persen lebih tinggi daripada perdesaan yang hanya 3,7 persen. Untuk jenjang SMA/ sederajat atau lebih, persentase lansia di perkotaan yang menamatkan pada jenjang tersebut lima kali lipat dari persentase lansia di perdesaan yang menamatkan di jenjang yang sama.

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat adanya perbedaan pola pendidikan yang ditamatkan antara lansia laki-laki dan perempuan. Lansia laki-laki pada umumnya cenderung mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan lansia perempuan. Lansia laki-laki yang menamatkan pendidikan di setiap jenjang (tamat SD, tamat SMP, dan tamat SMA/ sederajat ke atas) persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan. Sementara itu, persentase lansia perempuan yang tidak/ belum pernah sekolah dan tidak menamatkan pendidikan di SD/ sederajat lebih tinggi daripada pemuda di perkotaan (Lihat Tabel 4.3). Hal ini secara tidak langsung menunjukkan adanya kesenjangan dalam bidang pendidikan antara lansia laki-laki dan perempuan.

Kondisi rendahnya pendidikan lansia merata di semua provinsi lihat Lampiran Tabel 2.2.5. Tiga provinsi dengan persentase lansia yang tidak/ belum pernah sekolah tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat (45,37 persen), Kalimantan Barat (37,34 persen), dan Bali (36,75 persen). Sementara itu, tiga provinsi dengan persentase lansia tidak/ belum pernah sekolah yang terendah adalah Sulawesi Utara (1,60 persen), Gorontalo (4,82 persen), dan Maluku (6,72 persen).

Gambar 4.2 Proporsi Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011 – 2014



Sumber: BPS, Susenas 2011 – 2014

Perkembangan dari pendidikan tertinggi lansia dalam empat tahun terakhir disajikan pada Gambar 4.2. Secara umum, tidak ada perbedaan yang nyata dari pendidikan tertinggi lansia pada setiap jenjang pada periode tahun 2011-2014, kecuali lansia yang tidak/belum pernah sekolah.

Lansia yang tidak/belum pernah bersekolah persentasenya cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2011, lansia yang tidak/belum pernah bersekolah persentasenya sebesar 28,67 persen. Pada tahun 2012, angkanya turun menjadi 26,92 persen, tahun 2013 menurun kembali menjadi sebesar 25,17 persen, dan tahun 2014 menjadi sebesar 24,34 persen.

4.3 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 60 tahun ke atas pada tahun 2014 adalah 4,27 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan lansia baru mencapai jenjang pendidikan kelas 4 SD/ sederajat atau putus sekolah di kelas 5 SD/ sederajat.

Secara umum, rata-rata lama sekolah lansia laki-laki lebih tinggi dibanding lansia perempuan. Rata-rata lama sekolah lansia laki-laki sebesar 5,39 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah lansia perempuan sebesar 3,28 tahun. Pola yang serupa juga terlihat pada lansia laki-laki dan perempuan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah lansia di daerah perkotaan lebih baik dibanding dengan lansia di perdesaan. Rata-rata lama sekolah lansia di perkotaan yaitu 5,60 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah lansia di perdesaan sebesar 3,12 tahun.

Apabila dilihat menurut kelompok umur, Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa penduduk kelompok umur 80 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah yang paling rendah dibanding dengan kelompok umur lainnya. Rata-rata lama sekolah penduduk kelompok umur 80 tahun ke atas sebesar 2,08 tahun. Sementara itu rata-rata lama sekolah penduduk umur 70-79 tahun sebesar 3,47 tahun, kelompok umur 60-69 tahun sebesar 5,02 tahun, dan kelompok umur 45-49 tahun sebesar 6,77

persen. Pola yang serupa terlihat baik pada lansia laki-laki atau perempuan maupun lansia di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Lansia (Tahun) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur (tahun)				
	Pra Lansia	Lansia			60+
	45-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan					
Laki-laki	9,03	7,53	6,09	3,80	6,83
Perempuan	7,45	5,46	3,52	2,04	4,51
Laki-laki + Perempuan	8,24	6,48	4,64	2,76	5,60
Perdesaan					
Laki-laki	6,03	4,65	3,61	2,44	4,15
Perempuan	4,59	2,83	1,56	0,97	2,22
Laki-laki + Perempuan	5,31	3,72	2,47	1,57	3,12
Perkotaan + Perdesaan					
Laki-laki	7,53	6,01	4,74	3,02	5,39
Perempuan	6,01	4,07	2,46	1,43	3,28
Laki-laki + Perempuan	6,77	5,02	3,47	2,08	4,27

Sumber: BPS, Susenas 2014

Rata-rata lama sekolah lansia untuk setiap provinsi disajikan pada lampiran Tabel 2.3.5. Rata-rata lama sekolah lansia di setiap provinsi bervariasi antara 2,63 tahun sampai dengan 8,48 tahun. Tiga provinsi dengan rata-rata lama sekolah lansia yang terendah adalah Nusa Tenggara Barat (2,63 tahun), Kalimantan Barat (3,18 tahun), dan Bali (3,45 tahun). Sementara itu, provinsi dengan rata-rata lama sekolah lansia tertinggi adalah DKI Jakarta (8,48 tahun), Sulawesi Utara (6,66 tahun), dan Maluku (6,08 tahun).

4.4 Fasilitas Teknologi Informasi

Geroteknologi adalah ilmu yang mempelajari kaum lansia dan hubungannya dengan perkembangan teknologi. Pendekatan ini merupakan ilmu terbaru yang menguraikan sejauh mana perkembangan teknologi bagi kaum lansia. Geroteknologi sebenarnya ilmu praktis untuk memudahkan para lansia dalam menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Penerapan teknologi yang mutakhir terhadap para lansia akan menyokong mereka sekaligus menempatkan mereka secara mandiri dalam menjalankan masa

tuanya. Kemajuan teknologi yang semakin mutakhir memberikan peluang atau kesempatan bagi kaum lansia untuk mengembangkan dirinya. Akses teknologi informasi yang dimiliki oleh lansia di rumah disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Persentase Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kepemilikan Akses Teknologi Informasi di Rumah, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Akses Teknologi Informasi di Rumah			
	Telepon rumah	Telepon genggam	Komputer	Internet rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Laki-laki	14,82	83,57	8,52	7,81
Perempuan	14,00	77,48	7,34	7,59
Laki-laki + Perempuan	14,38	80,33	7,89	7,70
Perdesaan				
Laki-laki	1,77	71,17	1,25	1,26
Perempuan	1,74	64,47	1,17	1,21
Laki-laki + Perempuan	1,76	67,60	1,20	1,24
Perkotaan + Perdesaan				
Laki-laki	7,81	76,91	4,61	4,29
Perempuan	7,41	70,49	4,02	4,17
Laki-laki + Perempuan	7,60	73,49	4,30	4,23

Sumber: BPS, Susenas 2014

Telepon genggam lebih banyak digunakan oleh lansia dibanding dengan penggunaan telepon rumah, komputer, dan internet. Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa sebesar 73,49 persen lansia memiliki telepon genggam. Sementara itu, lansia yang memiliki telepon rumah sebesar 7,60 persen, memiliki komputer sebesar 4,30 persen, dan memiliki akses internet di rumah sebesar 4,23 persen.

Penggunaan teknologi biasanya terkait dengan tingkat pendidikan lansia. Semakin tinggi pendidikan maka kecenderungan mengakses teknologi semakin tinggi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa lansia di perkotaan pada umumnya memiliki pendidikan lebih tinggi daripada lansia di perdesaan. Dengan demikian, kecenderungan lansia perkotaan menggunakan teknologi lebih tinggi daripada lansia di perdesaan. Terlihat pada Tabel 4.4, persentase lansia pengguna internet dan komputer tujuh kali lipat persentase lansia yang menggunakan alat yang sama di perdesaan. Begitupula penggunaan telepon genggam lansia di perkotaan lebih tinggi 12,73 persen daripada persentase lansia di perdesaan.

Secara umum, akses teknologi informasi yang dimiliki oleh lansia di rumah pada setiap provinsi, menunjukkan pola yang sama dengan pola nasional. Persentase terbesar dari akses teknologi informasi yang dimiliki oleh lansia di rumah pada setiap provinsi adalah telepon genggam, diikuti telepon rumah, komputer, dan internet rumah. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.5.5 pada lampiran publikasi ini.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

BAB V KESEHATAN



KESEHATAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Segala upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia serta daya saing bangsa. Prinsip nondiskriminatif berarti setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses atas sumber daya kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kelompok masyarakat yang paling membutuhkan pelayanan kesehatan adalah mereka yang menderita penyakit kronis, berasal dari ekonomi lemah, penyandang disabilitas, atau penduduk lanjut usia.

Secara biologis, lansia mengalami penurunan daya tahan fisik secara terus menerus dan rentan terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Menurut Busnan (2007), kondisi fisik lansia mengalami penurunan penampilan seperti pada bagian wajah, tangan, dan kulit, penurunan fungsi dalam tubuh seperti sistem saraf, perut, limpa, dan hati, penurunan kemampuan panca indra seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa, serta penurunan motorik seperti kekuatan dan kecepatan. Perubahan-perubahan tersebut mengarah pada kemunduran kesehatan secara fisik dan psikis yang akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari.

Menurut Tamher, S dan Noorkasiani (2009), dalam Simanullang, Poniyah dkk, et al. (2011), menjadi lansia merupakan fenomena alamiah sebagai akibat dari proses menua. Fenomena ini bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu keadaan yang wajar dan bersifat universal. Proses menua adalah suatu proses kemunduran mencakup proses organobiologis, psikologik, serta sosiobudaya.

Proses penuaan seseorang ditentukan secara genetik dan dipengaruhi oleh gaya hidupnya ketika muda. Kondisi kesehatan seseorang ketika usia lanjut merupakan hasil dari proses akumulasi sejak dalam kandungan, anak-anak, dewasa, hingga menjelang lansia. Lansia yang telah membiasakan pola hidup sehatnya sejak muda akan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik daripada lansia yang masa lalunya tidak berperilaku hidup sehat.

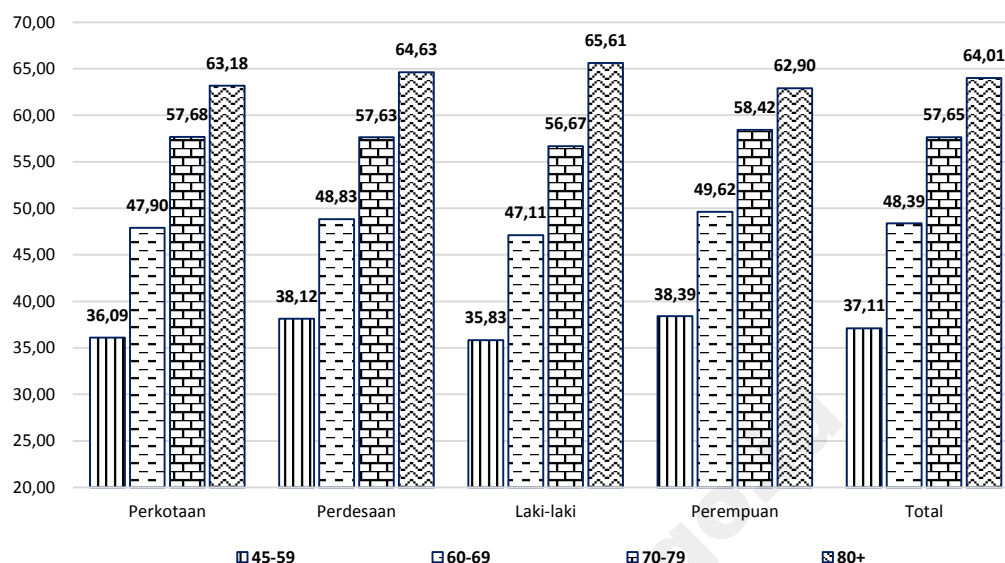
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak lansia dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan penduduk lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pelayanan kesehatan bagi lansia termasuk penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan, upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik, serta pengembangan lembaga perawatan lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal. Upaya pemerintah yang telah dilakukan antara lain pendirian *home care* bagi lansia berkebutuhan khusus, program usaha ekonomi produktif, serta Posyandu Lansia. Kegiatan yang dilaksanakan melalui posyandu lansia di antaranya adalah pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan senam lansia.

5.1 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas, atau sebab lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, namun banyaknya keluhan kesehatan yang dialami penduduk dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat secara umum. Jenis keluhan kesehatan juga dapat mencerminkan kondisi lingkungan tempat tinggal penduduk secara umum.

Semakin bertambah tua umurnya, proporsi lansia yang mengalami keluhan kesehatan semakin besar. Sebanyak 37,11 persen penduduk pra lansia mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, meningkat menjadi 48,39 persen pada lansia muda, meningkat lagi menjadi 57,65 persen pada lansia madya, dan proporsi tertinggi pada lansia tua yaitu sebesar 64,01 persen. Pola yang sama juga terjadi baik menurut tipe daerah maupun jenis kelamin. Proporsi lansia perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi daripada lansia laki-laki pada semua kelompok umur, kecuali kelompok lansia tua. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2014



Sumber: BPS, Susenas 2014

Pada Gambar 5.1 terlihat bahwa saat ini lebih dari separoh lansia mengalami keluhan kesehatan. Sementara itu, kondisi satu diantara tiga para calon lansia juga mengalami keluhan kesehatan. Proporsi pralansia di kota yang mengeluh kesehatan 2,03 persen lebih tinggi daripada proporsi pralansia di perdesaan. Sebagaimana lansia saat ini, kondisi kesehatan pralansia perempuan lebih buruk dibanding pralansia laki-laki. Hal ini terlihat dari proporsi pralansia perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi daripada proporsi pralansia laki-laki.

Provinsi dengan tingkat keluhan kesehatan lansia tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (66,36 persen), Aceh (65,98 persen), Gorontalo (63,95 persen), dan Kalimantan Selatan (60,71 persen). Sebaliknya, provinsi dengan tingkat keluhan kesehatan terendah adalah Provinsi Maluku Utara (39,69 persen), Papua (41,40 persen), dan Maluku (41,67 persen). Persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan menurut provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1 lampiran publikasi ini.

Kemunduran fungsi organ tubuh khususnya pada lansia menyebabkan kelompok ini rawan terhadap serangan berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, stroke, gagal ginjal, kanker, hipertensi, dan jantung. Penyakit-penyakit tersebut kemungkinan telah lama diderita oleh lansia. Akan tetapi karena kurangnya perhatian terhadap keluhan kesehatan yang dialami, penyakit tersebut tidak dapat dideteksi dan diatasi secara dini. Jenis-jenis keluhan kesehatan dapat mengindikasikan gejala awal dari penyakit kronis yang sebenarnya tengah diderita oleh lansia.

Pada setiap jenis keluhan kesehatan yang disajikan pada Tabel 5.1 terlihat bahwa seiring dengan pertambahan umur semakin tinggi pula persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan, terkecuali untuk keluhan sakit gigi dan pilek. Adapun jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami lansia adalah keluhan lainnya, yaitu jenis keluhan kesehatan yang secara khusus memang diderita lansia seperti asam urat, darah tinggi, darah rendah, reumatik, diabetes, dan berbagai jenis penyakit kronis lainnya. Jenis keluhan lainnya diderita oleh sebesar 20,03 persen penduduk pra lansia, 30,83 persen lansia muda, 39,79 persen lansia madya, dan 46,76 persen lansia tua.

Tabel 5.1 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan Kesehatan, 2014

Kelompok Umur/ Jenis Kelamin	Jenis Keluhan Kesehatan							
	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pra Lansia (umur 45-59 tahun)								
Laki-laki	8,04	13,62	11,43	1,69	1,17	5,14	2,07	17,67
Perempuan	6,86	10,94	9,62	1,68	1,07	7,29	1,73	22,40
Laki-laki + Perempuan	7,45	12,29	10,53	1,69	1,12	6,21	1,90	20,03
Lansia Muda (umur 60-69 tahun)								
Laki-laki	8,39	16,41	11,45	3,98	1,53	6,24	1,76	28,07
Perempuan	7,74	13,53	10,08	2,90	1,16	8,41	1,44	33,49
Laki-laki + Perempuan	8,06	14,94	10,75	3,43	1,34	7,35	1,60	30,83
Lansia Madya (umur 70-79 tahun)								
Laki-laki	8,79	18,72	11,54	7,01	1,70	7,62	1,10	37,40
Perempuan	8,46	15,23	9,86	4,63	1,61	10,37	1,12	41,68
Laki-laki + Perempuan	8,61	16,77	10,60	5,68	1,65	9,16	1,11	39,79
Lansia Tua (umur 80 tahun ke atas)								
Laki-laki	9,72	21,64	11,84	8,96	2,13	9,27	1,11	45,90
Perempuan	9,03	16,43	9,54	4,88	2,23	10,26	0,84	47,35
Laki-laki + Perempuan	9,31	18,56	10,48	6,55	2,19	9,85	0,95	46,76

Sumber: BPS, Susenas 2014

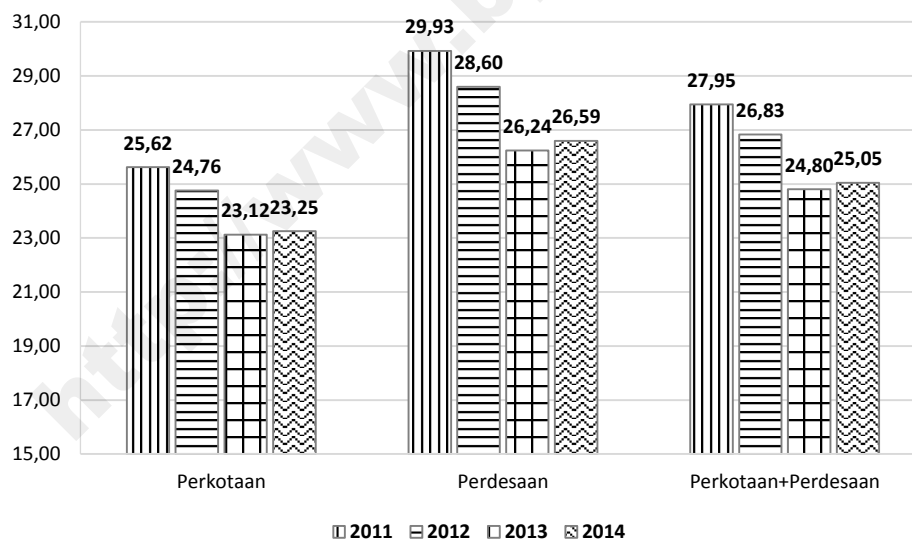
Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, persentase lansia perempuan yang mengalami jenis keluhan kesehatan lainnya lebih besar daripada lansia laki-laki. Begitu pula pada keluhan kesehatan sakit kepala, dimana lebih banyak dialami oleh lansia perempuan daripada lansia laki-laki. Adapun jenis keluhan kesehatan yang lebih banyak dialami lansia laki-laki adalah sakit panas, batuk, dan pilek.

5.2 Angka Kesakitan Lansia

Tubuh yang sehat dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas produktif secara maksimal. Setiap jenis keluhan kesehatan, apalagi yang mengganggu aktivitas sehari-hari, akan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan. Keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari inilah yang disebut sebagai kondisi sakit. Angka kesakitan (*morbidity rates*) lansia adalah proporsi lansia yang mengalami sakit minimal sehari dalam satu bulan terakhir. Semakin tinggi angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang baik. Derajat kesehatan penduduk merupakan cerminan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Angka kesakitan lansia tahun 2014 sebesar 25,05 persen menunjukkan bahwa satu dari empat lansia mengalami sakit. Perkembangan derajat kesehatan lansia relatif membaik selama empat tahun terakhir baik lansia yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Lihat Gambar 5.2.

Gambar 5.2 Angka Kesakitan Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011 – 2014



Sumber: BPS, Susenas 2011 – 2014

Pada Gambar 5.2 terlihat bahwa derajat kesehatan lansia yang tinggal di perkotaan cenderung lebih baik daripada lansia yang tinggal di perdesaan. Hal ini ditunjukkan oleh angka kesakitan lansia perkotaan yang lebih rendah daripada perdesaan selama empat tahun terakhir.

Dibedakan kelompok umur, seperti halnya pola presentase keluhan kesehatan bahwa semakin bertambah umur maka angka kesakitan semakin tinggi. Dibedakan menurut jenis kelamin, meski lansia perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak daripada lansia laki-laki,

namun angka kesakitannya justru lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia maka keluhan kesehatan yang dialami lansia semakin serius dan berdampak pada kesehatan. Selain itu, keluhan kesehatan yang dialami lansia laki-laki lebih serius dibanding lansia perempuan. Angka kesakitan lansia dibedakan kelompok umur dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Angka Kesakitan Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur				
	Pra Lansia	Lansia			60+
	45-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Laki-laki	14,77	19,70	26,77	33,24	22,72
Perempuan	14,51	20,63	27,67	29,68	23,72
Laki-laki + Perempuan	14,64	20,17	27,27	31,14	23,25
Perdesaan					
Laki-laki	17,80	23,92	30,66	38,03	27,14
Perempuan	17,28	23,39	28,66	32,56	26,11
Laki-laki + Perempuan	17,54	23,65	29,55	34,80	26,59
Perkotaan + Perdesaan					
Laki-laki	16,29	21,93	28,89	35,98	25,10
Perempuan	15,91	22,10	28,20	31,32	25,00
Laki-laki + Perempuan	16,10	22,02	28,50	33,23	25,05

Sumber: BPS, Susenas 2014

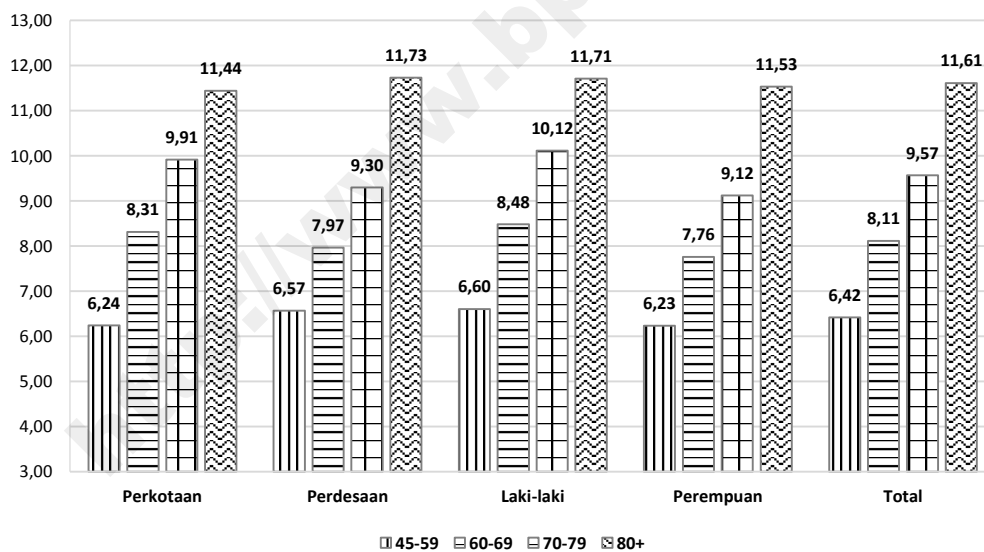
Dari Tabel 5.2 terlihat pula bahwa derajat kesehatan lansia di perkotaan lebih baik daripada lansia di perdesaan. Pada kelompok lansia muda, angka kesakitan di perkotaan sebesar 20,17 persen. Angka ini lebih rendah dibanding angka kesakitan di daerah perdesaan yang sebesar 23,65 persen. Begitupula dengan lansia madya dan lansia tua yang berada di perkotaan derajat kesehatannya lebih baik daripada mereka yang tinggal di perdesaan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan bagi lansia di perdesaan.

Angka kesakitan lansia menurut provinsi berada pada besaran 20 hingga 37 persen. Angka kesakitan lansia tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (37,45 persen) dan angka kesakitan lansia terendah terdapat di Provinsi Sumatera Selatan (20,11 persen). Sebanyak empat belas provinsi dengan angka kesakitan lansia yang lebih rendah daripada angka nasional atau sekitar 42,42 persen. Data angka kesakitan lansia menurut provinsi disajikan di bagian lampiran yaitu pada Tabel 3.2.

5.3 Lama Sakit

Lamanya menderita sakit sangat dipengaruhi oleh tingkat keparahan penyakit dan daya tahan tubuh seseorang. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan bahwa sakit yang dideritanya cukup parah, begitu pula sebaliknya. Semakin lemah daya tahan tubuh seseorang maka proses penyembuhannya akan semakin lama, begitu pula sebaliknya. Kemunduran fungsi organ dan menurunnya daya tahan tubuh pada lansia menyebabkan proses penyembuhannya menjadi lebih lama dibandingkan yang usianya lebih muda. Gambar 5.3 menunjukkan bahwa semakin tinggi umur lansia maka rata-rata lama sakitnya semakin meningkat. Rata-rata lama sakit penduduk lansia tua lebih dari 11 hari, yaitu hampir dua kali dari lamasakit pra lansia yang hanya sekitar 6 hari. Hal ini menunjukkan bahwa makin panjang usia seseorang, maka daya tahan tubuhnya akan semakin lemah dan proses penyembuhannya juga akan menjadi lebih lama.

Gambar 5.3 Rata-rata Lama Lansia Sakit (hari) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2011 – 2014



Sumber: BPS, Susenas 2011 – 2014

Dibedakan menurut jenis kelamin, seperti telah diduga sebelumnya bahwa keluhan kesehatan lansia laki-laki lebih serius daripada lansia perempuan juga ditunjukkan dengan semakin lamanya sakit yang dialami oleh lansia laki-laki daripada lansia perempuan di seluruh kelompok umur. Dari Gambar 5.3 terlihat bahwa pada kelompok lansia muda, untuk lansia laki-laki rata-rata lamanya sakit adalah sebesar 8,48 hari sementara lansia perempuan hanya 7,76 hari. Untuk kelompok lansia madya dan lansia tua laki-laki, rata-rata lama sakit berbeda sekitar satu hari lebih lama daripada lansia perempuan.

Sementara itu menurut lamanya sakit, terdapat 16,81 persen lansia yang sakit lebih dari tiga minggu. Lansia laki-laki yang sakit lebih dari tiga minggu (17,71 persen) relatif lebih banyak daripada lansia perempuan (16,01 persen). Kondisi tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Proporsi Lansia Sakit Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Lamanya Sakit, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Lamanya Lansia Sakit (hari)					Total
	1-3	4-7	8-14	15-21	22+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
Laki-laki	41,35	29,17	6,67	3,58	19,24	100,00
Perempuan	43,48	31,20	6,23	2,46	16,63	100,00
Laki-laki + Perempuan	42,50	30,27	6,43	2,97	17,82	100,00
Perdesaan						
Laki-laki	39,69	32,62	7,42	3,66	16,61	100,00
Perempuan	42,27	31,98	6,41	3,81	15,52	100,00
Laki-laki + Perempuan	41,04	32,29	6,89	3,74	16,04	100,00
Perkotaan + Perdesaan						
Laki-laki	40,38	31,18	7,10	3,62	17,71	100,00
Perempuan	42,80	31,64	6,33	3,22	16,01	100,00
Laki-laki + Perempuan	41,67	31,42	6,69	3,41	16,81	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tiga provinsi dengan rata-rata lansia sakit terlama adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (10,79 hari), Sulawesi Selatan (10,29 hari), dan Bengkulu (10,02 hari). Dari Tabel 3.4 pada bagian lampiran publikasi ini juga terlihat bahwa rata-rata lama sakit lansia laki-laki di tiga provinsi tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Selatan (10,98 hari), Kalimantan Selatan (10,77 hari), dan Kepulauan Bangka Belitung (10,55 hari). Sementara dibedakan tempat tinggalnya, lansia yang tinggal di perkotaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata lama sakit tertinggi, yaitu selama 12,24 hari.

5.4 Cara Berobat

Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan lansia, baik oleh lansia yang sakit secara mandiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap. Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan

kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten.

Separoh lebih lansia menangani keluhan kesehatannya dengan mengobati sendiri. Menurut jenis pengobatannya, sebagian besar lansia mengobati sendiri menggunakan obat modern (66,01 persen). Hanya 11,60 persen lansia yang mengobati sendiri menggunakan pengobatan tradisional, sementara sebesar 21,20 persen lansia sakit yang mencampurkan pengobatan modern dengan tradisional untuk mengatasi keluhan kesehatan yang diderita. Lihat Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Persentase Lansia Sakit yang Berobat Sendiri dan Proporsi Jenis Pengobatannya, Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Persentase lansia sakit yang berobat sendiri	Jenis Pengobatan Sendiri				Total
		Tradisional	Modern	Lainnya	Campuran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pra Lansia (umur 45–59 tahun)						
Perkotaan	64,57	8,65	74,89	1,20	15,26	100,00
Perdesaan	64,25	10,25	68,89	1,06	19,80	100,00
Perkotaan + Perdesaan	64,40	9,47	71,81	1,13	17,59	100,00
Lansia (umur 60 tahun ke atas)						
Perkotaan	58,94	10,42	69,64	1,22	18,72	100,00
Perdesaan	59,50	12,59	62,97	1,17	23,28	100,00
Perkotaan + Perdesaan	59,24	11,60	66,01	1,19	21,20	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Dari Tabel 5.4 terlihat bahwa perilaku mengobati sendiri banyak dilakukan lansia yang tinggal di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Persentase lansia yang mengobati sendiri dengan pengobatan tradisional di daerah perdesaan (12,59 persen) lebih tinggi daripada lansia yang tinggal di daerah perkotaan (10,42 persen). Sebaliknya persentase lansia yang mengobati sendiri dengan pengobatan modern di daerah perdesaan lebih rendah 6,67 persen dari persentase lansia yang tinggal di daerah perkotaan.

Provinsi Maluku Utara (76,80 persen), Maluku (73,63 persen), dan Kalimantan Selatan (72,82 persen) adalah tiga provinsi tertinggi dengan proporsi lansia sakit yang mengobati sendiri. Sementara proporsi lansia sakit yang mengobati sendiri terkecil berada di Provinsi Bali (41,89 persen), DI

Yogyakarta (45,35 persen), dan Sulawesi Utara (46,64 persen). Secara lengkap, persentase lansia sakit yang mengobati sendiri menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.5 lampiran publikasi ini.

Selain mengobati sendiri, sebesar 51,24 persen memilih untuk berobat jalan untuk mengatasi keluhan kesehatan yang dideritanya. Pada Tabel 5.5 terlihat bahwa proporsi lansia yang tinggal di perkotaan untuk berobat jalan lebih tinggi daripada lansia yang tinggal di perdesaan. Hal ini mungkin erat kaitannya dengan fasilitas kesehatan yang pada umumnya lebih lengkap tersedia di daerah perkotaan daripada di perdesaan.

Tabel 5.5 Persentase Lansia Sakit yang Berobat Jalan dan Tempat Berobat Jalan, Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Persentase lansia sakit yang berobat jalan	Tempat Berobat Jalan						
		RS pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ poliklinik	Puskes mas /pustu	Praktek nakes	Praktek batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pra Lansia (umur 45–59 tahun)								
Perkotaan	49,37	9,41	7,44	40,80	29,29	18,66	2,97	2,34
Perdesaan	48,80	5,52	3,00	26,66	28,22	42,46	2,99	2,89
Kota+Desa	49,08	7,41	5,16	33,55	28,74	30,86	2,98	2,62
Lansia (umur 60 tahun ke atas)								
Perkotaan	53,22	10,62	7,69	38,87	26,13	21,69	2,71	2,64
Perdesaan	49,56	5,29	2,79	25,19	27,88	44,61	2,85	2,43
Kota+Desa	51,24	7,83	5,12	31,70	27,05	33,71	2,78	2,53

Sumber: BPS, Susenas 2014

Terdapat pola yang berbeda antara perkotaan dan perdesaan dalam hal tempat/fasilitas berobat jalan yang diakses lansia. Di perkotaan lansia lebih memilih berobat di praktek dokter/poliklinik sementara di perdesaan tempat fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi oleh lansia untuk berobat jalan adalah praktek tenaga kesehatan. Hal ini terlihat dari persentase tempat berobat tertinggi yang diakses lansia di daerah perkotaan adalah praktek dokter/poliklinik, yaitu sebesar 38,87 persen. Sementara itu persentase tempat berobat tertinggi yang diakses lansia di daerah perdesaan adalah praktek tenaga kesehatan sebesar 44,61 persen.

Dari Tabel 5.5 juga terlihat bahwa rumah sakit pemerintah dan fasilitas puskesmas/puskesmas pembantu tidak menjadi pilihan utama untuk berobat bagi lansia, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Persentase lansia yang berobat jalan di rumah sakit pemerintah hanya 7,83 persen dan yang berobat jalan di puskesmas/pustu hanya 27,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa

para lansia lebih memilih berobat ke fasilitas kesehatan yang dikelola oleh swasta baik secara individu maupun kelembagaan. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi terhadap penyediaan fasilitas kesehatan bagi lansia utamanya yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dikaji berdasarkan provinsi, puskesmas/puskesmas pembantu justru menjadi tempat berobat jalan utama bagi para lansia yang tinggal di Indonesia bagian timur. Dari Tabel 3.8 pada lampiran publikasi ini terlihat bahwa sebesar 62,38 persen lansia di Provinsi Nusa Tenggara Timur memanfaatkan puskesmas/ puskesmas pembantu. Selanjutnya lebih dari lima puluh persen lansia di Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara juga memanfaatkan , puskesmas/puskesmas pembantu sebagai tempat utama berobat jalan. Sebaliknya, lansia yang berada provinsi di wilayah Jawa dan Sumatera cenderung menggunakan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh swasta.

Tabel 5.6 Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur				
	Pra Lansia	Lansia			60+
	45-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Laki-laki	3,29	5,66	7,84	7,00	6,35
Perempuan	3,43	4,90	5,66	5,16	5,16
Laki-laki + Perempuan	3,36	5,27	6,61	5,91	5,71
Perdesaan					
Laki-laki	2,90	4,81	5,17	6,15	5,04
Perempuan	2,81	3,71	4,42	4,29	3,99
Laki-laki + Perempuan	2,86	4,25	4,76	5,05	4,48
Perkotaan + Perdesaan					
Laki-laki	3,10	5,21	6,39	6,51	5,65
Perempuan	3,12	4,27	4,99	4,67	4,53
Laki-laki + Perempuan	3,11	4,73	5,61	5,42	5,05

Sumber: BPS, Susenas 2014

Dalam setahun terakhir hanya 5,05 persen lansia yang pernah di rawat inap. Pada Tabel 5.6 terlihat bahwa persentase lansia di daerah perkotaan yang pernah di rawat inap lebih tinggi daripada persentase lansia di daerah perdesaan. Dibedakan jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang pernah dirawat inap lebih besar daripada lansia perempuan. Hal ini terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan.

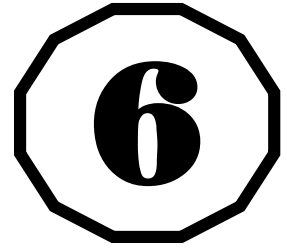
Pada Tabel 5.6 terlihat pula bahwa semakin bertambah umur lansia belum tentu kecenderungan untuk pernah dirawat inap semakin besar. Terlihat bahwa persentase lansia muda yang pernah dirawat inap adalah sebesar 4,73 persen meningkat 0,88 persen pada lansia madya, namun sedikit menurun persentasenya pada kelompok lansia tua. Pola ini terjadi baik pada lansia yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

BAB VI

KEGIATAN EKONOMI



KEGIATAN EKONOMI

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa seluruh penduduk yang berada di wilayah Indonesia berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk di dalamnya adalah penduduk lanjut usia. Hak lansia untuk bekerja juga dijamin dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pasal 15 menyebutkan bahwa lansia potensial dapat mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya untuk bekerja pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat.

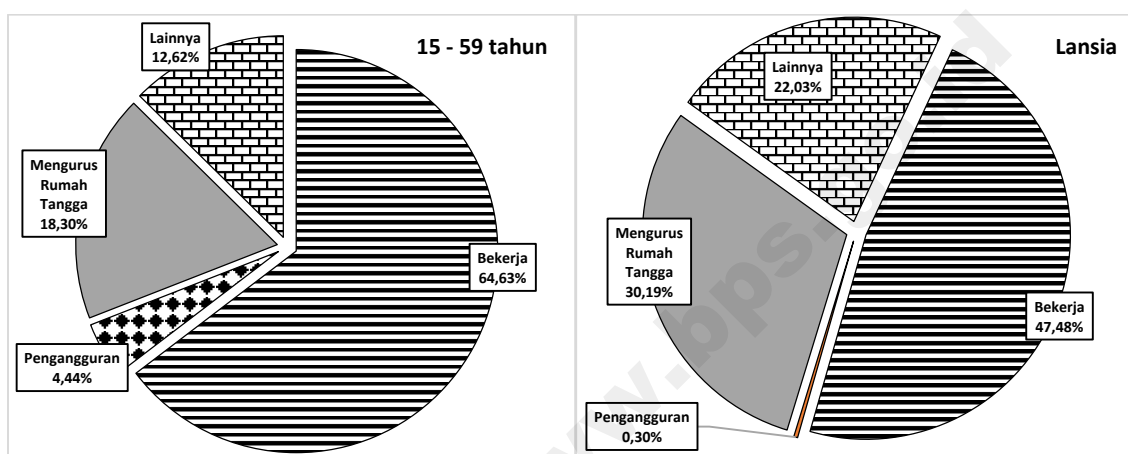
Lanjut usia dipandang sebagai masa kemunduran, masa dimana seseorang mengalami penurunan-penurunan yang terjadi pada dirinya baik secara fisik maupun psikologis. Para lansia menjalani dan memaknai usia lanjut dengan cara yang berbeda-beda. Ada lansia yang mampu melihat arti penting usia tua dalam konteks eksistensi manusia, yaitu sebagai masa hidup yang memberi lansia kesempatan-kesempatan untuk tumbuh berkembang dan memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu atau berarti untuk orang lain. Usia lanjut tetap memungkinkan seseorang untuk bekerja memperoleh penghasilan. Oleh karena itu tenaga kerja lanjut usia perlu didayagunakan untuk meningkatkan kemandirian agar dapat membantu diri dan keluarga sehingga tidak lagi menjadi beban bagi orang lain.

Wirakartakusumah dan Anwar (1994) mengatakan bahwa setidaknya ada tiga alasan yang mempengaruhi lansia untuk terjun ke pasar kerja. Pertama, masih banyak lansia yang tetap kuat secara fisik dan mental sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari pasar kerja. Kedua, terjunnya lansia ke pasar kerja karena desakan ekonomi. Ketiga, alasan yang bukan didasarkan pada motif ekonomi, tetapi lebih didasarkan pada motif aktualisasi diri atau emosi.

6.1 Partisipasi Lansia dalam Angkatan Kerja

Angkatan kerja lansia merupakan lansia yang bekerja dan mencari pekerjaan (penganggur). Lansia ini sering disebut lansia potensial. Mereka tergolong sebagai lansia yang produktif dan mandiri. Lansia potensial banyak ditemukan di negara berkembang dan negara-negara yang belum memiliki tunjangan sosial untuk hari tua. Mereka berusaha tetap bekerja dalam upaya memenuhi tuntutan hidup maupun mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Gambar 6.1 Proporsi Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir dan Kelompok Umur, 2014



Sumber: BPS, Sakernas 2014

Berdasarkan data hasil Sakernas Agustus 2014, sebesar 47,48 persen lansia Indonesia yang bekerja, dan sebesar 0,30 persen lansia menganggur (Gambar 6.1). Tingginya persentase lansia yang bekerja tidak hanya dipandang bahwa mereka masih benar-benar mampu bekerja, tetapi juga bisa bermakna bahwa tingkat kesejahteraan lansia masih rendah sehingga di usia senja mereka terpaksa masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lansia yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga sebesar 30,19 persen, dan melakukan kegiatan lainnya sebesar 22,03 persen. Kegiatan lainnya yang dimaksud dalam hal ini adalah berbagai kegiatan selain kegiatan bekerja, mencari pekerjaan dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya mencakup kegiatan santai, rekreasi, olahraga, hiburan, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan antara lain berupa kegiatan pengajian atau kebaktian dan kegiatan kemasyarakatan.

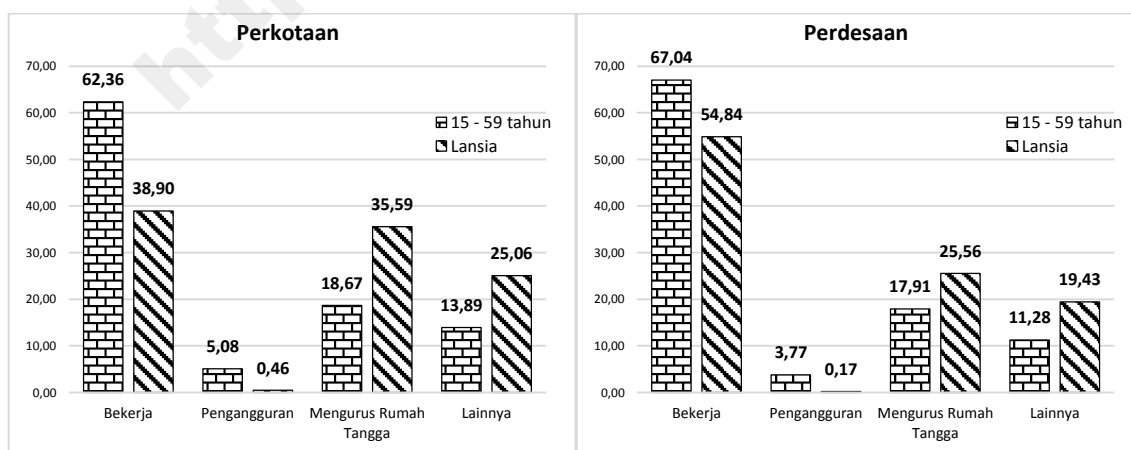
Apabila dibandingkan dengan penduduk usia produktif, terlihat bahwa proporsi penduduk lansia yang bekerja lebih kecil dibandingkan dengan penduduk usia 15-59 tahun (47,48 persen berbanding 64,63 persen). Kondisi tersebut dikarenakan penduduk 15-59 tahun termasuk penduduk usia produktif. Pada usia tersebut sebagian besar dari mereka bekerja karena memiliki tanggung

jawab terhadap perekonomian keluarga. Sementara itu, untuk kegiatan mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya, terlihat bahwa proporsi penduduk lansia lebih besar dibandingkan dengan penduduk 15-59 tahun, yaitu 30,19 persen berbanding 18,30 persen untuk kegiatan mengurus rumah tangga dan 22,03 persen berbanding 12,62 persen untuk kegiatan lainnya.

Menurut tipe daerah, terlihat bahwa proporsi lansia di perdesaan yang bekerja lebih besar dibandingkan lansia di perkotaan. Lansia di perdesaan yang bekerja sebesar 54,84 persen sedangkan lansia di perdesaan sebesar 38,90 persen (Gambar 6.2). Lebih banyaknya lapangan pekerjaan non formal di perdesaan, seperti sektor pertanian yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti faktor usia atau pendidikan yang lebih tinggi, dianggap sebagai salah satu penyebab lansia di perdesaan lebih mudah memperoleh pekerjaan. Sementara itu, proporsi lansia di perkotaan dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga dan lainnya (35,59 persen dan 25,06 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (25,56 persen dan 19,43 persen).

Proporsi lansia yang bekerja baik di perkotaan maupun di perdesaan lebih rendah apabila dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Perbedaan yang lebih nyata terjadi di daerah perkotaan. Sebesar 62,36 persen penduduk 15-59 tahun di perkotaan yang bekerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lansia yang bekerja sebesar 38,90 persen. Sementara di perdesaan, selisih proporsi bekerja antara penduduk usia produktif (67,04 persen) dengan lansia (54,84 persen) relatif lebih kecil.

Gambar 6.2 Proporsi Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir, Kelompok Umur, dan Tipe Daerah, 2014

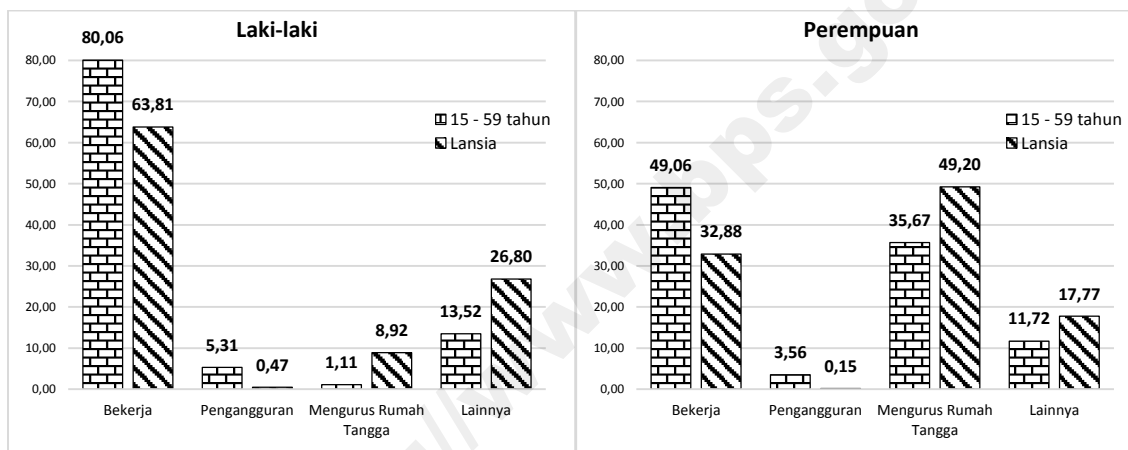


Sumber: BPS, Sakernas 2014

Gambar 6.3 menunjukkan kegiatan utama dari lansia dan penduduk usia 15-59 tahun menurut jenis kelamin. Terlihat bahwa proporsi lansia laki-laki yang bekerja lebih besar dibanding lansia

perempuan. Lansia laki-laki yang bekerja tercatat sebesar 63,81 persen, sedangkan lansia perempuan sebesar 32,88 persen. Begitu juga untuk kegiatan mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha dan kegiatan lainnya, proporsi lansia laki-laki (0,47 persen dan 26,80 persen) lebih tinggi dibanding lansia perempuan (0,15 persen dan 17,77 persen). Sementara itu, untuk kegiatan mengurus rumah tangga, proporsi lansia perempuan (49,20 persen) jauh lebih tinggi dibanding lansia laki-laki (8,92 persen). Hal ini menunjukkan bahwa faktor gender masih berpengaruh kuat bagi lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Perempuan cenderung untuk tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki cenderung untuk bekerja. Pola yang sama juga terjadi pada kelompok usia 15-59 tahun.

Gambar 6.3 Proporsi Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, 2014



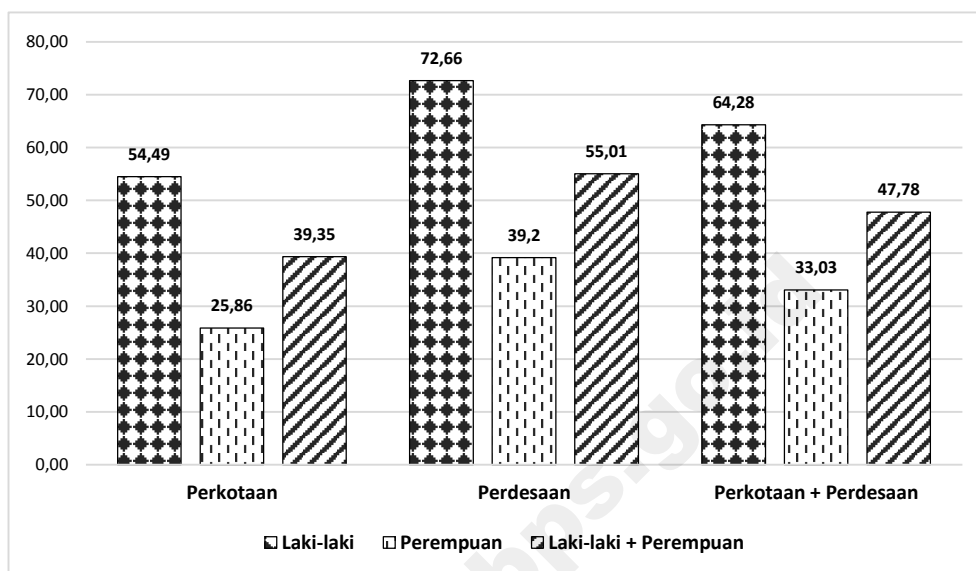
Sumber: BPS, Sakernas 2014

Partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi juga dapat dilihat dari nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingginya nilai TPAK mencerminkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada kelompok lansia, TPAK lansia dihitung dari proporsi jumlah lansia yang bekerja dan pengangguran terhadap seluruh jumlah lansia.

Lansia yang terlibat dalam kegiatan ekonomi pada tahun 2014 cukup besar. Hal ini terlihat dari TPAK lansia yang sebesar 47,78 persen (Gambar 6.4). Nilai TPAK sebesar 47,78 persen menunjukkan dari 100 lansia, sekitar 48 orang masih aktif melakukan kegiatan ekonomi. TPAK lansia laki-laki lebih tinggi dibanding dengan TPAK lansia perempuan (64,28 persen berbanding 33,03 persen). Hal ini dikarenakan lansia laki-laki pada umumnya sebagai kepala rumah tangga sehingga

harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berbeda dengan lansia perempuan sebagai ibu rumah tangga yang lebih banyak mengurus rumah tangga, sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Gambar 6.4 TPAK Lansia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS, Sakernas 2014

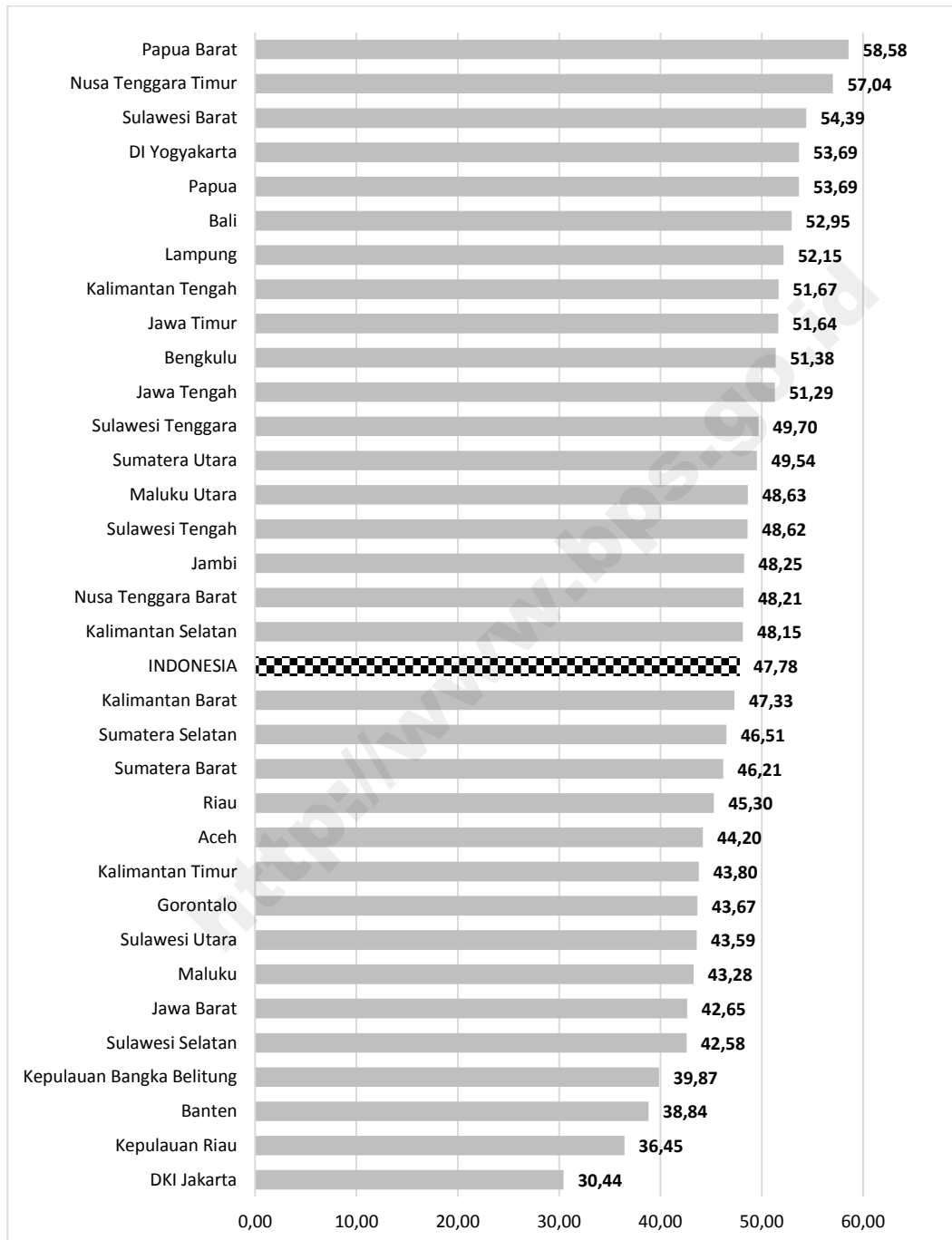
Apabila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, partisipasi lansia di perdesaan dalam kegiatan ekonomi lebih tinggi dibanding lansia di perkotaan. Hal tersebut terlihat dari TPAK lansia di perdesaan (55,01 persen) yang lebih besar dibanding di perkotaan (39,35 persen).

TPAK lansia pada masing-masing provinsi bervariasi dengan persentase berkisar antara 30,44–58,58 persen, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.5. Tiga provinsi yang memiliki TPAK lansia tertinggi adalah Provinsi Papua Barat (58,58 persen), Nusa Tenggara Timur (57,04 persen), dan Sulawesi Barat (54,39 persen). Daerah-daerah tersebut selain karena tuntutan alam dan kondisi ekonomi masyarakatnya, juga karena budaya kerja dan kondisi kesehatan lansia yang memungkinkan lansia untuk tetap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki TPAK lansia terendah adalah Provinsi DKI Jakarta (30,44 persen), Kepulauan Riau (36,45 persen), dan Banten (38,84 persen). Rendahnya nilai TPAK lansia didorong oleh banyaknya pusat-pusat kegiatan industri di tiga provinsi tersebut yang menuntut partisipasi tenaga kerja usia muda. Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya lansia untuk tetap bekerja, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia pensiun.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa sebesar 47,78 persen lansia yang bekerja pada tahun 2014. Pembahasan pada sub bab berikutnya akan membahas karakteristik lansia yang

bekerja dan keterangan pekerjaannya yang meliputi lapangan usaha, jenis dan status pekerjaan, serta jumlah jam kerja dan upah/gaji/pendapatan yang diperolehnya.

Gambar 6.5 TPAK Lansia Menurut Provinsi, 2014

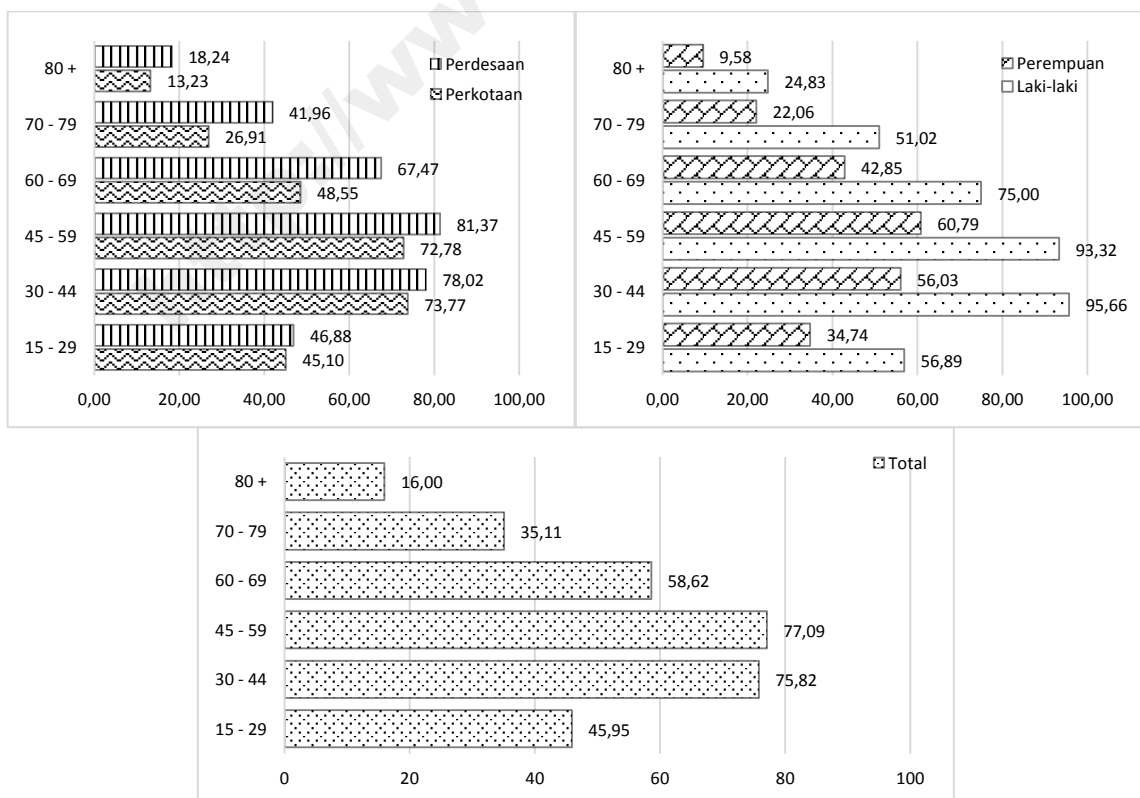


Sumber: BPS, Sakernas 2014

6.2 Karakteristik Lansia Bekerja

Perbedaan usia akan membedakan seberapa besar produktivitas seseorang dalam melakukan aktivitas. Semakin tua usia seseorang maka produktivitasnya akan semakin menurun. Kondisi tersebut juga terlihat pada lansia yang bekerja. Berdasarkan Gambar 6.6, lansia kelompok umur 80 tahun ke atas yang bekerja, yaitu sebesar 16,00 persen, mempunyai persentase terkecil diantara kelompok umur yang lain. Persentase lansia kelompok umur 70-79 tahun yang bekerja sebesar 35,11 persen, dan lansia kelompok umur 60-69 tahun yang bekerja sebesar 58,62 persen. Faktor kesehatan dan kondisi fisik lansia menjadi penyebab utama kecilnya persentase lansia bekerja pada kelompok usia 80 tahun ke atas. Menurut tipe daerah, terlihat bahwa proporsi lansia di perdesaan lebih tinggi dibandingkan lansia di perkotaan, baik pada kelompok umur 60-69 tahun, 70-79 tahun, maupun pada kelompok umur 80 tahun ke atas. Sedangkan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa proporsi lansia laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan pada setiap kelompok umur. Penurunan proporsi lansia yang bekerja seiring dengan penambahan usia lansia, tidak dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin dan tempat tinggalnya.

Gambar 6.6 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS, Sakernas 2014

Mayoritas dari lansia yang bekerja adalah mereka yang berstatus menikah. Pada tahun 2014, sebesar 74,98 persen dari keseluruhan lansia yang bekerja berstatus menikah (Tabel 6.1). Sementara itu, sebesar 22,52 persen lansia yang bekerja berstatus cerai mati, sebesar 1,71 persen berstatus cerai hidup, dan sebesar 0,78 persen berstatus belum kawin. Pola yang serupa terlihat pada lansia di perkotaan dan perdesaan maupun lansia laki-laki dan perempuan yang bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa alasan umum lansia masih bekerja adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Persentase lansia perempuan bekerja yang berstatus kawin relatif seimbang dengan lansia perempuan yang berstatus cerai mati (51,28 persen berbanding 44,71 persen). Sementara itu, lansia laki-laki bekerja yang berstatus kawin (89,12 persen) persentasenya jauh lebih besar dibanding dengan lansia laki-laki bekerja yang berstatus belum kawin (0,56 persen), cerai hidup (1,06 persen) dan cerai mati (9,74 persen). Tingginya proporsi lansia perempuan dengan status cerai mati yang bekerja menunjukkan bahwa status perkawinan tidak menghalangi mereka untuk bekerja, bahkan menuntut kemandirian yang lebih mengingat lansia perempuan yang cerai mati umumnya tidak memiliki *life support* yang mencukupi.

Tabel 6.1 Proporsi Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, Tahun 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status perkawinan				Total
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Laki-laki	0,61	88,36	1,12	9,91	100,00
Perempuan	1,70	46,96	3,25	48,09	100,00
Laki-laki + Perempuan	0,99	73,91	1,86	23,24	100,00
Perdesaan					
Laki-laki	0,54	88,83	1,02	9,62	100,00
Perempuan	0,86	53,73	2,62	42,79	100,00
Laki-laki + Perempuan	0,66	75,63	1,62	22,09	100,00
Perkotaan + Perdesaan					
Laki-laki	0,56	88,64	1,06	9,74	100,00
Perempuan	1,16	51,28	2,85	44,71	100,00
Laki-laki + Perempuan	0,78	74,98	1,71	22,52	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Banyaknya lansia yang masih bekerja berkaitan dengan status sebagai kepala rumah tangga. Affandi (2009) mengemukakan bahwa tidak sedikit lansia yang masih menghidupi keluarga yang

tinggal bersamanya karena statusnya sebagai kepala rumah tangga. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.2, sebesar 75,29 persen dari seluruh lansia yang bekerja berstatus sebagai kepala rumah tangga, sebesar 17,69 persen berstatus sebagai suami/istri, sebesar 5,70 persen berstatus sebagai orang tua/mertua, dan sebesar 1,33 persen berstatus lainnya. Pola yang sama terlihat di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, terdapat perbedaan status dalam rumah tangga antara lansia laki-laki dan perempuan yang bekerja. Mayoritas lansia laki-laki yang bekerja adalah mereka yang berstatus sebagai kepala rumah tangga dengan persentase sebesar 95,87 persen. Sementara itu, sebagian besar lansia perempuan yang bekerja adalah mereka yang berstatus sebagai isteri dari kepala rumah tangga dengan persentase sebesar 47,87 persen dan juga sebagai kepala rumah tangga dengan persentase sebesar 39,60 persen.

Tabel 6.2 Proporsi Lansia Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Dalam Rumah Tangga, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status dalam rumah tangga				Total
	Kepala rumah tangga	Isteri/ suami	Orang tua/ Mertua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Laki-laki	95,72	0,35	3,22	0,70	100,00
Perempuan	43,67	42,80	9,95	3,58	100,00
Laki-laki + Perempuan	77,56	15,16	5,57	1,71	100,00
Perdesaan					
Laki-laki	95,96	0,24	2,99	0,81	100,00
Perempuan	37,29	50,75	10,41	1,56	100,00
Laki-laki + Perempuan	73,91	19,22	5,78	1,09	100,00
Perkotaan + Perdesaan					
Laki-laki	95,87	0,28	3,08	0,77	100,00
Perempuan	39,60	47,87	10,24	2,29	100,00
Laki-laki + Perempuan	75,29	17,69	5,70	1,33	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka persentase lansia yang bekerja cenderung semakin rendah. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.3, sebagian besar dari lansia yang bekerja adalah mereka yang mempunyai tingkat pendidikan rendah (sebesar 18,73 persen lansia tidak/belum pernah sekolah, sebesar 34,65 tidak tamat SD, dan sebesar 31,54 persen berpendidikan SD/ sederajat). Sementara itu, lansia bekerja yang mempunyai tingkat pendidikan diploma/akademi/sarjana persentasenya hanya sebesar 2,13 persen.

Tabel 6.3 Proporsi Lansia Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan						Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/ Paket C	Diploma/ Akademi/ Sarjana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan	12,80	29,07	31,30	11,38	11,16	4,28	100,00
Perdesaan	22,34	38,05	31,68	4,25	2,86	0,82	100,00
Laki-laki	13,22	33,12	34,74	8,55	7,66	2,71	100,00
Perempuan	28,30	37,30	25,98	4,18	3,12	1,12	100,00
Total	18,73	34,65	31,54	6,95	6,00	2,13	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Lansia yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi umumnya adalah mereka yang dulunya mempunyai pekerjaan yang baik, sehingga pada masa tuanya tidak perlu lagi bekerja karena sudah mampu menghidupi dirinya sendiri atau keluarganya, tanpa harus bekerja. Berbeda dengan lansia yang berpendidikan rendah, yang mana bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya saat itu saja, tanpa memikirkan adanya jaminan hari tua. Oleh karena itu, ketika memasuki usia tua lansia tidak memiliki tabungan yang dapat menjamin hari tuanya (Leonesio et al dalam Kartika dan Sudibia, 2014).

6.3 Lapangan Usaha

Komposisi lansia yang bekerja menurut lapangan usaha mencerminkan struktur perekonomian dan potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja lansia. Informasi tersebut juga dapat memberikan gambaran kasar mengenai kualitas sumber daya lansia terutama tingkat keterampilan yang dikuasai. Terdapat 1.457 kategori lapangan usaha yang tercatat dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2009. Akan tetapi, lapangan usaha yang melibatkan lansia dikelompokkan menjadi lima kelompok lapangan usaha besar, yaitu sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, dan kelompok lapangan usaha lainnya.

Sektor pertanian masih memegang peran penting bagi ketenagakerjaan Indonesia, dimana 59,95 persen dari lansia yang bekerja berada pada lapangan usaha pertanian (Tabel 6.4). Selain pertanian, lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja lansia adalah sektor perdagangan (18,58 persen), dan sektor jasa (8,20 persen). Hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama sebagian besar pekerja lansia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masih

rendahnya tingkat pendidikan lansia secara umum menyebabkan terjadinya kondisi tersebut, dimana lapangan usaha sektor pertanian terbuka untuk semua kalangan dan tanpa syarat pendidikan tertentu.

Tabel 6.4 Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah, dan Lapangan Usaha, Tahun 2014

Kelompok Umur/ Tipe Daerah	Lapangan Usaha					Total
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-59 Tahun						
Perkotaan	8,92	18,64	29,73	22,58	20,13	100,00
Perdesaan	53,69	9,28	14,32	11,18	11,54	100,00
Perkotaan+Perdesaan	31,49	13,92	21,96	16,83	15,80	100,00
60 Tahun ke Atas						
Perkotaan	32,69	8,83	32,35	14,44	11,69	100,00
Perdesaan	76,56	5,81	10,20	4,40	3,03	100,00
Perkotaan+Perdesaan	59,95	6,95	18,58	8,20	6,31	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Terdapat persamaan pola lapangan usaha lansia bekerja di daerah perkotaan dengan perdesaan. Di daerah perkotaan dan perdesaan, mayoritas lansia bekerja di sektor pertanian. Lansia di perkotaan yang bekerja di sektor pertanian sebesar 32,69 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 76,56 persen. Sektor lain di perkotaan yang menyerap tenaga lansia cukup besar adalah sektor perdagangan, yaitu sebesar 32,35 persen.

Sebagian besar lansia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun lansia kalah bersaing dengan penduduk yang lebih muda dan berpendidikan tinggi ketika memasuki pasar kerja. Hal ini karena persentase lansia yang berpendidikan rendah relatif tinggi. Oleh sebab itu, mayoritas lansia hanya dapat bekerja pada pekerjaan yang tidak menuntut pendidikan tinggi seperti pada sektor pertanian.

Tabel 6.5 menggambarkan lebih dari 90 persen lansia yang bekerja di sektor pertanian berpendidikan tamat SD ke bawah (Tamat SD/ sederajat sebesar 31,94 persen, tidak tamat SD sebesar 37,96 persen, dan tidak/belum pernah sekolah sebesar 22,14 persen). Sementara itu, lansia berpendidikan SMA/ sederajat ke atas yang bekerja di sektor ini hanya sekitar 3,53 persen.

Secara umum, sebagian besar lansia yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri hanya tamat SD/ sederajat, tidak/belum tamat SD atau tidak pernah sekolah. Banyaknya pekerja lansia di sektor tersebut karena pada umumnya sektor pertanian dan perdagangan tidak

mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu. Sementara itu, sektor industri yang banyak digeluti oleh lansia berpendidikan rendah merupakan industri rumah tangga berskala kecil yang dapat dilakukan di rumah dan juga tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 6.5 Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, Lapangan Usaha, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Kelompok Umur/ Lapangan Usaha	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan						Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/ Paket C	Diploma/ Akademi/ Sarjana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15-59 Tahun							
Pertanian	7,32	20,75	41,86	17,61	11,63	0,83	100,00
Industri	1,42	7,71	24,27	23,46	38,06	5,09	100,00
Perdagangan	1,36	8,71	24,86	21,23	37,47	6,38	100,00
Jasa	1,09	5,14	13,21	12,55	31,06	36,96	100,00
Lainnya	1,07	8,86	26,80	20,33	30,67	12,26	100,00
60 Tahun ke Atas							
Pertanian	22,14	37,96	31,94	4,43	2,73	0,80	100,00
Industri	18,02	36,27	29,76	7,47	6,64	1,84	100,00
Perdagangan	13,46	28,97	32,62	11,62	10,89	2,44	100,00
Jasa	13,88	29,21	25,24	9,29	12,50	9,89	100,00
Lainnya	8,95	25,21	34,74	13,52	13,51	4,07	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Struktur lapangan usaha lansia di tiap provinsi dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.4.5. Sektor pertanian menjadi pilihan utama dari lansia bekerja di provinsi seluruh Indonesia, dengan kisaran proporsi antara 30 hingga 81 persen, kecuali Provinsi DKI Jakarta dimana hanya 1,71 persen lansia yang bekerja di sektor pertanian.

6.4 Jabatan/Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan dalam Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) adalah kumpulan pekerjaan yang cukup bersamaan tugas utamanya sehingga bisa digabungkan bersama dalam satu kelompok dalam keseluruhan sistem klasifikasi (KBJI, 2002). Pembagian jenis pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan tingkat keahlian dan spesialisasi keahliannya. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mengakomodir jenis pekerjaan utama dari KBJI 2002 yang mengacu pada ISCO 1988. Secara ringkas, jenis pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu (1) pekerja profesional, pejabat dan manager (*white collar worker*); (2) tenaga usaha dan jasa (*blue collar worker*); serta (3) buruh, operator dan pekerja kasar (*grey collar worker*). Pengelompokan pekerja

berdasarkan jenis pekerjaan merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang mencerminkan kualitas pekerja di suatu wilayah.

Tabel 6.6 Proporsi Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jabatan/jenis pekerjaan			Total
	Profesional, pejabat dan manager	Tenaga usaha dan jasa	Buruh, operator dan pekerja kasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Laki-laki	7,11	58,79	34,10	100,00
Perempuan	4,60	67,63	27,77	100,00
Laki-laki + Perempuan	6,23	61,87	31,89	100,00
Perdesaan				
Laki-laki	1,60	81,92	16,48	100,00
Perempuan	1,60	80,91	17,48	100,00
Laki-laki + Perempuan	1,60	81,54	16,86	100,00
Perkotaan + Perdesaan				
Laki-laki	3,74	72,94	23,33	100,00
Perempuan	2,69	76,11	21,20	100,00
Laki-laki + Perempuan	3,35	74,10	22,55	100,00

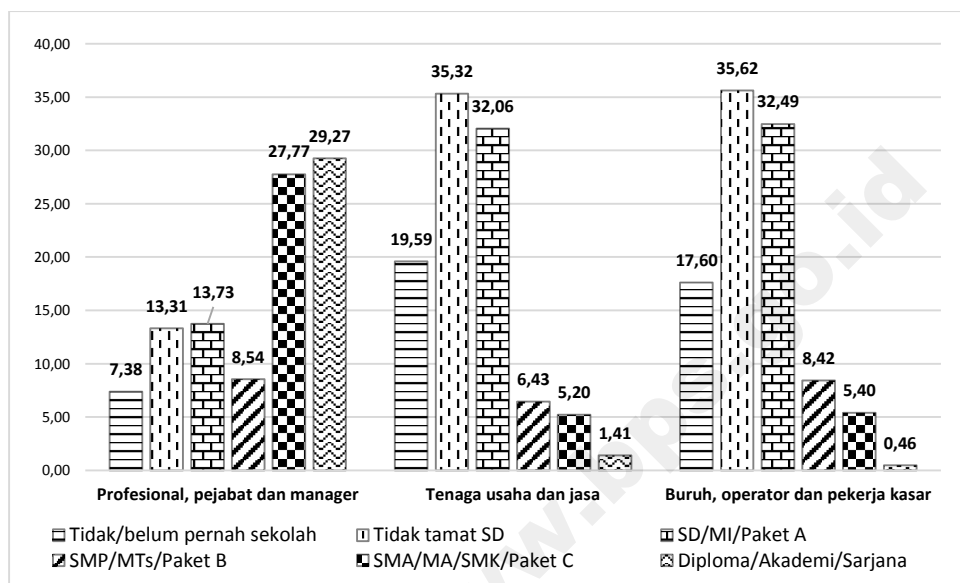
Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 6.6 memperlihatkan bahwa sebesar 74,10 persen lansia bekerja sebagai tenaga usaha dan jasa (*blue collar worker*). Sementara itu, lansia yang bekerja sebagai buruh, operator, dan pekerja kasar (*grey collar worker*) persentasenya sebesar 22,55 persen, dan lansia yang bekerja sebagai tenaga profesional, pejabat, dan manager (*white collar worker*) persentasenya sebesar 3,35 persen. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin lansia, tampak tidak ada perbedaan yang nyata antara jabatan/jenis pekerjaan lansia laki-laki dan lansia perempuan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, lansia di perkotaan yang bekerja dengan jabatan/jenis pekerjaan sebagai profesional, pejabat, dan manager serta bekerja sebagai buruh, operator, dan pekerja kasar lebih besar persentasenya dibanding lansia di perdesaan. Sebaliknya persentase lansia di perdesaan yang bekerja dengan jabatan/jenis pekerjaan sebagai tenaga usaha dan jasa lebih besar dibanding lansia di perkotaan. Persentase lansia di perkotaan yang bekerja dengan jabatan/jenis pekerjaan sebagai profesional, pejabat, dan manager sebesar 6,23 persen. Lansia bekerja dengan jabatan/jenis pekerjaan sebagai buruh, operator, dan pekerja kasar sebesar 31,89 persen, serta bekerja sebagai tenaga usaha dan jasa sebesar 61,87 persen. Sementara itu, persentase lansia di

perdesaan yang bekerja dengan jabatan/jenis pekerjaan sebagai profesional, pejabat, dan manager sebesar 1,60 persen. Lansia bekerja dengan jabatan/jenis pekerjaan sebagai buruh, operator, dan pekerja kasar sebesar 16,86 persen, serta bekerja sebagai tenaga usaha dan jasa sebesar 81,54 persen.

Gambar 6.7 Proporsi Lansia Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014



Sumber: BPS, Sakernas 2014

Gambar 6.7 menunjukkan bahwa sebagian besar dari lansia yang bekerja dengan jabatan/jenis pekerjaan sebagai profesional, pejabat, dan manager adalah mereka yang berpendidikan tinggi (SMA/ sederajat ke atas). Lansia yang bekerja dengan jabatan/jenis pekerjaan sebagai profesional, pejabat, dan manager dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebesar 27,77 persen, dan tingkat pendidikan Diploma/ Akademi/ Sarjana sebesar 29,27 persen. Sementara itu, jabatan/jenis pekerjaan sebagai tenaga usaha, dan jasa serta jabatan/jenis pekerjaan sebagai buruh, operator, dan pekerja kasar lebih didominasi oleh lansia yang memiliki pendidikan pada tingkat dasar (SD/ sederajat ke bawah). Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa latar belakang tingkat pendidikan yang dimiliki pada dasarnya berpengaruh terhadap status pekerjaan.

6.5 Status Pekerjaan

Pola penyebaran tenaga kerja sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas dari sisi kesehatan, pendidikan, keahlian dan keterampilan akan mempunyai tingkat produktivitas yang jauh lebih baik. Status pekerjaan terdiri atas berusaha/ bekerja

sendiri, berusaha/bekerja dibantu buruh/karyawan/pegawai, sebagai buruh/karyawan/pegawai yang terikat, pekerja bebas yang tidak terikat pada satu pengusaha/perusahaan, serta pekerja keluarga atau tidak dibayar. Komposisi lansia yang bekerja menurut status pekerjaan memberikan gambaran tentang kedudukan lansia dalam pekerjaan. Kedudukan seorang pekerja lansia dalam lapangan usaha tempatnya bekerja mencerminkan seberapa besar peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi status pekerjaannya, semakin tinggi pula kemandirian dan partisipasinya dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 6.7 memperlihatkan bahwa sebesar 42,41 persen lansia bekerja dengan status berusaha/bekerja dibantu buruh. Selain berusaha/bekerja dibantu buruh, lansia juga banyak yang berusaha sendiri (26,30 persen) dan sebagai pekerja tidak dibayar (13,34 persen). Sementara itu, lansia yang bekerja dengan status sebagai pekerja bebas, dan buruh/karyawan persentasenya masing-masing sebesar 9,35 persen dan 8,60 persen.

Tabel 6.7 Proporsi Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status pekerjaan					Total
	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu buruh	Buruh/ karyawan	Pekerja bebas	Pekerja keluarga/ tidak dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
Laki-laki	28,40	39,23	17,89	10,65	3,83	100,00
Perempuan	37,59	21,44	11,00	8,93	21,04	100,00
Laki-laki + Perempuan	31,60	33,02	15,49	10,05	9,84	100,00
Perdesaan						
Laki-laki	21,04	62,40	4,91	9,01	2,64	100,00
Perempuan	26,44	24,43	3,56	8,79	36,78	100,00
Laki-laki + Perempuan	23,07	48,13	4,40	8,93	15,47	100,00
Perkotaan + Perdesaan						
Laki-laki	23,90	53,40	9,95	9,65	3,10	100,00
Perempuan	30,47	23,35	6,25	8,84	31,09	100,00
Laki-laki + Perempuan	26,30	42,41	8,60	9,35	13,34	100,00

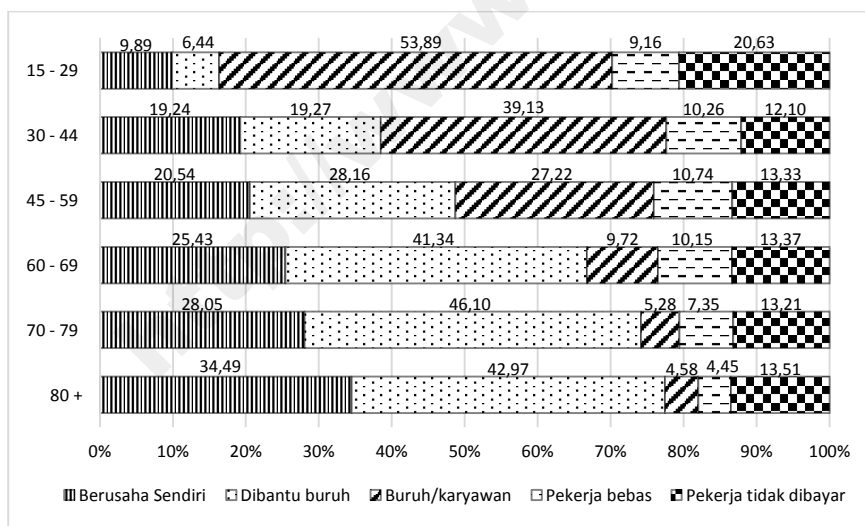
Sumber: BPS, Sakernas 2014

Apabila dibedakan menurut daerah tempat tinggal, status dari pekerja lansia di perdesaan sebagian besar berusaha dibantu oleh buruh/karyawan (48,13 persen), berusaha sendiri (23,07 persen), dan sebagai pekerja bebas (15,47 persen). Sementara itu, lansia di perkotaan sebagian besar bekerja dengan status berusaha dibantu oleh buruh/karyawan, berusaha sendiri, dan buruh/karyawan dengan persentase masing-masing sebesar 33,02 persen, 31,60 persen, dan 15,49 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan jenis status pekerjaan antara lansia laki-laki dan perempuan. Lansia perempuan lebih banyak terkonsentrasi sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar (31,09 persen), berusaha sendiri (30,47 persen), dan bekerja/berusaha dibantu buruh/karyawan (23,35 persen). Sementara itu, lansia laki-laki yang bekerja lebih banyak bekerja/berusaha dibantu buruh/karyawan (53,40 persen), berusaha sendiri (23,90 persen), dan sebagai buruh/karyawan (9,95 persen).

Apabila diperhatikan menurut kelompok umur, seperti yang disajikan pada Gambar 6.8, terlihat bahwa proporsi pekerja lansia yang dibantu oleh buruh/karyawan dan berusaha sendiri semakin besar seiring dengan pertambahan kelompok umur. Hal sebaliknya terjadi pada pekerja lansia dengan status sebagai buruh/karyawan yang mengalami penurunan proporsi seiring dengan pertambahan kelompok umurnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang bekerja secara terikat pada suatu perusahaan cenderung untuk melepaskan status buruh/karyawannya seiring dengan pertambahan usia. Mereka beralih profesi menjadi pekerja/pengusaha, baik sebagai pengusaha mandiri maupun dibantu buruh/karyawan.

Gambar 6.8 Proporsi Lansia Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan, 2014



Sumber: BPS, Sakernas 2014

Lampiran Tabel 4.6.5 menyajikan informasi mengenai status lansia yang bekerja menurut provinsi. Secara umum status pekerjaan dari lansia bekerja di setiap provinsi sama dengan status pekerjaan secara nasional, yaitu bekerja/berusaha dibantu buruh. Disisi lain, untuk lansia yang mayoritas berstatus berusaha sendiri terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Maluku, Kalimantan Timur, dan Banten.

6.6 Jumlah Jam Kerja

Produktivitas seorang lansia dan peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari jumlah jam kerja dari pekerjaan yang ditekuninya. Seyogianya, jam kerja lansia semakin menurun seiring dengan kondisi fisiknya yang mulai melemah. Partisipasi lansia dalam kegiatan ekonomi tidak diutamakan pada kuantitas jam kerjanya, melainkan lebih kepada kualitas kerja yang tercermin dari fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya. Namun pada kenyataannya, masih banyak lansia yang bekerja secara penuh atau jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu.

Tabel 6.8 memperlihatkan sebesar 44,25 persen dari seluruh lansia bekerja memiliki jam kerja antara 15 hingga 35 jam dalam seminggu. Lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh atau lebih dari 35 jam dalam seminggu terakhir sebesar 40,19 persen. Sementara itu, lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu hanya sebesar 15,56 persen.

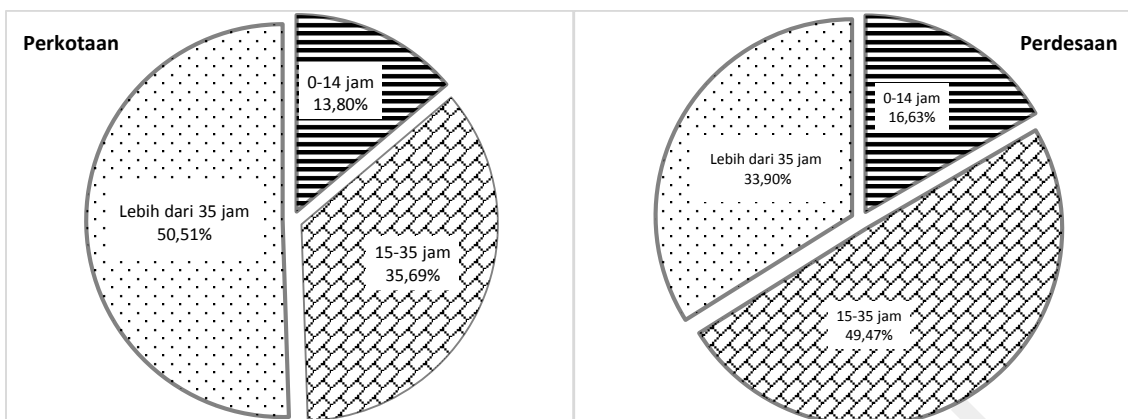
Tabel 6.8 Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir, 2014

Kelompok Umur/ Jenis Kelamin	Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir			Total
	0 - 14 jam	15 - 35 jam	Lebih dari 35 jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-59 Tahun				
Laki-laki	5,59	23,21	71,21	100,00
Perempuan	10,75	35,71	53,54	100,00
Laki-laki + Perempuan	7,54	27,93	64,54	100,00
60 Tahun ke Atas				
Laki-laki	12,88	41,86	45,26	100,00
Perempuan	20,20	48,41	31,40	100,00
Laki-laki + Perempuan	15,56	44,25	40,19	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Apabila ditinjau dari jenis kelamin, produktivitas pekerja lansia laki-laki lebih tinggi dibanding lansia perempuan. Hal ini tercermin dari persentase lansia yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Persentase lansia laki-laki yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu tercatat sebesar 45,26 persen, sedangkan lansia perempuan sebesar 31,40 persen. Sebaliknya, untuk lansia dengan jam kerja 35 jam atau kurang dalam seminggu, terlihat persentase lansia perempuan lebih tinggi dibanding lansia laki-laki. Persentase lansia perempuan dengan jumlah jam kerja 0-14 jam dalam seminggu sebesar 20,20 persen, jam kerja 15-35 jam seminggu sebesar 48,41 persen. Sementara itu, persentase pada lansia laki-laki masing-masing sebesar 12,88 persen dan 41,86 persen.

Gambar 6.9 Proporsi Penduduk Lansia Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir dan Tipe Daerah, 2014

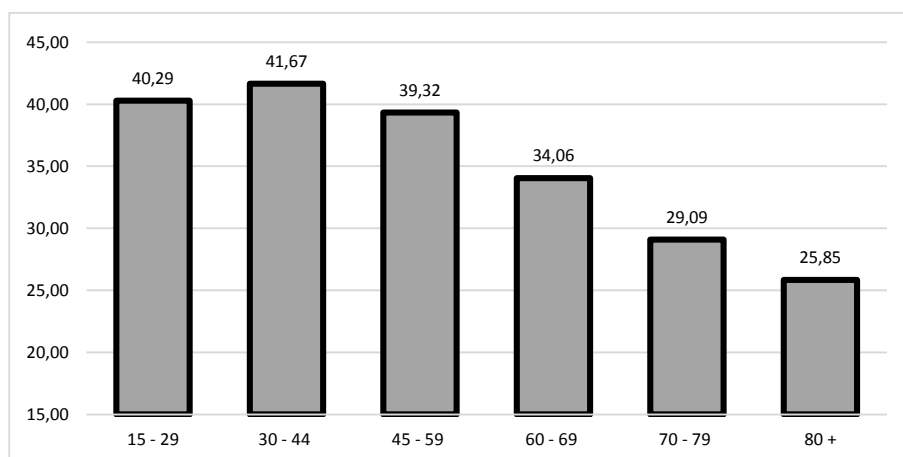


Sumber: BPS, Sakernas 2014

Berdasarkan daerah tempat tinggal, ada perbedaan pola antara pekerja lansia di perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, sebagian besar pekerja lansia bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu (50,51 persen). Sementara itu, sebagian besar pekerja lansia di perdesaan bekerja dengan jumlah jam kerja antara 15 hingga 35 jam dalam seminggu (49,47 persen).

Rata-rata jumlah jam kerja dari penduduk bekerja menurut kelompok umur disajikan pada Gambar 6.10. Pola yang terlihat pada Gambar 6.10 rata-rata jumlah jam kerja menurun seiring dengan bertambahnya umur. Pekerja dengan umur 30-44 tahun mempunyai rata-rata jam kerja yang paling banyak yaitu 41,67 jam dalam seminggu. Sementara itu, rata-rata jam kerja dari pekerja lansia sebesar 34,06 jam dalam seminggu (kelompok umur 60-69 tahun), sebesar 29,09 jam dalam seminggu (kelompok umur 70-79 tahun), dan sebesar 25,85 jam dalam seminggu (kelompok umur 80 tahun ke atas).

Gambar 6.10 Rata-rata Jumlah Jam Kerja Dari Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2014



Sumber: BPS, Susenas 2014

Gambaran mengenai jam kerja dari lansia yang bekerja menurut provinsi disajikan pada Tabel 4.7.5. Provinsi dengan proporsi terkecil pekerja lansia yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu adalah Provinsi Sulawesi Barat, dengan persentase sebesar 26,79 persen. Sedangkan provinsi dengan proporsi terbesar pekerja lansia yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu adalah Provinsi DKI Jakarta, dengan persentase sebesar 65,07 persen.

6.7 Pendapatan Lansia

Tingkat pendidikan lanjut usia yang pada umumnya sangat rendah berpengaruh terhadap produktivitas kerja sehingga pendapatan yang diperoleh juga kecil. Pekerjaan yang disertai dengan pendidikan dan keterampilan akan mendorong kemajuan setiap usaha (Sedarmayanti, 2001). Kemajuan akan meningkatkan pendapatan, baik pendapatan individu, kelompok maupun pendapatan Nasional. Sumber utama kinerja yang efektif mempengaruhi individu adalah kelemahan intelektual, kelemahan psikologis, kelemahan fisik. Jadi jika lanjut usia dengan kondisi yang serba menurun bekerja sudah tidak efektif lagi ditinjau dari proses dan hasilnya.

Tabel 6.9 Proporsi Lansia Bekerja Menurut Upah/Gaji/Pendapatan dalam Sebulan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe daerah/ Jenis kelamin	Upah/gaji/pendapatan (rupiah)						Total
	Kurang dari 500.000	500.000 -	1.000.000 -	1.500.000 -	2.000.000 -	2.500.000 atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan							
Laki-laki	16,65	35,04	17,34	12,27	6,80	11,88	100,00
Perempuan	29,64	44,76	9,94	7,64	2,79	5,23	100,00
Laki-laki + Perempuan	21,23	38,47	14,73	10,64	5,39	9,54	100,00
Perdesaan							
Laki-laki	19,57	46,58	15,64	9,07	4,26	4,88	100,00
Perempuan	35,92	52,55	6,47	2,81	0,87	1,38	100,00
Laki-laki + Perempuan	26,23	49,01	11,90	6,52	2,88	3,45	100,00
Perkotaan + Perdesaan							
Laki-laki	18,05	40,58	16,52	10,74	5,58	8,53	100,00
Perempuan	33,02	48,95	8,07	5,04	1,76	3,16	100,00
Laki-laki + Perempuan	23,74	43,76	13,31	8,57	4,13	6,49	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

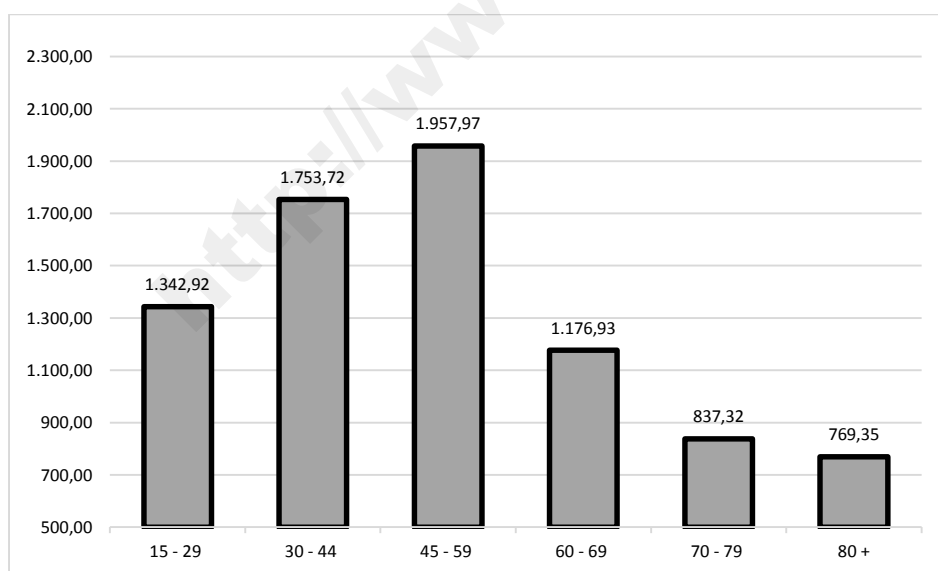
Penghasilan yang rendah atau masih dibawah standar kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan tingkat kesejahteraan para pekerja masih sangat sulit untuk dicapai. Penghasilan yang

rendah ini juga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang harus dicapai setiap harinya. Para pekerja akan terjebak pada pola hidup subsistem dan nantinya akan berujung pada kemiskinan sebagai salah satu konsekuensi akibat rendahnya penghasilan yang mereka terima.

Tabel 6.9 memperlihatkan bahwa separuh lebih dari lansia bekerja memperoleh upah/gaji/pendapatan kurang dari satu juta rupiah dalam sebulan. Sebesar 43,76 persen lansia memperoleh upah/gaji/pendapatan sebesar 500.000-999.999 rupiah dalam sebulan dan sebesar 23,74 persen memperoleh upah/gaji/pendapatan kurang dari 500.000 rupiah dalam sebulan. Sementara itu pekerja lansia yang memperoleh upah/gaji/pendapatan sebesar 2.500.000 rupiah atau lebih per bulan hanya sebesar 6,49 persen.

Lansia laki-laki maupun perempuan yang bekerja mempunyai pola yang relatif sama dalam kaitannya dengan upah/gaji/pendapatan yang diterima dalam sebulan. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.9, baik lansia laki-laki maupun lansia perempuan yang bekerja sebagian besar memperoleh upah/gaji/pendapatan kurang dari 1.000.000 rupiah per bulan. Kondisi yang serupa juga terlihat pada lansia di perkotaan dan perdesaan.

Gambar 6.11 Rata-rata Besarnya Upah/Gaji/Pendapatan (Ribuan Rupiah) dari Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2014



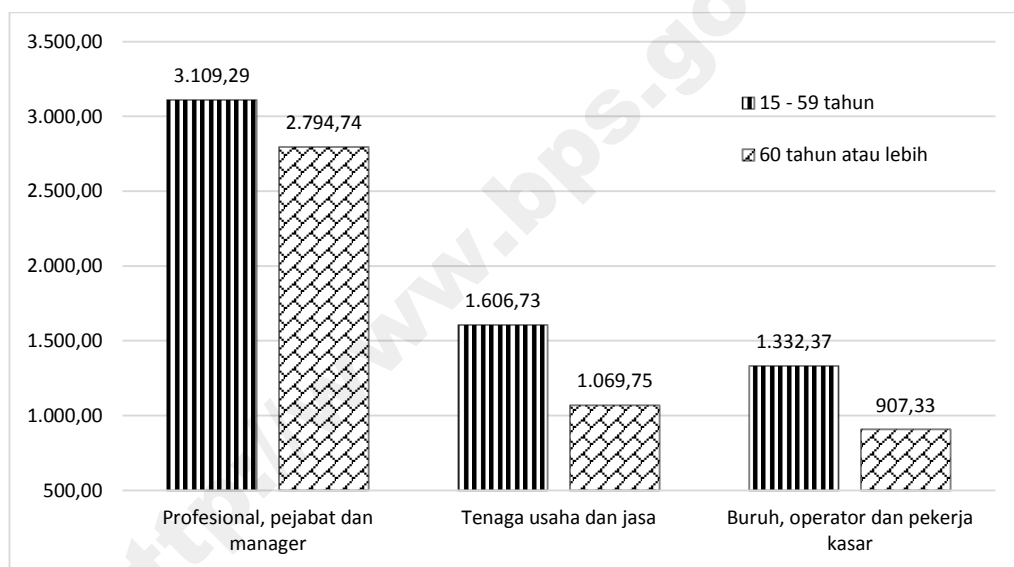
Sumber: BPS, Susenas 2014

Rata-rata upah/gaji/pendapatan yang diperoleh penduduk yang bekerja menurut kelompok umur disajikan pada Gambar 6.11. Secara umum terlihat adanya peningkatan upah/gaji/pendapatan pada penduduk usia produktif (kelompok umur 15-59 tahun) seiring dengan meningkatnya umur.

Keadaan sebaliknya terjadi pada kelompok umur 60 tahun ke atas (penduduk lansia), dimana terjadi penurunan upah/gaji/pendapatan seiring dengan meningkatnya umur.

Pada kelompok umur 15–29 tahun, rata-rata upah/gaji/pendapatan yang diterima oleh penduduk yang bekerja yaitu sebesar 1,34 juta rupiah. Nilai tersebut semakin naik hingga mencapai rata-rata 1,96 juta rupiah pada kelompok umur 45–59 tahun. Sementara itu, pada kelompok umur 60–69 tahun, rata-rata upah/gaji/pendapatan yang diterima oleh penduduk yang bekerja yaitu sebesar 1,18 juta rupiah. Nilai tersebut kemudian semakin menurun seiring dengan bertambahnya umur hingga mencapai rata-rata 769 ribu rupiah pada kelompok umur 80 tahun ke atas.

Gambar 6.12 Rata-rata Besarnya Upah/Gaji/Pendapatan (Ribuan Rupiah) per Bulan dari Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014



Sumber: BPS, Susenas 2014

Gambar 6.12 memperlihatkan rata-rata upah/gaji/pendapatan yang diperoleh lansia yang bekerja menurut jabatan/jenis pekerjaan dibanding penduduk usia produktif. Secara rata-rata, upah/gaji/pendapatan per bulan lansia yang bekerja sebagai buruh, operator, dan pekerja kasar hanya sebesar 907 ribu rupiah. Angka ini lebih rendah dibanding penduduk usia produktif yang memperoleh rata-rata upah/gaji/pendapatan per bulan sebesar 1,33 juta rupiah. Begitu pula dengan penduduk yang bekerja sebagai tenaga usaha dan jasa, rata-rata upah/gaji/pendapatan per bulan dari pekerja lansia (1,07 juta rupiah) jauh lebih rendah daripada pekerja usia produktif (1,61 juta rupiah). Rata-rata upah/gaji/pendapatan per bulan dari penduduk lansia yang bekerja sebagai tenaga profesional, pejabat dan manager (2,79 juta rupiah) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pekerja usia produktif (3,11 juta rupiah).

<http://www.bps.go.id>

BAB VIII

KONDISI SOSIAL



KONDISI SOSIAL

Negara-negara di dunia sedang menghadapi salah satu isu global yaitu terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia tua yang diakibatkan meningkatnya angka harapan hidup penduduk. Situasi ini memberikan dampak terhadap kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkannya. Permasalahan tersebut tidak hanya yang berkaitan dengan penyediaan perawatan medis yang berkualitas, melainkan perawatan khusus untuk perlindungan dan kepentingan lansia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan bahwa “Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar” . Perlindungan terhadap lansia dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Aman dari berbagai gangguan yang timbul dari lingkungan (alam dan manusia), dan nyaman dalam menjalani hidup.

7.1 Tempat Tinggal Lansia

Tempat tinggal/rumah pada dasarnya merupakan tempat hunian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, tidak terkecuali bagi lansia. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, serta menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Masalah perumahan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23). Ditinjau dari sisi kelayakan, rumah dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu rumah layak huni, rumah hampir tidak layak huni, dan rumah tidak layak huni.

Tabel 7.1 Persentase Lansia menurut Kategori Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2011 – 2014

Kategori Kelayakan Rumah Tempat Tinggal	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Layak Huni	8,35	6,81	5,71	5,51
Hampir Tidak Layak Huni	14,92	13,69	12,48	11,98
Layak Huni	76,73	79,50	81,81	82,51
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

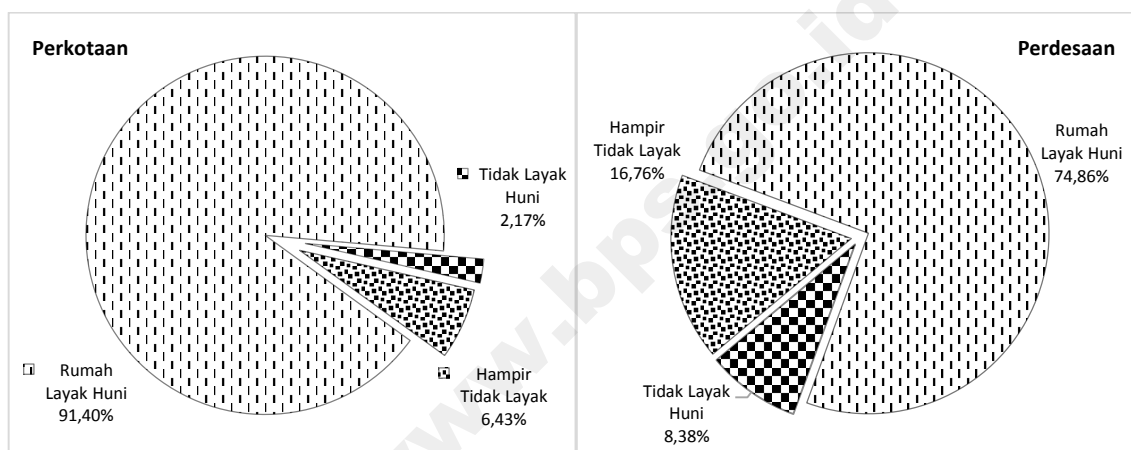
Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 7.1 memberikan gambaran kelayakan rumah yang ditinggali oleh lansia. Pada tahun 2014, persentase lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni sebesar 5,51 persen, di rumah hampir tidak layak huni sebesar 11,98 persen, dan di rumah layak huni sebesar 82,51 persen. Apabila diperhatikan perkembangannya dalam empat tahun terakhir, terlihat adanya peningkatan persentase lansia yang tinggal di rumah layak huni. Pada tahun 2011, persentase lansia yang tinggal di rumah layak huni sebesar 76,73 persen. Angka tersebut meningkat menjadi sebesar 79,50 persen di tahun 2012, meningkat menjadi 81,81 persen di tahun 2013 dan menjadi 82,51 persen di tahun 2014. Sementara itu, persentase lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni mengalami penurunan dari 8,35 persen pada tahun 2011 menjadi 5,51 persen pada tahun 2014. Kondisi tersebut secara tidak

langsung memberikan gambaran membaiknya kondisi kesejahteraan lansia apabila dilihat dari kelayakan rumah tinggalnya.

Dalam hal kelayakan rumah tinggal, lansia yang tinggal di daerah perkotaan tampak memiliki kehidupan yang lebih baik dibanding lansia di perdesaan. Hal ini terlihat dari lebih tingginya persentase lansia di perdesaan yang tinggal di rumah tidak layak huni di bandingkan dengan lansia di perkotaan (8,38 persen berbanding 2,17 persen). Sementara itu, lansia di perkotaan yang tinggal di rumah layak huni (91,40 persen) lebih tinggi daripada di perdesaan (74,85 persen).

Gambar 7.1 Persentase Lansia Menurut Tipe Daerah dan Kategori Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2014



Sumber: BPS, Susenas 2014

Sebaran lansia menurut kelayakan rumah tinggal menurut provinsi disajikan pada Lampiran Tabel 5.2.5. Provinsi dengan persentase tertinggi lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni adalah Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 34,24 persen. Selanjutnya adalah Papua dengan persentase sebesar 17,51 persen, kemudian Maluku Utara dengan persentase sebesar 11,95 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase tertinggi lansia yang tinggal di rumah layak huni adalah Kepulauan Riau (97,05 persen), DKI Jakarta (96,69 persen), dan Kepulauan Bangka Belitung (95,83 persen).

Rumah tinggal merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok. Memiliki dan tinggal di rumah sendiri merupakan impian bagi semua orang, tidak terkecuali bagi lansia. Memiliki hunian milik sendiri meskipun kecil akan terasa lebih nikmat ketimbang tinggal di rumah dengan luas bangunan yang besar namun bukan kepunyaan sendiri. Selain itu tinggal di rumah dengan status milik sendiri akan merasa lebih nyaman dibandingkan dengan menyewa, mengontrak, atau lainnya.

Pada Tabel 7.2 terlihat bahwa sebagian besar (92,40 persen) lansia tinggal di rumah dengan status milik sendiri. Sementara itu, sebesar 4,80 persen lansia tinggal di rumah dengan status bebas

sewa/milik keluarga. Sebesar 1,49 persen lansia tinggal di rumah dengan status kontrak/sewa dan sebesar 1,32 persen lansia tinggal di rumah dengan status lainnya.

Tabel 7.2 Persentase Lansia menurut Tipe Daerah dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2014

Tipe Daerah	Status kepemilikan tempat tinggal				Total
	Milik Sendiri/ Milik ART	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa/ Milik Keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	89,44	2,98	5,76	1,82	100,00
Perdesaan	94,94	0,20	3,97	0,89	100,00
Perkotaan + Perdesaan	92,40	1,49	4,80	1,32	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Berdasarkan tipe daerah tempat tinggal, terlihat adanya perbedaan pola status kepemilikan tempat tinggal antara lansia di perkotaan dengan di perdesaan. Persentase lansia yang tinggal di rumah dengan status milik sendiri di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia di perkotaan (94,94 persen berbanding 89,44 persen). Sementara itu persentase lansia di perkotaan yang tinggal di rumah dengan status sewa/kontrak, bebas sewa, dan lainnya lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

7.2 Status Ekonomi Rumah Tangga

Nugroho W. (2000) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kondisi lanjut usia akan menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan masa pensiun akan berakibat pada turunnya pendapatan, hilangnya fasilitas-fasilitas, kekuasaan, wewenang, dan penghasilan. Disisi lain, lansia dituntut untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin meningkat dari sebelumnya, seperti kebutuhan akan makanan gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perawatan bagi yang menderita penyakit ketuaan dan kebutuhan rekreasi. Kondisi fisik dan psikis yang menurun menyebabkan lansia kurang mampu menghasilkan pekerjaan yang produktif. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan hidup terkadang lansia mendapat bantuan dari anak-anak atau keluarga. Bantuan tersebut berupa uang atau kebutuhan-kebutuhan lain seperti makan, pakaian, dan kesehatan.

Tabel 7.3 menggambarkan persentase lansia menurut status ekonomi rumah tangganya. Status ekonomi ditentukan dengan mengurutkan rumah tangga berdasarkan pengeluaran

perkapitanya, kemudian dikelompokkan ke dalam 40 persen rumah tangga ekonomi rendah, 40 persen ekonomi menengah, dan 20 persen ekonomi tinggi.

Tabel 7.3 Persentase Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status Ekonomi Rumah Tangga			Total
	40 persen terendah	40 persen menengah	20 persen tertinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Laki-laki	45,58	38,04	16,38	100,00
Perempuan	46,57	37,30	16,13	100,00
Laki-laki + Perempuan	46,11	37,64	16,25	100,00
Perdesaan				
Laki-laki	45,90	37,60	16,50	100,00
Perempuan	47,06	37,33	15,62	100,00
Laki-laki + Perempuan	46,52	37,45	16,03	100,00
Perkotaan + Perdesaan				
Laki-laki	45,75	37,80	16,45	100,00
Perempuan	46,83	37,31	15,85	100,00
Laki-laki + Perempuan	46,33	37,54	16,13	100,00

Catatan: Status ekonomi rumah tangga ditentukan dengan mengurutkan rumah tangga berdasarkan pengeluaran perkapitanya. Pendekatan pengeluaran digunakan dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: BPS, Susenas 2014

Berdasarkan Tabel 7.3, diketahui bahwa sebagian besar lansia berada di rumah tangga dengan status ekonomi rendah, yaitu sebesar 46,33 persen. Sementara itu, persentase lansia yang berada di rumah tangga dengan status ekonomi menengah dan tinggi masing-masing sebesar 37,54 persen dan 16,13 persen. Pola yang relatif sama juga terlihat pada lansia di perkotaan maupun perdesaan serta pada lansia laki-laki maupun perempuan.

7.3 Lansia yang Bepergian

Bepergian saat ini sudah menjadi kebutuhan dan faktor pelengkap dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak lepas dengan adanya dorongan naluri manusia yang selalu ingin mengetahui dan mencari hal-hal yang baru, bagus, menarik, mengagumkan, dan menantang. Biasanya hal tersebut dilakukan dengan perjalanan ke luar daerah atau keluar dari kebiasaan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 7.4 menyajikan proporsi lansia yang bepergian dalam tiga bulan terakhir. Lansia yang bepergian dalam tiga bulan terakhir sebesar 7,46 persen. Apabila dilihat menurut tipe daerah, lansia di perkotaan yang melakukan aktivitas bepergian persentasenya lebih tinggi daripada lansia di perdesaan. Lansia di perkotaan yang melakukan aktivitas bepergian tercatat sebesar 10,07 persen, sedangkan lansia di perdesaan sebesar 5,20 persen.

Tabel 7.4 Proporsi Lansia yang Bepergian Tiga Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	10,97	9,28	10,07
Perdesaan	6,06	4,45	5,20
Perkotaan+Perdesaan	8,33	6,69	7,46

Sumber: BPS, Susenas 2014

Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, tampak bahwa lansia laki-laki yang bepergian persentasenya lebih besar dibanding dengan lansia perempuan. Lansia laki-laki yang bepergian tercatat sebesar 8,33 persen, sedangkan lansia perempuan sebesar 6,69 persen.

Tabel 7.5 Proporsi Lansia Bepergian Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tujuan Utama Bepergian, 2014

Jenis Kelamin	Tujuan Utama Bepergian						Total
	Berlibur/ rekreasi	Profesi/ bisnis	Kesehatan	Berziarah/ keagamaan	Mengunjungi teman/ keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-laki	11,34	6,15	6,04	9,18	61,54	5,76	100,00
Perempuan	12,83	1,85	4,96	12,86	63,88	3,61	100,00
Laki-laki + Perempuan	12,05	4,10	5,53	10,93	62,66	4,73	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Pada dasarnya seseorang yang bepergian memiliki tujuan tertentu, baik karena keinginan sendiri maupun karena mengikuti orang lain. Gambaran tentang lansia yang bepergian menurut tujuan bepergian yang utama disajikan pada Tabel 7.5. Secara umum sebagian besar dari lansia yang

berpergian mempunyai tujuan untuk mengunjungi teman/keluarga (62,66 persen), kemudian tujuan berlibur/rekreasi (12,05 persen), dan tujuan berziarah/keagamaan (10,93 persen). Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat adanya persamaan pola tujuan utama berpergian antara lansia laki-laki dan lansia perempuan.

7.4 Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan

Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di kota besar dan kota-kota lainnya adalah kriminalitas atau tindak kejahatan. Dalam berbagai acara berita di televisi, misalnya hampir setiap hari selalu ada berita mengenai tindak kejahatan. Hal ini tentunya cukup meresahkan bagi masyarakat. Tindak kejahatan yang dilakukan sangat bervariasi, mulai dari pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya. Lansia yang lemah dan hidup sendiri ataupun yang ada di lingkungan keluarganya sangat rentan terhadap kekerasan dan kejahatan. Faktor usia dan kondisi fisik lansia dianggap sebagai peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan karena para pelaku kejahatan berpikir para lansia tersebut tidak bisa berbuat apa-apa jika menjadi korban kejahatan.

Tabel 7.6 Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	1,79	1,14	1,44
Perdesaan	1,51	0,66	1,06
Perkotaan+Perdesaan	1,64	0,88	1,23

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 7.6 menunjukkan proporsi lansia yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir. Pada tahun 2014, persentase lansia yang menjadi korban kejahatan sebesar 1,23 persen. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, secara umum persentase lansia laki-laki yang menjadi korban kejahatan lebih tinggi dibanding dengan lansia perempuan. Sebesar 1,64 persen lansia laki-laki menjadi korban kejahatan, sedangkan lansia perempuan yang menjadi korban kejahatan sebesar 0,88 persen. Bila dilihat menurut tipe daerah, lansia di perkotaan yang menjadi korban kejahatan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia di perdesaan (1,44 persen berbanding 1,06 persen).

Tabel 7.7 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kejahatan , 2014

Jenis Kelamin	Jenis Kejahatan				Total
	Pencurian	Perampokan	Penipuan	Lainnya	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	78,67	6,06	11,12	4,16	100,00
Perempuan	67,23	11,87	13,50	7,40	100,00
Laki-laki + Perempuan	74,33	8,26	12,02	5,39	100,00

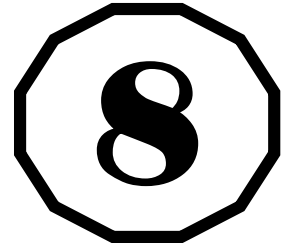
Sumber: BPS, Susenas 2014

Jenis kejahatan yang paling sering dialami oleh lansia yang menjadi korban kejahatan adalah pencurian dengan persentase sebesar 74,33 persen (Tabel 7.7). Selain pencurian, jenis kejahatan lain yang banyak dialami oleh lansia adalah penipuan (12,02 persen) dan perampokan (8,26 persen). Berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia perempuan yang menjadi korban lebih tinggi apabila dibandingkan dengan lansia laki-laki untuk setiap jenis kejahatan, kecuali pencurian. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada jenis kejahatan perampokan, dimana lansia perempuan yang menjadi korban tindak kejahatan perampokan sebesar 11,87 persen atau hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding lansia laki-laki (6,06 persen).

<http://www.bps.go.id>

BAB VIII

PERLINDUNGAN SOSIAL



PERLINDUNGAN SOSIAL

Penduduk lanjut usia termasuk ke dalam kelompok rentan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menyelenggarakan beberapa bentuk perlindungan sosial terutama bagi masyarakat yang tergolong rentan, termasuk di dalamnya adalah: lansia, penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas ganda (fisik dan mental) serta penduduk yang tinggal di kawasan terpencil. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan/jaminan sosial bagi mereka dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi maupun sosial yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H-ayat 3 (amandemen kedua) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat", dan Pasal 34 ayat 2 (amandemen keempat), bahwa: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Di samping itu, Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 juga mengugaskan kepada presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan sosial rakyat terutama bagi penduduk lanjut usia telah menyelenggarakan beberapa bentuk perlindungan sosial. Gambaran umum mengenai pencapaian penyelenggaraan perlindungan sosial yang telah dilakukan pemerintah akan disajikan dalam bab ini. Jenis perlindungan sosial yang dicakup adalah bantuan sosial (*social assistance*), asuransi sosial (*social insurance*), dan kebijakan pasar kerja (*labour market policies*).

8.1 Bantuan Sosial

Salah satu bentuk bantuan sosial yang telah dilaksanakan pemerintah adalah pemberian subsidi beras bagi penduduk miskin. Beras miskin (raskin) merupakan program bantuan pangan yang sudah dilaksanakan sejak Juli 1998 dengan tujuan awal menanggulangi kerawanan pangan akibat krisis moneter 1997/1998. Program ini berlanjut hingga saat ini dengan tujuan utama mengurangi beban rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program yang sebelum 2002 bernama Operasi Pasar Khusus (OPK) ini awalnya merupakan program darurat bagian dari jaring pengaman sosial (*social safety net*), namun kemudian fungsinya diperluas menjadi bagian dari program perlindungan sosial.

Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin nasional tahun 2014 adalah sebanyak 15.530.897 rumah tangga (tidak mengalami perubahan dari tahun 2013), yaitu rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda kepesertaannya, atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) untuk rumah tangga pengganti dari hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).

Gambaran mengenai bantuan beras miskin yang diterima/dibeli oleh rumah tangga lansia pada tahun 2014, disajikan pada Gambar 8.1. Sebesar 59,99 persen dari seluruh rumah tangga lansia menerima/membeli bantuan beras miskin. Rumah tangga lansia di daerah perkotaan yang menerima/membeli bantuan beras miskin sebesar 47,46 persen, sedangkan rumah tangga lansia di perdesaan yang menerima/membeli beras miskin sebesar 70,83 persen.

Tabel 8.1 Karakteristik Penyaluran Bantuan Beras Miskin (Raskin) Kepada Rumah Tangga Lansia Menurut Tipe Daerah, 2014

Karakteristik Penyaluran Raskin	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase rumah tangga lansia yang menerima/membeli raskin	47,46	70,83	59,99
Rata-rata banyaknya (kg) raskin yang diterima/dibeli rumah tangga lansia perbulan	5,42	5,91	5,73
Rata-rata harga (rupiah) per kg raskin yang dibeli rumah tangga lansia	2.215,25	2.114,72	2.151,56

Sumber: BPS, Susenas 2014

Harga Raskin adalah sebesar Rp 1,600/kg netto di titik distribusi. Harga tersebut merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masing-masing rumah tangga berhak mendapatkan harga Rp 1,600 tersebut, namun jika terdapat biaya distribusi dalam penyaluran beras, harga beras dapat berbeda tergantung dari kesepakatan pelaksana distribusi di tingkat kelurahan dengan masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan hasil Susenas 2014, rata-rata harga per kg Raskin yang dibayar rumah tangga lansia adalah sebesar Rp 2.151,- (di perkotaan sebesar Rp 2.215,- dan di perdesaan sebesar Rp 2.114,-). Perbedaan harga tersebut dikarenakan terdapat biaya tambahan seperti untuk biaya bongkar muat, biaya jaga malam dan lain sebagainya. Harga ditingkat rumah tangga penerima manfaat Raskin diwakili oleh harga patokan pemerintah ditambah dengan biaya-biaya selama proses pendistribusian dan keuntungan yang diperoleh oleh pelaksana distribusi (Damanik, 2014).

Pada tahun 2014, RTS-PM Raskin berhak untuk menebus beras Raskin sebanyak 15 kg per RTS-PM per bulan. Hasil Susenas 2014 menunjukkan rata-rata banyaknya Raskin yang diterima oleh satu rumah tangga lansia kurang dari jumlah alokasi sasaran yang ditetapkan pemerintah. Rata-rata banyaknya Raskin yang dibeli untuk sebulan yaitu sebesar 5,73 kg per rumah tangga lansia. Hal yang menyebabkan berkurangnya beras yang diterima adalah karena adanya kebijakan lokal dimana beras umumnya dibagi secara merata kepada hampir seluruh rumah tangga atau paling tidak kepada rumah tangga yang lebih banyak dari sasaran.

8.2 Jaminan Sosial

Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia membawa dampak konsekuensi pada meningkatnya populasi lansia dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan kebutuhan pelayanan sosial bagi lansia dalam mengisi hari tuanya dengan sejahtera, khususnya bagi lansia terlantar dan rawan terlantar. Untuk mengatasi berbagai permasalahan orang lanjut usia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial mengupayakan suatu wadah atau sarana untuk menampung orang lanjut usia dalam suatu institusi. Di dalam wadah yang dibangun ini, para lansia diberikan pelayanan dan pembinaan yang dapat membantu lansia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 8.2 menyajikan data jumlah dan proporsi rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial menurut tipe daerah. Pada tahun 2014, hanya sekitar 6,66 persen dari jumlah rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sedikitnya rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial sehingga diperlukan perhatian lebih dari berbagai pihak agar lansia bisa memperoleh jaminan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan lansia.

Akses dan fasilitas di perkotaan yang lebih memadai menyebabkan rumah tangga lansia di perkotaan lebih mudah untuk menerima jaminan sosial dibandingkan perdesaan. Hal ini terlihat dari proporsi rumah tangga lansia di perkotaan yang memiliki jaminan sosial jauh lebih besar dibanding dengan rumah tangga lansia di perdesaan. Rumah tangga lansia di perkotaan yang memiliki jaminan sosial sebesar 10,64 persen, sedangkan di perdesaan hanya sebesar 3,23 persen.

Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial dan Tipe Daerah, 2014

Kepemilikan Jaminan Sosial	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial (%)	10,64	3,23	6,66
Jenis Jaminan Sosial:			
- Jaminan pensiun	9,45	2,68	5,82
- Jaminan hari tua	0,85	0,24	0,52
- Asuransi kecelakaan kerja	0,91	0,25	0,56
- Jaminan veteran	0,36	0,25	0,30
- Pesangon PHK	0,21	0,05	0,12

Sumber: BPS, Susenas 2014

Jaminan pensiun merupakan jenis jaminan sosial yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga lansia dengan proporsi sebesar 5,82 persen. Rumah tangga lansia di perkotaan yang memiliki jaminan pensiun tercatat sebesar 9,45 persen, sedangkan rumah tangga lansia di perdesaan sebesar 2,68 persen.

Program jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Seiring dengan semakin meningkatnya populasi lansia, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kesehatan usia lanjut ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia untuk mencapai masa tua bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya. Tersedianya jaminan kesehatan hari tua secara layak dan dapat dinikmati oleh setiap lansia, menjadi permasalahan khusus sebagai akibat terjadinya proses penuaan penduduk. Penurunan kualitas kesehatan bagi lansia, membutuhkan proses pengobatan dan layanan kesehatan yang mudah dan murah. Hal ini mempertegas pentingnya jaminan kesehatan bagi lansia.

Berdasarkan Tabel 8.3 diketahui bahwa sebesar 52,75 persen rumah tangga lansia sudah memiliki jaminan kesehatan. Apabila diperhatikan menurut daerah tempat tinggal, proporsi rumah tangga lansia di perkotaan yang mempunyai jaminan kesehatan (54,85 persen) lebih besar dibandingkan di perdesaan (50,93 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyaknya rumah tangga lansia yang belum mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan sehingga diperlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah.

Tabel 8.3 Persentase Rumah Tangga Lansia Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Tipe Daerah, 2014

Kepemilikan Jaminan Kesehatan (1)	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan (4)
	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	
Rumah tangga lansia yang memiliki jaminan kesehatan (%)	54,85	50,93	52,75
Jenis jaminan Kesehatan:			
- Jamkesmas	24,87	38,24	32,04
- Jamkesda	6,08	7,42	6,80
- Jaminan persalinan	0,42	0,47	0,45
- JPK PNS/ Veteran/ Pensiun	15,22	4,42	9,43
- JPK Jamsostek	7,90	1,51	4,47

Sumber: BPS, Susenas 2014

Jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga lansia adalah Jamkesmas. Sebesar 32,04 persen rumah tangga lansia memiliki jaminan kesehatan Jamkesmas (Tabel 8.3). Selain Jamkesmas, jaminan kesehatan yang juga banyak dimiliki oleh rumah tangga lansia adalah JPK PNS/Veteran/Pensiun (9,43 persen) dan Jamkesda (6,80 persen).

Pola yang relatif berbeda terlihat dari kepemilikan jaminan kesehatan dari rumah tangga lansia di perkotaan dan perdesaan. Jaminan kesehatan yang banyak dimiliki oleh rumah tangga lansia di perkotaan adalah Jamkesmas (24,87 persen), JPK PNS/Veteran/Pensiun (15,22 persen), dan JPK Jamsostek (7,90 persen). Sementara itu, di perdesaan jaminan kesehatan yang banyak dimiliki adalah Jamkesmas (38,24 persen), Jamkesda (7,42 persen) dan JPK PNS/Veteran/Pensiun (4,42 persen).

8.3 Kebijakan Pasar Kerja

Umumnya lansia di Indonesia masih dapat melakukan berbagai aktivitas dan masih banyak berperan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tidaklah mengherankan bila lansia di Indonesia masih banyak yang bekerja. Banyaknya lansia yang masih bekerja disebabkan oleh kebutuhan

ekonomi yang relatif masih besar, serta secara fisik dan mental lansia tersebut masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan ekonomi yang relatif besar pada lansia kemungkinan disebabkan tidak atau belum adanya jaminan sosial ekonomi yang memadai bagi lansia.

Salah satu cara mewujudkan kebijakan pasar kerja (*labour market policies*) yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh penduduk lansia adalah dengan mengadakan program PNPM Mandiri dan Program lainnya (seperti: Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dan lain-lain).

Gambaran mengenai rumah tangga lansia yang menerima bantuan kredit usaha ditampilkan pada Tabel 8.4. Pada tahun 2014, sebesar 6,68 persen dari seluruh rumah tangga lansia menerima bantuan kredit usaha. Apabila dilihat menurut tipe daerah, rumah tangga lansia di perdesaan yang menerima bantuan yaitu sebesar 7,23 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 6,04 persen.

Tabel 8.4 Persentase Rumah Tangga Lansia Yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah, 2014

Penyaluran Kredit Pengembangan Usaha	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah tangga lansia menerima kredit usaha (%)	6,04	7,23	6,68
Jenis Kredit Usaha:			
- PNPM	0,92	2,15	1,58
- Program pemerintah lainnya	0,31	0,42	0,37

Sumber: BPS, Susenas 2014

Rumah tangga lansia yang menerima bantuan kredit usaha dari program PNPM dan program pemerintah lainnya relatif sangat kecil. Rumah tangga lansia penerima program PNPM sebesar 1,58 persen dan program pemerintah lainnya sebesar 0,37 persen. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, rumah tangga lansia penerima bantuan kredit usaha melalui Program PNPM di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan (2,15 persen berbanding 0,92 persen). Pola yang sama juga terlihat untuk program pemerintah lainnya. Rumah tangga lansia di perdesaan yang menerima program pemerintah lainnya sebesar 0,42 persen dan di perkotaan sebesar 0,31 persen.

<http://www.bps.go.id>

BAB IX
PROGRAM
PEMBERDAYAAN LANSIA



PROGRAM PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN LANSIA

Jumlah lansia yang terus meningkat memerlukan berbagai penanganan khusus, baik yang menyentuh lansia secara langsung maupun antisipasi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Negara perlu memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada lansia, sehingga kelangsungan dan kualitas hidup mereka tetap membaik dan keberadaannya tidak menjadi beban bagi pembangunan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai masalah kesejahteraan lansia. Undang-undang tersebut diaplikasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Pemerintah juga menginisiasi pembentukan Komisi Nasional dan Komisi Daerah Lanjut Usia melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan bahwa 'Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa'. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia menurut PP Nomor 43 tahun 2004 adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan lansia di antaranya adalah Undang-undang

Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

9.1 Pihak-pihak yang Terlibat

Perbaikan kondisi kesehatan, jaminan ekonomi, serta dukungan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab lansia itu sendiri, melainkan dibutuhkan juga peran keluarga, masyarakat, dan negara. Kepedulian terhadap lansia merupakan tanggungjawab bersama, untuk itu dibutuhkan upaya yang harmonis dan berkesinambungan dari berbagai pihak agar masalah kesejahteraan lansia tidak menjadi permasalahan sosial di kemudian hari. Pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan lansia, di antaranya adalah:

1. Pemerintah Pusat dan Daerah, melalui berbagai kebijakan dan program pelayanan dan pemberdayaan lansia yang dikawal oleh:
 - Kementerian Sosial,
 - Kementerian Agama,
 - Kementerian Kesehatan,
 - Kementerian Perhubungan,
 - Kementerian Tenaga Kerja,
 - Kementerian Pemuda dan Olahraga,
 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 - Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
 - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta
 - Komisi Nasional Lanjut Usia.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial non Pemerintah, melalui berbagai kegiatan pelayanan sosial yang bersentuhan langsung dengan lansia, seperti:
 - Panti sosial Tresna Werdha (PSTW),
 - Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial non panti,
 - Lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta
 - Badan Usaha yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan kesehatan.
3. Keluarga dan masyarakat, melalui berbagai upaya pendampingan, perawatan, dan pemberdayaan lansia.

Perhatian pemerintah terhadap penduduk lansia lebih banyak dimotori melalui Kementerian Sosial beserta jajarannya. Berbagai program pelayanan dan pemberdayaan lansia yang bersentuhan khusus dengan penduduk lansia dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Sosial. Begitu pula dengan kelembagaan masyarakat yang mengurus masalah lansia, umumnya dibawah koordinasi langsung Kementerian Sosial. Adapun program dan kebijakan yang cakupannya lebih luas dilakukan pula oleh kementerian lainnya, walaupun tidak secara khusus bersentuhan langsung dengan penduduk lansia. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggungjawab terhadap harmonisasi dan kesinambungan berbagai program dan kebijakan tersebut.

9.2 Kebijakan Umum Pelayanan Kesejahteraan Lansia

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, penduduk lansia berhak atas pelayanan kesejahteraan lansia dari pemerintah, yang mencakup:

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual,
- b. Pelayanan kesehatan,
- c. Pelayanan kesempatan kerja,
- d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan,
- e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum,
- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum,
- g. Perlindungan sosial, dan
- h. Bantuan sosial

Kebijakan dan program di bidang kesejahteraan sosial bagi lansia yang disusun oleh Kementerian Sosial difokuskan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Meningkatkan dan memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial bagi lansia,
- Meningkatkan koordinasi intra dan inter sektoral, antar berbagai instansi pemerintahan pusat dan daerah, serta organisasi sosial masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial bagi lansia,
- Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial lansia,
- Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sosial lansia,
- Membangun dan mengembangkan sistem jaminan dan perlindungan sosial bagi lansia, serta
- Meningkatkan, mengembangkan, dan memantapkan peran kelembagaan lansia untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi lansia.

9.3 Program-program Pelayanan dan Pemberdayaan Lansia

Secara umum, program pemberdayaan dan pelayanan sosial bagi lansia dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) program Pelayanan Sosial di dalam Panti; (2) program Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial di luar Panti; serta (3) Kelembagaan Sosial dan Aksestabilitas Lansia Lainnya. Secara rinci, berbagai program pelayanan dan pemberdayaan lansia tersebut adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Sosial di dalam Panti

1) Pelayanan Sosial Reguler melalui Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)

PSTW merupakan suatu unit pelaksana teknis (UPT)/lembaga kesejahteraan sosial (LKS)/institusi yang menampung dan merawat lansia, serta berperan sebagai keluarga bagi lansia dalam menjalankan fungsi pendampingan dan pembinaan kesejahteraan sosial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam PSTW adalah (a) bimbingan mental dan sosial; (b) pelayanan kesehatan; (c) kegiatan keagamaan; (d) bimbingan keterampilan; dan (e) rekreasi. Pendirian PSTW dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, yayasan, lembaga sosial masyarakat, maupun oleh anggota masyarakat secara pribadi. Menempatkan lansia di dalam PSTW pada dasarnya merupakan upaya terakhir, apabila upaya-upaya lainnya sudah tidak memungkinkan lagi.

2) Subsidi Panti Lansia Non Pemerintah

Subsidi panti lansia non pemerintah merupakan program bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui panti lansia. Panti mengajukan proposal nama-nama lansia yang berhak menerima bantuan. Pemerintah kemudian melakukan verifikasi mendalam terhadap proposal yang masuk sebelum menyalurkan bantuan sesuai aturan yang berlaku. Penyaluran subsidi melalui Kementerian Sosial dan jajarannya hingga Dinas Sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Program Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial di luar Panti

1) Pendampingan dan Perawatan Sosial Lanjut Usia di Rumah (*Home Care*)

Program *home care* dilakukan oleh petugas Dinas dan Panti Sosial yang mengunjungi lansia di rumahnya. Program *home care* bertujuan untuk membantu lansia dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial dan memecahkan permasalahan lansia, sekaligus memberi kesempatan kepada lansia untuk tetap tinggal dalam keluarganya. Program ini memiliki beberapa fungsi antara lain pencegahan, promosi, rehabilitasi, perlindungan, serta

pemeliharaan. *Home care* lansia membangun kemitraan antara pekerja sosial, dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, rohaniawan, guru, serta pemandu kebugaran jasmani. Sasaran pelayanan meliputi lansia rentan, lansia telantar, lansia tinggal sendiri, lansia miskin, lansia dengan keterbatasan mobilitas, lansia penyandang cacat ringan atau berat, dan lansia pasca perawatan di rumah sakit.

2) Pelayanan Harian Lanjut Usia (Day Care)

Kegiatan *day care* dilakukan di Panti Sosial dengan melibatkan lansia dari luar Panti, dimana lansia datang ke Panti pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Selama di Panti, lansia melakukan kegiatan bersama-sama dengan lansia lainnya. Kegiatan yang dilakukan berupa aktivitas di bidang ekonomi, pendidikan (membaca, menulis), kegiatan spiritual, dan lain-lain. Kegiatan bersama tersebut dilaksanakan selama 7 hingga 8 jam per kegiatan. Tujuannya kegiatan ini antara lain untuk membantu memberikan pelayanan kepada lansia, memenuhi kebutuhan lansia, meningkatkan kemampuan lansia untuk mengembangkan diri, membentuk hubungan dan kerjasama harmonis antara lansia, keluarga, dan masyarakat, serta untuk mengurangi rasa kecemasan yang timbul dalam diri lansia.

3) Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT)

Program ASLUT bertujuan untuk membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lansia, sehingga dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Program dilakukan dengan cara pemberian uang tunai kepada lansia telantar, per orang per bulan selama satu tahun, melalui lembaga penyalur yang ditunjuk pemerintah. Penyaluran dana ASLUT dikendalikan oleh petugas pendamping yang sekaligus bertugas untuk memberikan bimbingan psikologi dan advokasi sosial. Target ASLUT adalah lansia yang mengalami ketelantaran, mengalami sakit menahun, hidupnya tergantung pada orang lain, tidak memiliki penghasilan, miskin, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Program ASLUT telah dirintis oleh Kementerian Sosial sejak tahun 2006 dengan nama Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Mulai tahun 2011 menjadi program ASLUT dan diluncurkan secara nasional. Pada tahun 2013, bantuan tunai yang diberikan sebesar Rp. 200.000,- per bulan dengan sasaran 26.500 lansia telantar di seluruh Indonesia.

4) Penyaluran Bantuan Investasi Sosial Lansia melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Program UEP merupakan pemberian modal kepada lansia potensial yang masih aktif, kreatif, dan produktif, dalam bentuk bantuan investasi, bimbingan/pelatihan, dan pendampingan usaha. Program UEP bertujuan supaya lansia potensial yang masih sehat, aktif dan produktif

dapat membangun usaha yang menjadi sumber penghasilan bagi dirinya sendiri. Jenis usaha disesuaikan dengan kemampuan lansia dan pangsa pasar, baik dalam bentuk usaha kelompok maupun individu. Penyaluran bantuan diberikan setelah dilakukannya seleksi terhadap proposal usaha dari lansia atau kelompok lansia. Program ini dikelola secara nasional oleh Kementerian Sosial dan jajarannya.

5) Bantuan Sarana dan Prasarana bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia

Program ini bertujuan untuk membantu lansia baik secara perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang disalurkan melalui LKS lanjut usia yang membutuhkan. Bantuan bagi LKS Lansia dikelola oleh Kementerian Sosial beserta jajarannya, melalui sistem proposal. Besaran bantuan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.095.000,- per orang per tahun melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

6) Pelayanan Sosial Lansia dalam Situasi Darurat

Program yang digagas oleh Kementerian Sosial ini berupa pelayanan sosial khusus dalam situasi darurat bagi penduduk lansia. Situasi darurat yang dimaksud terjadi sebagai akibat dari adanya bencana alam, maupun oleh sebab lain seperti penelantaran, penipuan, tindak kekerasan, diskriminasi dan kasus khusus lainnya. Pelayanan sosial yang dilakukan antara lain (a) penyelamatan dan evakuasi; (b) pemulihan kondisi fisik; (c) pemulihan kondisi psikologis; (d) pemulihan kondisi sosial; (e) intervensi krisis; (f) advokasi; dan (g) rujukan.

7) Bedah Rumah Lansia

Bedah rumah lansia merupakan program Kementerian Sosial dalam rangka memberikan tempat tinggal yang layak bagi lansia. Bedah rumah dilakukan dengan memberikan bantuan rehabilitasi dan renovasi rumah bagi lansia telantar yang tinggal di rumah tidak layak huni.

C. Kelembagaan Sosial dan Aksestabilitas Lansia Lainnya

1) Bina Keluarga Lansia (BKL)

Program BKL yang dilaksanakan oleh BKKBN merupakan wadah kegiatan bagi lansia dan keluarga yang memiliki lansia untuk meningkatkan keterampilan keluarga dalam memberikan pelayanan, perawatan dan pengakuan yang layak sebagai lansia. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga lansia melalui kegiatan pemberdayaan, pembinaan, serta pengembangan potensi bagi lansia. Melalui kelompok BKL, lansia akan mendapatkan penyuluhan-penyuluhan dari Kader BKL yang sifatnya selain menambah

pengetahuan juga memberi dorongan, bahkan sebagai konsultan dan mediator. Bentuk kegiatan di dalam BKL diantaranya:

- Kegiatan kepedulian kepada sesama, misalnya memberikan santunan kepada sesama, melakukan silaturahmi, mengunjungi lansia yang sakit, serta melayat lansia yang meninggal,
- Kegiatan sosial kemasyarakatan bagi lansia misalnya kegiatan spiritual di bidang keagamaan, gotong royong, bakti sosial, kegiatan ekonomi produktif, penyaluran hobi bakat, menjadi guru tamu, menjadi orang tua asuh.

2) Karang Lansia

Pembentukan karang lansia dimaksudkan untuk membentuk sebuah wadah yang dapat menampung kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap lanjut usia serta menyediakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi para lanjut usia. Sehingga dengan adanya karang lansia diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan kepedulian masyarakat terhadap kaum lanjut usia. Kegiatan yang terdapat dalam karang lansia antara lain posyandu lansia, pembinaan keagamaan/pengajian, dan rekreasi.

3) Posyandu Lansia

Pelayanan yang disediakan oleh Posyandu Lansia adalah pemeriksaan tekanan darah dan kesehatan yang dilakukan setiap satu bulan sekali, serta pemberian makanan tambahan dan senam lansia yang dilakukan seminggu atau dua minggu sekali. Posyandu Lansia juga melaksanakan kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi lansia. Pembentukan Posyandu Lansia di bawah pembinaan Puskesmas setempat.

4) Rumah Sehat Lansia

Rumah Sehat Lansia merupakan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dialihfungsikan untuk memberikan konsultasi dan pelayanan khusus kepada lansia. Rumah Sehat Lansia juga bekerjasama dengan Rumah Sakit umum untuk pelayanan konsultasi Geriatri sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

5) Puskesmas Santun Lansia

Puskesmas Santun Usila merupakan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada pra lansia dan lansia yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Puskesmas Santun Lansia disediakan di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Sebagaimana posyandu untuk balita, Puskesmas Santun Usila juga memberikan Kartu Menuju Sehat (KMS) lansia sebagai salah satu instrumen pemantauan kesehatan. Puskesmas Santun Lansia

dilengkapi peralatan Usila KIT. Lansia mendapatkan layanan prioritas di Puskesmas Santun Lansia, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, tindakan, hingga pemberian obat dilaksanakan dalam satu ruang. Lansia tidak perlu berpindah tempat dan mengantri lagi untuk memperoleh pelayanan lainnya.

6) Taman Lansia

Taman lansia berfungsi sebagaimana taman kota. Di sela warna warni tanaman disediakan *track* yang khusus dibuat untuk kenyamanan kusi roda para lansia, ada *track* khusus dengan batuan sebagai alat refleksi, ada pula tempat duduk untuk pengantar saat menemani para lansia menikmati suasana kota.

7) Program Kota Ramah Lansia

Kota ramah lansia merupakan integrasi dan harmonisasi berbagai program pelayanan dan pemberdayaan lansia yang digagas oleh *World Wealth Organization* (WHO) pada tahun 2007. Aplikasi program ini di Indonesia masih dalam tataran konsep yang diajukan oleh Komisi Nasional Lansia. Empat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kota ramah lansia, yaitu (1) memiliki seperangkat peraturan daerah yang mengatur tentang kesejahteraan lansia; (2) memiliki jajaran pemerintah daerah yang peduli dan berkomitmen terhadap lansia; (3) memenuhi standar penilaian ramah lansia dari WHO; serta (4) fasilitas yang ramah terhadap lansia. Menurut WHO (2007), standar ramah lansia yang harus dipenuhi berbagai fasilitas perkotaan mencakup pada delapan dimensi, yaitu:

1. Gedung dan ruang terbuka (*building and outdoor space*);
2. Transportasi (*transportation*);
3. Perumahan (*housing*);
4. Partisipasi sosial (*social participation*);
5. Penghormatan dan keterlibatan sosial (*respect and social inclusion*);
6. Partisipasi sipil dan pekerjaan (*civil participation and employment*);
7. Komunikasi dan informasi (*communication and information*); serta
8. Dukungan masyarakat dan layanan kesehatan (*community support and health services*).

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penduduk Lanjut Usia Memilih Untuk Bekerja*. *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3 No. 2, Oktober 2009
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2012*. Jakarta: BPS; 2013
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Pendidikan 2012*. Jakarta: BPS; 2013.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2013*. Jakarta: BPS; 2014
- Damanik, R.F. *Analisis Efektivitas Distribusi Beras Miskin (Raskin) (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi)*. *Journal On Social Economic Of Agriculture And Agribusiness* Vol 3, No 2; 2014
- Kartika, Ni Putu R.D. dan Sudibia, I Ketut. *Pengaruh Variabel Sosial Demografi Dan Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Kerja Penduduk Lanjut Usia*. *E-Jurnal EP Unud*, 3 [6] : 247-256
- Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 *tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 *tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 tahun 2008 *tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota*
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 *tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia*
- Nugroho W. *Keperawatan Gerontik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2000
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung : Mandar Maju; 2001.
- Simanullang, Poniayah, dkk. *Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Status Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) Di Wilayah Kerja Puskesmas Darusalam Medan*. Medan:USU; 2011.
- Sulistiyarningsih, E.D. *Etos Kerja Penduduk Lanjut Usia (Studi Tentang Kebiasaan Bekerja Keras Pada Penduduk Lanjut Usia Di Desa Kalisari Jawa Tengah)*. Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014, 20 Desember 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 *Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.
- Undang-undang No. 13 Tahun 1998 *tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang *Perumahan dan Pemukiman*.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*

Wirakartakusumah & Anwar. *Aging in Indonesia Demographic Characteristic Demographic Institute, Faculty of Economics. University of Indonesia.1994,*

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

TABEL LAMPIRAN

Tabel 1.1.1 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Provinsi	Kelompok Umur (tahun)							
	0-44	Pra Lansia			Lansia			60+
		45-49	50-54	55-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	81,90	5,42	4,18	3,00	3,54	1,46	0,50	5,50
Sumatera Utara	79,45	5,75	4,80	3,84	4,00	1,59	0,58	6,17
Sumatera Barat	77,16	5,31	5,48	4,42	4,73	2,05	0,85	7,63
Riau	83,38	5,37	4,20	2,78	2,79	1,19	0,30	4,28
Jambi	79,68	5,60	5,47	3,30	4,05	1,47	0,43	5,95
Sumatera Selatan	78,50	5,65	5,23	4,22	4,05	1,70	0,65	6,41
Bengkulu	80,57	5,52	4,73	4,02	3,16	1,43	0,56	5,15
Lampung	77,49	6,59	5,44	3,73	4,12	1,92	0,73	6,76
Kep. Bangka Belitung	77,92	6,32	4,77	4,36	4,28	1,58	0,78	6,64
Kep. Riau	86,27	4,89	3,27	2,33	2,33	0,76	0,14	3,23
DKI Jakarta	78,98	6,39	5,09	3,65	4,09	1,37	0,43	5,89
Jawa Barat	78,46	6,10	4,89	3,66	4,33	1,95	0,61	6,89
Jawa Tengah	71,48	7,01	6,14	4,84	6,05	3,30	1,18	10,53
DI Yogyakarta	71,14	6,75	6,07	4,68	6,00	3,73	1,64	11,37
Jawa Timur	71,59	7,27	6,23	4,83	6,06	2,96	1,07	10,08
Banten	82,04	6,07	4,61	2,80	3,00	1,14	0,34	4,48
Bali	75,24	6,95	5,27	3,90	5,25	2,45	0,95	8,65
Nusa Tenggara Barat	78,99	5,69	4,61	3,51	4,48	2,08	0,63	7,19
Nusa Tenggara Timur	81,39	4,66	4,47	3,15	3,90	1,80	0,63	6,33
Kalimantan Barat	79,26	5,69	4,72	3,62	4,42	1,72	0,57	6,71
Kalimantan Tengah	81,85	5,85	4,44	3,16	2,97	1,22	0,51	4,70
Kalimantan Selatan	79,43	6,23	5,11	3,44	3,69	1,63	0,47	5,78
Kalimantan Timur	81,16	6,31	4,84	3,22	3,09	1,04	0,35	4,48
Sulawesi Utara	74,12	6,54	5,95	4,78	5,29	2,51	0,82	8,61
Sulawesi Tengah	79,83	5,97	4,87	3,18	3,94	1,52	0,69	6,15
Sulawesi Selatan	78,84	5,97	4,47	3,38	4,52	2,11	0,69	7,33
Sulawesi Tenggara	82,99	5,41	3,90	2,68	3,29	1,23	0,50	5,02
Gorontalo	78,55	6,01	5,34	3,52	4,58	1,73	0,27	6,58
Sulawesi Barat	81,49	5,11	3,73	3,20	3,90	1,92	0,64	6,46
Maluku	80,90	5,11	4,52	3,30	3,83	1,73	0,60	6,17
Maluku Utara	83,89	4,39	3,75	3,13	3,37	1,12	0,35	4,84
Papua Barat	83,86	6,17	3,60	2,94	2,56	0,71	0,18	3,44
Papua	83,57	5,78	3,96	2,96	2,77	0,68	0,27	3,73
Indonesia	77,15	6,32	5,22	3,90	4,59	2,10	0,72	7,41

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.1.2 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Perdesaan

Provinsi	Kelompok Umur (tahun)							
	0-44	Pra Lansia			Lansia			60+
		45-49	50-54	55-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	81,37	5,03	4,28	3,11	3,86	1,75	0,59	6,20
Sumatera Utara	79,58	5,59	4,65	3,68	4,12	1,62	0,76	6,50
Sumatera Barat	76,03	5,47	5,20	4,39	5,27	2,51	1,13	8,90
Riau	83,13	5,34	4,09	2,86	3,03	1,05	0,49	4,57
Jambi	80,09	5,73	5,05	3,11	3,83	1,55	0,63	6,02
Sumatera Selatan	79,66	5,51	4,66	3,48	4,09	1,88	0,73	6,69
Bengkulu	78,97	5,86	5,16	3,47	4,03	1,71	0,80	6,54
Lampung	77,45	5,99	5,22	3,60	4,65	2,15	0,93	7,73
Kep. Bangka Belitung	80,08	5,70	4,77	3,36	3,98	1,45	0,67	6,10
Kep. Riau	79,90	5,07	5,16	3,45	4,41	1,42	0,58	6,42
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	75,38	6,20	5,42	4,05	5,46	2,52	0,96	8,95
Jawa Tengah	69,99	7,12	6,42	4,88	6,57	3,63	1,39	11,60
DI Yogyakarta	63,50	7,13	6,93	6,14	8,48	5,10	2,72	16,30
Jawa Timur	68,93	7,52	6,58	5,20	6,92	3,52	1,32	11,76
Banten	80,78	5,66	4,58	3,00	3,92	1,55	0,52	5,98
Bali	69,87	7,00	5,83	5,09	7,01	3,58	1,62	12,21
Nusa Tenggara Barat	78,67	5,49	4,69	3,61	4,68	2,13	0,73	7,54
Nusa Tenggara Timur	79,12	5,21	4,48	3,56	4,53	2,33	0,77	7,63
Kalimantan Barat	79,95	5,78	4,75	3,28	4,15	1,58	0,50	6,23
Kalimantan Tengah	81,79	5,86	4,56	2,77	3,31	1,26	0,45	5,02
Kalimantan Selatan	79,16	6,15	4,94	3,38	4,07	1,69	0,61	6,38
Kalimantan Timur	81,69	6,06	4,33	2,97	3,39	1,24	0,33	4,95
Sulawesi Utara	73,17	6,67	5,50	5,15	5,84	2,73	0,94	9,52
Sulawesi Tengah	78,89	5,74	4,88	3,38	4,38	2,05	0,68	7,11
Sulawesi Selatan	76,24	5,79	4,90	3,79	5,50	2,69	1,08	9,27
Sulawesi Tenggara	81,41	5,07	4,05	3,01	4,05	1,74	0,67	6,45
Gorontalo	79,45	5,68	5,03	3,26	4,50	1,74	0,34	6,58
Sulawesi Barat	81,89	5,18	3,75	2,99	3,80	1,80	0,60	6,19
Maluku	80,73	4,86	4,56	3,33	4,01	1,65	0,86	6,52
Maluku Utara	82,74	4,83	3,97	3,17	3,55	1,29	0,44	5,29
Papua Barat	84,16	5,57	3,50	3,07	2,74	0,76	0,20	3,70
Papua	86,52	5,78	3,70	2,01	1,47	0,40	0,12	1,99
Indonesia	75,72	6,24	5,36	4,03	5,20	2,49	0,96	8,65

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.1.3 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Laki-laki

Provinsi	Kelompok Umur (tahun)							
	0-44	Pra Lansia			Lansia			60+
		45-49	50-54	55-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	82,15	5,19	4,16	3,07	3,58	1,46	0,39	5,43
Sumatera Utara	80,68	5,33	4,57	3,75	3,81	1,34	0,52	5,67
Sumatera Barat	77,96	5,19	4,95	4,40	4,85	1,94	0,71	7,50
Riau	83,06	5,43	4,33	2,82	2,95	1,05	0,35	4,35
Jambi	80,04	5,62	5,15	3,32	3,89	1,52	0,47	5,87
Sumatera Selatan	79,70	5,48	4,83	3,78	4,06	1,58	0,58	6,22
Bengkulu	79,38	5,69	5,18	3,83	3,74	1,53	0,66	5,92
Lampung	77,44	6,15	5,33	3,73	4,52	1,99	0,84	7,34
Kep. Bangka Belitung	79,11	6,21	5,01	3,65	4,14	1,37	0,51	6,02
Kep. Riau	84,33	5,48	3,79	2,66	2,66	0,87	0,21	3,74
DKI Jakarta	79,30	6,41	4,88	3,76	4,03	1,26	0,36	5,65
Jawa Barat	77,58	6,28	5,05	3,91	4,65	1,93	0,59	7,18
Jawa Tengah	71,58	6,95	6,20	4,95	6,19	3,01	1,13	10,33
DI Yogyakarta	70,20	6,65	6,23	5,13	6,47	3,82	1,50	11,79
Jawa Timur	71,31	7,18	6,31	5,17	6,36	2,73	0,93	10,03
Banten	81,37	6,17	4,66	3,08	3,29	1,14	0,28	4,72
Bali	74,03	6,88	5,65	4,10	5,71	2,67	0,96	9,33
Nusa Tenggara Barat	79,18	5,45	4,61	3,58	4,60	1,90	0,70	7,19
Nusa Tenggara Timur	80,02	4,99	4,47	3,43	4,27	2,15	0,67	7,08
Kalimantan Barat	79,70	5,84	4,78	3,41	4,26	1,61	0,41	6,28
Kalimantan Tengah	81,38	6,04	4,74	3,01	3,24	1,23	0,36	4,83
Kalimantan Selatan	79,71	6,32	5,01	3,44	3,73	1,46	0,33	5,53
Kalimantan Timur	80,68	6,44	4,64	3,50	3,35	1,09	0,31	4,75
Sulawesi Utara	74,56	6,43	5,57	5,10	5,47	2,16	0,71	8,34
Sulawesi Tengah	79,07	5,83	4,99	3,41	4,29	1,85	0,56	6,70
Sulawesi Selatan	78,65	5,69	4,56	3,49	4,76	2,04	0,80	7,60
Sulawesi Tenggara	82,41	5,00	3,96	2,97	3,75	1,37	0,54	5,66
Gorontalo	79,87	5,77	5,08	3,25	4,20	1,60	0,22	6,03
Sulawesi Barat	82,26	5,19	3,69	3,01	3,71	1,73	0,41	5,85
Maluku	81,27	4,95	4,15	3,54	3,81	1,62	0,66	6,09
Maluku Utara	83,08	4,54	4,10	3,17	3,56	1,24	0,31	5,11
Papua Barat	83,72	5,68	3,62	3,18	2,86	0,69	0,24	3,80
Papua	84,56	6,09	4,26	2,46	2,00	0,48	0,15	2,63
Indonesia	77,01	6,24	5,23	4,04	4,78	2,01	0,69	7,48

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.1.4 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Perempuan

Provinsi	Kelompok Umur (tahun)							
	0-44	Pra Lansia			Lansia			60+
		45-49	50-54	55-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	80,90	5,10	4,34	3,09	3,96	1,88	0,74	6,58
Sumatera Utara	78,35	6,00	4,88	3,77	4,31	1,87	0,82	7,00
Sumatera Barat	75,01	5,62	5,67	4,41	5,27	2,71	1,33	9,30
Riau	83,41	5,27	3,93	2,84	2,92	1,16	0,48	4,56
Jambi	79,88	5,77	5,21	3,02	3,90	1,54	0,68	6,13
Sumatera Selatan	78,77	5,64	4,90	3,72	4,10	2,06	0,82	6,98
Bengkulu	79,57	5,83	4,86	3,44	3,78	1,73	0,79	6,30
Lampung	77,47	6,14	5,22	3,54	4,51	2,19	0,92	7,62
Kep. Bangka Belitung	78,91	5,78	4,51	4,07	4,11	1,67	0,96	6,73
Kep. Riau	86,18	4,33	3,35	2,37	2,69	0,86	0,21	3,77
DKI Jakarta	78,66	6,37	5,29	3,54	4,16	1,48	0,50	6,13
Jawa Barat	77,26	5,99	5,09	3,67	4,77	2,36	0,86	7,99
Jawa Tengah	69,78	7,18	6,39	4,77	6,47	3,94	1,46	11,88
DI Yogyakarta	66,90	7,10	6,49	5,22	7,21	4,56	2,51	14,29
Jawa Timur	69,12	7,62	6,52	4,88	6,66	3,75	1,46	11,87
Banten	81,92	5,69	4,55	2,64	3,29	1,40	0,51	5,20
Bali	72,21	7,06	5,33	4,63	6,18	3,12	1,47	10,77
Nusa Tenggara Barat	78,46	5,69	4,71	3,57	4,59	2,30	0,69	7,58
Nusa Tenggara Timur	79,13	5,21	4,48	3,52	4,54	2,30	0,81	7,66
Kalimantan Barat	79,78	5,67	4,71	3,36	4,20	1,64	0,64	6,48
Kalimantan Tengah	82,27	5,66	4,28	2,79	3,14	1,27	0,59	5,00
Kalimantan Selatan	78,83	6,05	5,01	3,37	4,10	1,87	0,77	6,74
Kalimantan Timur	82,12	5,96	4,65	2,71	3,04	1,13	0,38	4,56
Sulawesi Utara	72,60	6,80	5,84	4,86	5,72	3,12	1,07	9,91
Sulawesi Tengah	79,17	5,77	4,76	3,24	4,25	2,01	0,81	7,07
Sulawesi Selatan	75,83	6,01	4,91	3,79	5,50	2,89	1,07	9,46
Sulawesi Tenggara	81,29	5,33	4,06	2,87	3,92	1,82	0,70	6,44
Gorontalo	78,40	5,82	5,19	3,45	4,86	1,87	0,41	7,14
Sulawesi Barat	81,33	5,13	3,80	3,07	3,93	1,93	0,81	6,66
Maluku	80,31	4,97	4,95	3,08	4,08	1,75	0,86	6,69
Maluku Utara	83,03	4,88	3,71	3,15	3,44	1,25	0,53	5,22
Papua Barat	84,45	5,85	3,43	2,86	2,48	0,80	0,13	3,42
Papua	87,11	5,43	3,21	2,02	1,60	0,46	0,16	2,22
Indonesia	75,85	6,32	5,34	3,90	5,01	2,58	1,00	8,59

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.1.5 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Kelompok Umur (tahun)							
	0-44	Pra Lansia			Lansia			60+
		45-49	50-54	55-59	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	81,52	5,14	4,25	3,08	3,77	1,67	0,57	6,00
Sumatera Utara	79,51	5,67	4,73	3,76	4,06	1,60	0,67	6,34
Sumatera Barat	76,47	5,41	5,31	4,40	5,06	2,33	1,02	8,40
Riau	83,23	5,35	4,13	2,83	2,94	1,10	0,41	4,45
Jambi	79,96	5,69	5,18	3,17	3,90	1,53	0,57	6,00
Sumatera Selatan	79,24	5,56	4,86	3,75	4,08	1,81	0,70	6,59
Bengkulu	79,47	5,75	5,03	3,64	3,76	1,63	0,72	6,11
Lampung	77,46	6,15	5,28	3,64	4,51	2,09	0,88	7,48
Kep. Bangka Belitung	79,01	6,00	4,77	3,85	4,13	1,52	0,72	6,37
Kep. Riau	85,24	4,92	3,58	2,52	2,67	0,87	0,21	3,75
DKI Jakarta	78,98	6,39	5,09	3,65	4,09	1,37	0,43	5,89
Jawa Barat	77,42	6,14	5,07	3,79	4,71	2,14	0,73	7,58
Jawa Tengah	70,67	7,07	6,29	4,86	6,33	3,48	1,29	11,11
DI Yogyakarta	68,53	6,88	6,36	5,18	6,84	4,20	2,01	13,05
Jawa Timur	70,20	7,40	6,41	5,03	6,51	3,25	1,20	10,96
Banten	81,64	5,94	4,60	2,86	3,29	1,27	0,39	4,95
Bali	73,13	6,97	5,49	4,36	5,94	2,89	1,21	10,05
Nusa Tenggara Barat	78,81	5,57	4,66	3,57	4,59	2,11	0,69	7,39
Nusa Tenggara Timur	79,57	5,10	4,48	3,48	4,41	2,23	0,74	7,37
Kalimantan Barat	79,74	5,76	4,74	3,38	4,23	1,62	0,52	6,38
Kalimantan Tengah	81,81	5,86	4,52	2,90	3,19	1,25	0,47	4,91
Kalimantan Selatan	79,27	6,19	5,01	3,41	3,91	1,67	0,55	6,13
Kalimantan Timur	81,36	6,21	4,64	3,13	3,20	1,11	0,34	4,66
Sulawesi Utara	73,60	6,61	5,70	4,98	5,59	2,63	0,89	9,11
Sulawesi Tengah	79,12	5,80	4,88	3,33	4,27	1,92	0,68	6,88
Sulawesi Selatan	77,21	5,85	4,74	3,64	5,14	2,48	0,94	8,55
Sulawesi Tenggara	81,85	5,16	4,01	2,92	3,84	1,59	0,62	6,05
Gorontalo	79,14	5,79	5,14	3,35	4,53	1,74	0,31	6,58
Sulawesi Barat	81,80	5,16	3,75	3,04	3,82	1,83	0,61	6,25
Maluku	80,79	4,96	4,55	3,31	3,94	1,68	0,76	6,38
Maluku Utara	83,06	4,70	3,91	3,16	3,50	1,25	0,42	5,17
Papua Barat	84,06	5,76	3,53	3,03	2,68	0,74	0,19	3,62
Papua	85,76	5,78	3,77	2,25	1,81	0,47	0,16	2,43
Indonesia	76,43	6,28	5,29	3,97	4,89	2,29	0,84	8,03

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.2.1 Proporsi Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	19,18	21,59	20,90
Sumatera Utara	21,15	21,53	21,35
Sumatera Barat	25,19	29,73	27,96
Riau	14,26	15,29	14,89
Jambi	19,27	18,98	19,07
Sumatera Selatan	21,85	21,00	21,29
Bengkulu	16,46	19,50	18,56
Lampung	22,34	22,85	22,73
Kep. Bangka Belitung	19,53	18,33	18,91
Kep. Riau	8,96	18,46	10,40
DKI Jakarta	17,93	-	17,93
Jawa Barat	21,12	25,07	22,52
Jawa Tengah	30,91	32,72	31,90
DI Yogyakarta	26,89	43,70	32,23
Jawa Timur	29,50	33,54	31,64
Banten	15,48	21,47	17,35
Bali	21,93	33,90	26,45
Nusa Tenggara Barat	20,95	21,41	21,22
Nusa Tenggara Timur	23,01	27,82	26,88
Kalimantan Barat	23,60	20,41	21,33
Kalimantan Tengah	14,71	15,43	15,19
Kalimantan Selatan	17,33	19,58	18,63
Kalimantan Timur	14,61	15,71	15,04
Sulawesi Utara	25,07	28,37	26,85
Sulawesi Tengah	20,52	22,91	22,35
Sulawesi Selatan	24,98	30,54	28,51
Sulawesi Tenggara	18,09	21,85	20,80
Gorontalo	21,47	21,18	21,28
Sulawesi Barat	23,31	21,22	21,67
Maluku	21,75	24,08	23,16
Maluku Utara	18,04	20,21	19,59
Papua Barat	12,05	12,89	12,63
Papua	12,78	5,74	7,45
Indonesia	22,80	26,18	24,50

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.2.2 Proporsi Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4,97	6,04	5,50	5,61	6,79	6,20	5,43	6,58	6,00
Sumatera Utara	5,60	6,74	6,17	5,73	7,26	6,50	5,67	7,00	6,34
Sumatera Barat	6,84	8,40	7,63	7,91	9,87	8,90	7,50	9,30	8,40
Riau	4,16	4,40	4,28	4,48	4,67	4,57	4,35	4,56	4,45
Jambi	5,81	6,10	5,95	5,90	6,14	6,02	5,87	6,13	6,00
Sumatera Selatan	5,94	6,88	6,41	6,37	7,03	6,69	6,22	6,98	6,59
Bengkulu	4,96	5,35	5,15	6,35	6,74	6,54	5,92	6,30	6,11
Lampung	6,52	7,00	6,76	7,63	7,85	7,73	7,34	7,62	7,48
Kep. Bangka Belitung	6,24	7,06	6,64	5,82	6,41	6,10	6,02	6,73	6,37
Kep. Riau	3,18	3,29	3,23	6,51	6,31	6,42	3,74	3,77	3,75
DKI Jakarta	5,65	6,13	5,89	-	-	-	5,65	6,13	5,89
Jawa Barat	6,52	7,26	6,89	8,47	9,44	8,95	7,18	7,99	7,58
Jawa Tengah	9,74	11,30	10,53	10,82	12,36	11,60	10,33	11,88	11,11
DI Yogyakarta	10,28	12,45	11,37	14,76	17,78	16,30	11,79	14,29	13,05
Jawa Timur	9,25	10,89	10,08	10,74	12,75	11,76	10,03	11,87	10,96
Banten	4,30	4,66	4,48	5,61	6,38	5,98	4,72	5,20	4,95
Bali	8,05	9,26	8,65	11,35	13,07	12,21	9,33	10,77	10,05
Nusa Tenggara Barat	6,93	7,43	7,19	7,37	7,69	7,54	7,19	7,58	7,39
Nusa Tenggara Timur	6,00	6,66	6,33	7,35	7,90	7,63	7,08	7,66	7,37
Kalimantan Barat	6,58	6,85	6,71	6,15	6,32	6,23	6,28	6,48	6,38
Kalimantan Tengah	4,64	4,76	4,70	4,93	5,13	5,02	4,83	5,00	4,91
Kalimantan Selatan	5,28	6,30	5,78	5,71	7,06	6,38	5,53	6,74	6,13
Kalimantan Timur	4,54	4,40	4,48	5,07	4,82	4,95	4,75	4,56	4,66
Sulawesi Utara	7,80	9,44	8,61	8,78	10,29	9,52	8,34	9,91	9,11
Sulawesi Tengah	5,82	6,48	6,15	6,97	7,26	7,11	6,70	7,07	6,88
Sulawesi Selatan	6,48	8,14	7,33	8,27	10,23	9,27	7,60	9,46	8,55
Sulawesi Tenggara	4,69	5,34	5,02	6,04	6,87	6,45	5,66	6,44	6,05
Gorontalo	5,81	7,33	6,58	6,14	7,04	6,58	6,03	7,14	6,58
Sulawesi Barat	5,87	7,04	6,46	5,84	6,55	6,19	5,85	6,66	6,25
Maluku	5,73	6,61	6,17	6,31	6,74	6,52	6,09	6,69	6,38
Maluku Utara	4,58	5,11	4,84	5,31	5,26	5,29	5,11	5,22	5,17
Papua Barat	3,55	3,33	3,44	3,92	3,46	3,70	3,80	3,42	3,62
Papua	3,86	3,57	3,73	2,19	1,76	1,99	2,63	2,22	2,43
Indonesia	6,91	7,93	7,41	8,05	9,26	8,65	7,48	8,59	8,03

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.3 Rasio Ketergantungan Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	7,89	9,50	8,70	9,27	11,13	10,20	8,86	10,66	9,76
Sumatera Utara	8,96	10,71	9,84	9,89	12,52	11,21	9,42	11,59	10,51
Sumatera Barat	11,01	13,49	12,26	13,47	16,84	15,16	12,48	15,48	13,99
Riau	6,37	6,91	6,63	7,20	7,59	7,39	6,87	7,32	7,09
Jambi	8,96	9,52	9,24	9,29	9,71	9,49	9,19	9,65	9,41
Sumatera Selatan	8,98	10,50	9,73	10,09	11,38	10,71	9,68	11,05	10,35
Bengkulu	7,52	8,03	7,77	10,07	10,70	10,38	9,26	9,82	9,53
Lampung	10,10	10,80	10,45	12,20	12,63	12,41	11,64	12,13	11,88
Kep. Bangka Belitung	9,56	10,93	10,23	8,93	10,07	9,47	9,24	10,50	9,84
Kep. Riau	4,85	4,99	4,92	10,27	10,15	10,21	5,72	5,77	5,75
DKI Jakarta	8,20	8,85	8,53	-	-	-	8,20	8,85	8,53
Jawa Barat	10,07	11,26	10,65	13,72	15,30	14,50	11,26	12,58	11,91
Jawa Tengah	15,30	17,61	16,47	17,60	20,05	18,83	16,53	18,90	17,73
DI Yogyakarta	15,20	18,75	16,97	23,72	28,82	26,32	17,91	22,06	19,99
Jawa Timur	14,17	16,69	15,44	16,89	20,06	18,50	15,57	18,43	17,02
Banten	6,45	6,98	6,71	8,99	10,29	9,62	7,22	7,97	7,59
Bali	12,14	14,10	13,10	18,31	21,15	19,73	14,45	16,80	15,61
Nusa Tenggara Barat	11,34	11,60	11,48	12,67	12,36	12,51	12,10	12,04	12,07
Nusa Tenggara Timur	9,98	11,00	10,49	13,88	14,35	14,12	13,02	13,64	13,34
Kalimantan Barat	10,37	10,56	10,47	9,95	10,31	10,12	10,07	10,39	10,23
Kalimantan Tengah	7,02	7,33	7,17	7,67	8,20	7,92	7,45	7,89	7,66
Kalimantan Selatan	8,05	9,62	8,82	9,03	11,27	10,13	8,61	10,55	9,56
Kalimantan Timur	6,83	6,72	6,78	7,84	7,64	7,75	7,21	7,06	7,14
Sulawesi Utara	11,84	14,60	13,19	13,92	16,68	15,24	12,97	15,70	14,30
Sulawesi Tengah	8,90	9,81	9,35	11,45	12,08	11,75	10,80	11,47	11,13
Sulawesi Selatan	10,20	12,69	11,48	13,97	16,98	15,53	12,50	15,33	13,96
Sulawesi Tenggara	7,63	8,53	8,09	10,61	11,93	11,27	9,73	10,91	10,32
Gorontalo	8,98	11,48	10,24	9,87	11,33	10,59	9,56	11,38	10,47
Sulawesi Barat	9,80	11,64	10,73	9,90	11,01	10,45	9,87	11,16	10,52
Maluku	9,25	10,52	9,89	11,27	11,91	11,59	10,44	11,33	10,89
Maluku Utara	7,30	8,00	7,65	9,16	9,01	9,08	8,62	8,71	8,66
Papua Barat	5,40	5,20	5,31	6,25	5,64	5,97	5,97	5,50	5,75
Papua	5,84	5,54	5,71	3,52	2,78	3,17	4,15	3,49	3,84
Indonesia	10,62	12,19	11,40	13,11	15,08	14,09	11,83	13,59	12,71

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.4.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014

Provinsi	Status Perkawinan				Perkotaan
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1,47	53,28	1,71	43,54	100,00
Sumatera Utara	1,02	56,36	1,13	41,49	100,00
Sumatera Barat	0,18	61,05	2,70	36,07	100,00
Riau	0,49	60,94	1,50	37,07	100,00
Jambi	0,55	63,77	2,02	33,67	100,00
Sumatera Selatan	1,00	57,94	1,20	39,86	100,00
Bengkulu	0,00	55,46	0,95	43,59	100,00
Lampung	0,10	59,68	1,35	38,88	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,96	61,75	1,78	34,51	100,00
Kep. Riau	0,35	67,38	2,21	30,06	100,00
DKI Jakarta	1,13	59,96	2,21	36,69	100,00
Jawa Barat	0,53	59,88	2,44	37,15	100,00
Jawa Tengah	0,69	58,48	1,70	39,13	100,00
DI Yogyakarta	2,64	58,46	2,43	36,48	100,00
Jawa Timur	1,15	55,78	2,01	41,06	100,00
Banten	0,15	58,67	2,32	38,85	100,00
Bali	3,69	64,75	1,94	29,62	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,44	55,83	5,89	36,84	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,28	61,97	0,64	34,11	100,00
Kalimantan Barat	2,15	57,34	1,77	38,74	100,00
Kalimantan Tengah	1,36	61,30	3,06	34,28	100,00
Kalimantan Selatan	2,14	53,18	2,62	42,05	100,00
Kalimantan Timur	0,78	60,40	3,59	35,23	100,00
Sulawesi Utara	2,45	57,48	1,55	38,53	100,00
Sulawesi Tengah	4,60	53,86	3,19	38,35	100,00
Sulawesi Selatan	3,73	53,22	3,34	39,70	100,00
Sulawesi Tenggara	1,35	54,58	4,31	39,76	100,00
Gorontalo	4,73	53,49	2,25	39,53	100,00
Sulawesi Barat	2,85	53,05	2,32	41,78	100,00
Maluku	4,48	57,81	1,53	36,18	100,00
Maluku Utara	2,67	48,64	3,61	45,07	100,00
Papua Barat	0,63	66,52	0,00	32,85	100,00
Papua	1,14	64,76	1,49	32,61	100,00
Indonesia	1,10	58,30	2,14	38,47	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.4.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014

Provinsi	Status Perkawinan				Perdesaan
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,63	54,65	1,98	42,74	100,00
Sumatera Utara	0,93	56,61	1,39	41,08	100,00
Sumatera Barat	0,29	57,43	4,85	37,43	100,00
Riau	1,37	59,02	2,03	37,58	100,00
Jambi	0,30	60,09	2,15	37,46	100,00
Sumatera Selatan	0,67	61,80	1,97	35,56	100,00
Bengkulu	0,09	63,99	2,35	33,57	100,00
Lampung	0,26	64,63	1,17	33,94	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,08	60,77	2,91	34,24	100,00
Kep. Riau	0,71	71,61	0,58	27,10	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,32	62,38	2,72	34,58	100,00
Jawa Tengah	0,45	61,25	1,94	36,36	100,00
DI Yogyakarta	2,19	59,53	2,07	36,21	100,00
Jawa Timur	0,76	56,08	2,34	40,83	100,00
Banten	0,00	53,70	3,88	42,42	100,00
Bali	3,71	63,35	1,29	31,65	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,50	58,73	4,30	36,47	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,89	57,53	1,27	38,31	100,00
Kalimantan Barat	0,62	62,22	1,10	36,05	100,00
Kalimantan Tengah	0,99	61,42	2,08	35,52	100,00
Kalimantan Selatan	1,46	52,23	3,27	43,05	100,00
Kalimantan Timur	1,35	62,43	4,33	31,90	100,00
Sulawesi Utara	1,89	62,77	1,22	34,13	100,00
Sulawesi Tengah	1,82	59,15	2,98	36,05	100,00
Sulawesi Selatan	2,66	53,21	3,54	40,60	100,00
Sulawesi Tenggara	1,32	58,29	4,58	35,81	100,00
Gorontalo	1,65	62,61	1,92	33,81	100,00
Sulawesi Barat	1,75	57,32	3,06	37,87	100,00
Maluku	2,63	59,13	1,68	36,55	100,00
Maluku Utara	1,29	59,71	0,69	38,31	100,00
Papua Barat	0,80	60,17	2,07	36,97	100,00
Papua	0,72	68,40	1,05	29,84	100,00
Indonesia	0,89	59,18	2,33	37,60	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.4.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014

Laki-laki

Provinsi	Status Perkawinan				Total
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,73	86,26	0,90	12,10	100,00
Sumatera Utara	0,38	81,00	0,71	17,91	100,00
Sumatera Barat	0,23	86,90	2,81	10,06	100,00
Riau	0,69	83,41	1,46	14,45	100,00
Jambi	0,44	84,86	1,30	13,39	100,00
Sumatera Selatan	0,39	84,08	1,16	14,36	100,00
Bengkulu	0,00	81,51	1,41	17,08	100,00
Lampung	0,25	84,55	0,64	14,56	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,43	80,68	2,62	15,26	100,00
Kep. Riau	0,27	87,01	0,81	11,91	100,00
DKI Jakarta	0,68	81,57	1,96	15,79	100,00
Jawa Barat	0,40	86,14	1,13	12,34	100,00
Jawa Tengah	0,38	84,23	0,57	14,82	100,00
DI Yogyakarta	1,86	80,88	0,54	16,72	100,00
Jawa Timur	0,79	82,97	1,14	15,10	100,00
Banten	0,04	82,76	1,94	15,27	100,00
Bali	3,18	81,59	1,05	14,17	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,89	80,45	2,04	16,62	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,57	79,46	0,91	18,06	100,00
Kalimantan Barat	0,99	80,70	1,04	17,26	100,00
Kalimantan Tengah	0,44	83,60	1,70	14,26	100,00
Kalimantan Selatan	0,81	83,38	2,13	13,69	100,00
Kalimantan Timur	1,09	81,30	2,90	14,72	100,00
Sulawesi Utara	1,93	78,62	1,11	18,33	100,00
Sulawesi Tengah	2,30	78,68	2,30	16,72	100,00
Sulawesi Selatan	1,28	78,18	2,25	18,30	100,00
Sulawesi Tenggara	1,24	82,61	1,51	14,64	100,00
Gorontalo	1,11	83,30	1,32	14,27	100,00
Sulawesi Barat	1,27	81,55	2,25	14,93	100,00
Maluku	1,98	73,07	1,37	23,58	100,00
Maluku Utara	1,14	75,27	0,53	23,06	100,00
Papua Barat	0,50	78,33	1,61	19,55	100,00
Papua	0,82	81,27	0,74	17,17	100,00
Indonesia	0,70	83,28	1,18	14,84	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.4.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014

Perempuan

Provinsi	Status Perkawinan				Total
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,94	28,02	2,74	68,30	100,00
Sumatera Utara	1,45	36,73	1,71	60,11	100,00
Sumatera Barat	0,27	36,27	5,10	58,35	100,00
Riau	1,40	35,88	2,21	60,52	100,00
Jambi	0,30	37,56	2,92	59,21	100,00
Sumatera Selatan	1,15	38,70	2,20	57,96	100,00
Bengkulu	0,13	42,38	2,54	54,96	100,00
Lampung	0,19	42,05	1,79	55,97	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,59	42,59	2,04	52,78	100,00
Kep. Riau	0,64	49,39	2,74	47,24	100,00
DKI Jakarta	1,56	39,75	2,45	56,25	100,00
Jawa Barat	0,49	37,51	3,86	58,13	100,00
Jawa Tengah	0,70	39,35	2,91	57,04	100,00
DI Yogyakarta	2,92	41,17	3,67	52,23	100,00
Jawa Timur	1,05	33,71	3,06	62,18	100,00
Banten	0,15	32,21	3,84	63,80	100,00
Bali	4,15	48,72	2,14	45,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,88	37,10	7,54	54,48	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,21	39,03	1,40	55,35	100,00
Kalimantan Barat	1,24	40,49	1,59	56,68	100,00
Kalimantan Tengah	1,81	38,00	3,13	57,06	100,00
Kalimantan Selatan	2,50	26,75	3,75	67,00	100,00
Kalimantan Timur	0,93	38,05	5,03	55,99	100,00
Sulawesi Utara	2,29	44,63	1,57	51,50	100,00
Sulawesi Tengah	2,56	37,49	3,74	56,22	100,00
Sulawesi Selatan	4,32	34,09	4,42	57,18	100,00
Sulawesi Tenggara	1,40	35,09	7,19	56,32	100,00
Gorontalo	4,06	39,30	2,64	53,99	100,00
Sulawesi Barat	2,67	34,04	3,44	59,85	100,00
Maluku	4,56	45,28	1,87	48,29	100,00
Maluku Utara	2,16	38,04	2,39	57,42	100,00
Papua Barat	1,06	41,99	1,22	55,73	100,00
Papua	0,97	47,99	1,87	49,18	100,00
Indonesia	1,23	37,23	3,18	58,36	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.4.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Status Perkawinan				Total
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,84	54,30	1,91	42,95	100,00
Sumatera Utara	0,97	56,49	1,27	41,27	100,00
Sumatera Barat	0,25	58,72	4,09	36,95	100,00
Riau	1,04	59,74	1,83	37,39	100,00
Jambi	0,37	61,20	2,11	36,31	100,00
Sumatera Selatan	0,78	60,45	1,70	37,06	100,00
Bengkulu	0,06	61,74	1,98	36,21	100,00
Lampung	0,22	63,47	1,21	35,10	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,02	61,27	2,33	34,38	100,00
Kep. Riau	0,45	68,56	1,76	29,24	100,00
DKI Jakarta	1,13	59,96	2,21	36,69	100,00
Jawa Barat	0,45	60,88	2,55	36,13	100,00
Jawa Tengah	0,55	60,05	1,83	37,56	100,00
DI Yogyakarta	2,45	58,91	2,27	36,37	100,00
Jawa Timur	0,93	55,95	2,19	40,93	100,00
Banten	0,09	56,77	2,92	40,22	100,00
Bali	3,70	64,08	1,63	30,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,88	57,55	4,95	36,62	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,95	58,28	1,17	37,60	100,00
Kalimantan Barat	1,11	60,66	1,32	36,91	100,00
Kalimantan Tengah	1,11	61,38	2,40	35,12	100,00
Kalimantan Selatan	1,73	52,61	3,01	42,65	100,00
Kalimantan Timur	1,01	61,22	3,89	33,88	100,00
Sulawesi Utara	2,12	60,51	1,36	36,00	100,00
Sulawesi Tengah	2,43	58,00	3,02	36,56	100,00
Sulawesi Selatan	3,00	53,21	3,47	40,31	100,00
Sulawesi Tenggara	1,33	57,43	4,52	36,72	100,00
Gorontalo	2,71	59,48	2,04	35,77	100,00
Sulawesi Barat	2,01	56,31	2,88	38,79	100,00
Maluku	3,32	58,64	1,63	36,41	100,00
Maluku Utara	1,64	56,85	1,45	40,06	100,00
Papua Barat	0,75	62,10	1,44	35,72	100,00
Papua	0,88	66,97	1,22	30,93	100,00
Indonesia	0,99	58,77	2,24	38,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.5.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Anggota Rumah Tangga, 2014

Perkotaan

Provinsi	Status Anggota Rumah Tangga				Total
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	72,87	13,57	11,95	1,61	100,00
Sumatera Utara	64,58	18,40	14,94	2,08	100,00
Sumatera Barat	60,13	19,38	17,44	3,06	100,00
Riau	63,02	15,54	18,90	2,54	100,00
Jambi	63,14	21,21	12,83	2,81	100,00
Sumatera Selatan	57,82	17,71	22,42	2,04	100,00
Bengkulu	61,56	17,99	18,54	1,91	100,00
Lampung	58,93	16,83	22,89	1,35	100,00
Kep. Bangka Belitung	65,06	20,51	11,45	2,98	100,00
Kep. Riau	57,33	21,29	19,40	1,97	100,00
DKI Jakarta	67,39	19,53	10,27	2,81	100,00
Jawa Barat	67,02	18,35	12,85	1,78	100,00
Jawa Tengah	60,93	18,58	18,07	2,42	100,00
DI Yogyakarta	61,28	22,11	13,25	3,35	100,00
Jawa Timur	59,92	17,14	19,48	3,46	100,00
Banten	62,83	16,30	19,35	1,52	100,00
Bali	37,76	16,76	39,23	6,24	100,00
Nusa Tenggara Barat	66,89	16,20	14,97	1,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	62,00	18,88	16,37	2,75	100,00
Kalimantan Barat	59,56	17,24	20,60	2,59	100,00
Kalimantan Tengah	63,50	17,87	16,04	2,58	100,00
Kalimantan Selatan	64,91	14,49	16,25	4,34	100,00
Kalimantan Timur	60,80	15,63	21,30	2,27	100,00
Sulawesi Utara	55,63	19,66	21,08	3,63	100,00
Sulawesi Tengah	55,90	14,61	25,15	4,34	100,00
Sulawesi Selatan	62,32	17,46	15,79	4,43	100,00
Sulawesi Tenggara	68,17	14,44	14,19	3,20	100,00
Gorontalo	55,57	18,73	19,96	5,74	100,00
Sulawesi Barat	60,10	14,30	21,10	4,50	100,00
Maluku	59,07	22,59	13,00	5,35	100,00
Maluku Utara	62,14	14,52	19,15	4,20	100,00
Papua Barat	65,02	19,56	13,43	1,99	100,00
Papua	68,27	15,58	14,96	1,19	100,00
Indonesia	62,37	18,02	16,94	2,67	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.5.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Anggota Rumah Tangga, 2014

Provinsi	Status Anggota Rumah Tangga				Total
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Aceh	75,88	14,70	8,52	0,90	100,00
Sumatera Utara	69,08	18,88	10,85	1,18	100,00
Sumatera Barat	61,01	17,64	17,71	3,63	100,00
Riau	65,38	16,50	15,61	2,51	100,00
Jambi	63,73	15,88	18,93	1,46	100,00
Sumatera Selatan	59,90	18,90	19,59	1,61	100,00
Bengkulu	60,45	20,75	17,27	1,53	100,00
Lampung	60,84	19,51	18,25	1,41	100,00
Kep. Bangka Belitung	65,37	18,44	13,19	3,01	100,00
Kep. Riau	58,69	23,98	13,74	3,60	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	68,62	18,97	11,05	1,37	100,00
Jawa Tengah	58,07	19,32	20,01	2,60	100,00
DI Yogyakarta	53,61	20,52	23,51	2,36	100,00
Jawa Timur	58,56	16,48	21,10	3,85	100,00
Banten	67,47	14,21	16,88	1,44	100,00
Bali	44,43	18,71	32,10	4,76	100,00
Nusa Tenggara Barat	62,80	18,96	15,75	2,48	100,00
Nusa Tenggara Timur	57,14	17,34	20,88	4,63	100,00
Kalimantan Barat	58,02	18,21	22,53	1,23	100,00
Kalimantan Tengah	62,69	16,56	18,10	2,66	100,00
Kalimantan Selatan	67,91	13,02	16,18	2,89	100,00
Kalimantan Timur	71,14	17,19	8,88	2,78	100,00
Sulawesi Utara	57,76	22,35	16,95	2,94	100,00
Sulawesi Tengah	59,17	17,90	19,58	3,35	100,00
Sulawesi Selatan	58,36	17,51	19,78	4,35	100,00
Sulawesi Tenggara	62,59	17,58	17,83	2,00	100,00
Gorontalo	55,68	21,02	20,40	2,90	100,00
Sulawesi Barat	59,28	17,07	20,52	3,13	100,00
Maluku	57,02	20,60	19,01	3,37	100,00
Maluku Utara	58,44	17,30	19,78	4,48	100,00
Papua Barat	64,31	14,99	16,42	4,27	100,00
Papua	65,91	21,74	11,57	0,78	100,00
Indonesia	61,11	18,04	18,16	2,69	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.5.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Anggota Rumah Tangga, 2014

Laki-laki

Provinsi	Status Anggota Rumah Tangga				Total
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	96,02	0,32	3,26	0,41	100,00
Sumatera Utara	93,14	0,11	6,23	0,52	100,00
Sumatera Barat	89,42	0,29	7,52	2,78	100,00
Riau	91,50	0,08	6,83	1,59	100,00
Jambi	92,78	0,06	5,31	1,85	100,00
Sumatera Selatan	89,83	0,46	8,62	1,08	100,00
Bengkulu	88,55	0,33	9,77	1,35	100,00
Lampung	91,14	0,13	7,70	1,04	100,00
Kep. Bangka Belitung	91,34	0,00	7,18	1,48	100,00
Kep. Riau	86,94	0,18	10,31	2,57	100,00
DKI Jakarta	94,94	0,06	3,43	1,58	100,00
Jawa Barat	94,35	0,13	4,84	0,68	100,00
Jawa Tengah	88,77	0,30	10,06	0,87	100,00
DI Yogyakarta	89,59	0,23	8,79	1,38	100,00
Jawa Timur	89,49	0,46	8,30	1,76	100,00
Banten	93,45	0,18	5,47	0,90	100,00
Bali	70,03	0,00	26,15	3,82	100,00
Nusa Tenggara Barat	88,21	0,04	9,93	1,82	100,00
Nusa Tenggara Timur	85,38	0,33	11,84	2,46	100,00
Kalimantan Barat	87,85	0,03	11,19	0,93	100,00
Kalimantan Tengah	91,58	0,50	6,52	1,40	100,00
Kalimantan Selatan	90,84	0,87	7,04	1,25	100,00
Kalimantan Timur	91,26	0,17	7,76	0,81	100,00
Sulawesi Utara	85,45	0,56	10,94	3,05	100,00
Sulawesi Tengah	86,41	0,26	10,74	2,58	100,00
Sulawesi Selatan	88,56	0,41	8,67	2,36	100,00
Sulawesi Tenggara	90,80	0,00	7,07	2,13	100,00
Gorontalo	87,38	0,69	10,03	1,89	100,00
Sulawesi Barat	88,78	0,37	10,10	0,75	100,00
Maluku	87,30	0,60	10,04	2,06	100,00
Maluku Utara	85,49	0,00	12,52	1,98	100,00
Papua Barat	88,15	0,14	7,99	3,72	100,00
Papua	92,97	0,00	6,79	0,24	100,00
Indonesia	90,27	0,27	8,12	1,34	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.5.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Anggota Rumah Tangga, 2014

Provinsi	Status Anggota Rumah Tangga				Total
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/ Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Aceh	57,90	25,99	14,47	1,64	100,00
Sumatera Utara	45,78	33,59	18,13	2,49	100,00
Sumatera Barat	37,83	32,57	25,66	3,94	100,00
Riau	37,26	32,34	26,94	3,46	100,00
Jambi	34,34	34,91	28,85	1,90	100,00
Sumatera Selatan	30,94	35,08	31,59	2,39	100,00
Bengkulu	33,51	39,31	25,28	1,91	100,00
Lampung	29,16	37,91	31,17	1,76	100,00
Kep. Bangka Belitung	40,05	38,28	17,22	4,44	100,00
Kep. Riau	27,35	44,74	25,63	2,28	100,00
DKI Jakarta	41,63	37,73	16,67	3,96	100,00
Jawa Barat	42,97	35,66	18,88	2,49	100,00
Jawa Tengah	34,11	35,00	26,96	3,93	100,00
DI Yogyakarta	32,52	38,55	24,75	4,18	100,00
Jawa Timur	34,20	30,19	30,34	5,27	100,00
Banten	37,35	29,97	30,62	2,05	100,00
Bali	15,44	33,22	44,31	7,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,28	33,72	20,35	2,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	33,07	33,29	27,64	6,00	100,00
Kalimantan Barat	28,99	35,89	32,70	2,42	100,00
Kalimantan Tengah	32,82	34,33	28,91	3,93	100,00
Kalimantan Selatan	46,44	24,32	23,92	5,33	100,00
Kalimantan Timur	34,69	34,83	26,07	4,41	100,00
Sulawesi Utara	31,76	39,32	25,53	3,40	100,00
Sulawesi Tengah	30,74	33,95	30,77	4,54	100,00
Sulawesi Selatan	37,44	30,58	26,06	5,92	100,00
Sulawesi Tenggara	40,01	31,80	25,78	2,41	100,00
Gorontalo	28,75	36,79	28,91	5,55	100,00
Sulawesi Barat	33,62	30,57	29,97	5,83	100,00
Maluku	30,46	40,55	22,98	6,01	100,00
Maluku Utara	32,75	33,51	26,86	6,88	100,00
Papua Barat	35,27	36,50	24,83	3,40	100,00
Papua	32,15	44,96	21,02	1,87	100,00
Indonesia	36,57	33,65	25,92	3,86	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.5.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Anggota Rumah Tangga, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Status Anggota Rumah Tangga				Total
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/ Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	75,10	14,40	9,41	1,09	100,00
Sumatera Utara	66,92	18,65	12,82	1,61	100,00
Sumatera Barat	60,70	18,26	17,61	3,43	100,00
Riau	64,49	16,14	16,85	2,52	100,00
Jambi	63,55	17,49	17,08	1,87	100,00
Sumatera Selatan	59,17	18,48	20,58	1,76	100,00
Bengkulu	60,74	20,02	17,60	1,63	100,00
Lampung	60,39	18,87	19,34	1,39	100,00
Kep. Bangka Belitung	65,21	19,50	12,30	2,99	100,00
Kep. Riau	57,71	22,04	17,82	2,43	100,00
DKI Jakarta	67,39	19,53	10,27	2,81	100,00
Jawa Barat	67,65	18,59	12,13	1,62	100,00
Jawa Tengah	59,31	19,00	19,17	2,52	100,00
DI Yogyakarta	58,02	21,43	17,62	2,93	100,00
Jawa Timur	59,16	16,77	20,39	3,68	100,00
Banten	64,61	15,50	18,40	1,49	100,00
Bali	40,95	17,69	35,82	5,53	100,00
Nusa Tenggara Barat	64,47	17,84	15,44	2,26	100,00
Nusa Tenggara Timur	57,96	17,60	20,12	4,31	100,00
Kalimantan Barat	58,51	17,90	21,91	1,67	100,00
Kalimantan Tengah	62,95	16,98	17,43	2,63	100,00
Kalimantan Selatan	66,71	13,61	16,21	3,47	100,00
Kalimantan Timur	65,00	16,26	16,26	2,48	100,00
Sulawesi Utara	56,85	21,20	18,71	3,23	100,00
Sulawesi Tengah	58,46	17,18	20,80	3,57	100,00
Sulawesi Selatan	59,62	17,49	18,52	4,38	100,00
Sulawesi Tenggara	63,89	16,85	16,98	2,28	100,00
Gorontalo	55,64	20,23	20,25	3,87	100,00
Sulawesi Barat	59,48	16,42	20,66	3,45	100,00
Maluku	57,78	21,35	16,76	4,11	100,00
Maluku Utara	59,39	16,58	19,62	4,41	100,00
Papua Barat	64,53	16,38	15,51	3,58	100,00
Papua	66,83	19,32	12,91	0,94	100,00
Indonesia	61,69	18,03	17,59	2,68	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.6.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2014

Provinsi	Status Tinggal Bersama					Total
	Tinggal sendiri	Bersama pasangan	Bersama keluarga	Tiga generasi	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Aceh	13,58	13,11	38,76	31,36	3,20	100,00
Sumatera Utara	8,20	12,48	33,02	42,97	3,33	100,00
Sumatera Barat	6,10	13,63	33,90	43,43	2,94	100,00
Riau	5,22	11,11	36,61	43,73	3,33	100,00
Jambi	4,01	16,34	35,36	40,54	3,75	100,00
Sumatera Selatan	4,39	9,98	33,46	49,27	2,91	100,00
Bengkulu	3,41	13,20	34,48	46,34	2,58	100,00
Lampung	5,51	10,55	29,82	52,13	1,99	100,00
Kep. Bangka Belitung	10,47	14,49	36,07	35,36	3,61	100,00
Kep. Riau	4,27	12,32	37,70	41,51	4,20	100,00
DKI Jakarta	5,64	8,16	42,81	36,63	6,76	100,00
Jawa Barat	10,65	19,87	30,55	36,09	2,85	100,00
Jawa Tengah	10,24	18,53	25,32	42,61	3,29	100,00
DI Yogyakarta	8,88	23,80	27,16	34,06	6,10	100,00
Jawa Timur	9,22	16,33	25,15	44,44	4,86	100,00
Banten	3,73	10,33	36,92	46,86	2,17	100,00
Bali	4,00	13,91	18,59	56,32	7,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,28	17,84	27,94	38,06	3,89	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,43	5,89	25,23	59,71	5,73	100,00
Kalimantan Barat	4,83	7,41	29,73	54,27	3,76	100,00
Kalimantan Tengah	8,88	12,08	34,40	40,07	4,57	100,00
Kalimantan Selatan	9,44	16,35	32,94	35,02	6,26	100,00
Kalimantan Timur	6,18	10,78	38,44	41,50	3,10	100,00
Sulawesi Utara	5,78	14,53	28,08	46,82	4,79	100,00
Sulawesi Tengah	3,58	6,28	23,33	59,27	7,54	100,00
Sulawesi Selatan	5,71	9,78	31,75	45,08	7,68	100,00
Sulawesi Tenggara	6,58	7,45	35,92	44,90	5,14	100,00
Gorontalo	4,54	13,99	30,07	43,85	7,55	100,00
Sulawesi Barat	3,06	7,26	29,47	52,88	7,33	100,00
Maluku	2,60	5,98	20,93	62,97	7,53	100,00
Maluku Utara	4,34	9,14	25,42	54,99	6,10	100,00
Papua Barat	1,41	4,28	37,53	52,08	4,70	100,00
Papua	4,88	11,73	41,13	40,09	2,16	100,00
Indonesia	8,51	15,79	29,70	41,92	4,08	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.6.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2014

Perdesaan

Provinsi	Status Tinggal Bersama					Total
	Tinggal sendiri	Bersama pasangan	Bersama keluarga	Tiga generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	14,68	12,88	43,22	27,58	1,64	100,00
Sumatera Utara	14,81	19,82	30,75	33,03	1,60	100,00
Sumatera Barat	10,00	16,56	25,92	43,63	3,90	100,00
Riau	7,88	13,09	37,00	38,98	3,04	100,00
Jambi	8,58	15,08	31,74	42,82	1,78	100,00
Sumatera Selatan	7,66	19,14	28,73	42,28	2,19	100,00
Bengkulu	9,56	20,14	27,23	41,14	1,93	100,00
Lampung	8,03	18,61	28,61	43,04	1,70	100,00
Kep. Bangka Belitung	10,04	22,13	31,49	33,05	3,30	100,00
Kep. Riau	7,55	9,64	50,15	27,39	5,29	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	15,66	27,79	25,18	29,30	2,07	100,00
Jawa Tengah	9,89	21,04	19,96	45,94	3,18	100,00
DI Yogyakarta	12,79	23,76	17,59	43,25	2,61	100,00
Jawa Timur	10,83	18,74	18,94	46,86	4,63	100,00
Banten	11,57	8,66	27,60	50,03	2,14	100,00
Bali	7,35	18,83	18,60	49,25	5,97	100,00
Nusa Tenggara Barat	11,47	18,32	24,12	42,80	3,29	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,35	9,44	23,79	53,71	6,71	100,00
Kalimantan Barat	6,19	13,47	32,50	46,41	1,43	100,00
Kalimantan Tengah	10,75	19,21	35,12	31,68	3,23	100,00
Kalimantan Selatan	14,80	18,96	27,21	34,77	4,26	100,00
Kalimantan Timur	10,73	15,41	39,01	30,42	4,43	100,00
Sulawesi Utara	6,53	18,11	23,77	47,05	4,55	100,00
Sulawesi Tengah	7,64	13,94	27,85	46,29	4,29	100,00
Sulawesi Selatan	8,12	10,87	25,84	49,72	5,46	100,00
Sulawesi Tenggara	10,40	13,63	25,70	46,80	3,48	100,00
Gorontalo	5,04	17,96	26,16	46,54	4,30	100,00
Sulawesi Barat	5,43	8,51	33,00	47,29	5,77	100,00
Maluku	5,58	9,95	25,77	53,48	5,23	100,00
Maluku Utara	4,30	8,26	23,95	58,03	5,46	100,00
Papua Barat	5,66	11,05	38,15	39,72	5,41	100,00
Papua	6,39	21,22	41,99	25,21	5,19	100,00
Indonesia	10,65	18,94	24,29	42,66	3,46	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.6.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2014

Laki-laki

Provinsi	Status Tinggal Bersama					Total
	Tinggal sendiri	Bersama pasangan	Bersama keluarga	Tiga generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4,07	17,24	55,70	21,79	1,21	100,00
Sumatera Utara	5,05	21,51	38,78	33,18	1,47	100,00
Sumatera Barat	2,67	20,65	36,51	37,13	3,05	100,00
Riau	3,35	16,30	45,44	32,41	2,50	100,00
Jambi	3,89	20,29	40,04	33,57	2,21	100,00
Sumatera Selatan	3,33	20,56	36,90	37,51	1,71	100,00
Bengkulu	3,12	22,59	34,63	37,95	1,72	100,00
Lampung	3,80	20,27	35,87	38,62	1,45	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,84	21,89	39,60	30,26	2,42	100,00
Kep. Riau	2,76	14,95	48,15	29,74	4,39	100,00
DKI Jakarta	5,07	10,19	47,45	31,37	5,92	100,00
Jawa Barat	3,90	29,07	36,54	29,02	1,47	100,00
Jawa Tengah	3,91	26,10	27,33	41,10	1,56	100,00
DI Yogyakarta	6,03	30,12	27,44	33,80	2,61	100,00
Jawa Timur	4,21	24,74	26,37	42,02	2,66	100,00
Banten	3,09	12,30	44,10	38,97	1,54	100,00
Bali	3,26	19,92	21,61	50,12	5,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,91	23,55	32,18	36,78	2,59	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,05	11,23	29,76	51,11	4,85	100,00
Kalimantan Barat	2,99	14,28	37,68	43,55	1,50	100,00
Kalimantan Tengah	5,74	21,43	41,73	28,11	3,00	100,00
Kalimantan Selatan	5,09	27,42	35,64	28,84	3,01	100,00
Kalimantan Timur	6,10	15,07	45,55	31,04	2,25	100,00
Sulawesi Utara	3,70	20,57	28,42	43,04	4,27	100,00
Sulawesi Tengah	4,51	16,05	31,81	44,20	3,43	100,00
Sulawesi Selatan	3,86	14,75	33,23	44,51	3,65	100,00
Sulawesi Tenggara	4,08	16,13	34,37	42,24	3,18	100,00
Gorontalo	1,48	22,19	34,17	39,70	2,46	100,00
Sulawesi Barat	2,59	11,00	37,78	45,17	3,46	100,00
Maluku	4,72	9,74	27,42	54,60	3,52	100,00
Maluku Utara	2,79	10,64	27,08	56,49	3,01	100,00
Papua Barat	3,72	12,53	42,14	36,93	4,68	100,00
Papua	5,09	19,95	49,20	23,05	2,71	100,00
Indonesia	4,04	22,87	33,08	37,68	2,33	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.6.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2014

Perempuan

Provinsi	Status Tinggal Bersama					Total
	Tinggal sendiri	Bersama pasangan	Bersama keluarga	Tiga generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	22,88	9,40	30,86	34,12	2,73	100,00
Sumatera Utara	16,95	12,09	26,24	41,53	3,20	100,00
Sumatera Barat	13,35	11,43	22,57	48,68	3,96	100,00
Riau	10,44	8,36	28,20	49,19	3,81	100,00
Jambi	10,50	10,63	25,64	50,69	2,54	100,00
Sumatera Selatan	9,44	11,69	24,38	51,37	3,12	100,00
Bengkulu	12,66	14,12	23,77	46,98	2,47	100,00
Lampung	11,14	13,11	21,82	51,84	2,10	100,00
Kep. Bangka Belitung	14,52	14,66	28,30	38,06	4,46	100,00
Kep. Riau	7,70	8,06	33,92	45,71	4,61	100,00
DKI Jakarta	6,17	6,26	38,47	41,55	7,55	100,00
Jawa Barat	20,71	17,40	20,91	37,44	3,53	100,00
Jawa Tengah	15,29	14,68	17,97	47,40	4,65	100,00
DI Yogyakarta	14,18	18,67	19,58	41,34	6,23	100,00
Jawa Timur	14,99	11,87	17,80	48,91	6,43	100,00
Banten	10,17	7,22	23,20	56,67	2,74	100,00
Bali	7,65	13,05	15,95	55,41	7,94	100,00
Nusa Tenggara Barat	17,95	13,28	19,88	44,52	4,38	100,00
Nusa Tenggara Timur	8,41	6,67	18,84	58,01	8,08	100,00
Kalimantan Barat	8,54	8,76	25,51	54,34	2,86	100,00
Kalimantan Tengah	14,78	12,13	27,69	41,03	4,37	100,00
Kalimantan Selatan	19,03	9,93	24,33	39,94	6,77	100,00
Kalimantan Timur	10,25	9,88	30,73	43,89	5,24	100,00
Sulawesi Utara	8,41	13,08	23,14	50,38	4,99	100,00
Sulawesi Tengah	8,98	8,51	21,96	54,01	6,55	100,00
Sulawesi Selatan	10,03	7,29	23,49	51,11	8,09	100,00
Sulawesi Tenggara	14,33	8,70	22,49	50,01	4,47	100,00
Gorontalo	7,74	11,86	21,85	50,63	7,92	100,00
Sulawesi Barat	6,88	5,76	27,21	51,65	8,50	100,00
Maluku	4,23	7,27	20,75	59,28	8,47	100,00
Maluku Utara	5,87	6,30	21,52	58,02	8,30	100,00
Papua Barat	5,17	4,63	32,78	51,58	5,84	100,00
Papua	6,73	14,23	31,64	41,69	5,71	100,00
Indonesia	14,60	12,75	21,27	46,39	4,99	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 1.6.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Status Tinggal Bersama					Total
	Tinggal sendiri	Bersama pasangan	Bersama keluarga	Tiga generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	14,40	12,94	42,07	28,56	2,04	100,00
Sumatera Utara	11,64	16,29	31,84	37,80	2,43	100,00
Sumatera Barat	8,62	15,52	28,75	43,56	3,56	100,00
Riau	6,88	12,35	36,85	40,77	3,15	100,00
Jambi	7,20	15,46	32,83	42,13	2,38	100,00
Sumatera Selatan	6,51	15,94	30,38	44,72	2,44	100,00
Bengkulu	7,94	18,31	29,14	42,51	2,10	100,00
Lampung	7,44	16,71	28,90	45,18	1,77	100,00
Kep. Bangka Belitung	10,26	18,20	33,84	34,24	3,46	100,00
Kep. Riau	5,18	11,57	41,17	37,58	4,50	100,00
DKI Jakarta	5,64	8,16	42,81	36,63	6,76	100,00
Jawa Barat	12,63	23,01	28,42	33,40	2,54	100,00
Jawa Tengah	10,04	19,95	22,29	44,49	3,23	100,00
DI Yogyakarta	10,54	23,78	23,09	37,97	4,61	100,00
Jawa Timur	10,12	17,68	21,66	45,80	4,73	100,00
Banten	6,73	9,69	33,35	48,07	2,16	100,00
Bali	5,60	16,26	18,60	52,94	6,61	100,00
Nusa Tenggara Barat	11,80	18,12	25,68	40,87	3,53	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,86	8,84	24,04	54,72	6,54	100,00
Kalimantan Barat	5,76	11,53	31,61	48,93	2,18	100,00
Kalimantan Tengah	10,15	16,89	34,89	34,40	3,67	100,00
Kalimantan Selatan	12,66	17,92	29,49	34,87	5,05	100,00
Kalimantan Timur	8,03	12,66	38,67	37,00	3,64	100,00
Sulawesi Utara	6,21	16,58	25,61	46,95	4,65	100,00
Sulawesi Tengah	6,75	12,26	26,86	49,13	5,00	100,00
Sulawesi Selatan	7,35	10,52	27,71	48,25	6,16	100,00
Sulawesi Tenggara	9,51	12,19	28,07	46,36	3,86	100,00
Gorontalo	4,87	16,60	27,50	45,62	5,41	100,00
Sulawesi Barat	4,87	8,22	32,17	48,61	6,14	100,00
Maluku	4,46	8,46	23,96	57,03	6,09	100,00
Maluku Utara	4,31	8,49	24,33	57,24	5,63	100,00
Papua Barat	4,37	9,00	37,96	43,48	5,20	100,00
Papua	5,80	17,49	41,65	31,06	4,00	100,00
Indonesia	9,66	17,48	26,80	42,32	3,75	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.1.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2014

Perkotaan

Provinsi	Kemampuan membaca dan menulis				Total
	Huruf latin	Huruf lainnya	Huruf latin dan lainnya	Tidak dapat membaca	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	54,59	7,49	23,90	14,02	100,00
Sumatera Utara	59,47	4,84	33,01	2,68	100,00
Sumatera Barat	64,54	5,68	28,29	1,50	100,00
Riau	63,79	5,02	27,30	3,88	100,00
Jambi	41,10	9,03	45,26	4,60	100,00
Sumatera Selatan	48,51	4,25	40,31	6,93	100,00
Bengkulu	61,37	8,85	27,24	2,54	100,00
Lampung	52,15	11,29	24,18	12,38	100,00
Kep. Bangka Belitung	39,61	8,89	45,35	6,15	100,00
Kep. Riau	34,37	9,89	49,51	6,22	100,00
DKI Jakarta	44,18	6,73	47,20	1,89	100,00
Jawa Barat	29,93	13,00	50,69	6,39	100,00
Jawa Tengah	33,39	13,29	28,82	24,49	100,00
DI Yogyakarta	34,12	13,47	28,96	23,45	100,00
Jawa Timur	26,94	14,61	30,49	27,96	100,00
Banten	22,85	14,65	40,67	21,83	100,00
Bali	27,01	16,01	35,08	21,90	100,00
Nusa Tenggara Barat	26,41	14,68	15,30	43,61	100,00
Nusa Tenggara Timur	58,20	4,68	7,65	29,48	100,00
Kalimantan Barat	45,70	12,60	11,29	30,41	100,00
Kalimantan Tengah	47,40	5,60	39,45	7,55	100,00
Kalimantan Selatan	27,74	8,13	57,86	6,27	100,00
Kalimantan Timur	44,05	5,85	46,24	3,86	100,00
Sulawesi Utara	88,61	2,04	8,14	1,21	100,00
Sulawesi Tengah	43,90	7,65	41,76	6,69	100,00
Sulawesi Selatan	33,42	9,03	28,75	28,80	100,00
Sulawesi Tenggara	62,73	7,40	18,47	11,40	100,00
Gorontalo	53,64	8,40	35,60	2,36	100,00
Sulawesi Barat	40,51	20,25	14,85	24,40	100,00
Maluku	79,54	0,07	17,42	2,96	100,00
Maluku Utara	52,08	2,22	40,70	5,00	100,00
Papua Barat	77,58	4,05	17,18	1,19	100,00
Papua	69,85	1,98	18,69	9,48	100,00
Indonesia	35,89	11,67	36,15	16,30	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.1.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2014

Provinsi	Kemampuan membaca dan menulis				Total
	Huruf latin	Huruf lainnya	Huruf latin dan lainnya	Tidak dapat membaca	
	(2)	(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	53,11	14,56	13,83	18,50	100,00
Sumatera Utara	64,44	7,91	19,82	7,83	100,00
Sumatera Barat	60,51	10,91	21,56	7,02	100,00
Riau	49,79	19,63	25,27	5,31	100,00
Jambi	27,27	16,29	44,03	12,40	100,00
Sumatera Selatan	54,65	10,56	25,85	8,94	100,00
Bengkulu	57,00	11,48	14,62	16,90	100,00
Lampung	50,37	12,46	13,48	23,68	100,00
Kep. Bangka Belitung	35,33	15,07	40,99	8,62	100,00
Kep. Riau	51,59	12,48	21,74	14,20	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	31,79	16,88	42,41	8,91	100,00
Jawa Tengah	31,43	16,63	20,17	31,77	100,00
DI Yogyakarta	28,48	19,62	19,78	32,12	100,00
Jawa Timur	22,34	23,31	17,53	36,81	100,00
Banten	12,78	31,38	43,47	12,37	100,00
Bali	23,20	11,78	25,24	39,78	100,00
Nusa Tenggara Barat	28,61	10,63	5,66	55,10	100,00
Nusa Tenggara Timur	47,10	16,71	1,36	34,83	100,00
Kalimantan Barat	37,11	17,40	5,55	39,94	100,00
Kalimantan Tengah	49,50	14,39	30,80	5,30	100,00
Kalimantan Selatan	25,53	18,00	46,61	9,86	100,00
Kalimantan Timur	53,88	10,62	20,13	15,36	100,00
Sulawesi Utara	91,13	3,57	4,17	1,12	100,00
Sulawesi Tengah	57,32	9,41	22,47	10,80	100,00
Sulawesi Selatan	23,41	23,67	16,33	36,60	100,00
Sulawesi Tenggara	52,83	7,47	7,30	32,39	100,00
Gorontalo	60,11	8,82	26,19	4,88	100,00
Sulawesi Barat	36,65	28,22	4,64	30,49	100,00
Maluku	69,37	7,67	19,63	3,33	100,00
Maluku Utara	56,97	8,95	22,89	11,19	100,00
Papua Barat	60,84	16,29	10,39	12,48	100,00
Papua	56,16	7,84	5,33	30,67	100,00
Indonesia	35,74	17,20	21,95	25,11	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.1.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2014

Laki-laki

Provinsi	Kemampuan membaca dan menulis				Total
	Huruf latin	Huruf lainnya	Huruf latin dan lainnya	Tidak dapat membaca	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	61,38	4,33	20,28	14,02	100,00
Sumatera Utara	65,61	2,42	29,42	2,55	100,00
Sumatera Barat	66,41	3,94	25,68	3,98	100,00
Riau	61,46	7,17	29,43	1,94	100,00
Jambi	33,21	4,56	54,48	7,75	100,00
Sumatera Selatan	55,96	3,72	36,16	4,16	100,00
Bengkulu	65,53	5,38	24,25	4,84	100,00
Lampung	56,05	5,12	20,19	18,64	100,00
Kep. Bangka Belitung	38,42	4,11	53,07	4,40	100,00
Kep. Riau	38,04	8,37	47,16	6,43	100,00
DKI Jakarta	44,79	3,23	51,30	0,68	100,00
Jawa Barat	34,80	7,16	53,52	4,51	100,00
Jawa Tengah	37,66	8,89	32,72	20,72	100,00
DI Yogyakarta	34,11	12,38	35,27	18,24	100,00
Jawa Timur	29,22	10,81	31,26	28,71	100,00
Banten	23,29	12,03	52,13	12,55	100,00
Bali	27,85	5,96	47,12	19,07	100,00
Nusa Tenggara Barat	34,13	5,81	14,88	45,19	100,00
Nusa Tenggara Timur	54,77	13,58	3,12	28,53	100,00
Kalimantan Barat	48,06	12,81	10,20	28,93	100,00
Kalimantan Tengah	55,33	4,31	38,58	1,78	100,00
Kalimantan Selatan	31,26	6,51	59,85	2,38	100,00
Kalimantan Timur	50,79	2,68	41,27	5,26	100,00
Sulawesi Utara	90,04	2,48	7,05	0,43	100,00
Sulawesi Tengah	59,64	7,77	28,25	4,34	100,00
Sulawesi Selatan	29,58	16,86	26,05	27,52	100,00
Sulawesi Tenggara	67,09	6,67	13,49	12,75	100,00
Gorontalo	64,92	3,61	25,77	5,70	100,00
Sulawesi Barat	46,83	13,83	9,56	29,78	100,00
Maluku	74,04	2,57	21,96	1,43	100,00
Maluku Utara	55,59	3,95	36,05	4,41	100,00
Papua Barat	66,83	11,82	17,11	4,24	100,00
Papua	62,15	4,86	11,68	21,31	100,00
Indonesia	40,45	8,19	35,36	16,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.1.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2014

Provinsi	Kemampuan membaca dan menulis				Total
	Huruf latin	Huruf lainnya	Huruf latin dan lainnya	Tidak dapat membaca	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Aceh	47,02	19,63	13,29	20,06	100,00
Sumatera Utara	59,18	9,68	23,52	7,62	100,00
Sumatera Barat	58,38	13,13	22,57	5,92	100,00
Riau	48,60	21,16	22,62	7,62	100,00
Jambi	29,71	23,62	34,34	12,33	100,00
Sumatera Selatan	49,33	12,62	26,06	11,99	100,00
Bengkulu	50,93	16,08	11,79	21,20	100,00
Lampung	45,45	19,35	11,76	23,44	100,00
Kep. Bangka Belitung	36,68	19,38	33,76	10,19	100,00
Kep. Riau	40,34	12,95	36,18	10,54	100,00
DKI Jakarta	43,61	10,00	43,37	3,02	100,00
Jawa Barat	26,84	21,36	41,75	10,05	100,00
Jawa Tengah	27,68	20,56	16,41	35,35	100,00
DI Yogyakarta	29,79	19,08	16,79	34,34	100,00
Jawa Timur	20,36	26,64	16,61	36,39	100,00
Banten	14,93	29,59	31,92	23,55	100,00
Bali	22,86	21,04	15,68	40,42	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,98	18,06	4,88	55,07	100,00
Nusa Tenggara Timur	43,71	15,68	1,79	38,83	100,00
Kalimantan Barat	31,61	18,93	4,57	44,89	100,00
Kalimantan Tengah	41,97	19,14	28,38	10,51	100,00
Kalimantan Selatan	22,34	20,41	43,73	13,52	100,00
Kalimantan Timur	44,86	13,68	29,16	12,30	100,00
Sulawesi Utara	90,07	3,30	4,81	1,81	100,00
Sulawesi Tengah	49,17	10,27	25,15	15,40	100,00
Sulawesi Selatan	24,30	20,68	15,84	39,18	100,00
Sulawesi Tenggara	44,52	8,15	6,71	40,62	100,00
Gorontalo	51,94	12,96	32,51	2,59	100,00
Sulawesi Barat	29,37	37,38	4,82	28,42	100,00
Maluku	72,38	6,92	15,88	4,82	100,00
Maluku Utara	55,82	10,53	18,77	14,87	100,00
Papua Barat	64,80	13,50	6,68	15,02	100,00
Papua	60,73	6,43	9,12	23,72	100,00
Indonesia	31,73	20,31	22,50	25,46	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.1.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Kemampuan membaca dan menulis				Total
	Huruf latin	Huruf lainnya	Huruf latin dan lainnya	Tidak dapat membaca	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	53,50	12,73	16,44	17,33	100,00
Sumatera Utara	62,05	6,44	26,15	5,36	100,00
Sumatera Barat	61,94	9,06	23,94	5,06	100,00
Riau	55,06	14,13	26,04	4,77	100,00
Jambi	31,46	14,10	44,41	10,04	100,00
Sumatera Selatan	52,51	8,36	30,90	8,24	100,00
Bengkulu	58,15	10,79	17,95	13,11	100,00
Lampung	50,79	12,18	16,00	21,02	100,00
Kep. Bangka Belitung	37,53	11,89	43,23	7,35	100,00
Kep. Riau	39,17	10,61	41,77	8,45	100,00
DKI Jakarta	44,18	6,73	47,20	1,89	100,00
Jawa Barat	30,67	14,54	47,41	7,39	100,00
Jawa Tengah	32,28	15,18	23,93	28,60	100,00
DI Yogyakarta	31,72	16,09	25,05	27,14	100,00
Jawa Timur	24,36	19,49	23,22	32,92	100,00
Banten	18,99	21,06	41,74	18,21	100,00
Bali	25,19	13,99	30,37	30,44	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,71	12,29	9,60	50,41	100,00
Nusa Tenggara Timur	48,97	14,68	2,42	33,92	100,00
Kalimantan Barat	39,86	15,86	7,39	36,88	100,00
Kalimantan Tengah	48,82	11,54	33,61	6,03	100,00
Kalimantan Selatan	26,41	14,06	51,09	8,43	100,00
Kalimantan Timur	48,04	7,79	35,65	8,53	100,00
Sulawesi Utara	90,06	2,92	5,86	1,16	100,00
Sulawesi Tengah	54,38	9,02	26,69	9,90	100,00
Sulawesi Selatan	26,59	19,02	20,27	34,12	100,00
Sulawesi Tenggara	55,13	7,46	9,90	27,52	100,00
Gorontalo	57,89	8,67	29,42	4,02	100,00
Sulawesi Barat	37,56	26,34	7,04	29,05	100,00
Maluku	73,18	4,83	18,80	3,19	100,00
Maluku Utara	55,70	7,21	27,50	9,59	100,00
Papua Barat	65,93	12,57	12,45	9,05	100,00
Papua	61,54	5,54	10,58	22,34	100,00
Indonesia	35,81	14,64	28,52	21,03	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.2.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Provinsi	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan					Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat atau lebih	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6,75	25,00	32,96	11,95	23,33	100,00
Sumatera Utara	5,96	20,40	32,09	16,33	25,23	100,00
Sumatera Barat	4,49	29,22	24,85	11,80	29,65	100,00
Riau	8,19	24,20	33,86	11,46	22,28	100,00
Jambi	11,36	23,51	24,89	15,19	25,05	100,00
Sumatera Selatan	10,18	29,23	24,48	11,71	24,40	100,00
Bengkulu	8,38	28,30	28,08	11,23	24,02	100,00
Lampung	14,32	31,99	24,13	12,00	17,56	100,00
Kep. Bangka Belitung	14,71	30,32	32,82	10,25	11,90	100,00
Kep. Riau	17,00	27,52	29,77	9,40	16,31	100,00
DKI Jakarta	7,16	14,65	22,79	15,83	39,58	100,00
Jawa Barat	16,91	27,31	30,59	9,17	16,03	100,00
Jawa Tengah	24,77	30,25	22,78	8,19	14,01	100,00
DI Yogyakarta	21,68	19,81	21,85	12,41	24,25	100,00
Jawa Timur	22,31	28,78	25,92	7,94	15,06	100,00
Banten	22,79	29,16	18,66	9,42	19,97	100,00
Bali	29,95	25,85	25,83	6,18	12,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,73	26,32	15,37	4,74	11,83	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,04	23,74	23,66	13,61	27,94	100,00
Kalimantan Barat	26,18	23,35	22,37	10,76	17,34	100,00
Kalimantan Tengah	9,42	26,02	34,71	8,08	21,77	100,00
Kalimantan Selatan	10,71	29,57	29,89	6,71	23,12	100,00
Kalimantan Timur	8,99	22,23	30,81	15,79	22,18	100,00
Sulawesi Utara	1,11	22,13	24,30	19,33	33,14	100,00
Sulawesi Tengah	9,20	19,47	28,27	16,64	26,42	100,00
Sulawesi Selatan	17,01	18,70	26,99	10,59	26,71	100,00
Sulawesi Tenggara	14,80	22,69	27,18	11,23	24,11	100,00
Gorontalo	2,86	30,75	30,91	11,94	23,54	100,00
Sulawesi Barat	18,62	29,50	18,04	8,92	24,92	100,00
Maluku	2,72	18,44	32,75	16,86	29,23	100,00
Maluku Utara	4,91	25,44	29,91	13,44	26,30	100,00
Papua Barat	3,65	13,28	28,27	17,99	36,81	100,00
Papua	5,62	19,11	29,39	13,67	32,21	100,00
Indonesia	18,16	26,39	26,22	10,04	19,18	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.2.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Perdesaan

Provinsi	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan					Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	18,01	33,57	36,67	5,82	5,94	100,00
Sumatera Utara	11,24	37,37	33,02	10,64	7,72	100,00
Sumatera Barat	9,74	51,75	24,03	7,85	6,64	100,00
Riau	21,64	41,22	29,61	4,40	3,14	100,00
Jambi	25,05	36,66	28,64	4,19	5,45	100,00
Sumatera Selatan	15,31	45,93	30,43	4,65	3,68	100,00
Bengkulu	22,39	47,21	21,86	4,34	4,20	100,00
Lampung	22,22	44,16	27,07	3,82	2,72	100,00
Kep. Bangka Belitung	20,15	52,28	22,39	3,79	1,40	100,00
Kep. Riau	24,35	45,05	21,88	3,26	5,46	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	21,11	38,12	35,22	2,67	2,88	100,00
Jawa Tengah	32,95	38,91	22,18	2,84	3,13	100,00
DI Yogyakarta	38,34	26,19	25,99	4,82	4,66	100,00
Jawa Timur	40,58	33,99	20,70	2,59	2,14	100,00
Banten	30,86	47,40	18,55	0,74	2,44	100,00
Bali	44,17	27,76	22,38	2,58	3,11	100,00
Nusa Tenggara Barat	47,88	33,77	13,35	2,32	2,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	31,60	40,60	22,03	2,38	3,39	100,00
Kalimantan Barat	43,20	33,59	18,38	2,84	1,99	100,00
Kalimantan Tengah	15,72	34,39	39,10	5,84	4,94	100,00
Kalimantan Selatan	20,44	50,47	21,80	2,39	4,90	100,00
Kalimantan Timur	24,96	36,37	31,21	3,52	3,94	100,00
Sulawesi Utara	1,97	44,36	31,06	10,75	11,86	100,00
Sulawesi Tengah	13,84	37,31	36,93	5,95	5,98	100,00
Sulawesi Selatan	41,36	31,58	18,44	3,46	5,15	100,00
Sulawesi Tenggara	31,99	36,35	21,38	4,37	5,92	100,00
Gorontalo	5,85	58,50	26,16	4,78	4,71	100,00
Sulawesi Barat	36,21	35,04	19,14	4,35	5,26	100,00
Maluku	9,11	36,00	36,69	9,48	8,72	100,00
Maluku Utara	16,10	39,99	30,88	8,09	4,94	100,00
Papua Barat	22,47	27,06	32,18	6,30	12,00	100,00
Papua	36,51	19,14	28,62	6,48	9,25	100,00
Indonesia	29,66	37,78	25,21	3,70	3,65	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.2.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Laki-laki

Provinsi	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan					Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,94	26,78	42,19	9,42	15,67	100,00
Sumatera Utara	3,86	22,05	34,45	18,29	21,35	100,00
Sumatera Barat	3,90	40,35	26,51	10,91	18,32	100,00
Riau	8,01	31,56	36,43	8,74	15,26	100,00
Jambi	9,56	29,75	33,62	9,60	17,47	100,00
Sumatera Selatan	6,00	36,05	31,74	9,86	16,34	100,00
Bengkulu	7,05	42,34	28,44	7,25	14,92	100,00
Lampung	9,93	39,91	32,93	7,83	9,39	100,00
Kep. Bangka Belitung	8,34	38,36	32,78	9,73	10,79	100,00
Kep. Riau	12,23	30,00	30,48	9,87	17,41	100,00
DKI Jakarta	3,77	10,01	22,72	15,44	48,05	100,00
Jawa Barat	10,13	29,74	36,33	8,33	15,46	100,00
Jawa Tengah	15,24	36,23	30,02	6,92	11,59	100,00
DI Yogyakarta	13,56	21,42	31,44	11,76	21,82	100,00
Jawa Timur	17,35	33,21	31,05	6,49	11,90	100,00
Banten	13,01	38,43	24,34	5,79	18,43	100,00
Bali	16,80	30,96	33,75	6,34	12,15	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,33	35,22	18,65	4,23	10,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	19,27	37,59	26,03	5,42	11,70	100,00
Kalimantan Barat	23,24	35,97	24,16	7,03	9,61	100,00
Kalimantan Tengah	4,90	25,89	43,91	9,85	15,45	100,00
Kalimantan Selatan	7,14	37,36	31,56	5,28	18,66	100,00
Kalimantan Timur	8,94	22,02	34,66	12,29	22,10	100,00
Sulawesi Utara	1,01	29,45	31,02	14,41	24,11	100,00
Sulawesi Tengah	8,24	29,62	37,69	10,18	14,28	100,00
Sulawesi Selatan	23,81	27,57	22,28	7,65	18,70	100,00
Sulawesi Tenggara	14,93	31,19	29,98	7,13	16,77	100,00
Gorontalo	1,40	49,80	28,31	8,71	11,77	100,00
Sulawesi Barat	17,73	36,23	22,93	7,33	15,79	100,00
Maluku	2,68	26,20	39,10	12,88	19,14	100,00
Maluku Utara	7,66	29,08	34,01	14,04	15,21	100,00
Papua Barat	13,18	20,48	30,74	9,33	26,27	100,00
Papua	22,72	13,59	27,44	11,16	25,09	100,00
Indonesia	13,06	31,85	31,26	8,38	15,45	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.2.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Perempuan

Provinsi	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan					Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	22,60	35,10	30,38	5,76	6,17	100,00
Sumatera Utara	12,61	35,01	31,06	9,41	11,91	100,00
Sumatera Barat	11,04	46,47	22,58	7,92	11,99	100,00
Riau	25,22	38,11	25,94	5,35	5,37	100,00
Jambi	32,24	35,62	21,40	5,44	5,30	100,00
Sumatera Selatan	20,43	43,82	25,24	4,59	5,93	100,00
Bengkulu	30,09	42,09	18,66	5,09	4,06	100,00
Lampung	30,96	42,70	19,72	3,63	2,99	100,00
Kep. Bangka Belitung	26,02	43,53	22,91	4,58	2,95	100,00
Kep. Riau	26,14	34,90	24,54	5,43	9,00	100,00
DKI Jakarta	10,32	18,98	22,86	16,19	31,65	100,00
Jawa Barat	26,38	33,31	28,81	4,99	6,51	100,00
Jawa Tengah	41,51	34,21	15,95	3,66	4,67	100,00
DI Yogyakarta	41,06	23,42	17,29	7,09	11,14	100,00
Jawa Timur	45,07	30,45	16,36	3,67	4,45	100,00
Banten	38,05	33,98	13,21	6,39	8,37	100,00
Bali	54,25	23,08	15,78	2,81	4,08	100,00
Nusa Tenggara Barat	57,91	26,72	10,18	2,49	2,71	100,00
Nusa Tenggara Timur	36,17	37,91	18,93	3,23	3,76	100,00
Kalimantan Barat	52,34	24,61	15,13	3,72	4,20	100,00
Kalimantan Tengah	22,92	37,77	31,11	3,11	5,09	100,00
Kalimantan Selatan	24,48	46,15	19,53	3,13	6,71	100,00
Kalimantan Timur	23,01	34,84	26,72	9,10	6,33	100,00
Sulawesi Utara	2,13	39,66	25,69	14,39	18,13	100,00
Sulawesi Tengah	17,37	37,16	32,41	6,41	6,66	100,00
Sulawesi Selatan	41,16	27,43	20,30	4,25	6,86	100,00
Sulawesi Tenggara	39,59	34,93	16,29	4,92	4,27	100,00
Gorontalo	7,72	48,28	27,35	5,99	10,66	100,00
Sulawesi Barat	44,72	31,53	15,31	3,74	4,69	100,00
Maluku	10,46	32,42	31,62	11,65	13,85	100,00
Maluku Utara	18,86	43,51	27,18	4,82	5,64	100,00
Papua Barat	21,18	25,84	31,31	10,49	11,18	100,00
Papua	26,57	26,48	30,88	6,85	9,22	100,00
Indonesia	34,26	33,09	20,77	5,10	6,79	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.2.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan					Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	15,09	31,35	35,71	7,41	10,45	100,00
Sumatera Utara	8,71	29,22	32,57	13,37	16,13	100,00
Sumatera Barat	7,88	43,76	24,32	9,25	14,80	100,00
Riau	16,58	34,82	31,21	7,05	10,34	100,00
Jambi	20,91	32,68	27,51	7,52	11,38	100,00
Sumatera Selatan	13,51	40,09	28,35	7,12	10,92	100,00
Bengkulu	18,69	42,22	23,50	6,16	9,43	100,00
Lampung	20,36	41,29	26,38	5,75	6,22	100,00
Kep. Bangka Belitung	17,35	41,00	27,75	7,11	6,79	100,00
Kep. Riau	19,05	32,40	27,57	7,69	13,28	100,00
DKI Jakarta	7,16	14,65	22,79	15,83	39,58	100,00
Jawa Barat	18,57	31,60	32,42	6,59	10,81	100,00
Jawa Tengah	29,39	35,14	22,44	5,16	7,86	100,00
DI Yogyakarta	28,77	22,53	23,61	9,18	15,91	100,00
Jawa Timur	32,56	31,70	22,99	4,94	7,81	100,00
Banten	25,88	36,14	18,62	6,10	13,26	100,00
Bali	36,75	26,76	24,18	4,46	7,85	100,00
Nusa Tenggara Barat	45,37	30,73	14,17	3,31	6,41	100,00
Nusa Tenggara Timur	28,13	37,76	22,31	4,27	7,54	100,00
Kalimantan Barat	37,74	30,31	19,66	5,38	6,91	100,00
Kalimantan Tengah	13,68	31,68	37,67	6,57	10,40	100,00
Kalimantan Selatan	16,56	42,14	25,03	4,11	12,17	100,00
Kalimantan Timur	15,47	27,97	30,97	10,81	14,78	100,00
Sulawesi Utara	1,60	34,89	28,18	14,40	20,92	100,00
Sulawesi Tengah	12,82	33,41	35,04	8,29	10,45	100,00
Sulawesi Selatan	33,63	27,49	21,16	5,73	12,00	100,00
Sulawesi Tenggara	28,00	33,17	22,73	5,96	10,14	100,00
Gorontalo	4,82	48,98	27,79	7,24	11,17	100,00
Sulawesi Barat	32,07	33,73	18,88	5,42	9,89	100,00
Maluku	6,72	29,43	35,22	12,24	16,40	100,00
Maluku Utara	13,20	36,22	30,63	9,48	10,47	100,00
Papua Barat	16,75	22,87	30,99	9,85	19,53	100,00
Papua	24,37	19,13	28,92	9,31	18,27	100,00
Indonesia	24,34	32,51	25,68	6,63	10,84	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Provinsi	Kelompok Umur			Perkotaan
	60-69	70-79	80+	60+
	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)				
Aceh	7,45	6,06	4,13	6,78
Sumatera Utara	7,90	6,51	3,41	7,12
Sumatera Barat	7,86	6,85	3,87	7,14
Riau	7,25	5,69	3,36	6,55
Jambi	7,17	6,15	4,16	6,70
Sumatera Selatan	7,71	4,66	2,36	6,36
Bengkulu	7,60	5,71	2,88	6,56
Lampung	6,57	4,80	2,45	5,62
Kep. Bangka Belitung	5,64	4,57	2,78	5,05
Kep. Riau	5,57	5,00	4,10	5,37
DKI Jakarta	9,11	7,48	5,74	8,48
Jawa Barat	6,10	4,52	2,85	5,37
Jawa Tengah	5,59	3,60	2,16	4,58
DI Yogyakarta	7,72	5,27	2,65	6,18
Jawa Timur	5,83	3,95	2,31	4,91
Banten	5,87	4,61	1,72	5,23
Bali	5,22	3,37	1,64	4,30
Nusa Tenggara Barat	3,97	3,17	1,39	3,51
Nusa Tenggara Timur	7,58	6,15	3,41	6,76
Kalimantan Barat	6,09	3,87	1,31	5,12
Kalimantan Tengah	7,00	5,09	4,46	6,23
Kalimantan Selatan	6,76	5,41	2,26	6,02
Kalimantan Timur	7,34	5,66	3,33	6,63
Sulawesi Utara	8,66	7,37	5,97	8,03
Sulawesi Tengah	8,17	6,77	2,12	7,14
Sulawesi Selatan	7,30	5,84	4,18	6,59
Sulawesi Tenggara	7,48	4,25	2,36	6,18
Gorontalo	7,14	6,08	4,08	6,73
Sulawesi Barat	7,80	3,39	1,37	5,85
Maluku	8,44	7,34	5,39	7,83
Maluku Utara	7,68	6,52	4,43	7,18
Papua Barat	8,97	6,54	7,60	8,40
Papua	8,53	5,96	3,75	7,71
Indonesia	6,48	4,64	2,76	5,60

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.3.2 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Provinsi	Kelompok Umur			Perdesaan
	60-69	70-79	80+	60+
	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)				
Aceh	4,76	3,53	2,61	4,21
Sumatera Utara	5,46	4,11	2,58	4,79
Sumatera Barat	4,53	4,13	2,94	4,22
Riau	3,85	2,70	1,94	3,38
Jambi	4,16	2,77	1,73	3,54
Sumatera Selatan	4,19	3,25	2,04	3,69
Bengkulu	3,84	2,69	1,53	3,26
Lampung	3,92	2,67	1,68	3,30
Kep. Bangka Belitung	3,42	2,58	0,68	2,92
Kep. Riau	3,82	2,52	1,70	3,34
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	4,05	2,95	1,88	3,50
Jawa Tengah	3,48	2,14	1,26	2,80
DI Yogyakarta	4,24	2,74	1,24	3,27
Jawa Timur	3,05	1,79	1,25	2,47
Banten	2,66	2,00	1,54	2,39
Bali	3,14	2,09	0,73	2,52
Nusa Tenggara Barat	2,52	1,21	1,09	2,01
Nusa Tenggara Timur	3,53	2,26	1,31	2,92
Kalimantan Barat	2,69	1,57	0,92	2,26
Kalimantan Tengah	4,74	3,68	2,50	4,27
Kalimantan Selatan	3,74	2,41	1,03	3,13
Kalimantan Timur	3,85	3,21	0,88	3,49
Sulawesi Utara	6,20	5,22	3,33	5,64
Sulawesi Tengah	4,98	3,64	2,68	4,37
Sulawesi Selatan	3,40	1,94	1,19	2,72
Sulawesi Tenggara	3,76	2,47	1,44	3,17
Gorontalo	4,49	3,96	1,46	4,20
Sulawesi Barat	3,67	2,03	1,37	2,97
Maluku	5,76	4,32	2,95	5,02
Maluku Utara	4,62	3,20	2,59	4,10
Papua Barat	5,20	3,75	1,92	4,73
Papua	4,34	3,46	2,04	4,03
Indonesia	3,72	2,47	1,57	3,12

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.3.3 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Laki-laki

Provinsi	Kelompok Umur			60+
	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6,55	5,38	4,25	6,07
Sumatera Utara	7,59	6,55	4,12	7,03
Sumatera Barat	6,19	6,09	4,18	5,97
Riau	6,21	4,86	3,11	5,63
Jambi	6,26	5,41	3,49	5,82
Sumatera Selatan	6,34	5,20	3,20	5,76
Bengkulu	5,96	4,72	2,83	5,29
Lampung	5,50	4,41	2,74	4,89
Kep. Bangka Belitung	5,52	4,48	3,10	5,08
Kep. Riau	5,89	5,45	3,91	5,68
DKI Jakarta	9,94	9,14	6,31	9,53
Jawa Barat	6,17	5,06	3,13	5,62
Jawa Tengah	5,44	4,07	2,62	4,73
DI Yogyakarta	7,58	5,91	3,19	6,48
Jawa Timur	5,34	4,13	2,77	4,77
Banten	5,85	4,22	2,49	5,26
Bali	5,67	4,27	2,19	4,91
Nusa Tenggara Barat	4,31	2,88	1,52	3,66
Nusa Tenggara Timur	5,11	3,88	2,18	4,46
Kalimantan Barat	4,66	3,17	1,86	4,09
Kalimantan Tengah	6,56	5,46	5,21	6,18
Kalimantan Selatan	6,11	4,93	2,58	5,58
Kalimantan Timur	7,10	5,82	3,09	6,55
Sulawesi Utara	7,54	7,01	4,87	7,17
Sulawesi Tengah	6,36	5,00	3,53	5,75
Sulawesi Selatan	5,71	4,51	3,26	5,13
Sulawesi Tenggara	5,94	4,56	2,64	5,29
Gorontalo	5,39	5,45	2,78	5,31
Sulawesi Barat	5,81	3,59	2,26	4,91
Maluku	7,35	6,10	4,25	6,68
Maluku Utara	6,41	5,33	4,90	6,05
Papua Barat	7,11	5,30	4,12	6,59
Papua	6,85	5,08	2,95	6,30
Indonesia	6,01	4,74	3,02	5,39

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.3.4 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Provinsi	Kelompok Umur			Perempuan
	60-69	70-79	80+	60+
	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)				
Aceh	4,51	3,21	2,33	3,89
Sumatera Utara	5,81	4,37	2,19	5,00
Sumatera Barat	5,35	4,34	2,75	4,68
Riau	3,95	3,11	1,75	3,50
Jambi	3,92	2,07	1,43	3,18
Sumatera Selatan	4,54	2,55	1,38	3,58
Bengkulu	3,68	2,42	1,01	2,99
Lampung	3,54	2,01	0,98	2,79
Kep. Bangka Belitung	3,51	2,82	1,06	2,99
Kep. Riau	4,28	3,15	2,12	3,90
DKI Jakarta	8,29	6,05	5,31	7,51
Jawa Barat	4,42	2,92	1,91	3,71
Jawa Tengah	3,43	1,81	0,89	2,58
DI Yogyakarta	5,08	2,84	1,30	3,70
Jawa Timur	3,32	1,73	1,03	2,53
Banten	3,40	3,07	1,15	3,09
Bali	2,94	1,43	0,48	2,17
Nusa Tenggara Barat	1,99	1,36	0,90	1,70
Nusa Tenggara Timur	3,43	1,96	1,24	2,76
Kalimantan Barat	2,84	1,45	0,51	2,26
Kalimantan Tengah	4,21	2,76	1,89	3,57
Kalimantan Selatan	3,85	2,63	0,98	3,18
Kalimantan Timur	4,50	3,34	1,85	3,99
Sulawesi Utara	6,96	5,52	4,12	6,20
Sulawesi Tengah	5,01	3,51	1,83	4,22
Sulawesi Selatan	3,81	2,27	1,12	3,04
Sulawesi Tenggara	3,41	1,56	0,87	2,61
Gorontalo	5,43	4,03	1,92	4,86
Sulawesi Barat	3,51	1,25	0,92	2,54
Maluku	6,21	4,99	3,27	5,51
Maluku Utara	4,38	2,68	1,89	3,72
Papua Barat	5,37	3,92	2,55	4,92
Papua	4,78	3,60	2,64	4,38
Indonesia	4,07	2,46	1,43	3,28

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.3.5 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Kelompok Umur			60+
	60-69	70-79	80+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	5,48	4,15	2,99	4,88
Sumatera Utara	6,64	5,28	2,93	5,91
Sumatera Barat	5,75	5,07	3,24	5,25
Riau	5,11	3,97	2,34	4,57
Jambi	5,11	3,76	2,29	4,50
Sumatera Selatan	5,45	3,72	2,15	4,62
Bengkulu	4,83	3,52	1,85	4,13
Lampung	4,55	3,18	1,84	3,85
Kep. Bangka Belitung	4,55	3,60	1,80	4,01
Kep. Riau	5,10	4,33	3,03	4,81
DKI Jakarta	9,11	7,48	5,74	8,48
Jawa Barat	5,30	3,90	2,42	4,63
Jawa Tengah	4,41	2,78	1,64	3,57
DI Yogyakarta	6,25	4,22	2,00	4,94
Jawa Timur	4,29	2,73	1,70	3,54
Banten	4,65	3,60	1,64	4,14
Bali	4,26	2,75	1,16	3,45
Nusa Tenggara Barat	3,12	2,02	1,20	2,63
Nusa Tenggara Timur	4,23	2,88	1,66	3,57
Kalimantan Barat	3,77	2,31	1,05	3,18
Kalimantan Tengah	5,45	4,14	3,22	4,90
Kalimantan Selatan	4,94	3,65	1,47	4,28
Kalimantan Timur	5,93	4,62	2,43	5,36
Sulawesi Utara	7,25	6,14	4,42	6,66
Sulawesi Tengah	5,70	4,24	2,54	4,98
Sulawesi Selatan	4,67	3,17	2,01	3,95
Sulawesi Tenggara	4,65	2,86	1,65	3,87
Gorontalo	5,41	4,69	2,22	5,07
Sulawesi Barat	4,63	2,36	1,37	3,65
Maluku	6,77	5,53	3,70	6,08
Maluku Utara	5,43	4,03	3,01	4,90
Papua Barat	6,35	4,60	3,60	5,84
Papua	5,99	4,40	2,80	5,48
Indonesia	5,02	3,47	2,08	4,27

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.4.1 Proporsi Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi di Rumah Menurut Provinsi dan Jenis Akses, 2014

Provinsi	Akses teknologi informasi di rumah			
	Telepon rumah	Telepon genggam	Komputer	Internet rumah
	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,87	76,65	3,05	3,27
Sumatera Utara	9,08	87,42	4,65	5,89
Sumatera Barat	12,36	91,39	8,62	9,27
Riau	10,76	94,79	8,66	5,40
Jambi	16,13	89,86	3,76	8,89
Sumatera Selatan	18,27	92,22	9,15	7,31
Bengkulu	11,42	91,05	5,41	6,92
Lampung	13,61	87,12	6,67	5,67
Kep. Bangka Belitung	6,98	82,59	1,61	4,11
Kep. Riau	16,08	95,74	12,06	17,24
DKI Jakarta	43,46	92,27	22,79	26,75
Jawa Barat	12,33	73,74	8,07	6,35
Jawa Tengah	10,36	75,04	5,80	4,32
DI Yogyakarta	18,58	74,77	8,47	5,53
Jawa Timur	12,14	78,46	5,92	6,74
Banten	15,95	84,44	10,08	10,23
Bali	23,60	86,81	7,76	8,00
Nusa Tenggara Barat	3,94	62,86	2,33	2,53
Nusa Tenggara Timur	12,52	90,25	7,73	5,02
Kalimantan Barat	13,21	92,92	7,66	9,67
Kalimantan Tengah	10,35	88,56	8,35	5,08
Kalimantan Selatan	12,93	86,17	5,74	4,03
Kalimantan Timur	17,92	94,07	10,47	14,64
Sulawesi Utara	9,66	87,69	8,51	9,45
Sulawesi Tengah	15,17	88,67	8,52	9,63
Sulawesi Selatan	15,52	90,26	5,80	7,99
Sulawesi Tenggara	8,50	91,80	6,99	6,05
Gorontalo	5,45	81,27	6,27	0,61
Sulawesi Barat	8,55	90,47	1,65	6,35
Maluku	12,66	89,32	4,93	4,05
Maluku Utara	8,51	91,53	11,26	5,31
Papua Barat	4,76	96,88	11,80	2,78
Papua	11,08	92,79	11,84	8,09
Indonesia	14,38	80,33	7,89	7,70

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.4.2 Proporsi Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi di Rumah Menurut Provinsi dan Jenis Akses, 2014

Provinsi	Akses teknologi informasi di rumah			
	Telepon rumah	Telepon genggam	Komputer	Internet rumah
	(1)	(2)	(3)	(4)
				Perdesaan
Aceh	1,97	68,69	0,42	0,85
Sumatera Utara	1,39	73,37	0,66	0,83
Sumatera Barat	2,70	77,66	1,58	1,55
Riau	3,00	84,99	0,81	2,52
Jambi	1,89	76,59	0,55	1,08
Sumatera Selatan	1,18	73,43	0,84	0,93
Bengkulu	2,73	69,71	0,63	0,84
Lampung	2,07	73,39	1,18	0,97
Kep. Bangka Belitung	1,35	70,85	2,68	2,23
Kep. Riau	3,80	84,44	3,98	6,34
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	1,88	54,98	1,44	1,09
Jawa Tengah	1,47	66,35	1,49	1,38
DI Yogyakarta	1,92	66,62	1,91	1,89
Jawa Timur	1,82	67,03	1,12	1,52
Banten	0,77	71,29	1,54	0,24
Bali	4,04	71,90	2,94	2,02
Nusa Tenggara Barat	1,15	56,03	0,22	0,61
Nusa Tenggara Timur	1,49	60,41	0,33	0,48
Kalimantan Barat	1,58	74,46	0,55	0,74
Kalimantan Tengah	1,25	75,10	0,40	0,52
Kalimantan Selatan	1,33	70,08	1,25	1,73
Kalimantan Timur	2,02	79,91	1,09	2,47
Sulawesi Utara	1,46	72,02	1,57	1,33
Sulawesi Tengah	1,22	69,04	1,11	0,22
Sulawesi Selatan	1,74	79,44	1,11	1,34
Sulawesi Tenggara	1,75	72,44	1,18	0,61
Gorontalo	1,87	67,95	0,00	0,76
Sulawesi Barat	4,23	69,76	1,47	0,38
Maluku	0,70	64,97	0,07	0,41
Maluku Utara	2,85	69,40	2,08	0,45
Papua Barat	0,92	63,92	4,03	0,36
Papua	0,35	45,60	0,56	0,22
Indonesia	1,76	67,60	1,20	1,24

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.4.3 Proporsi Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi di Rumah Menurut Provinsi dan Jenis Akses, 2014

Provinsi	Akses teknologi informasi di rumah			
	Telepon rumah	Telepon genggam	Komputer	Internet rumah
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,33	80,12	1,26	1,31
Sumatera Utara	4,68	83,88	2,86	3,54
Sumatera Barat	6,56	86,12	3,90	4,40
Riau	5,72	90,83	3,80	2,74
Jambi	6,35	83,51	1,54	3,83
Sumatera Selatan	6,56	82,57	3,83	3,18
Bengkulu	5,62	77,92	1,96	1,85
Lampung	4,96	78,36	2,59	1,96
Kep. Bangka Belitung	4,51	82,17	2,84	3,35
Kep. Riau	10,65	94,02	8,88	16,91
DKI Jakarta	42,55	93,77	22,26	24,77
Jawa Barat	8,45	72,09	5,87	4,50
Jawa Tengah	5,53	73,46	3,79	2,71
DI Yogyakarta	11,80	73,10	7,45	4,96
Jawa Timur	6,80	74,98	3,52	3,89
Banten	10,82	82,95	7,03	7,07
Bali	15,01	80,49	5,68	5,43
Nusa Tenggara Barat	2,27	62,72	1,23	1,65
Nusa Tenggara Timur	3,33	66,75	1,44	0,77
Kalimantan Barat	5,04	82,22	2,89	2,99
Kalimantan Tengah	4,06	82,88	2,95	2,07
Kalimantan Selatan	5,74	80,55	3,68	2,50
Kalimantan Timur	11,18	90,72	6,78	9,92
Sulawesi Utara	4,14	80,27	4,54	3,69
Sulawesi Tengah	3,83	74,44	2,69	2,42
Sulawesi Selatan	6,71	85,52	2,70	3,49
Sulawesi Tenggara	3,35	80,62	3,21	2,24
Gorontalo	3,23	74,54	1,90	0,57
Sulawesi Barat	5,59	75,95	1,29	1,18
Maluku	4,80	74,76	2,05	1,47
Maluku Utara	4,94	77,04	2,67	2,17
Papua Barat	2,09	74,27	4,79	0,94
Papua	5,80	64,27	5,37	2,67
Indonesia	7,81	76,91	4,61	4,29

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.4.4 Proporsi Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi di Rumah Menurut Provinsi dan Jenis Akses, 2014

Provinsi	Akses teknologi informasi di rumah			
	Telepon rumah	Telepon genggam	Komputer	Internet rumah
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,57	63,06	0,97	1,62
Sumatera Utara	5,40	77,07	2,35	3,04
Sumatera Barat	5,78	79,67	4,22	4,20
Riau	6,12	86,50	3,72	4,47
Jambi	6,05	77,70	1,50	3,06
Sumatera Selatan	7,70	77,64	3,67	3,13
Bengkulu	4,44	72,82	1,83	3,02
Lampung	4,63	74,86	2,36	2,20
Kep. Bangka Belitung	3,99	71,79	1,45	3,04
Kep. Riau	14,75	91,12	10,78	11,39
DKI Jakarta	44,32	90,88	23,28	28,60
Jawa Barat	7,94	60,95	5,04	4,06
Jawa Tengah	5,17	67,27	2,99	2,62
DI Yogyakarta	11,24	69,85	4,24	3,19
Jawa Timur	5,99	69,64	2,99	3,75
Banten	9,49	76,05	6,60	5,77
Bali	13,58	78,98	5,25	4,89
Nusa Tenggara Barat	2,31	55,34	0,95	1,17
Nusa Tenggara Timur	3,38	64,27	1,71	1,68
Kalimantan Barat	5,58	78,53	2,77	4,22
Kalimantan Tengah	4,35	75,88	3,01	1,92
Kalimantan Selatan	6,14	73,09	2,49	2,77
Kalimantan Timur	11,80	85,57	6,53	9,46
Sulawesi Utara	5,66	77,31	4,51	5,76
Sulawesi Tengah	4,72	72,25	2,77	2,15
Sulawesi Selatan	5,66	80,85	2,52	3,42
Sulawesi Tenggara	3,29	73,67	1,93	1,55
Gorontalo	2,98	70,81	2,37	0,83
Sulawesi Barat	4,96	73,48	1,71	2,33
Maluku	5,53	73,46	1,74	2,05
Maluku Utara	3,67	73,18	6,27	1,24
Papua Barat	2,07	73,51	8,38	1,29
Papua	2,93	63,99	4,50	4,17
Indonesia	7,41	70,49	4,02	4,17

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 2.5.5 Proporsi Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi di Rumah Menurut Provinsi dan Jenis Akses, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan			
	Akses teknologi informasi di rumah			
	Telepon rumah	Telepon genggam	Komputer	Internet rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2,46	70,76	1,10	1,48
Sumatera Utara	5,08	80,11	2,58	3,26
Sumatera Barat	6,13	82,53	4,08	4,29
Riau	5,92	88,68	3,76	3,60
Jambi	6,20	80,61	1,52	3,44
Sumatera Selatan	7,15	80,00	3,75	3,16
Bengkulu	5,02	75,34	1,90	2,44
Lampung	4,79	76,62	2,48	2,08
Kep. Bangka Belitung	4,25	76,88	2,13	3,19
Kep. Riau	12,66	92,60	9,81	14,20
DKI Jakarta	43,46	92,27	22,79	26,75
Jawa Barat	8,18	66,30	5,44	4,27
Jawa Tengah	5,34	70,12	3,36	2,66
DI Yogyakarta	11,49	71,30	5,68	3,98
Jawa Timur	6,35	72,05	3,23	3,81
Banten	10,14	79,41	6,81	6,40
Bali	14,25	79,69	5,45	5,14
Nusa Tenggara Barat	2,29	58,82	1,08	1,40
Nusa Tenggara Timur	3,35	65,45	1,58	1,24
Kalimantan Barat	5,31	80,38	2,83	3,60
Kalimantan Tengah	4,20	79,47	2,98	2,00
Kalimantan Selatan	5,96	76,50	3,04	2,65
Kalimantan Timur	11,47	88,33	6,66	9,70
Sulawesi Utara	4,95	78,70	4,52	4,79
Sulawesi Tengah	4,28	73,34	2,73	2,28
Sulawesi Selatan	6,11	82,87	2,60	3,45
Sulawesi Tenggara	3,32	76,94	2,53	1,88
Gorontalo	3,10	72,52	2,15	0,71
Sulawesi Barat	5,25	74,64	1,51	1,79
Maluku	5,18	74,08	1,89	1,77
Maluku Utara	4,31	75,13	4,45	1,71
Papua Barat	2,08	73,93	6,39	1,10
Papua	4,57	64,15	4,99	3,31
Indonesia	7,60	73,49	4,30	4,23

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 3.1 Proporsi Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	56,86	62,51	59,95	64,97	70,65	68,09	62,85	68,55	65,98
Sumatera Utara	43,27	46,18	44,87	52,95	53,48	53,24	48,24	50,01	49,22
Sumatera Barat	57,83	54,60	56,04	60,19	61,46	60,90	59,35	59,04	59,18
Riau	44,94	47,46	46,21	53,24	59,94	56,56	50,14	55,21	52,67
Jambi	44,40	49,66	47,06	46,26	46,06	46,16	45,70	47,16	46,43
Sumatera Selatan	56,55	55,65	56,07	48,20	48,80	48,51	51,03	51,26	51,15
Bengkulu	57,96	58,53	58,25	57,82	59,49	58,66	57,86	59,23	58,55
Lampung	43,71	47,44	45,63	50,73	54,89	52,77	49,13	53,07	51,09
Kep. Bangka Belitung	48,19	63,48	56,10	52,65	59,59	56,13	50,39	61,62	56,11
Kep. Riau	41,64	41,30	41,47	41,48	51,73	46,30	41,59	44,08	42,82
DKI Jakarta	49,24	61,21	55,42	-	-	-	49,24	61,21	55,42
Jawa Barat	50,94	56,05	53,60	56,88	58,42	57,68	53,30	56,99	55,22
Jawa Tengah	53,03	55,34	54,29	49,28	47,52	48,34	50,90	50,94	50,92
DI Yogyakarta	50,55	57,63	54,44	53,88	51,53	52,57	51,96	55,01	53,65
Jawa Timur	47,90	51,70	49,97	48,61	49,91	49,33	48,30	50,69	49,61
Banten	50,16	53,56	51,90	61,89	66,03	64,04	54,60	58,38	56,55
Bali	47,68	54,10	51,08	61,37	62,99	62,24	54,18	58,38	56,41
Nusa Tenggara Barat	68,56	67,23	67,85	65,04	65,61	65,34	66,46	66,28	66,36
Nusa Tenggara Timur	51,13	54,39	52,84	58,17	59,44	58,84	56,98	58,59	57,82
Kalimantan Barat	48,95	56,07	52,57	53,86	60,86	57,31	52,31	59,29	55,79
Kalimantan Tengah	52,55	49,71	51,15	54,62	55,39	54,99	53,96	53,52	53,75
Kalimantan Selatan	57,46	62,50	60,17	58,44	63,26	61,07	58,04	62,96	60,71
Kalimantan Timur	41,49	41,28	41,39	50,11	49,87	50,00	45,05	44,69	44,88
Sulawesi Utara	42,97	38,32	40,45	51,10	51,90	51,52	47,72	46,00	46,80
Sulawesi Tengah	57,30	60,51	58,99	57,49	57,71	57,60	57,45	58,35	57,90
Sulawesi Selatan	43,88	46,00	45,08	49,96	51,88	51,05	48,03	50,01	49,15
Sulawesi Tenggara	53,88	54,38	54,15	55,09	58,18	56,73	54,81	57,29	56,13
Gorontalo	57,76	63,54	61,03	64,00	66,79	65,47	61,97	65,62	63,95
Sulawesi Barat	51,44	53,16	52,39	52,62	52,97	52,81	52,36	53,02	52,71
Maluku	34,12	42,48	38,59	46,00	41,12	43,51	41,69	41,65	41,67
Maluku Utara	32,56	38,87	35,84	39,92	42,20	41,03	38,11	41,29	39,69
Papua Barat	41,26	43,73	42,39	48,23	34,68	42,24	46,15	37,50	42,29
Papua	38,40	41,44	39,76	43,37	41,20	42,46	41,47	41,30	41,40
Indonesia	50,00	54,05	52,16	52,58	53,60	53,12	51,39	53,81	52,67

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 3.2 Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	30,19	30,26	30,23	38,16	40,85	39,64	36,08	38,12	37,20
Sumatera Utara	23,71	21,43	22,46	31,21	30,32	30,72	27,57	26,09	26,75
Sumatera Barat	23,31	27,03	25,37	33,31	27,89	30,29	29,75	27,59	28,54
Riau	21,06	20,33	20,69	28,46	30,28	29,36	25,70	26,51	26,10
Jambi	19,89	23,32	21,63	29,76	24,85	27,32	26,81	24,38	25,59
Sumatera Selatan	18,11	19,04	18,61	21,86	20,03	20,92	20,58	19,67	20,11
Bengkulu	30,06	29,11	29,57	36,54	35,17	35,85	34,87	33,53	34,19
Lampung	20,07	23,03	21,59	22,70	20,94	21,83	22,10	21,45	21,78
Kep. Bangka Belitung	18,78	24,35	21,66	25,26	27,83	26,55	21,98	26,02	24,04
Kep. Riau	21,72	20,20	20,96	21,71	23,22	22,42	21,72	21,01	21,37
DKI Jakarta	17,57	23,04	20,40	-	-	-	17,57	23,04	20,40
Jawa Barat	23,20	24,31	23,78	27,02	26,81	26,91	24,71	25,30	25,02
Jawa Tengah	23,25	24,03	23,67	22,33	19,52	20,82	22,73	21,49	22,06
DI Yogyakarta	17,30	21,44	19,57	23,35	22,51	22,88	19,85	21,90	20,98
Jawa Timur	22,63	23,67	23,20	25,59	25,56	25,57	24,28	24,74	24,53
Banten	23,62	23,65	23,64	27,82	29,72	28,80	25,21	26,00	25,61
Bali	23,83	25,25	24,58	38,25	38,80	38,55	30,67	31,77	31,26
Nusa Tenggara Barat	41,58	33,40	37,22	37,52	37,69	37,61	39,16	35,92	37,45
Nusa Tenggara Timur	21,28	26,11	23,81	32,00	32,36	32,19	30,19	31,31	30,78
Kalimantan Barat	29,54	24,67	27,06	31,83	29,10	30,48	31,11	27,65	29,38
Kalimantan Tengah	29,96	28,38	29,18	32,63	33,73	33,17	31,78	31,98	31,87
Kalimantan Selatan	25,43	23,65	24,47	25,79	27,80	26,89	25,65	26,16	25,93
Kalimantan Timur	14,24	17,05	15,56	30,82	30,17	30,52	21,09	22,26	21,63
Sulawesi Utara	22,69	16,86	19,52	34,55	32,60	33,53	29,61	25,76	27,56
Sulawesi Tengah	30,33	29,75	30,02	36,89	34,97	35,94	35,52	33,77	34,64
Sulawesi Selatan	19,71	21,81	20,90	27,01	26,15	26,52	24,69	24,77	24,74
Sulawesi Tenggara	30,02	23,59	26,59	34,34	36,15	35,29	33,34	33,21	33,27
Gorontalo	31,76	29,33	30,38	31,74	30,24	30,95	31,75	29,91	30,75
Sulawesi Barat	30,96	23,58	26,89	34,23	31,51	32,80	33,49	29,57	31,41
Maluku	18,52	24,24	21,57	26,69	21,66	24,12	23,72	22,66	23,17
Maluku Utara	23,84	32,09	28,13	29,89	23,36	26,71	28,40	25,73	27,08
Papua Barat	24,81	18,60	21,97	25,96	19,06	22,91	25,61	18,92	22,62
Papua	19,68	15,35	17,75	24,28	20,02	22,50	22,52	18,12	20,63
Indonesia	22,72	23,72	23,25	27,14	26,11	26,59	25,10	25,00	25,05

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 3.3 Rata-rata Lamanya Lansia Sakit (Hari) Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Tipe daerah		Jenis kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	8,03	6,89	7,10	7,16	7,13
Sumatera Utara	8,31	8,54	8,50	8,40	8,44
Sumatera Barat	9,77	9,33	9,84	9,14	9,47
Riau	10,02	8,50	8,49	9,41	8,95
Jambi	8,90	9,55	10,07	8,62	9,38
Sumatera Selatan	10,42	7,40	8,41	8,34	8,37
Bengkulu	11,48	9,59	10,28	9,75	10,02
Lampung	7,61	9,30	9,88	7,88	8,90
Kep. Bangka Belitung	12,24	9,54	10,55	10,98	10,79
Kep. Riau	7,24	9,06	8,69	6,79	7,77
DKI Jakarta	7,45	-	7,37	7,50	7,45
Jawa Barat	9,08	8,50	9,22	8,49	8,83
Jawa Tengah	9,93	8,94	9,64	9,18	9,40
DI Yogyakarta	8,32	6,47	7,78	7,23	7,46
Jawa Timur	9,98	9,83	10,43	9,45	9,89
Banten	8,07	10,06	8,84	9,00	8,93
Bali	8,22	6,82	7,73	7,11	7,40
Nusa Tenggara Barat	8,59	9,29	9,05	8,96	9,01
Nusa Tenggara Timur	7,92	8,86	9,62	7,96	8,73
Kalimantan Barat	8,70	8,34	8,25	8,67	8,45
Kalimantan Tengah	9,32	7,48	8,49	7,54	8,02
Kalimantan Selatan	9,57	9,50	10,77	8,51	9,53
Kalimantan Timur	10,94	8,43	9,86	9,11	9,50
Sulawesi Utara	10,09	8,78	9,13	9,21	9,17
Sulawesi Tengah	11,64	8,62	9,04	9,35	9,19
Sulawesi Selatan	9,84	10,45	10,98	9,76	10,29
Sulawesi Tenggara	8,27	8,90	8,92	8,66	8,78
Gorontalo	9,57	7,89	8,71	8,24	8,46
Sulawesi Barat	7,56	9,28	9,47	8,40	8,94
Maluku	6,96	8,86	9,91	6,53	8,19
Maluku Utara	8,46	8,82	9,61	7,72	8,72
Papua Barat	9,76	7,02	8,60	6,52	7,82
Papua	8,02	6,78	7,99	5,91	7,20
Indonesia	9,25	8,94	9,41	8,77	9,07

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 3.4 Persentase Lansia Sakit Menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2014

Provinsi	Lamanya sakit (hari)					Total
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	50,23	30,85	5,43	3,46	10,03	100,00
Sumatera Utara	45,98	29,84	6,48	2,37	15,33	100,00
Sumatera Barat	40,01	29,68	6,93	7,12	16,27	100,00
Riau	44,38	32,30	3,81	2,28	17,23	100,00
Jambi	41,47	30,99	6,32	3,60	17,62	100,00
Sumatera Selatan	46,19	32,45	3,73	2,41	15,22	100,00
Bengkulu	42,15	27,60	7,02	2,18	21,05	100,00
Lampung	45,94	27,73	5,28	4,03	17,01	100,00
Kep. Bangka Belitung	40,74	26,51	2,78	6,60	23,37	100,00
Kep. Riau	46,91	26,98	8,14	7,39	10,59	100,00
DKI Jakarta	54,35	26,26	4,78	1,21	13,41	100,00
Jawa Barat	40,21	33,80	7,47	2,70	15,82	100,00
Jawa Tengah	42,52	29,83	5,55	3,68	18,43	100,00
DI Yogyakarta	49,64	29,78	6,00	2,62	11,97	100,00
Jawa Timur	38,13	30,11	8,23	4,29	19,24	100,00
Banten	38,58	36,27	6,44	2,88	15,84	100,00
Bali	51,68	28,83	4,24	3,99	11,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	34,37	39,16	8,41	2,80	15,26	100,00
Nusa Tenggara Timur	37,68	37,40	7,61	2,72	14,59	100,00
Kalimantan Barat	44,40	32,63	5,52	2,29	15,15	100,00
Kalimantan Tengah	47,02	31,76	3,77	3,83	13,61	100,00
Kalimantan Selatan	42,21	28,57	5,80	4,20	19,22	100,00
Kalimantan Timur	39,61	32,28	7,42	2,68	18,00	100,00
Sulawesi Utara	38,31	36,35	7,50	2,10	15,73	100,00
Sulawesi Tengah	38,69	34,76	7,17	2,36	17,02	100,00
Sulawesi Selatan	39,14	29,69	5,85	3,72	21,60	100,00
Sulawesi Tenggara	44,76	30,43	5,08	3,44	16,29	100,00
Gorontalo	40,98	34,53	8,45	1,95	14,09	100,00
Sulawesi Barat	43,01	29,03	8,29	4,88	14,78	100,00
Maluku	33,73	41,55	12,40	1,53	10,80	100,00
Maluku Utara	32,18	40,17	12,22	3,00	12,43	100,00
Papua Barat	45,06	32,74	8,58	1,16	12,46	100,00
Papua	46,24	34,89	5,95	3,11	9,81	100,00
Indonesia	41,67	31,42	6,69	3,41	16,81	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 3.5 Proporsi Lansia Sakit yang Pernah Mengobati Sendiri Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Tipe daerah		Jenis kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	45,15	56,92	56,73	52,20	54,15
Sumatera Utara	63,07	63,18	64,04	62,43	63,13
Sumatera Barat	47,00	51,97	50,00	50,55	50,30
Riau	53,36	64,87	65,70	56,83	61,07
Jambi	60,49	70,42	69,52	65,30	67,38
Sumatera Selatan	65,12	65,86	64,98	66,13	65,58
Bengkulu	56,27	61,22	62,97	57,00	59,92
Lampung	59,20	62,27	63,24	60,11	61,62
Kep. Bangka Belitung	57,21	68,41	62,67	62,65	62,66
Kep. Riau	70,85	41,00	64,46	59,30	61,86
DKI Jakarta	64,19	-	70,11	59,74	64,19
Jawa Barat	65,05	67,40	66,94	65,23	66,02
Jawa Tengah	55,52	54,97	54,53	55,82	55,23
DI Yogyakarta	51,25	37,11	48,58	42,89	45,35
Jawa Timur	55,13	57,41	56,27	56,50	56,40
Banten	64,03	69,83	63,40	69,33	66,55
Bali	41,69	42,06	42,82	41,13	41,89
Nusa Tenggara Barat	60,17	55,49	55,07	59,57	57,45
Nusa Tenggara Timur	55,40	50,79	51,87	51,17	51,50
Kalimantan Barat	56,47	68,36	66,04	63,64	64,77
Kalimantan Tengah	64,74	67,67	64,80	68,85	66,76
Kalimantan Selatan	67,64	76,21	73,55	72,26	72,82
Kalimantan Timur	60,13	70,88	67,61	61,95	64,99
Sulawesi Utara	41,41	49,69	49,04	44,46	46,64
Sulawesi Tengah	68,67	65,03	63,98	67,66	65,84
Sulawesi Selatan	55,91	57,61	58,95	55,76	57,12
Sulawesi Tenggara	64,12	61,57	61,33	62,84	62,14
Gorontalo	62,05	70,85	71,36	65,25	67,97
Sulawesi Barat	57,46	52,30	55,56	51,72	53,51
Maluku	67,80	76,72	72,20	74,96	73,63
Maluku Utara	75,15	77,30	73,71	79,71	76,80
Papua Barat	68,62	54,73	56,05	63,40	58,96
Papua	67,42	57,61	61,14	61,53	61,31
Indonesia	58,94	59,50	59,79	58,78	59,24

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 3.6 Persentase Lansia Sakit yang Mengobati Sendiri Menurut Provinsi dan Obat/Cara Pengobatan Sendiri, 2014

Provinsi	Obat/cara Pengobatan Sendiri				Total
	Tradisional	Modern	Lainnya	Lampuran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	15,07	53,80	0,93	30,21	100,00
Sumatera Utara	9,39	66,14	0,84	23,63	100,00
Sumatera Barat	25,23	50,94	1,34	22,49	100,00
Riau	8,46	71,50	0,35	19,69	100,00
Jambi	9,74	62,79	1,28	26,19	100,00
Sumatera Selatan	6,85	66,31	2,54	24,31	100,00
Bengkulu	15,11	59,40	1,41	24,08	100,00
Lampung	12,50	62,08	1,70	23,72	100,00
Kep. Bangka Belitung	6,81	70,23	0,79	22,17	100,00
Kep. Riau	23,51	53,86	0,52	22,10	100,00
DKI Jakarta	8,79	65,38	2,04	23,79	100,00
Jawa Barat	7,35	70,79	0,57	21,29	100,00
Jawa Tengah	10,40	70,85	1,90	16,84	100,00
DI Yogyakarta	15,25	59,74	2,95	22,06	100,00
Jawa Timur	14,54	60,89	1,18	23,39	100,00
Banten	6,08	76,46	0,94	16,51	100,00
Bali	29,44	48,65	0,32	21,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	15,79	66,50	0,42	17,29	100,00
Nusa Tenggara Timur	25,81	55,93	1,22	17,04	100,00
Kalimantan Barat	12,40	66,75	1,99	18,87	100,00
Kalimantan Tengah	8,47	63,65	0,50	27,39	100,00
Kalimantan Selatan	5,55	73,39	0,80	20,25	100,00
Kalimantan Timur	11,02	61,03	0,12	27,82	100,00
Sulawesi Utara	9,83	79,75	0,79	9,63	100,00
Sulawesi Tengah	11,96	69,02	1,34	17,69	100,00
Sulawesi Selatan	13,92	61,38	0,75	23,95	100,00
Sulawesi Tenggara	12,67	69,53	0,78	17,02	100,00
Gorontalo	4,90	77,63	0,76	16,70	100,00
Sulawesi Barat	16,55	65,79	0,50	17,16	100,00
Maluku	13,25	59,11	0,48	27,16	100,00
Maluku Utara	11,49	51,62	0,00	36,88	100,00
Papua Barat	21,23	61,43	0,00	17,35	100,00
Papua	23,66	52,65	1,00	22,69	100,00
Indonesia	11,60	66,01	1,19	21,20	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 3.7 Proporsi Lansia Sakit yang Pernah Berobat Jalan Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	66,53	65,87	65,67	66,29	66,02
Sumatera Utara	49,86	45,31	48,14	46,65	47,30
Sumatera Barat	61,99	55,20	58,55	56,61	57,48
Riau	53,08	39,13	43,52	43,93	43,73
Jambi	51,68	46,66	45,36	50,96	48,20
Sumatera Selatan	51,77	45,26	45,36	49,95	47,75
Bengkulu	53,81	48,79	51,76	48,53	50,11
Lampung	49,49	48,79	48,07	49,76	48,94
Kep. Bangka Belitung	55,90	48,35	55,11	49,96	52,23
Kep. Riau	40,67	58,81	49,81	42,53	46,13
DKI Jakarta	54,95	-	53,68	55,91	54,95
Jawa Barat	54,24	49,40	52,30	52,18	52,24
Jawa Tengah	52,61	49,60	50,42	51,48	51,00
DI Yogyakarta	53,84	63,59	56,54	58,95	57,91
Jawa Timur	54,20	51,15	53,18	51,97	52,50
Banten	45,16	47,27	47,42	44,89	46,08
Bali	64,03	71,61	65,06	70,44	68,03
Nusa Tenggara Barat	54,76	53,39	55,41	52,66	53,96
Nusa Tenggara Timur	44,52	45,34	42,92	47,24	45,22
Kalimantan Barat	51,04	43,97	47,41	44,94	46,10
Kalimantan Tengah	47,41	46,18	47,86	45,18	46,56
Kalimantan Selatan	44,79	37,45	40,36	40,34	40,35
Kalimantan Timur	57,08	42,37	50,75	50,06	50,43
Sulawesi Utara	55,31	57,65	57,25	56,37	56,79
Sulawesi Tengah	41,72	42,78	44,83	40,31	42,54
Sulawesi Selatan	48,34	43,87	44,70	45,52	45,17
Sulawesi Tenggara	37,85	34,03	38,83	31,55	34,89
Gorontalo	55,80	54,48	48,04	60,41	54,91
Sulawesi Barat	46,33	44,97	51,09	40,24	45,29
Maluku	47,87	29,35	36,01	35,54	35,77
Maluku Utara	51,50	35,93	43,92	35,48	39,57
Papua Barat	42,93	44,19	43,80	43,83	43,81
Papua	41,12	39,60	38,64	42,23	40,18
Indonesia	53,22	49,56	51,14	51,32	51,24

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 3.8 Proporsi Lansia Sakit yang Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2014

Provinsi	Tempat Berobat Jalan						
	RS pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ poliklinik	Puskesmas/ pustu	Praktek nakes	Praktek batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	16,77	2,24	15,09	47,79	32,25	3,46	2,34
Sumatera Utara	10,61	9,52	23,24	21,74	40,82	4,31	4,16
Sumatera Barat	12,42	4,10	22,13	26,04	40,26	6,40	2,85
Riau	13,65	9,31	28,39	29,49	24,83	4,77	3,64
Jambi	9,31	2,70	36,44	29,50	31,08	3,00	2,62
Sumatera Selatan	7,71	6,91	27,47	22,58	37,11	3,21	3,59
Bengkulu	9,98	3,35	27,86	23,64	44,18	3,47	2,22
Lampung	3,60	3,42	25,30	22,05	48,55	2,76	3,18
Kep. Bangka Belitung	13,19	10,34	28,20	34,85	25,77	1,96	0,93
Kep. Riau	8,95	15,71	29,29	34,93	18,79	3,95	1,03
DKI Jakarta	18,61	15,04	39,31	28,96	0,59	1,77	3,42
Jawa Barat	6,57	4,91	41,43	26,82	26,91	2,51	2,13
Jawa Tengah	6,54	4,34	35,13	23,35	36,23	2,52	2,30
DI Yogyakarta	10,11	10,64	41,51	24,95	17,42	2,15	2,41
Jawa Timur	5,61	4,69	27,77	20,76	45,13	2,77	2,15
Banten	5,50	7,61	34,47	22,96	34,38	1,96	3,67
Bali	5,73	1,58	41,85	22,61	34,59	2,68	1,46
Nusa Tenggara Barat	3,77	1,63	28,22	29,03	40,51	3,91	1,68
Nusa Tenggara Timur	5,77	2,62	16,06	62,38	12,91	0,60	5,22
Kalimantan Barat	7,22	2,88	22,70	24,93	45,84	6,33	2,85
Kalimantan Tengah	12,10	1,88	14,40	41,39	37,34	3,78	5,70
Kalimantan Selatan	10,40	3,49	25,48	27,36	41,00	3,79	2,12
Kalimantan Timur	18,51	3,98	26,96	46,91	10,06	0,32	1,75
Sulawesi Utara	7,63	5,01	44,71	32,47	19,68	0,57	1,39
Sulawesi Tengah	11,30	1,55	16,91	44,54	28,25	4,19	3,24
Sulawesi Selatan	10,26	3,42	20,09	46,90	26,53	0,70	2,75
Sulawesi Tenggara	8,63	6,03	16,82	51,50	20,45	2,79	5,63
Gorontalo	6,05	1,26	39,77	26,61	40,06	4,84	1,25
Sulawesi Barat	11,87	2,62	10,90	55,28	24,36	2,04	0,00
Maluku	8,27	4,04	24,45	46,65	17,87	1,76	2,94
Maluku Utara	11,33	3,07	21,09	53,13	11,78	0,61	2,60
Papua Barat	17,06	3,47	22,39	54,12	8,46	0,00	1,34
Papua	30,79	5,63	14,79	58,54	9,20	4,34	8,10
Indonesia	7,83	5,12	31,70	27,05	33,71	2,78	2,53

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 3.9 Proporsi Lansia yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	13,58	10,90	12,11	9,47	7,86	8,58	10,54	8,65	9,50
Sumatera Utara	4,45	4,44	4,44	3,72	2,97	3,30	4,07	3,67	3,85
Sumatera Barat	6,56	5,52	5,98	4,12	2,64	3,29	4,99	3,66	4,25
Riau	7,71	9,59	8,65	4,21	3,91	4,06	5,52	6,06	5,79
Jambi	4,70	4,67	4,68	4,62	2,82	3,73	4,64	3,39	4,02
Sumatera Selatan	5,88	5,95	5,92	3,82	3,41	3,61	4,52	4,32	4,42
Bengkulu	7,94	5,27	6,56	5,03	2,80	3,92	5,78	3,47	4,61
Lampung	4,10	3,15	3,61	4,06	2,33	3,21	4,07	2,53	3,30
Kep. Bangka Belitung	9,22	11,07	10,18	4,27	4,05	4,16	6,78	7,71	7,25
Kep. Riau	3,25	1,60	2,42	8,33	6,35	7,40	4,72	2,87	3,81
DKI Jakarta	6,57	6,11	6,33	-	-	-	6,57	6,11	6,33
Jawa Barat	5,17	3,61	4,36	4,64	4,33	4,48	4,96	3,89	4,41
Jawa Tengah	7,64	6,22	6,87	5,79	4,72	5,22	6,59	5,38	5,94
DI Yogyakarta	7,02	7,44	7,25	6,03	7,70	6,96	6,61	7,55	7,13
Jawa Timur	6,73	5,06	5,82	5,58	3,71	4,55	6,08	4,30	5,11
Banten	5,22	4,55	4,87	2,43	3,91	3,20	4,16	4,30	4,23
Bali	4,32	2,64	3,43	4,62	2,80	3,65	4,46	2,72	3,53
Nusa Tenggara Barat	9,76	6,73	8,14	8,04	8,25	8,15	8,73	7,62	8,15
Nusa Tenggara Timur	9,89	7,60	8,69	4,09	2,38	3,19	5,06	3,26	4,12
Kalimantan Barat	7,46	6,67	7,06	2,48	2,40	2,44	4,04	3,80	3,92
Kalimantan Tengah	5,71	4,44	5,08	5,04	2,28	3,70	5,25	2,99	4,15
Kalimantan Selatan	9,94	4,51	7,02	3,09	2,61	2,83	5,86	3,36	4,50
Kalimantan Timur	3,33	4,86	4,05	3,63	2,84	3,27	3,45	4,06	3,73
Sulawesi Utara	7,33	5,16	6,15	8,73	6,07	7,33	8,15	5,67	6,83
Sulawesi Tengah	8,64	7,91	8,26	5,96	4,39	5,18	6,52	5,19	5,86
Sulawesi Selatan	6,00	5,33	5,62	4,24	3,74	3,96	4,80	4,25	4,49
Sulawesi Tenggara	9,07	3,69	6,20	3,12	2,33	2,70	4,49	2,65	3,51
Gorontalo	9,74	9,59	9,66	10,29	5,83	7,94	10,11	7,18	8,53
Sulawesi Barat	3,67	6,79	5,39	4,75	2,06	3,34	4,51	3,22	3,82
Maluku	3,42	4,24	3,86	2,57	0,99	1,76	2,88	2,24	2,55
Maluku Utara	4,99	6,36	5,70	4,76	1,91	3,38	4,82	3,12	3,98
Papua Barat	5,84	7,19	6,46	2,31	5,38	3,67	3,36	5,94	4,52
Papua	8,73	2,71	6,05	2,71	1,12	2,04	5,01	1,77	3,62
Indonesia	6,35	5,16	5,71	5,04	3,99	4,48	5,65	4,53	5,05

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 4.1.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
	(2)	(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	37,06	0,38	34,97	27,58	100,00
Sumatera Utara	40,19	0,46	30,61	28,73	100,00
Sumatera Barat	39,56	0,34	33,06	27,05	100,00
Riau	33,21	0,12	39,74	26,93	100,00
Jambi	38,11	0,08	37,78	24,02	100,00
Sumatera Selatan	33,86	0,86	37,64	27,64	100,00
Bengkulu	39,18	0,00	36,19	24,62	100,00
Lampung	37,48	0,24	34,01	28,27	100,00
Kep. Bangka Belitung	34,64	0,00	47,76	17,60	100,00
Kep. Riau	31,34	0,62	43,33	24,71	100,00
DKI Jakarta	29,21	1,22	41,12	28,44	100,00
Jawa Barat	36,36	0,61	36,45	26,58	100,00
Jawa Tengah	42,54	0,27	34,68	22,51	100,00
DI Yogyakarta	41,02	0,69	39,55	18,74	100,00
Jawa Timur	44,00	0,30	32,98	22,72	100,00
Banten	32,62	0,41	38,01	28,96	100,00
Bali	47,29	0,19	33,41	19,11	100,00
Nusa Tenggara Barat	44,15	0,15	29,20	26,50	100,00
Nusa Tenggara Timur	37,34	0,00	36,14	26,52	100,00
Kalimantan Barat	33,61	0,66	37,72	28,01	100,00
Kalimantan Tengah	41,59	0,52	34,38	23,51	100,00
Kalimantan Selatan	36,79	0,42	33,50	29,29	100,00
Kalimantan Timur	35,73	0,59	31,49	32,18	100,00
Sulawesi Utara	37,33	0,21	33,41	29,05	100,00
Sulawesi Tengah	36,44	0,00	36,26	27,30	100,00
Sulawesi Selatan	32,63	0,25	42,75	24,37	100,00
Sulawesi Tenggara	36,86	0,50	44,18	18,46	100,00
Gorontalo	39,18	0,61	31,90	28,30	100,00
Sulawesi Barat	45,47	0,00	35,72	18,80	100,00
Maluku	30,72	0,14	41,71	27,42	100,00
Maluku Utara	33,05	0,88	38,79	27,27	100,00
Papua Barat	40,10	3,31	21,05	35,54	100,00
Papua	41,44	0,00	35,06	23,50	100,00
Indonesia	38,90	0,46	35,59	25,06	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.1.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
	(2)	(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	46,26	0,24	30,27	23,23	100,00
Sumatera Utara	57,49	0,28	22,94	19,30	100,00
Sumatera Barat	49,38	0,27	28,31	22,03	100,00
Riau	52,69	0,07	29,31	17,93	100,00
Jambi	52,67	0,13	25,25	21,95	100,00
Sumatera Selatan	53,02	0,00	26,49	20,49	100,00
Bengkulu	55,72	0,00	25,40	18,88	100,00
Lampung	55,99	0,28	26,68	17,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	45,41	0,00	34,89	19,70	100,00
Kep. Riau	48,87	0,21	36,03	14,89	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	50,85	0,42	29,27	19,46	100,00
Jawa Tengah	57,54	0,09	22,53	19,84	100,00
DI Yogyakarta	69,58	0,00	17,01	13,41	100,00
Jawa Timur	57,32	0,14	25,42	17,12	100,00
Banten	48,21	0,21	27,01	24,57	100,00
Bali	58,98	0,00	27,39	13,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	50,50	0,39	26,08	23,03	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,78	0,03	17,54	21,66	100,00
Kalimantan Barat	53,41	0,21	23,02	23,37	100,00
Kalimantan Tengah	56,07	0,13	22,54	21,26	100,00
Kalimantan Selatan	55,10	0,17	24,09	20,64	100,00
Kalimantan Timur	54,28	0,00	20,53	25,19	100,00
Sulawesi Utara	48,12	0,00	28,13	23,75	100,00
Sulawesi Tengah	51,86	0,10	27,63	20,41	100,00
Sulawesi Selatan	46,97	0,09	31,36	21,58	100,00
Sulawesi Tenggara	53,43	0,05	28,25	18,27	100,00
Gorontalo	45,32	0,00	31,21	23,47	100,00
Sulawesi Barat	57,16	0,00	27,30	15,55	100,00
Maluku	50,36	0,00	28,11	21,52	100,00
Maluku Utara	53,69	0,00	23,35	22,96	100,00
Papua Barat	64,25	0,00	19,79	15,96	100,00
Papua	60,19	1,24	17,34	21,22	100,00
Indonesia	54,84	0,17	25,56	19,43	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.1.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir, 2014

Laki-laki

Provinsi	Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	65,25	0,37	5,47	28,92	100,00
Sumatera Utara	63,78	0,45	5,23	30,54	100,00
Sumatera Barat	63,83	0,30	6,49	29,39	100,00
Riau	62,85	0,09	10,80	26,26	100,00
Jambi	66,80	0,23	6,46	26,52	100,00
Sumatera Selatan	63,88	0,63	7,35	28,14	100,00
Bengkulu	66,29	0,00	9,59	24,12	100,00
Lampung	69,12	0,40	8,17	22,30	100,00
Kep. Bangka Belitung	61,57	0,00	16,54	21,89	100,00
Kep. Riau	48,41	0,28	20,38	30,92	100,00
DKI Jakarta	41,94	2,21	10,69	45,15	100,00
Jawa Barat	60,27	0,71	7,94	31,07	100,00
Jawa Tengah	66,47	0,23	9,99	23,31	100,00
DI Yogyakarta	62,59	0,61	18,01	18,79	100,00
Jawa Timur	68,57	0,40	8,78	22,25	100,00
Banten	55,64	0,69	8,78	34,90	100,00
Bali	61,90	0,00	21,66	16,44	100,00
Nusa Tenggara Barat	62,59	0,52	6,84	30,05	100,00
Nusa Tenggara Timur	72,28	0,00	4,61	23,11	100,00
Kalimantan Barat	60,81	0,71	5,85	32,62	100,00
Kalimantan Tengah	64,65	0,32	9,08	25,95	100,00
Kalimantan Selatan	63,12	0,35	5,77	30,77	100,00
Kalimantan Timur	55,22	0,63	4,48	39,67	100,00
Sulawesi Utara	61,21	0,19	7,09	31,50	100,00
Sulawesi Tengah	66,61	0,00	8,70	24,69	100,00
Sulawesi Selatan	63,72	0,23	7,41	28,65	100,00
Sulawesi Tenggara	63,37	0,21	13,82	22,60	100,00
Gorontalo	63,48	0,39	8,48	27,65	100,00
Sulawesi Barat	71,73	0,00	12,87	15,40	100,00
Maluku	60,69	0,00	12,37	26,94	100,00
Maluku Utara	64,82	0,44	7,79	26,95	100,00
Papua Barat	68,12	1,56	6,17	24,15	100,00
Papua	62,53	0,95	10,22	26,30	100,00
Indonesia	63,81	0,47	8,92	26,80	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.1.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir, 2014

Perempuan

Provinsi	Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	26,33	0,20	52,91	20,56	100,00
Sumatera Utara	36,96	0,29	44,53	18,22	100,00
Sumatera Barat	30,62	0,29	50,05	19,04	100,00
Riau	25,96	0,08	57,89	16,06	100,00
Jambi	28,97	0,00	52,45	18,57	100,00
Sumatera Selatan	29,21	0,00	52,67	18,12	100,00
Bengkulu	35,98	0,00	47,49	16,53	100,00
Lampung	33,46	0,13	49,82	16,59	100,00
Kep. Bangka Belitung	17,22	0,00	67,57	15,21	100,00
Kep. Riau	23,58	0,73	62,26	13,42	100,00
DKI Jakarta	17,67	0,33	68,71	13,29	100,00
Jawa Barat	25,38	0,37	57,25	17,00	100,00
Jawa Tengah	37,94	0,11	42,97	18,98	100,00
DI Yogyakarta	45,62	0,22	39,65	14,52	100,00
Jawa Timur	37,02	0,05	45,57	17,36	100,00
Banten	22,10	0,00	57,86	20,04	100,00
Bali	44,88	0,19	38,38	16,56	100,00
Nusa Tenggara Barat	34,30	0,08	46,39	19,23	100,00
Nusa Tenggara Timur	43,24	0,05	34,88	21,83	100,00
Kalimantan Barat	33,03	0,00	49,89	17,08	100,00
Kalimantan Tengah	36,56	0,18	45,73	17,53	100,00
Kalimantan Selatan	34,20	0,19	47,57	18,03	100,00
Kalimantan Timur	29,17	0,00	54,19	16,64	100,00
Sulawesi Utara	27,75	0,00	51,10	21,15	100,00
Sulawesi Tengah	30,85	0,15	49,84	19,16	100,00
Sulawesi Selatan	25,86	0,07	56,42	17,64	100,00
Sulawesi Tenggara	37,42	0,10	47,91	14,57	100,00
Gorontalo	25,89	0,00	51,60	22,51	100,00
Sulawesi Barat	38,18	0,00	44,64	17,18	100,00
Maluku	27,04	0,10	52,23	20,63	100,00
Maluku Utara	31,32	0,00	47,63	21,05	100,00
Papua Barat	43,55	0,00	39,04	17,42	100,00
Papua	39,65	0,50	43,53	16,31	100,00
Indonesia	32,88	0,15	49,20	17,77	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.1.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	43,93	0,28	31,46	24,34	100,00
Sumatera Utara	49,17	0,36	26,63	23,83	100,00
Sumatera Barat	45,91	0,30	29,99	23,80	100,00
Riau	45,21	0,09	33,31	21,39	100,00
Jambi	48,14	0,11	29,15	22,60	100,00
Sumatera Selatan	46,20	0,31	30,46	23,03	100,00
Bengkulu	51,38	0,00	28,24	20,39	100,00
Lampung	51,88	0,27	28,31	19,54	100,00
Kep. Bangka Belitung	39,87	0,00	41,51	18,62	100,00
Kep. Riau	35,94	0,51	41,41	22,13	100,00
DKI Jakarta	29,21	1,22	41,12	28,44	100,00
Jawa Barat	42,11	0,53	33,60	23,75	100,00
Jawa Tengah	51,12	0,17	27,73	20,98	100,00
DI Yogyakarta	53,30	0,39	29,86	16,45	100,00
Jawa Timur	51,43	0,21	28,76	19,60	100,00
Banten	38,50	0,34	33,86	27,30	100,00
Bali	52,85	0,10	30,54	16,50	100,00
Nusa Tenggara Barat	47,92	0,29	27,35	24,44	100,00
Nusa Tenggara Timur	57,02	0,03	20,52	22,44	100,00
Kalimantan Barat	46,97	0,36	27,80	24,88	100,00
Kalimantan Tengah	51,42	0,25	26,35	21,98	100,00
Kalimantan Selatan	47,88	0,27	27,80	24,05	100,00
Kalimantan Timur	43,46	0,35	26,93	29,27	100,00
Sulawesi Utara	43,49	0,09	30,39	26,02	100,00
Sulawesi Tengah	48,54	0,08	29,48	21,90	100,00
Sulawesi Selatan	42,44	0,14	34,96	22,46	100,00
Sulawesi Tenggara	49,54	0,15	31,99	18,32	100,00
Gorontalo	43,48	0,18	31,42	24,91	100,00
Sulawesi Barat	54,39	0,00	29,29	16,32	100,00
Maluku	43,23	0,05	33,05	23,67	100,00
Maluku Utara	48,41	0,22	27,30	24,06	100,00
Papua Barat	57,68	0,90	20,13	21,29	100,00
Papua	52,92	0,76	24,21	22,11	100,00
Indonesia	47,48	0,30	30,19	22,03	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	37,45	46,50	65,62	26,53	44,20
Sumatera Utara	40,65	57,76	64,23	37,25	49,54
Sumatera Barat	39,90	49,66	64,13	30,92	46,21
Riau	33,33	52,76	62,94	26,05	45,30
Jambi	38,19	52,80	67,02	28,97	48,25
Sumatera Selatan	34,72	53,02	64,50	29,21	46,51
Bengkulu	39,18	55,72	66,29	35,98	51,38
Lampung	37,72	56,27	69,53	33,59	52,15
Kep. Bangka Belitung	34,64	45,41	61,57	17,22	39,87
Kep. Riau	31,96	49,09	48,69	24,32	36,45
DKI Jakarta	30,44	-	44,16	18,00	30,44
Jawa Barat	36,97	51,27	60,98	25,75	42,65
Jawa Tengah	42,81	57,63	66,70	38,05	51,29
DI Yogyakarta	41,71	69,58	63,20	45,83	53,69
Jawa Timur	44,30	57,46	68,97	37,07	51,64
Banten	33,03	48,42	56,33	22,10	38,84
Bali	47,48	58,98	61,90	45,06	52,95
Nusa Tenggara Barat	44,30	50,89	63,11	34,38	48,21
Nusa Tenggara Timur	37,34	60,81	72,28	43,29	57,04
Kalimantan Barat	34,27	53,62	61,53	33,03	47,33
Kalimantan Tengah	42,11	56,20	64,97	36,74	51,67
Kalimantan Selatan	37,21	55,27	63,47	34,40	48,15
Kalimantan Timur	36,32	54,28	55,85	29,17	43,80
Sulawesi Utara	37,54	48,12	61,41	27,75	43,59
Sulawesi Tengah	36,44	51,96	66,61	31,00	48,62
Sulawesi Selatan	32,88	47,06	63,94	25,94	42,58
Sulawesi Tenggara	37,36	53,48	63,58	37,52	49,70
Gorontalo	39,79	45,32	63,87	25,89	43,67
Sulawesi Barat	45,47	57,16	71,73	38,18	54,39
Maluku	30,86	50,36	60,69	27,14	43,28
Maluku Utara	33,93	53,69	65,26	31,32	48,63
Papua Barat	43,41	64,25	69,68	43,55	58,58
Papua	41,44	61,44	63,48	40,16	53,69
Indonesia	39,35	55,01	64,28	33,03	47,78

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.3.1 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014

Provinsi	Status Perkawinan				Total
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,12	72,50	2,42	23,96	100,00
Sumatera Utara	0,81	70,88	1,40	26,92	100,00
Sumatera Barat	0,47	73,03	2,93	23,57	100,00
Riau	0,00	76,90	2,14	20,96	100,00
Jambi	0,44	78,59	1,12	19,85	100,00
Sumatera Selatan	0,62	78,45	1,52	19,41	100,00
Bengkulu	0,41	79,92	1,43	18,25	100,00
Lampung	0,12	81,30	1,12	17,46	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,78	79,55	0,71	17,97	100,00
Kep. Riau	0,00	73,03	1,79	25,18	100,00
DKI Jakarta	1,83	71,70	2,25	24,21	100,00
Jawa Barat	0,10	78,87	1,90	19,12	100,00
Jawa Tengah	0,48	75,24	1,07	23,21	100,00
DI Yogyakarta	1,07	75,76	1,12	22,05	100,00
Jawa Timur	0,63	72,22	1,97	25,18	100,00
Banten	0,22	76,79	2,46	20,52	100,00
Bali	2,93	78,18	0,45	18,44	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,47	73,90	2,84	22,79	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,39	71,02	2,03	23,55	100,00
Kalimantan Barat	1,87	78,10	0,59	19,43	100,00
Kalimantan Tengah	0,23	71,62	2,42	25,72	100,00
Kalimantan Selatan	0,70	65,69	2,67	30,95	100,00
Kalimantan Timur	0,61	76,27	3,37	19,75	100,00
Sulawesi Utara	2,59	73,48	1,41	22,51	100,00
Sulawesi Tengah	1,70	74,51	2,13	21,66	100,00
Sulawesi Selatan	3,35	73,94	2,53	20,17	100,00
Sulawesi Tenggara	0,84	72,96	1,91	24,29	100,00
Gorontalo	1,82	75,03	2,17	20,98	100,00
Sulawesi Barat	1,31	70,83	2,08	25,78	100,00
Maluku	1,67	74,32	1,15	22,86	100,00
Maluku Utara	0,65	79,08	1,41	18,86	100,00
Papua Barat	0,85	75,98	0,66	22,50	100,00
Papua	1,56	78,42	1,29	18,73	100,00
Indonesia	0,78	74,98	1,71	22,52	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.3.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Anggota Rumah Tangga, 2014

Provinsi	Status Anggota Rumah Tangga				Total
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/Suami	Orang tua/Mertua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	85,61	12,98	0,94	0,48	100,00
Sumatera Utara	78,88	17,94	2,26	0,93	100,00
Sumatera Barat	78,96	15,26	4,55	1,23	100,00
Riau	84,67	12,02	3,22	0,08	100,00
Jambi	80,64	13,96	4,64	0,77	100,00
Sumatera Selatan	77,47	17,05	4,22	1,26	100,00
Bengkulu	75,13	18,35	5,67	0,86	100,00
Lampung	77,87	17,93	3,63	0,57	100,00
Kep. Bangka Belitung	83,98	12,40	2,41	1,22	100,00
Kep. Riau	87,31	10,79	1,28	0,62	100,00
DKI Jakarta	82,30	11,96	4,01	1,74	100,00
Jawa Barat	81,12	16,42	1,68	0,78	100,00
Jawa Tengah	70,85	20,52	7,56	1,08	100,00
DI Yogyakarta	64,43	24,65	8,45	2,48	100,00
Jawa Timur	73,53	17,79	7,16	1,53	100,00
Banten	81,74	12,24	4,28	1,73	100,00
Bali	51,95	23,20	21,47	3,37	100,00
Nusa Tenggara Barat	76,99	16,68	5,48	0,84	100,00
Nusa Tenggara Timur	72,10	19,52	5,66	2,73	100,00
Kalimantan Barat	74,91	18,44	5,76	0,89	100,00
Kalimantan Tengah	80,93	13,23	4,62	1,21	100,00
Kalimantan Selatan	80,28	11,85	6,43	1,43	100,00
Kalimantan Timur	80,55	14,39	3,08	1,98	100,00
Sulawesi Utara	74,31	16,64	6,98	2,06	100,00
Sulawesi Tengah	79,34	14,60	5,67	0,40	100,00
Sulawesi Selatan	74,93	16,28	6,22	2,57	100,00
Sulawesi Tenggara	75,79	18,72	3,67	1,82	100,00
Gorontalo	79,72	15,03	5,25	0,00	100,00
Sulawesi Barat	76,06	15,85	6,17	1,93	100,00
Maluku	74,04	15,60	7,24	3,12	100,00
Maluku Utara	75,97	16,94	4,68	2,40	100,00
Papua Barat	79,95	15,28	3,59	1,18	100,00
Papua	73,24	20,01	3,47	3,28	100,00
Indonesia	75,29	17,69	5,70	1,33	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.3.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Provinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Total
	Tidak/ belum sekolah	Tidak tamat SD	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/ Paket C	Diploma/ Akademi/ Sarjana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	12,33	29,33	39,46	9,99	6,82	2,08	100,00
Sumatera Utara	5,41	30,68	35,34	15,76	10,80	2,00	100,00
Sumatera Barat	5,41	37,96	30,09	12,17	11,83	2,54	100,00
Riau	12,84	29,52	37,02	10,49	7,99	2,15	100,00
Jambi	15,06	40,45	30,54	6,52	5,81	1,61	100,00
Sumatera Selatan	6,88	42,68	36,60	6,24	4,57	3,02	100,00
Bengkulu	11,16	40,48	33,03	7,14	5,55	2,64	100,00
Lampung	13,66	39,11	36,13	5,73	3,78	1,59	100,00
Kep. Bangka Belitung	11,76	39,82	29,83	11,44	6,20	0,95	100,00
Kep. Riau	11,35	28,71	25,81	13,10	16,88	4,15	100,00
DKI Jakarta	5,06	17,47	27,84	16,29	21,84	11,49	100,00
Jawa Barat	11,98	31,94	42,33	5,74	5,98	2,03	100,00
Jawa Tengah	20,30	38,94	29,27	5,62	4,51	1,36	100,00
DI Yogyakarta	27,89	25,75	26,87	9,31	7,03	3,16	100,00
Jawa Timur	26,12	35,46	28,16	5,25	3,77	1,23	100,00
Banten	16,79	40,82	23,16	6,20	7,96	5,07	100,00
Bali	29,10	29,23	29,09	4,32	4,76	3,49	100,00
Nusa Tenggara Barat	45,75	27,92	17,71	3,97	3,31	1,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	27,69	31,40	30,35	3,43	5,42	1,71	100,00
Kalimantan Barat	32,35	38,64	17,97	4,61	4,66	1,78	100,00
Kalimantan Tengah	10,45	36,30	38,81	6,31	6,61	1,51	100,00
Kalimantan Selatan	11,11	45,65	29,35	6,38	5,16	2,34	100,00
Kalimantan Timur	11,91	34,85	31,50	9,04	8,82	3,88	100,00
Sulawesi Utara	1,08	24,53	37,07	19,07	12,46	5,80	100,00
Sulawesi Tengah	11,57	28,39	37,28	11,01	9,82	1,93	100,00
Sulawesi Selatan	23,63	31,90	25,00	8,25	7,85	3,36	100,00
Sulawesi Tenggara	22,09	33,60	27,29	6,91	7,56	2,55	100,00
Gorontalo	3,21	45,46	35,99	6,75	7,02	1,58	100,00
Sulawesi Barat	24,25	39,15	22,30	6,03	6,58	1,68	100,00
Maluku	7,65	25,33	42,95	13,81	7,73	2,53	100,00
Maluku Utara	8,20	27,68	38,07	13,62	10,62	1,81	100,00
Papua Barat	17,14	31,31	30,76	7,34	10,17	3,28	100,00
Papua	28,75	24,31	18,35	12,42	12,55	3,62	100,00
Indonesia	18,73	34,65	31,54	6,95	6,00	2,13	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.4.1 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2014

Perkotaan

Provinsi	Lapangan Usaha					Total
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	31,00	8,32	32,61	15,68	12,39	100,00
Sumatera Utara	31,74	5,57	31,18	18,52	12,99	100,00
Sumatera Barat	36,10	7,24	33,25	13,98	9,44	100,00
Riau	24,93	6,01	43,71	9,45	15,89	100,00
Jambi	33,33	3,03	32,16	21,28	10,19	100,00
Sumatera Selatan	27,72	6,30	26,30	20,61	19,07	100,00
Bengkulu	29,69	5,13	36,32	19,51	9,34	100,00
Lampung	34,66	6,49	32,53	9,80	16,52	100,00
Kep. Bangka Belitung	23,79	15,05	25,22	17,85	18,09	100,00
Kep. Riau	9,91	5,50	40,63	19,87	24,09	100,00
DKI Jakarta	1,71	6,21	49,63	21,56	20,88	100,00
Jawa Barat	29,47	7,76	32,32	18,29	12,16	100,00
Jawa Tengah	38,03	13,55	28,82	10,64	8,95	100,00
DI Yogyakarta	44,19	8,75	28,67	10,30	8,08	100,00
Jawa Timur	39,71	8,80	30,20	11,51	9,78	100,00
Banten	15,79	5,54	37,45	24,54	16,68	100,00
Bali	40,31	15,14	26,76	10,08	7,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	49,53	5,73	31,02	9,80	3,92	100,00
Nusa Tenggara Timur	29,28	11,90	41,22	8,22	9,38	100,00
Kalimantan Barat	31,37	7,61	31,98	21,57	7,47	100,00
Kalimantan Tengah	33,67	5,23	35,12	17,21	8,77	100,00
Kalimantan Selatan	20,17	7,96	40,22	13,28	18,38	100,00
Kalimantan Timur	28,57	6,12	30,26	15,96	19,09	100,00
Sulawesi Utara	29,67	3,70	36,15	17,13	13,36	100,00
Sulawesi Tengah	29,19	9,64	31,99	15,33	13,86	100,00
Sulawesi Selatan	28,04	4,76	38,30	10,75	18,14	100,00
Sulawesi Tenggara	28,28	9,28	48,16	6,53	7,74	100,00
Gorontalo	16,47	11,11	58,26	4,58	9,58	100,00
Sulawesi Barat	50,74	10,42	32,54	4,60	1,69	100,00
Maluku	38,64	7,94	25,32	12,39	15,71	100,00
Maluku Utara	35,14	3,44	42,19	9,96	9,28	100,00
Papua Barat	5,41	6,90	53,50	15,15	19,04	100,00
Papua	22,28	1,63	41,25	13,23	21,60	100,00
Indonesia	32,69	8,83	32,35	14,44	11,69	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.4.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2014

Provinsi	Lapangan Usaha					Total
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Aceh	77,69	4,59	8,65	4,30	4,77	100,00
Sumatera Utara	81,61	3,20	8,51	4,29	2,40	100,00
Sumatera Barat	73,21	6,35	13,01	3,59	3,84	100,00
Riau	81,87	3,85	11,27	0,32	2,69	100,00
Jambi	85,40	1,37	4,46	8,06	0,71	100,00
Sumatera Selatan	86,67	2,35	6,81	3,04	1,13	100,00
Bengkulu	81,21	2,14	12,17	2,13	2,35	100,00
Lampung	77,71	3,73	11,43	5,12	2,01	100,00
Kep. Bangka Belitung	71,14	10,40	7,62	3,45	7,39	100,00
Kep. Riau	67,19	6,79	13,10	5,86	7,07	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	68,60	7,20	12,48	7,87	3,86	100,00
Jawa Tengah	74,04	8,42	10,34	3,22	3,98	100,00
DI Yogyakarta	85,09	4,52	6,11	1,53	2,75	100,00
Jawa Timur	77,35	5,09	10,49	4,65	2,42	100,00
Banten	61,16	5,88	16,99	9,46	6,51	100,00
Bali	76,08	6,91	10,75	1,63	4,63	100,00
Nusa Tenggara Barat	70,48	10,83	13,07	2,12	3,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	87,63	7,29	2,89	0,37	1,81	100,00
Kalimantan Barat	89,67	2,17	3,89	3,06	1,22	100,00
Kalimantan Tengah	86,96	2,67	6,34	1,84	2,18	100,00
Kalimantan Selatan	79,64	3,82	8,54	5,28	2,71	100,00
Kalimantan Timur	73,85	2,67	8,42	10,78	4,28	100,00
Sulawesi Utara	72,03	4,59	13,27	4,58	5,54	100,00
Sulawesi Tengah	78,50	5,16	11,86	3,00	1,48	100,00
Sulawesi Selatan	79,13	4,14	10,56	4,76	1,42	100,00
Sulawesi Tenggara	73,24	5,44	14,22	3,47	3,62	100,00
Gorontalo	68,84	11,38	11,82	4,31	3,66	100,00
Sulawesi Barat	77,46	6,77	13,38	1,14	1,24	100,00
Maluku	85,03	4,36	5,37	3,46	1,77	100,00
Maluku Utara	86,87	2,05	5,13	4,24	1,72	100,00
Papua Barat	68,65	2,92	12,43	13,03	2,97	100,00
Papua	77,04	1,48	7,65	12,63	1,20	100,00
Indonesia	76,56	5,81	10,20	4,40	3,03	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.4.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2014

Laki-laki

Provinsi	Lapangan Usaha					Total
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	68,34	3,89	12,32	7,00	8,45	100,00
Sumatera Utara	62,38	5,00	14,23	7,82	10,58	100,00
Sumatera Barat	63,23	6,70	14,57	7,68	7,82	100,00
Riau	68,18	4,44	16,38	2,46	8,53	100,00
Jambi	77,64	1,95	7,86	8,21	4,34	100,00
Sumatera Selatan	74,68	3,11	8,43	5,28	8,50	100,00
Bengkulu	73,99	2,95	11,61	6,01	5,43	100,00
Lampung	77,25	4,56	8,08	4,09	6,03	100,00
Kep. Bangka Belitung	53,23	9,38	15,31	9,52	12,56	100,00
Kep. Riau	36,35	2,73	22,51	16,76	21,65	100,00
DKI Jakarta	2,51	6,25	45,05	20,39	25,80	100,00
Jawa Barat	49,85	7,44	18,53	12,75	11,44	100,00
Jawa Tengah	67,62	7,78	10,15	5,27	9,18	100,00
DI Yogyakarta	71,10	3,84	11,42	4,86	8,78	100,00
Jawa Timur	69,49	5,45	11,01	6,00	8,06	100,00
Banten	38,90	5,97	20,87	18,16	16,10	100,00
Bali	67,10	5,77	10,81	6,59	9,73	100,00
Nusa Tenggara Barat	74,70	5,27	9,99	5,11	4,93	100,00
Nusa Tenggara Timur	84,58	3,27	6,71	1,52	3,93	100,00
Kalimantan Barat	75,64	3,25	10,34	7,11	3,66	100,00
Kalimantan Tengah	76,35	2,80	8,98	6,27	5,59	100,00
Kalimantan Selatan	64,89	3,11	13,87	6,65	11,48	100,00
Kalimantan Timur	56,01	4,25	16,12	7,28	16,34	100,00
Sulawesi Utara	65,27	4,50	9,29	8,73	12,21	100,00
Sulawesi Tengah	79,23	4,20	7,52	4,05	5,00	100,00
Sulawesi Selatan	72,22	3,79	11,32	5,07	7,60	100,00
Sulawesi Tenggara	73,02	4,64	11,73	3,34	7,27	100,00
Gorontalo	66,33	8,18	16,15	1,66	7,68	100,00
Sulawesi Barat	81,24	7,03	7,68	1,97	2,09	100,00
Maluku	74,48	5,07	6,95	5,75	7,75	100,00
Maluku Utara	80,08	1,55	8,55	6,23	3,59	100,00
Papua Barat	57,50	3,00	13,00	17,94	8,56	100,00
Papua	64,93	1,20	14,90	8,19	10,78	100,00
Indonesia	64,21	5,81	13,10	7,53	9,35	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.4.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2014

Provinsi	Lapangan Usaha					Total
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Aceh	66,41	8,46	16,74	6,20	2,20	100,00
Sumatera Utara	61,47	2,88	22,03	12,86	0,76	100,00
Sumatera Barat	59,58	6,48	27,36	5,09	1,49	100,00
Riau	59,56	4,51	31,09	4,04	0,81	100,00
Jambi	60,55	1,37	19,40	18,67	0,00	100,00
Sumatera Selatan	64,21	3,94	19,16	12,53	0,16	100,00
Bengkulu	64,98	2,34	27,27	4,86	0,55	100,00
Lampung	56,58	3,32	29,69	9,80	0,61	100,00
Kep. Bangka Belitung	37,92	24,04	16,12	11,23	10,69	100,00
Kep. Riau	18,15	12,55	47,68	11,01	10,62	100,00
DKI Jakarta	0,00	6,14	59,49	24,09	10,28	100,00
Jawa Barat	44,66	7,59	32,19	14,50	1,06	100,00
Jawa Tengah	51,56	13,96	27,13	6,76	0,58	100,00
DI Yogyakarta	62,66	9,25	21,21	5,97	0,91	100,00
Jawa Timur	53,20	8,13	28,74	9,18	0,75	100,00
Banten	33,19	5,08	44,43	15,62	1,68	100,00
Bali	49,85	16,84	27,30	4,37	1,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,22	15,11	36,38	4,81	1,48	100,00
Nusa Tenggara Timur	76,86	14,59	7,22	0,71	0,62	100,00
Kalimantan Barat	76,97	3,77	10,58	7,83	0,85	100,00
Kalimantan Tengah	66,66	4,41	23,43	4,97	0,52	100,00
Kalimantan Selatan	56,20	8,32	25,22	9,45	0,81	100,00
Kalimantan Timur	43,21	4,51	25,28	27,00	0,00	100,00
Sulawesi Utara	39,13	3,79	46,00	10,10	0,98	100,00
Sulawesi Tengah	52,12	9,46	31,16	6,98	0,28	100,00
Sulawesi Selatan	56,19	5,25	28,76	8,40	1,40	100,00
Sulawesi Tenggara	54,09	8,30	32,62	4,99	0,00	100,00
Gorontalo	29,72	18,06	41,96	10,26	0,00	100,00
Sulawesi Barat	56,26	8,32	33,83	1,59	0,00	100,00
Maluku	70,10	5,73	17,95	5,80	0,41	100,00
Maluku Utara	72,96	3,88	18,19	3,11	1,87	100,00
Papua Barat	54,97	5,11	35,44	3,87	0,61	100,00
Papua	50,59	2,24	24,28	22,90	0,00	100,00
Indonesia	52,58	8,94	28,08	9,38	1,02	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.4.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Lapangan Usaha					Total
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	67,71	5,39	13,77	6,74	6,40	100,00
Sumatera Utara	62,01	4,13	17,42	9,88	6,56	100,00
Sumatera Barat	61,91	6,62	19,17	6,75	5,55	100,00
Riau	65,82	4,46	20,42	2,90	6,41	100,00
Jambi	72,57	1,78	11,29	11,32	3,05	100,00
Sumatera Selatan	71,31	3,38	11,89	7,62	5,81	100,00
Bengkulu	70,89	2,74	17,01	5,62	3,75	100,00
Lampung	70,80	4,17	14,82	5,87	4,34	100,00
Kep. Bangka Belitung	50,00	12,48	15,48	9,88	12,17	100,00
Kep. Riau	30,35	5,96	30,80	14,87	18,01	100,00
DKI Jakarta	1,71	6,21	49,63	21,56	20,88	100,00
Jawa Barat	48,22	7,49	22,81	13,30	8,19	100,00
Jawa Tengah	61,21	10,25	16,92	5,87	5,75	100,00
DI Yogyakarta	67,14	6,38	16,01	5,38	5,09	100,00
Jawa Timur	63,12	6,50	17,94	7,24	5,20	100,00
Banten	37,23	5,71	27,78	17,41	11,87	100,00
Bali	59,31	10,76	18,26	5,59	6,08	100,00
Nusa Tenggara Barat	62,64	8,92	19,79	5,00	3,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	81,50	7,78	6,92	1,20	2,61	100,00
Kalimantan Barat	76,10	3,43	10,42	7,37	2,67	100,00
Kalimantan Tengah	73,11	3,34	13,82	5,84	3,89	100,00
Kalimantan Selatan	61,62	5,07	18,14	7,70	7,46	100,00
Kalimantan Timur	52,13	4,33	18,90	13,26	11,38	100,00
Sulawesi Utara	56,44	4,26	21,69	9,19	8,41	100,00
Sulawesi Tengah	70,53	5,88	15,11	4,99	3,48	100,00
Sulawesi Selatan	66,73	4,29	17,29	6,21	5,48	100,00
Sulawesi Tenggara	65,40	6,11	20,14	4,01	4,34	100,00
Gorontalo	54,73	11,31	24,33	4,38	5,25	100,00
Sulawesi Barat	72,17	7,50	17,17	1,83	1,33	100,00
Maluku	73,06	5,29	10,52	5,76	5,37	100,00
Maluku Utara	77,82	2,29	11,61	5,24	3,04	100,00
Papua Barat	56,69	3,67	20,20	13,43	6,01	100,00
Papua	60,42	1,53	17,85	12,81	7,39	100,00
Indonesia	59,95	6,95	18,58	8,20	6,31	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.5.1 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014

Provinsi	Jabatan/Jenis Pekerjaan			Total
	Profesional, Pejabat dan Manager	Tenaga Usaha dan Jasa	Buruh, Operator dan Pekerja Kasar	
	(2)	(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6,84	59,79	33,37	100,00
Sumatera Utara	6,13	63,78	30,09	100,00
Sumatera Barat	7,14	68,18	24,68	100,00
Riau	5,76	67,29	26,96	100,00
Jambi	4,70	72,44	22,86	100,00
Sumatera Selatan	14,56	50,49	34,95	100,00
Bengkulu	5,32	65,42	29,26	100,00
Lampung	3,64	65,11	31,25	100,00
Kep. Bangka Belitung	12,33	51,14	36,53	100,00
Kep. Riau	15,98	58,60	25,42	100,00
DKI Jakarta	13,77	59,65	26,58	100,00
Jawa Barat	6,15	56,88	36,97	100,00
Jawa Tengah	4,43	61,91	33,65	100,00
DI Yogyakarta	4,68	72,14	23,18	100,00
Jawa Timur	3,55	65,35	31,10	100,00
Banten	11,23	56,00	32,77	100,00
Bali	5,58	66,22	28,21	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,84	63,06	34,10	100,00
Nusa Tenggara Timur	8,08	69,19	22,73	100,00
Kalimantan Barat	9,47	63,59	26,94	100,00
Kalimantan Tengah	6,83	64,60	28,57	100,00
Kalimantan Selatan	12,00	57,81	30,19	100,00
Kalimantan Timur	9,63	56,78	33,59	100,00
Sulawesi Utara	10,96	60,15	28,89	100,00
Sulawesi Tengah	10,04	59,80	30,16	100,00
Sulawesi Selatan	11,40	62,80	25,80	100,00
Sulawesi Tenggara	15,08	63,51	21,41	100,00
Gorontalo	0,87	69,77	29,36	100,00
Sulawesi Barat	2,91	80,35	16,74	100,00
Maluku	6,29	63,65	30,06	100,00
Maluku Utara	10,03	74,37	15,60	100,00
Papua Barat	26,16	51,64	22,20	100,00
Papua	16,59	55,56	27,85	100,00
Indonesia	6,23	61,87	31,89	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.5.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014

Perdesaan

Provinsi	Jabatan/Jenis Pekerjaan			Total
	Profesional, Pejabat dan Manager	Tenaga Usaha dan Jasa	Buruh, Operator dan Pekerja Kasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,62	83,45	12,93	100,00
Sumatera Utara	1,67	88,40	9,94	100,00
Sumatera Barat	2,69	84,01	13,31	100,00
Riau	0,09	86,56	13,35	100,00
Jambi	2,61	86,32	11,07	100,00
Sumatera Selatan	2,49	85,17	12,34	100,00
Bengkulu	1,06	91,13	7,81	100,00
Lampung	1,41	86,41	12,18	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,45	74,58	22,96	100,00
Kep. Riau	5,62	79,42	14,97	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	1,46	69,00	29,55	100,00
Jawa Tengah	1,15	79,48	19,37	100,00
DI Yogyakarta	0,45	88,20	11,34	100,00
Jawa Timur	1,47	80,40	18,12	100,00
Banten	3,83	78,57	17,59	100,00
Bali	0,32	83,15	16,53	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,51	79,46	19,03	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,57	89,64	9,79	100,00
Kalimantan Barat	1,36	90,65	7,99	100,00
Kalimantan Tengah	1,19	89,79	9,02	100,00
Kalimantan Selatan	2,85	86,85	10,31	100,00
Kalimantan Timur	5,76	85,36	8,89	100,00
Sulawesi Utara	3,80	77,87	18,33	100,00
Sulawesi Tengah	1,72	88,24	10,04	100,00
Sulawesi Selatan	1,76	90,83	7,40	100,00
Sulawesi Tenggara	3,08	84,23	12,69	100,00
Gorontalo	1,66	77,47	20,87	100,00
Sulawesi Barat	1,33	89,38	9,29	100,00
Maluku	2,35	88,66	8,99	100,00
Maluku Utara	3,03	92,07	4,89	100,00
Papua Barat	8,59	80,31	11,10	100,00
Papua	1,46	94,14	4,40	100,00
Indonesia	1,60	81,54	16,86	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.5.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014

Laki-laki

Provinsi	Jabatan/Jenis Pekerjaan			Total
	Profesional, Pejabat dan Manager	Tenaga Usaha dan Jasa	Buruh, Operator dan Pekerja Kasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,31	77,39	18,31	100,00
Sumatera Utara	3,31	74,26	22,43	100,00
Sumatera Barat	4,49	77,83	17,68	100,00
Riau	1,93	79,90	18,17	100,00
Jambi	2,04	83,37	14,59	100,00
Sumatera Selatan	5,66	76,36	17,98	100,00
Bengkulu	2,17	82,89	14,94	100,00
Lampung	1,44	81,72	16,84	100,00
Kep. Bangka Belitung	6,36	65,65	27,99	100,00
Kep. Riau	15,21	61,36	23,43	100,00
DKI Jakarta	14,86	53,97	31,17	100,00
Jawa Barat	4,52	60,86	34,62	100,00
Jawa Tengah	2,54	73,37	24,09	100,00
DI Yogyakarta	2,26	80,82	16,91	100,00
Jawa Timur	2,39	73,74	23,87	100,00
Banten	8,67	63,97	27,36	100,00
Bali	3,96	76,47	19,57	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,12	75,09	21,78	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,11	90,09	7,80	100,00
Kalimantan Barat	3,43	83,34	13,22	100,00
Kalimantan Tengah	3,18	82,08	14,74	100,00
Kalimantan Selatan	7,35	76,68	15,97	100,00
Kalimantan Timur	5,55	72,93	21,52	100,00
Sulawesi Utara	5,80	70,24	23,96	100,00
Sulawesi Tengah	3,23	84,24	12,53	100,00
Sulawesi Selatan	4,53	82,76	12,72	100,00
Sulawesi Tenggara	7,27	79,46	13,27	100,00
Gorontalo	1,26	78,42	20,32	100,00
Sulawesi Barat	1,68	87,13	11,20	100,00
Maluku	4,12	79,53	16,35	100,00
Maluku Utara	5,59	87,27	7,14	100,00
Papua Barat	14,86	68,44	16,69	100,00
Papua	6,99	79,24	13,77	100,00
Indonesia	3,74	72,94	23,33	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.5.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014

Perempuan

Provinsi	Jabatan/Jenis Pekerjaan			Total
	Profesional, Pejabat dan Manager	Tenaga Usaha dan Jasa	Buruh, Operator dan Pekerja Kasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,31	80,46	15,23	100,00
Sumatera Utara	3,57	85,17	11,26	100,00
Sumatera Barat	3,25	81,60	15,15	100,00
Riau	1,05	84,36	14,59	100,00
Jambi	5,70	81,77	12,53	100,00
Sumatera Selatan	5,58	75,64	18,77	100,00
Bengkulu	1,43	91,85	6,72	100,00
Lampung	2,48	85,80	11,72	100,00
Kep. Bangka Belitung	8,76	58,37	32,88	100,00
Kep. Riau	6,33	75,53	18,15	100,00
DKI Jakarta	11,43	71,87	16,70	100,00
Jawa Barat	2,56	66,67	30,77	100,00
Jawa Tengah	2,00	72,99	25,01	100,00
DI Yogyakarta	2,36	81,53	16,11	100,00
Jawa Timur	2,06	76,23	21,71	100,00
Banten	5,47	73,16	21,37	100,00
Bali	1,35	73,69	24,97	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,11	70,33	29,56	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,24	83,56	16,20	100,00
Kalimantan Barat	2,89	86,24	10,87	100,00
Kalimantan Tengah	1,62	85,54	12,84	100,00
Kalimantan Selatan	2,75	80,31	16,93	100,00
Kalimantan Timur	12,36	68,70	18,94	100,00
Sulawesi Utara	7,67	73,54	18,78	100,00
Sulawesi Tengah	2,70	82,41	14,89	100,00
Sulawesi Selatan	3,29	86,46	10,24	100,00
Sulawesi Tenggara	2,06	82,33	15,61	100,00
Gorontalo	1,87	68,87	29,26	100,00
Sulawesi Barat	1,59	88,40	10,01	100,00
Maluku	1,81	87,78	10,42	100,00
Maluku Utara	1,39	92,66	5,96	100,00
Papua Barat	5,65	88,56	5,79	100,00
Papua	4,00	89,39	6,62	100,00
Indonesia	2,69	76,11	21,20	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.5.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Jabatan/Jenis Pekerjaan			Total
	Profesional, Pejabat dan Manager	Tenaga Usaha dan Jasa	Buruh, Operator dan Pekerja Kasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,31	78,40	17,30	100,00
Sumatera Utara	3,42	78,72	17,86	100,00
Sumatera Barat	4,04	79,19	16,77	100,00
Riau	1,69	81,13	17,18	100,00
Jambi	3,13	82,90	13,98	100,00
Sumatera Selatan	5,64	76,13	18,23	100,00
Bengkulu	1,91	85,98	12,11	100,00
Lampung	1,77	82,99	15,24	100,00
Kep. Bangka Belitung	6,87	64,11	29,02	100,00
Kep. Riau	12,28	66,03	21,69	100,00
DKI Jakarta	13,77	59,65	26,58	100,00
Jawa Barat	3,90	62,68	33,41	100,00
Jawa Tengah	2,32	73,22	24,46	100,00
DI Yogyakarta	2,31	81,16	16,54	100,00
Jawa Timur	2,26	74,71	23,03	100,00
Banten	7,73	66,67	25,60	100,00
Bali	2,78	75,21	22,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,01	73,32	24,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,36	87,49	11,15	100,00
Kalimantan Barat	3,24	84,36	12,40	100,00
Kalimantan Tengah	2,66	83,24	14,10	100,00
Kalimantan Selatan	5,62	78,05	16,33	100,00
Kalimantan Timur	7,61	71,65	20,74	100,00
Sulawesi Utara	6,43	71,35	22,21	100,00
Sulawesi Tengah	3,06	83,65	13,29	100,00
Sulawesi Selatan	4,10	84,03	11,87	100,00
Sulawesi Tenggara	5,17	80,61	14,21	100,00
Gorontalo	1,45	75,40	23,15	100,00
Sulawesi Barat	1,65	87,59	10,77	100,00
Maluku	3,37	82,21	14,42	100,00
Maluku Utara	4,26	88,98	6,76	100,00
Papua Barat	11,91	74,89	13,20	100,00
Papua	6,05	82,43	11,52	100,00
Indonesia	3,35	74,10	22,55	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.6.1 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2014

Perkotaan

Provinsi	Status Pekerjaan					Total
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	45,88	27,03	15,37	5,50	6,22	100,00
Sumatera Utara	36,43	30,00	19,61	5,91	8,05	100,00
Sumatera Barat	40,67	31,34	16,58	5,10	6,31	100,00
Riau	28,50	43,98	17,02	2,35	8,15	100,00
Jambi	32,87	33,50	10,57	8,92	14,15	100,00
Sumatera Selatan	26,87	28,81	29,30	2,53	12,49	100,00
Bengkulu	33,74	39,23	16,07	4,18	6,77	100,00
Lampung	32,59	31,02	16,58	10,88	8,93	100,00
Kep. Bangka Belitung	31,51	31,54	25,71	1,69	9,55	100,00
Kep. Riau	39,58	16,28	38,23	4,26	1,66	100,00
DKI Jakarta	38,60	29,42	23,76	2,53	5,70	100,00
Jawa Barat	29,82	32,30	15,59	13,96	8,33	100,00
Jawa Tengah	29,46	36,59	11,39	10,98	11,58	100,00
DI Yogyakarta	25,25	35,78	13,24	6,07	19,66	100,00
Jawa Timur	29,99	33,11	13,35	13,21	10,34	100,00
Banten	38,06	21,47	30,34	7,39	2,74	100,00
Bali	20,54	41,27	10,49	6,27	21,44	100,00
Nusa Tenggara Barat	33,91	34,88	6,09	15,94	9,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	39,90	33,05	16,67	0,88	9,50	100,00
Kalimantan Barat	31,05	32,94	19,62	5,10	11,29	100,00
Kalimantan Tengah	39,68	37,96	11,79	3,33	7,24	100,00
Kalimantan Selatan	46,12	26,17	11,36	5,79	10,55	100,00
Kalimantan Timur	31,79	28,32	24,06	6,83	8,99	100,00
Sulawesi Utara	44,76	25,64	18,40	4,12	7,09	100,00
Sulawesi Tengah	43,81	30,92	12,12	6,08	7,08	100,00
Sulawesi Selatan	34,35	40,98	15,37	2,09	7,21	100,00
Sulawesi Tenggara	47,01	36,22	5,83	2,99	7,95	100,00
Gorontalo	46,09	26,02	16,20	7,99	3,71	100,00
Sulawesi Barat	29,35	43,09	4,15	3,39	20,03	100,00
Maluku	40,85	27,16	21,54	0,53	9,92	100,00
Maluku Utara	31,42	36,85	10,44	3,85	17,45	100,00
Papua Barat	41,73	29,68	20,77	3,19	4,62	100,00
Papua	37,86	26,25	27,00	3,70	5,19	100,00
Indonesia	31,60	33,02	15,49	10,05	9,84	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.6.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2014

Provinsi	Status Pekerjaan					Total
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	32,75	46,12	7,43	5,11	8,59	100,00
Sumatera Utara	30,18	44,98	6,24	3,95	14,65	100,00
Sumatera Barat	38,84	40,02	5,10	5,96	10,07	100,00
Riau	39,82	42,38	5,45	5,17	7,18	100,00
Jambi	33,36	44,37	8,32	6,22	7,74	100,00
Sumatera Selatan	25,00	48,83	7,49	4,31	14,37	100,00
Bengkulu	29,48	44,60	4,27	4,39	17,27	100,00
Lampung	25,47	50,57	3,70	5,11	15,15	100,00
Kep. Bangka Belitung	50,22	31,78	9,51	2,12	6,36	100,00
Kep. Riau	63,68	17,93	11,16	2,53	4,70	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	18,95	46,74	5,42	17,36	11,53	100,00
Jawa Tengah	19,31	49,23	3,80	10,18	17,48	100,00
DI Yogyakarta	11,99	51,01	3,16	3,08	30,76	100,00
Jawa Timur	19,71	48,42	3,34	11,52	17,01	100,00
Banten	23,65	40,90	5,14	18,51	11,79	100,00
Bali	18,38	48,09	2,91	7,52	23,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	24,29	50,63	4,74	8,22	12,12	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,98	56,06	1,37	1,28	19,31	100,00
Kalimantan Barat	19,30	54,08	5,03	3,31	18,27	100,00
Kalimantan Tengah	33,29	45,15	7,36	3,13	11,08	100,00
Kalimantan Selatan	33,67	45,12	6,84	2,39	11,98	100,00
Kalimantan Timur	37,52	35,61	14,32	3,46	9,08	100,00
Sulawesi Utara	40,67	29,42	5,04	12,83	12,04	100,00
Sulawesi Tengah	30,52	51,58	3,66	3,09	11,16	100,00
Sulawesi Selatan	23,64	55,79	3,25	2,04	15,28	100,00
Sulawesi Tenggara	27,48	54,61	3,38	1,54	12,99	100,00
Gorontalo	37,39	43,22	2,58	8,80	8,01	100,00
Sulawesi Barat	23,43	56,13	1,58	3,62	15,24	100,00
Maluku	35,82	40,32	4,68	1,81	17,37	100,00
Maluku Utara	30,08	49,02	4,80	4,44	11,65	100,00
Papua Barat	24,15	47,19	13,55	0,64	14,47	100,00
Papua	25,78	45,87	3,12	1,50	23,72	100,00
Indonesia	23,07	48,13	4,40	8,93	15,47	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.6.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2014

Laki-laki

Provinsi	Status Pekerjaan					Total
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	35,28	48,02	10,64	5,04	1,01	100,00
Sumatera Utara	30,34	49,44	13,64	5,55	1,03	100,00
Sumatera Barat	35,89	45,39	10,37	5,24	3,11	100,00
Riau	35,15	48,65	10,97	3,73	1,50	100,00
Jambi	31,86	50,98	10,12	5,91	1,12	100,00
Sumatera Selatan	23,97	56,74	13,91	3,47	1,92	100,00
Bengkulu	29,38	58,35	7,39	3,12	1,77	100,00
Lampung	23,81	60,97	6,63	6,42	2,17	100,00
Kep. Bangka Belitung	41,70	38,93	16,66	1,53	1,19	100,00
Kep. Riau	45,36	21,88	27,15	5,43	0,18	100,00
DKI Jakarta	40,45	28,95	26,01	3,12	1,46	100,00
Jawa Barat	23,63	45,70	12,40	15,90	2,36	100,00
Jawa Tengah	18,91	58,70	7,29	11,07	4,02	100,00
DI Yogyakarta	12,77	65,18	9,11	6,40	6,53	100,00
Jawa Timur	20,37	55,43	8,16	12,55	3,49	100,00
Banten	28,86	34,82	20,76	12,60	2,96	100,00
Bali	14,18	61,87	6,84	6,65	10,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,92	59,97	6,23	9,35	2,53	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,28	68,92	3,89	1,25	3,66	100,00
Kalimantan Barat	19,04	63,52	10,24	3,34	3,86	100,00
Kalimantan Tengah	33,37	53,69	8,13	3,39	1,42	100,00
Kalimantan Selatan	33,81	49,85	9,13	4,22	2,99	100,00
Kalimantan Timur	32,71	39,23	19,44	5,89	2,73	100,00
Sulawesi Utara	42,30	33,57	11,88	9,84	2,41	100,00
Sulawesi Tengah	32,86	57,33	4,79	3,53	1,49	100,00
Sulawesi Selatan	25,48	63,30	7,02	1,16	3,05	100,00
Sulawesi Tenggara	26,00	65,28	4,66	2,53	1,52	100,00
Gorontalo	33,40	49,77	8,79	7,53	0,51	100,00
Sulawesi Barat	24,32	65,09	1,99	4,83	3,78	100,00
Maluku	35,87	50,43	10,86	2,19	0,65	100,00
Maluku Utara	28,21	56,56	7,14	4,91	3,17	100,00
Papua Barat	20,31	54,00	21,08	0,89	3,72	100,00
Papua	26,12	54,10	13,67	2,42	3,69	100,00
Indonesia	23,90	53,40	9,95	9,65	3,10	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.6.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2014

Perempuan

Provinsi	Status Pekerjaan					Total
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	36,11	29,81	6,02	5,50	22,55	100,00
Sumatera Utara	35,94	24,17	8,41	3,52	27,96	100,00
Sumatera Barat	45,64	23,12	5,44	6,52	19,28	100,00
Riau	40,52	27,44	2,76	6,08	23,20	100,00
Jambi	36,49	19,68	5,93	9,18	28,72	100,00
Sumatera Selatan	28,68	16,01	11,64	4,63	39,03	100,00
Bengkulu	32,15	15,32	5,20	6,68	40,65	100,00
Lampung	32,80	17,57	3,87	5,18	40,58	100,00
Kep. Bangka Belitung	42,51	4,59	17,06	3,45	32,38	100,00
Kep. Riau	53,92	6,67	31,46	0,00	7,95	100,00
DKI Jakarta	34,61	30,42	18,90	1,25	14,81	100,00
Jawa Barat	26,76	25,02	7,03	14,90	26,29	100,00
Jawa Tengah	28,96	23,69	5,32	9,54	32,47	100,00
DI Yogyakarta	23,51	20,69	5,85	2,12	47,83	100,00
Jawa Timur	28,61	22,70	5,50	11,55	31,63	100,00
Banten	37,00	20,61	12,84	12,76	16,79	100,00
Bali	25,74	24,24	6,00	7,28	36,74	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,00	18,93	3,58	14,09	25,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	26,26	30,60	1,60	1,21	40,33	100,00
Kalimantan Barat	27,57	22,55	5,07	4,44	40,36	100,00
Kalimantan Tengah	38,08	22,62	9,25	2,77	27,28	100,00
Kalimantan Selatan	43,46	22,03	6,69	2,09	25,73	100,00
Kalimantan Timur	39,51	15,76	17,97	3,22	23,54	100,00
Sulawesi Utara	41,93	17,16	6,17	9,21	25,53	100,00
Sulawesi Tengah	32,25	29,01	5,53	3,66	29,55	100,00
Sulawesi Selatan	27,71	30,88	4,62	3,75	33,05	100,00
Sulawesi Tenggara	38,14	30,80	2,54	0,69	27,83	100,00
Gorontalo	53,41	14,46	0,77	10,84	20,52	100,00
Sulawesi Barat	25,11	33,27	2,26	1,38	37,98	100,00
Maluku	39,72	8,81	5,22	0,00	46,26	100,00
Maluku Utara	34,85	26,06	2,87	3,10	33,13	100,00
Papua Barat	42,66	22,44	1,87	1,61	31,42	100,00
Papua	36,69	9,02	3,17	1,63	49,49	100,00
Indonesia	30,47	23,35	6,25	8,84	31,09	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.6.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Status Pekerjaan					Total
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	35,56	42,04	9,12	5,19	8,08	100,00
Sumatera Utara	32,64	39,09	11,50	4,72	12,06	100,00
Sumatera Barat	39,40	37,38	8,60	5,70	8,93	100,00
Riau	36,63	42,83	8,71	4,38	7,46	100,00
Jambi	33,24	41,69	8,87	6,88	9,32	100,00
Sumatera Selatan	25,49	43,61	13,18	3,85	13,88	100,00
Bengkulu	30,33	43,52	6,63	4,35	15,17	100,00
Lampung	26,61	47,43	5,77	6,03	14,15	100,00
Kep. Bangka Belitung	41,87	31,67	16,74	1,93	7,78	100,00
Kep. Riau	48,18	16,87	28,57	3,64	2,74	100,00
DKI Jakarta	38,60	29,42	23,76	2,53	5,70	100,00
Jawa Barat	24,61	39,22	10,72	15,59	9,86	100,00
Jawa Tengah	22,92	44,73	6,50	10,46	15,38	100,00
DI Yogyakarta	17,81	44,33	7,58	4,39	25,89	100,00
Jawa Timur	23,59	42,63	7,12	12,16	14,49	100,00
Banten	31,25	30,65	18,43	12,65	7,02	100,00
Bali	19,39	44,89	6,46	6,93	22,32	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,89	44,73	5,25	11,11	11,02	100,00
Nusa Tenggara Timur	23,87	53,64	2,98	1,23	18,28	100,00
Kalimantan Barat	22,03	49,16	8,43	3,73	16,65	100,00
Kalimantan Tengah	34,95	43,28	8,51	3,18	10,08	100,00
Kalimantan Selatan	37,45	39,38	8,21	3,42	11,55	100,00
Kalimantan Timur	34,77	32,11	18,99	5,08	9,04	100,00
Sulawesi Utara	42,18	28,03	9,95	9,63	10,22	100,00
Sulawesi Tengah	32,67	48,24	5,03	3,57	10,50	100,00
Sulawesi Selatan	26,24	52,19	6,20	2,05	13,32	100,00
Sulawesi Tenggara	30,89	51,40	3,81	1,79	12,11	100,00
Gorontalo	39,74	38,59	6,25	8,58	6,85	100,00
Sulawesi Barat	24,60	53,54	2,09	3,58	16,19	100,00
Maluku	37,12	36,92	9,03	1,48	15,45	100,00
Maluku Utara	30,32	46,89	5,79	4,34	12,67	100,00
Papua Barat	27,48	43,88	14,92	1,12	12,61	100,00
Papua	29,44	39,92	10,37	2,17	18,10	100,00
Indonesia	26,30	42,41	8,60	9,35	13,34	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.7.1 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seminggu, 2014

Provinsi	Jumlah Jam Kerja Seminggu			Total
	0 - 14 jam	15 - 35 jam	36 jam atau lebih	
	(1)	(2)	(3)	
Aceh	13,44	41,71	44,85	100,00
Sumatera Utara	12,17	34,85	52,99	100,00
Sumatera Barat	14,96	41,40	43,64	100,00
Riau	15,37	30,39	54,24	100,00
Jambi	12,73	38,08	49,19	100,00
Sumatera Selatan	7,85	37,09	55,06	100,00
Bengkulu	13,01	34,07	52,92	100,00
Lampung	12,00	32,80	55,21	100,00
Kep. Bangka Belitung	9,68	46,63	43,69	100,00
Kep. Riau	10,11	21,96	67,93	100,00
DKI Jakarta	12,33	22,60	65,07	100,00
Jawa Barat	12,07	36,55	51,38	100,00
Jawa Tengah	13,79	37,27	48,94	100,00
DI Yogyakarta	19,30	38,76	41,93	100,00
Jawa Timur	14,27	37,48	48,25	100,00
Banten	21,66	26,78	51,55	100,00
Bali	10,62	40,41	48,97	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,58	38,78	40,64	100,00
Nusa Tenggara Timur	17,29	36,40	46,31	100,00
Kalimantan Barat	19,43	30,75	49,82	100,00
Kalimantan Tengah	11,90	37,39	50,72	100,00
Kalimantan Selatan	18,28	34,35	47,37	100,00
Kalimantan Timur	13,34	30,32	56,34	100,00
Sulawesi Utara	9,63	28,07	62,31	100,00
Sulawesi Tengah	18,43	29,98	51,59	100,00
Sulawesi Selatan	14,00	36,00	50,01	100,00
Sulawesi Tenggara	11,67	36,59	51,74	100,00
Gorontalo	12,19	29,27	58,54	100,00
Sulawesi Barat	31,44	37,43	31,13	100,00
Maluku	13,40	30,52	56,08	100,00
Maluku Utara	9,31	43,13	47,55	100,00
Papua Barat	18,77	19,68	61,56	100,00
Papua	10,01	28,57	61,43	100,00
Indonesia	13,80	35,69	50,51	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.7.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seminggu, 2014

Perdesaan

Provinsi	Jumlah Jam Kerja Seminggu			Total
	0 - 14 jam	15 - 35 jam	36 jam atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	25,36	50,68	23,96	100,00
Sumatera Utara	17,24	50,47	32,29	100,00
Sumatera Barat	19,21	46,44	34,36	100,00
Riau	19,83	54,65	25,52	100,00
Jambi	21,44	53,84	24,72	100,00
Sumatera Selatan	16,09	54,69	29,22	100,00
Bengkulu	17,73	49,08	33,19	100,00
Lampung	16,83	48,41	34,77	100,00
Kep. Bangka Belitung	17,86	45,14	37,00	100,00
Kep. Riau	28,16	40,35	31,50	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	12,49	54,57	32,94	100,00
Jawa Tengah	16,85	46,52	36,62	100,00
DI Yogyakarta	14,33	41,99	43,68	100,00
Jawa Timur	15,00	52,12	32,88	100,00
Banten	16,56	50,17	33,27	100,00
Bali	12,21	46,15	41,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,38	40,90	37,72	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,19	46,43	31,38	100,00
Kalimantan Barat	15,98	51,36	32,67	100,00
Kalimantan Tengah	14,99	52,72	32,29	100,00
Kalimantan Selatan	20,98	48,58	30,44	100,00
Kalimantan Timur	11,22	45,98	42,81	100,00
Sulawesi Utara	12,68	50,32	37,00	100,00
Sulawesi Tengah	23,27	42,30	34,43	100,00
Sulawesi Selatan	22,68	43,44	33,88	100,00
Sulawesi Tenggara	19,82	46,94	33,24	100,00
Gorontalo	24,63	34,50	40,87	100,00
Sulawesi Barat	29,08	45,19	25,72	100,00
Maluku	10,25	54,53	35,21	100,00
Maluku Utara	18,21	45,96	35,83	100,00
Papua Barat	9,59	51,64	38,77	100,00
Papua	9,17	57,81	33,03	100,00
Indonesia	16,63	49,47	33,90	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.7.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seminggu, 2014

Laki-laki

Provinsi	Jumlah Jam Kerja Seminggu			Total
	0 - 14 jam	15 - 35 jam	36 jam atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	16,92	50,27	32,81	100,00
Sumatera Utara	13,80	39,33	46,88	100,00
Sumatera Barat	15,11	41,97	42,92	100,00
Riau	15,88	46,73	37,40	100,00
Jambi	18,27	47,31	34,42	100,00
Sumatera Selatan	12,77	47,90	39,33	100,00
Bengkulu	13,65	45,87	40,48	100,00
Lampung	13,49	43,06	43,45	100,00
Kep. Bangka Belitung	12,06	45,46	42,48	100,00
Kep. Riau	11,26	30,91	57,83	100,00
DKI Jakarta	11,69	18,97	69,34	100,00
Jawa Barat	10,72	41,23	48,06	100,00
Jawa Tengah	12,60	40,97	46,43	100,00
DI Yogyakarta	12,23	36,58	51,19	100,00
Jawa Timur	11,79	44,27	43,94	100,00
Banten	16,56	37,19	46,26	100,00
Bali	9,80	40,09	50,10	100,00
Nusa Tenggara Barat	18,24	41,07	40,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	17,66	43,40	38,94	100,00
Kalimantan Barat	14,23	44,25	41,52	100,00
Kalimantan Tengah	10,46	47,20	42,35	100,00
Kalimantan Selatan	15,38	42,58	42,04	100,00
Kalimantan Timur	7,32	39,45	53,23	100,00
Sulawesi Utara	9,88	41,37	48,74	100,00
Sulawesi Tengah	16,79	41,92	41,29	100,00
Sulawesi Selatan	17,00	41,64	41,37	100,00
Sulawesi Tenggara	16,05	44,29	39,67	100,00
Gorontalo	21,76	30,28	47,96	100,00
Sulawesi Barat	24,88	46,68	28,44	100,00
Maluku	9,23	45,87	44,90	100,00
Maluku Utara	13,32	40,91	45,78	100,00
Papua Barat	11,17	48,30	40,53	100,00
Papua	9,72	44,33	45,94	100,00
Indonesia	12,88	41,86	45,26	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.7.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seminggu, 2014

Perempuan

Provinsi	Jumlah Jam Kerja Seminggu			Total
	0 - 14 jam	15 - 35 jam	36 jam atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	34,86	45,68	19,46	100,00
Sumatera Utara	17,34	51,54	31,12	100,00
Sumatera Barat	22,90	50,12	26,98	100,00
Riau	25,70	50,66	23,65	100,00
Jambi	21,71	56,23	22,06	100,00
Sumatera Selatan	16,39	54,75	28,86	100,00
Bengkulu	22,74	46,45	30,81	100,00
Lampung	21,72	52,16	26,12	100,00
Kep. Bangka Belitung	22,23	47,08	30,69	100,00
Kep. Riau	27,33	23,67	49,01	100,00
DKI Jakarta	13,71	30,42	55,87	100,00
Jawa Barat	15,68	53,84	30,48	100,00
Jawa Tengah	20,52	46,63	32,86	100,00
DI Yogyakarta	21,37	45,11	33,53	100,00
Jawa Timur	19,30	50,19	30,51	100,00
Banten	25,74	39,40	34,85	100,00
Bali	13,48	47,56	38,96	100,00
Nusa Tenggara Barat	25,88	38,47	35,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	27,72	48,36	23,91	100,00
Kalimantan Barat	21,51	50,85	27,64	100,00
Kalimantan Tengah	21,58	51,79	26,63	100,00
Kalimantan Selatan	28,07	47,07	24,85	100,00
Kalimantan Timur	23,54	36,20	40,26	100,00
Sulawesi Utara	14,85	43,62	41,54	100,00
Sulawesi Tengah	34,53	36,92	28,55	100,00
Sulawesi Selatan	27,43	41,62	30,95	100,00
Sulawesi Tenggara	21,90	46,38	31,71	100,00
Gorontalo	20,24	39,16	40,60	100,00
Sulawesi Barat	37,75	38,35	23,90	100,00
Maluku	14,88	53,47	31,64	100,00
Maluku Utara	23,85	55,30	20,85	100,00
Papua Barat	11,66	39,87	48,48	100,00
Papua	8,76	58,95	32,29	100,00
Indonesia	20,20	48,41	31,40	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.7.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seminggu, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Jumlah Jam Kerja Seminggu			Total
	0 - 14 jam	15 - 35 jam	36 jam atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	22,81	48,76	28,42	100,00
Sumatera Utara	15,25	44,33	40,43	100,00
Sumatera Barat	17,91	44,90	37,18	100,00
Riau	18,57	47,81	33,62	100,00
Jambi	19,29	49,96	30,75	100,00
Sumatera Selatan	13,94	50,11	35,96	100,00
Bengkulu	16,78	46,07	37,15	100,00
Lampung	16,05	45,90	38,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	14,21	45,81	39,99	100,00
Kep. Riau	16,55	28,53	54,92	100,00
DKI Jakarta	12,33	22,60	65,07	100,00
Jawa Barat	12,27	45,18	42,54	100,00
Jawa Tengah	15,76	43,23	41,01	100,00
DI Yogyakarta	16,51	40,58	42,91	100,00
Jawa Timur	14,73	46,59	38,69	100,00
Banten	19,25	37,84	42,91	100,00
Bali	11,46	43,46	45,07	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,08	40,11	38,82	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,67	45,38	32,95	100,00
Kalimantan Barat	16,78	46,56	36,66	100,00
Kalimantan Tengah	14,18	48,74	37,08	100,00
Kalimantan Selatan	20,16	44,27	35,57	100,00
Kalimantan Timur	12,24	38,46	49,30	100,00
Sulawesi Utara	11,56	42,13	46,31	100,00
Sulawesi Tengah	22,49	40,31	37,20	100,00
Sulawesi Selatan	20,57	41,63	37,80	100,00
Sulawesi Tenggara	18,40	45,13	36,47	100,00
Gorontalo	21,28	33,09	45,63	100,00
Sulawesi Barat	29,55	43,66	26,79	100,00
Maluku	11,07	48,34	40,60	100,00
Maluku Utara	16,65	45,47	37,88	100,00
Papua Barat	11,32	45,60	43,08	100,00
Papua	9,42	48,93	41,64	100,00
Indonesia	15,56	44,25	40,19	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.8 Rata-rata Jumlah Jam Kerja dari Lansia Bekerja Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Tipe daerah		Jenis kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	35,53	24,77	29,20	22,72	27,07
Sumatera Utara	37,69	28,19	34,13	28,73	31,92
Sumatera Barat	35,65	29,86	33,81	27,73	31,62
Riau	38,85	27,48	31,95	27,34	30,68
Jambi	36,58	25,27	29,60	24,39	28,05
Sumatera Selatan	39,87	28,54	32,47	29,46	31,50
Bengkulu	39,42	29,52	32,42	29,76	31,51
Lampung	37,90	29,31	31,75	28,36	30,69
Kep. Bangka Belitung	35,30	29,95	33,42	28,31	32,34
Kep. Riau	38,75	27,41	35,74	32,58	34,70
DKI Jakarta	43,34	-	44,59	40,65	43,34
Jawa Barat	37,70	30,55	35,81	30,91	34,27
Jawa Tengah	36,02	31,04	34,52	30,25	32,82
DI Yogyakarta	33,37	32,43	35,73	29,57	32,84
Jawa Timur	36,24	30,84	34,49	30,39	32,88
Banten	36,62	29,72	34,45	30,73	33,36
Bali	37,46	34,08	37,26	33,73	35,66
Nusa Tenggara Barat	32,01	30,34	31,50	30,07	30,97
Nusa Tenggara Timur	36,03	26,82	29,83	24,71	27,79
Kalimantan Barat	35,99	28,90	32,46	27,00	30,55
Kalimantan Tengah	38,01	29,05	33,42	27,32	31,38
Kalimantan Selatan	33,57	27,22	31,66	24,96	29,14
Kalimantan Timur	40,88	33,79	39,75	31,32	37,19
Sulawesi Utara	40,82	31,47	34,56	35,60	34,91
Sulawesi Tengah	37,12	29,05	32,56	25,68	30,35
Sulawesi Selatan	38,19	29,19	32,47	29,28	31,38
Sulawesi Tenggara	38,85	29,23	31,46	30,10	30,91
Gorontalo	41,61	31,08	34,08	33,56	33,91
Sulawesi Barat	29,01	24,21	25,62	24,37	25,16
Maluku	41,96	29,54	33,99	30,15	32,74
Maluku Utara	37,68	27,44	31,26	24,85	29,23
Papua Barat	40,81	33,29	34,54	35,08	34,71
Papua	41,00	31,18	35,17	31,96	34,16
Indonesia	37,09	30,05	34,30	29,96	32,71

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.9.1 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji Selama Sebulan, 2014

Provinsi	Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji Sebulan (Rupiah)						Perkotaan
	Kurang dari 500.000	500.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 1.999.999	2.000.000 - 2.499.999	2.500.000 atau lebih	Total
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,70	22,71	16,09	16,37	10,67	26,46	100,00
Sumatera Utara	7,93	18,78	24,44	22,50	9,88	16,47	100,00
Sumatera Barat	7,63	22,62	20,36	17,63	9,41	22,36	100,00
Riau	7,38	15,70	19,17	16,89	10,15	30,70	100,00
Jambi	5,20	19,90	17,89	18,10	9,82	29,09	100,00
Sumatera Selatan	6,08	21,38	16,72	19,54	10,87	25,40	100,00
Bengkulu	11,37	20,48	18,66	12,03	9,94	27,51	100,00
Lampung	11,87	24,81	20,13	13,44	8,08	21,66	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,81	13,89	19,93	20,71	13,37	26,29	100,00
Kep. Riau	1,53	7,49	8,41	12,40	20,05	50,12	100,00
DKI Jakarta	4,26	10,92	9,94	17,20	20,17	37,50	100,00
Jawa Barat	12,50	22,37	18,73	15,90	11,11	19,40	100,00
Jawa Tengah	14,90	37,12	24,54	9,27	4,34	9,83	100,00
DI Yogyakarta	12,77	33,34	22,27	9,54	5,78	16,30	100,00
Jawa Timur	16,82	29,59	16,98	15,86	6,99	13,76	100,00
Banten	8,62	15,06	12,94	24,14	13,19	26,05	100,00
Bali	6,45	17,45	19,98	20,48	10,29	25,35	100,00
Nusa Tenggara Barat	16,36	36,27	15,08	10,72	5,89	15,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	13,56	27,33	12,92	9,48	8,17	28,54	100,00
Kalimantan Barat	7,85	16,97	21,02	17,84	11,04	25,28	100,00
Kalimantan Tengah	7,36	18,38	14,49	15,76	11,98	32,04	100,00
Kalimantan Selatan	11,90	21,35	18,26	14,84	8,20	25,46	100,00
Kalimantan Timur	4,46	10,15	13,01	15,45	11,84	45,09	100,00
Sulawesi Utara	4,25	16,79	15,27	24,89	13,76	25,04	100,00
Sulawesi Tengah	4,98	30,53	13,79	13,80	8,62	28,28	100,00
Sulawesi Selatan	16,07	17,80	17,26	12,96	7,65	28,27	100,00
Sulawesi Tenggara	10,81	24,46	14,16	15,06	6,65	28,86	100,00
Gorontalo	23,35	29,41	11,34	11,21	6,45	18,25	100,00
Sulawesi Barat	29,94	24,81	7,81	7,97	6,12	23,35	100,00
Maluku	7,80	20,85	15,31	14,76	7,40	33,88	100,00
Maluku Utara	10,32	14,77	13,44	18,35	13,11	30,01	100,00
Papua Barat	1,80	13,60	12,91	20,01	12,23	39,45	100,00
Papua	2,53	7,05	8,62	14,91	13,75	53,14	100,00
Indonesia	11,23	23,07	17,79	15,96	10,21	21,75	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.9.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji Selama Sebulan, 2014

Provinsi	Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji Sebulan (Rupiah)						Perdesaan
	Kurang dari 500.000	500.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 1.999.999	2.000.000 - 2.499.999	2.500.000 atau lebih	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	15,70	34,36	18,81	14,02	6,36	10,75	100,00
Sumatera Utara	11,71	30,89	21,91	17,99	8,57	8,92	100,00
Sumatera Barat	15,20	35,19	18,77	14,07	6,25	10,53	100,00
Riau	5,75	24,89	21,95	19,68	11,82	15,91	100,00
Jambi	12,78	29,31	22,02	15,61	7,69	12,59	100,00
Sumatera Selatan	13,83	36,59	20,41	11,58	6,97	10,62	100,00
Bengkulu	14,26	31,75	18,80	12,88	8,23	14,07	100,00
Lampung	21,66	38,79	15,84	11,40	4,40	7,90	100,00
Kep. Bangka Belitung	6,82	20,21	22,95	19,61	13,65	16,77	100,00
Kep. Riau	10,59	22,06	18,93	20,30	10,49	17,64	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	17,21	38,15	20,29	12,02	5,13	7,20	100,00
Jawa Tengah	18,85	41,94	21,08	8,94	3,66	5,52	100,00
DI Yogyakarta	15,75	38,02	23,20	8,90	4,88	9,26	100,00
Jawa Timur	21,07	41,46	17,58	9,34	4,93	5,62	100,00
Banten	14,65	35,79	17,09	14,42	10,95	7,09	100,00
Bali	13,44	30,41	23,27	13,99	7,60	11,29	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,40	44,92	12,25	6,01	2,02	7,39	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,29	42,65	8,12	3,73	4,04	11,17	100,00
Kalimantan Barat	9,82	29,48	19,73	18,28	10,30	12,39	100,00
Kalimantan Tengah	6,84	20,54	17,66	21,60	10,98	22,38	100,00
Kalimantan Selatan	8,41	24,37	18,67	20,52	9,39	18,65	100,00
Kalimantan Timur	7,72	17,84	19,34	16,01	10,20	28,89	100,00
Sulawesi Utara	7,65	30,28	22,64	15,61	9,26	14,56	100,00
Sulawesi Tengah	16,75	41,44	14,95	9,04	6,19	11,62	100,00
Sulawesi Selatan	24,45	28,40	16,28	11,41	6,48	12,98	100,00
Sulawesi Tenggara	18,07	32,32	15,49	10,36	6,58	17,19	100,00
Gorontalo	16,40	42,04	18,30	10,08	4,25	8,94	100,00
Sulawesi Barat	23,69	32,52	13,52	9,33	3,92	17,02	100,00
Maluku	13,70	39,93	13,09	12,00	7,04	14,24	100,00
Maluku Utara	8,52	38,97	16,57	11,98	7,58	16,38	100,00
Papua Barat	3,69	19,23	15,07	16,64	14,14	31,23	100,00
Papua	8,04	23,26	17,82	17,56	11,03	22,30	100,00
Indonesia	16,79	36,16	18,93	12,21	6,28	9,63	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.9.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji Selama Sebulan, 2014

Provinsi	Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji Sebulan (Rupiah)						Total
	Kurang dari 500.000	500.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 1.999.999	2.000.000 - 2.499.999	2.500.000 atau lebih	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,75	28,70	21,83	18,80	8,69	14,23	100,00
Sumatera Utara	5,23	18,00	25,96	25,11	11,91	13,79	100,00
Sumatera Barat	7,39	25,17	22,79	19,66	9,21	15,78	100,00
Riau	4,53	17,11	21,26	19,88	13,27	23,96	100,00
Jambi	7,49	21,00	24,17	19,55	9,45	18,33	100,00
Sumatera Selatan	7,20	25,66	21,19	17,12	10,58	18,25	100,00
Bengkulu	7,35	24,80	21,34	15,64	10,36	20,51	100,00
Lampung	13,21	34,01	19,99	13,99	6,27	12,54	100,00
Kep. Bangka Belitung	3,70	12,74	22,28	21,67	15,71	23,90	100,00
Kep. Riau	1,59	6,60	9,01	13,84	16,56	52,40	100,00
DKI Jakarta	1,87	7,14	9,87	18,56	21,16	41,40	100,00
Jawa Barat	10,22	25,74	20,60	16,39	10,29	16,78	100,00
Jawa Tengah	10,01	35,77	28,13	11,77	5,19	9,12	100,00
DI Yogyakarta	5,54	32,50	27,82	11,72	6,33	16,09	100,00
Jawa Timur	12,41	33,12	20,73	14,79	7,39	11,57	100,00
Banten	7,16	19,53	15,94	22,24	12,76	22,36	100,00
Bali	4,88	14,80	21,00	21,25	12,21	25,86	100,00
Nusa Tenggara Barat	14,23	37,55	18,52	11,47	4,78	13,47	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,22	38,68	11,74	6,72	5,14	17,50	100,00
Kalimantan Barat	5,74	19,82	21,45	21,47	13,19	18,33	100,00
Kalimantan Tengah	4,66	17,02	16,07	20,94	12,59	28,71	100,00
Kalimantan Selatan	5,89	17,34	20,34	20,39	10,57	25,47	100,00
Kalimantan Timur	2,74	9,40	15,01	15,80	11,92	45,13	100,00
Sulawesi Utara	3,97	22,38	20,74	21,95	12,80	18,15	100,00
Sulawesi Tengah	9,25	37,43	16,32	12,75	8,00	16,24	100,00
Sulawesi Selatan	14,00	21,48	20,07	14,26	8,10	22,09	100,00
Sulawesi Tenggara	10,39	27,18	17,97	14,89	7,41	22,16	100,00
Gorontalo	12,64	37,85	18,49	13,11	6,16	11,75	100,00
Sulawesi Barat	19,64	30,18	14,73	10,28	4,94	20,23	100,00
Maluku	6,84	31,54	15,61	14,59	7,63	23,79	100,00
Maluku Utara	7,36	28,73	16,47	16,95	10,49	20,00	100,00
Papua Barat	2,05	13,87	14,14	18,87	13,87	37,21	100,00
Papua	3,97	11,24	13,14	16,97	13,62	41,06	100,00
Indonesia	8,85	25,65	20,68	16,59	9,86	18,37	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.9.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji Selama Sebulan, 2014

Provinsi	Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji Sebulan (Rupiah)						Perempuan
	Kurang dari 500.000	500.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 1.999.999	2.000.000 - 2.499.999	2.500.000 atau lebih	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	24,40	34,35	9,49	6,23	5,87	19,66	100,00
Sumatera Utara	18,15	35,32	18,20	11,57	4,08	12,68	100,00
Sumatera Barat	20,27	38,32	13,42	8,23	4,66	15,09	100,00
Riau	11,58	31,51	19,50	14,81	5,31	17,29	100,00
Jambi	16,45	38,08	11,89	9,07	5,99	18,52	100,00
Sumatera Selatan	16,20	37,27	14,00	11,57	5,25	15,72	100,00
Bengkulu	24,33	31,05	13,54	6,26	6,19	18,62	100,00
Lampung	30,31	34,28	11,04	7,67	4,20	12,51	100,00
Kep. Bangka Belitung	13,18	28,04	19,02	16,24	7,66	15,87	100,00
Kep. Riau	5,66	16,30	12,06	13,01	23,13	29,84	100,00
DKI Jakarta	8,50	17,67	10,08	14,79	18,42	30,55	100,00
Jawa Barat	22,56	29,58	15,75	10,96	7,28	13,86	100,00
Jawa Tengah	27,29	44,94	14,77	4,94	2,19	5,87	100,00
DI Yogyakarta	25,08	37,49	14,84	5,99	4,41	12,19	100,00
Jawa Timur	29,50	37,17	11,11	10,17	3,90	8,15	100,00
Banten	16,82	22,40	9,79	20,25	12,28	18,46	100,00
Bali	14,17	31,44	21,20	14,24	5,50	13,44	100,00
Nusa Tenggara Barat	32,87	45,10	6,82	3,91	2,71	8,59	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,22	36,07	6,41	3,82	5,75	15,73	100,00
Kalimantan Barat	16,55	35,24	17,48	10,45	4,70	15,58	100,00
Kalimantan Tengah	12,79	26,30	17,42	15,69	8,35	19,45	100,00
Kalimantan Selatan	18,73	34,24	14,66	12,34	5,19	14,84	100,00
Kalimantan Timur	13,50	22,37	15,84	15,23	9,45	23,60	100,00
Sulawesi Utara	10,83	27,06	15,19	15,67	8,18	23,07	100,00
Sulawesi Tengah	19,95	38,26	10,87	6,35	5,00	19,57	100,00
Sulawesi Selatan	31,65	26,29	10,85	8,44	5,20	17,57	100,00
Sulawesi Tenggara	25,90	34,05	8,67	6,21	4,90	20,26	100,00
Gorontalo	32,06	34,60	9,44	5,67	3,28	14,94	100,00
Sulawesi Barat	37,55	30,10	5,85	6,17	3,92	16,43	100,00
Maluku	18,77	27,17	11,31	10,94	6,37	25,43	100,00
Maluku Utara	13,57	33,04	12,90	8,09	7,57	24,85	100,00
Papua Barat	5,49	25,80	14,65	15,26	12,33	26,46	100,00
Papua	8,79	25,53	13,11	14,06	9,03	29,48	100,00
Indonesia	22,59	33,76	13,48	10,19	6,17	13,80	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.9.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji Selama Sebulan, 2014

Provinsi	Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji Sebulan (Rupiah)						Total
	Kurang dari 500.000	500.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 1.999.999	2.000.000 - 2.499.999	2.500.000 atau lebih	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	13,05	30,50	17,90	14,80	7,79	15,96	100,00
Sumatera Utara	9,45	23,67	23,42	20,68	9,35	13,43	100,00
Sumatera Barat	12,00	29,87	19,44	15,57	7,59	15,53	100,00
Riau	6,44	21,01	20,78	18,50	11,11	22,16	100,00
Jambi	10,11	26,01	20,57	16,48	8,44	18,39	100,00
Sumatera Selatan	10,28	29,64	18,72	15,22	8,76	17,38	100,00
Bengkulu	13,01	26,88	18,74	12,52	8,97	19,88	100,00
Lampung	18,37	34,09	17,28	12,08	5,64	12,53	100,00
Kep. Bangka Belitung	6,29	16,93	21,39	20,18	13,51	21,70	100,00
Kep. Riau	2,88	9,66	9,97	13,58	18,63	45,29	100,00
DKI Jakarta	4,26	10,92	9,94	17,20	20,17	37,50	100,00
Jawa Barat	13,84	26,86	19,17	14,79	9,41	15,92	100,00
Jawa Tengah	16,70	39,32	22,96	9,12	4,03	7,86	100,00
DI Yogyakarta	13,53	34,54	22,51	9,38	5,55	14,50	100,00
Jawa Timur	18,61	34,59	17,24	13,11	6,12	10,33	100,00
Banten	10,18	20,43	14,02	21,62	12,61	21,14	100,00
Bali	8,79	21,80	21,09	18,30	9,39	20,63	100,00
Nusa Tenggara Barat	22,01	40,70	13,63	8,31	3,91	11,43	100,00
Nusa Tenggara Timur	24,85	37,67	9,68	5,60	5,38	16,81	100,00
Kalimantan Barat	9,04	24,53	20,24	18,10	10,60	17,48	100,00
Kalimantan Tengah	7,04	19,73	16,47	19,40	11,35	26,01	100,00
Kalimantan Selatan	10,11	22,89	18,47	17,74	8,80	21,98	100,00
Kalimantan Timur	5,60	12,85	15,23	15,65	11,26	39,41	100,00
Sulawesi Utara	6,01	23,78	19,09	20,08	11,43	19,61	100,00
Sulawesi Tengah	12,72	37,70	14,55	10,67	7,03	17,32	100,00
Sulawesi Selatan	20,35	23,21	16,76	12,17	7,05	20,46	100,00
Sulawesi Tenggara	15,35	29,38	14,99	12,12	6,61	21,55	100,00
Gorontalo	19,32	36,73	15,38	10,56	5,17	12,85	100,00
Sulawesi Barat	25,61	30,15	11,77	8,91	4,60	18,96	100,00
Maluku	10,67	30,14	14,23	13,41	7,23	24,32	100,00
Maluku Utara	9,19	30,00	15,41	14,34	9,63	21,43	100,00
Papua Barat	3,00	17,17	14,28	17,87	13,44	34,23	100,00
Papua	5,24	15,00	13,13	16,21	12,41	38,01	100,00
Indonesia	13,48	28,38	18,25	14,44	8,62	16,83	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 4.10 Rata-rata Jumlah Pendapatan/Upah/Gaji Dari Lansia Bekerja Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Tipe daerah		Jenis kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1.911,04	1.295,11	1.545,54	1.400,59	1.499,42
Sumatera Utara	1.764,69	1.341,13	1.720,72	1.332,75	1.593,88
Sumatera Barat	1.867,82	1.314,07	1.650,48	1.364,60	1.548,18
Riau	2.276,03	1.654,01	2.047,28	1.565,37	1.916,64
Jambi	2.092,88	1.452,87	1.750,50	1.502,10	1.677,74
Sumatera Selatan	1.984,28	1.288,70	1.705,04	1.418,08	1.606,70
Bengkulu	2.001,41	1.419,21	1.799,36	1.413,88	1.670,79
Lampung	1.816,21	1.162,17	1.450,31	1.224,77	1.382,23
Kep. Bangka Belitung	2.045,24	1.648,20	1.991,69	1.489,43	1.854,03
Kep. Riau	3.244,51	1.684,16	3.329,75	2.322,81	3.012,55
DKI Jakarta	2.763,74	-	2.993,94	2.353,16	2.763,74
Jawa Barat	1.823,31	1.165,34	1.724,13	1.423,39	1.635,87
Jawa Tengah	1.310,02	1.093,16	1.358,59	977,43	1.210,95
DI Yogyakarta	1.626,12	1.210,45	1.685,30	1.280,48	1.519,77
Jawa Timur	1.530,61	1.055,82	1.468,68	1.087,97	1.330,53
Banten	2.342,75	1.273,86	2.169,18	1.839,46	2.065,96
Bali	1.937,18	1.434,20	2.006,06	1.441,31	1.768,31
Nusa Tenggara Barat	1.506,19	1.035,06	1.445,06	1.013,78	1.264,93
Nusa Tenggara Timur	1.907,87	1.076,41	1.434,08	1.207,52	1.346,59
Kalimantan Barat	2.037,75	1.504,10	1.838,73	1.434,48	1.715,15
Kalimantan Tengah	2.118,79	1.834,02	2.043,49	1.692,69	1.941,10
Kalimantan Selatan	2.005,28	1.700,95	2.078,35	1.383,08	1.849,77
Kalimantan Timur	2.915,32	2.013,79	2.869,00	1.853,96	2.599,15
Sulawesi Utara	2.131,98	1.514,52	1.815,32	1.805,10	1.812,28
Sulawesi Tengah	2.068,10	1.236,92	1.563,77	1.433,50	1.521,49
Sulawesi Selatan	2.081,40	1.354,74	1.898,33	1.375,72	1.710,44
Sulawesi Tenggara	2.034,17	1.474,80	1.802,02	1.433,52	1.684,12
Gorontalo	1.680,79	1.168,37	1.435,40	1.284,77	1.383,61
Sulawesi Barat	1.774,68	1.520,61	1.757,58	1.280,98	1.598,68
Maluku	2.192,21	1.330,50	1.831,64	1.647,75	1.772,59
Maluku Utara	2.060,63	1.514,87	1.737,64	1.667,78	1.717,03
Papua Barat	2.431,27	2.260,34	2.472,41	1.932,01	2.322,75
Papua	3.131,20	1.865,58	2.677,32	2.042,60	2.510,30
Indonesia	1.910,38	1.264,20	1.787,94	1.373,44	1.648,24

Sumber: BPS, Sakernas 2014

Tabel 5.1.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2014

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				Total
	Milik sendiri	Kontrak/sewa	Bebas sewa/ milik keluarga	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Aceh	89,08	3,79	4,99	2,13	100,00
Sumatera Utara	81,90	6,99	6,99	4,12	100,00
Sumatera Barat	86,97	3,55	7,66	1,82	100,00
Riau	85,07	6,77	6,38	1,79	100,00
Jambi	83,83	5,03	9,94	1,20	100,00
Sumatera Selatan	86,16	7,50	4,29	2,05	100,00
Bengkulu	93,13	3,46	2,08	1,33	100,00
Lampung	91,23	2,18	4,72	1,87	100,00
Kep. Bangka Belitung	89,83	2,14	5,09	2,94	100,00
Kep. Riau	86,69	7,13	3,94	2,24	100,00
DKI Jakarta	80,10	8,76	7,35	3,79	100,00
Jawa Barat	90,53	2,44	5,76	1,27	100,00
Jawa Tengah	91,51	1,48	5,91	1,10	100,00
DI Yogyakarta	92,63	1,89	4,63	0,86	100,00
Jawa Timur	91,68	1,61	4,95	1,76	100,00
Banten	92,57	2,74	3,80	0,89	100,00
Bali	91,05	2,66	5,48	0,81	100,00
Nusa Tenggara Barat	91,62	0,34	6,37	1,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	90,04	1,24	6,83	1,89	100,00
Kalimantan Barat	89,37	1,81	7,59	1,23	100,00
Kalimantan Tengah	86,26	6,20	5,03	2,51	100,00
Kalimantan Selatan	81,62	7,51	6,64	4,23	100,00
Kalimantan Timur	86,23	5,67	5,33	2,78	100,00
Sulawesi Utara	80,87	1,64	12,90	4,59	100,00
Sulawesi Tengah	87,52	1,73	8,29	2,46	100,00
Sulawesi Selatan	91,42	2,40	4,82	1,36	100,00
Sulawesi Tenggara	94,79	1,71	2,32	1,17	100,00
Gorontalo	81,20	0,69	16,86	1,25	100,00
Sulawesi Barat	98,42	0,00	0,82	0,76	100,00
Maluku	86,84	1,18	8,27	3,71	100,00
Maluku Utara	93,07	0,73	4,20	2,00	100,00
Papua Barat	75,84	3,02	4,11	17,03	100,00
Papua	71,55	11,95	2,44	14,06	100,00
Indonesia	89,44	2,98	5,76	1,82	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.1.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2014

Perdesaan

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				Total
	Milik sendiri	Kontrak/sewa	Bebas sewa/ milik keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	94,68	0,38	3,94	1,00	100,00
Sumatera Utara	89,90	1,16	6,33	2,61	100,00
Sumatera Barat	86,54	0,35	11,89	1,23	100,00
Riau	93,66	1,09	3,03	2,22	100,00
Jambi	93,86	0,77	3,77	1,61	100,00
Sumatera Selatan	93,02	0,32	4,84	1,82	100,00
Bengkulu	94,70	0,30	3,61	1,39	100,00
Lampung	96,68	0,25	2,54	0,53	100,00
Kep. Bangka Belitung	97,11	0,60	2,29	0,00	100,00
Kep. Riau	94,43	0,00	3,13	2,44	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	95,10	0,04	4,00	0,87	100,00
Jawa Tengah	95,27	0,08	4,22	0,43	100,00
DI Yogyakarta	97,42	0,27	2,12	0,20	100,00
Jawa Timur	96,79	0,03	2,53	0,65	100,00
Banten	96,07	0,00	3,70	0,23	100,00
Bali	94,95	0,18	4,10	0,77	100,00
Nusa Tenggara Barat	94,83	0,03	4,46	0,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	94,53	0,12	3,99	1,36	100,00
Kalimantan Barat	95,60	0,24	3,50	0,65	100,00
Kalimantan Tengah	93,85	0,42	4,81	0,92	100,00
Kalimantan Selatan	94,35	0,34	3,35	1,96	100,00
Kalimantan Timur	92,38	1,17	3,91	2,54	100,00
Sulawesi Utara	90,10	0,70	7,22	1,98	100,00
Sulawesi Tengah	94,31	0,27	4,70	0,71	100,00
Sulawesi Selatan	94,37	0,07	4,67	0,89	100,00
Sulawesi Tenggara	95,25	0,00	4,36	0,39	100,00
Gorontalo	92,93	0,00	6,17	0,91	100,00
Sulawesi Barat	96,69	0,07	2,26	0,99	100,00
Maluku	96,62	0,16	2,36	0,86	100,00
Maluku Utara	96,46	0,00	2,50	1,04	100,00
Papua Barat	91,43	0,95	4,52	3,10	100,00
Papua	94,73	0,39	2,38	2,51	100,00
Indonesia	94,94	0,20	3,97	0,89	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.1.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2014

Laki-laki

Provinsi	Status kepemilikan tempat tinggal				Total
	Milik sendiri	Kontrak/sewa	Bebas sewa/ milik keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	95,22	1,36	2,28	1,14	100,00
Sumatera Utara	87,02	4,01	5,38	3,59	100,00
Sumatera Barat	87,72	1,68	8,98	1,62	100,00
Riau	91,38	3,39	3,02	2,22	100,00
Jambi	92,66	2,00	3,79	1,55	100,00
Sumatera Selatan	91,15	3,03	3,75	2,08	100,00
Bengkulu	95,52	1,15	2,03	1,30	100,00
Lampung	96,39	0,55	2,21	0,84	100,00
Kep. Bangka Belitung	93,62	1,63	2,99	1,76	100,00
Kep. Riau	90,53	4,02	3,30	2,15	100,00
DKI Jakarta	78,76	10,77	6,50	3,97	100,00
Jawa Barat	93,64	1,68	3,79	0,89	100,00
Jawa Tengah	94,90	0,66	3,80	0,63	100,00
DI Yogyakarta	95,45	1,23	2,77	0,54	100,00
Jawa Timur	95,24	0,83	2,70	1,23	100,00
Banten	94,65	1,74	2,66	0,95	100,00
Bali	92,96	1,44	4,90	0,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	95,21	0,12	4,04	0,63	100,00
Nusa Tenggara Timur	94,51	0,25	3,91	1,32	100,00
Kalimantan Barat	94,25	0,72	4,27	0,76	100,00
Kalimantan Tengah	91,89	2,29	4,17	1,65	100,00
Kalimantan Selatan	90,96	3,02	2,55	3,47	100,00
Kalimantan Timur	89,25	4,18	3,33	3,24	100,00
Sulawesi Utara	88,50	1,21	7,21	3,08	100,00
Sulawesi Tengah	94,65	0,43	3,61	1,31	100,00
Sulawesi Selatan	93,58	0,99	4,14	1,29	100,00
Sulawesi Tenggara	96,67	0,51	2,31	0,51	100,00
Gorontalo	91,16	0,00	7,55	1,29	100,00
Sulawesi Barat	97,02	0,11	1,40	1,47	100,00
Maluku	93,62	0,40	3,80	2,18	100,00
Maluku Utara	96,27	0,38	2,51	0,85	100,00
Papua Barat	86,81	2,19	3,71	7,29	100,00
Papua	86,40	3,53	1,72	8,35	100,00
Indonesia	93,32	1,62	3,71	1,35	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.1.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2014

Perempuan

Provinsi	Status kepemilikan tempat tinggal				Total
	Milik sendiri	Kontrak/sewa	Bebas sewa/ milik keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	91,59	1,18	5,81	1,42	100,00
Sumatera Utara	85,29	3,92	7,67	3,13	100,00
Sumatera Barat	85,87	1,33	11,51	1,29	100,00
Riau	89,47	3,07	5,57	1,89	100,00
Jambi	88,98	2,11	7,48	1,43	100,00
Sumatera Selatan	90,14	2,65	5,48	1,74	100,00
Bengkulu	93,07	1,12	4,36	1,45	100,00
Lampung	94,38	0,86	3,91	0,84	100,00
Kep. Bangka Belitung	93,13	1,16	4,44	1,27	100,00
Kep. Riau	87,11	6,31	4,13	2,45	100,00
DKI Jakarta	81,35	6,88	8,14	3,63	100,00
Jawa Barat	91,15	1,31	6,23	1,31	100,00
Jawa Tengah	92,55	0,71	5,94	0,79	100,00
DI Yogyakarta	94,03	1,17	4,19	0,60	100,00
Jawa Timur	93,97	0,64	4,33	1,06	100,00
Banten	93,20	1,65	4,80	0,35	100,00
Bali	92,88	1,50	4,75	0,87	100,00
Nusa Tenggara Barat	92,01	0,19	6,31	1,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	93,10	0,36	4,98	1,56	100,00
Kalimantan Barat	92,95	0,77	5,36	0,92	100,00
Kalimantan Tengah	90,87	2,31	5,63	1,20	100,00
Kalimantan Selatan	87,85	3,35	6,43	2,36	100,00
Kalimantan Timur	88,12	3,45	6,39	2,04	100,00
Sulawesi Utara	84,12	1,01	11,77	3,10	100,00
Sulawesi Tengah	91,02	0,74	7,35	0,88	100,00
Sulawesi Selatan	93,31	0,68	5,16	0,85	100,00
Sulawesi Tenggara	93,78	0,30	5,29	0,64	100,00
Gorontalo	86,99	0,44	11,78	0,80	100,00
Sulawesi Barat	97,16	0,00	2,38	0,46	100,00
Maluku	92,35	0,67	5,29	1,69	100,00
Maluku Utara	94,89	0,00	3,38	1,74	100,00
Papua Barat	86,55	0,82	5,25	7,38	100,00
Papua	84,58	6,80	3,31	5,32	100,00
Indonesia	91,59	1,37	5,75	1,30	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.1.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Status kepemilikan tempat tinggal				Total
	Milik sendiri	Kontrak/sewa	Bebas sewa/ milik keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	93,23	1,26	4,22	1,29	100,00
Sumatera Utara	86,06	3,96	6,65	3,33	100,00
Sumatera Barat	86,69	1,48	10,39	1,44	100,00
Riau	90,43	3,23	4,29	2,06	100,00
Jambi	90,82	2,06	5,64	1,49	100,00
Sumatera Selatan	90,62	2,83	4,65	1,90	100,00
Bengkulu	94,28	1,14	3,21	1,37	100,00
Lampung	95,40	0,71	3,05	0,84	100,00
Kep. Bangka Belitung	93,37	1,39	3,73	1,51	100,00
Kep. Riau	88,85	5,15	3,71	2,29	100,00
DKI Jakarta	80,10	8,76	7,35	3,79	100,00
Jawa Barat	92,34	1,48	5,06	1,11	100,00
Jawa Tengah	93,64	0,69	4,95	0,72	100,00
DI Yogyakarta	94,67	1,20	3,56	0,58	100,00
Jawa Timur	94,54	0,73	3,59	1,14	100,00
Banten	93,91	1,69	3,76	0,64	100,00
Bali	92,91	1,47	4,82	0,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	93,52	0,16	5,24	1,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	93,77	0,31	4,47	1,45	100,00
Kalimantan Barat	93,60	0,74	4,82	0,84	100,00
Kalimantan Tengah	91,39	2,30	4,88	1,43	100,00
Kalimantan Selatan	89,27	3,20	4,66	2,87	100,00
Kalimantan Timur	88,73	3,84	4,75	2,68	100,00
Sulawesi Utara	86,17	1,10	9,64	3,09	100,00
Sulawesi Tengah	92,83	0,59	5,49	1,10	100,00
Sulawesi Selatan	93,43	0,81	4,71	1,04	100,00
Sulawesi Tenggara	95,14	0,40	3,89	0,58	100,00
Gorontalo	88,90	0,24	9,84	1,03	100,00
Sulawesi Barat	97,09	0,05	1,92	0,93	100,00
Maluku	92,96	0,54	4,57	1,93	100,00
Maluku Utara	95,59	0,19	2,94	1,29	100,00
Papua Barat	86,70	1,58	4,40	7,33	100,00
Papua	85,62	4,93	2,40	7,05	100,00
Indonesia	92,40	1,49	4,80	1,32	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.2.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2014

Perkotaan

Provinsi	Status kelayakan rumah tempat tinggal			Total
	Tidak layak huni	Hampir tidak layak huni	Rumah layak huni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,70	2,93	96,38	100,00
Sumatera Utara	0,68	3,06	96,26	100,00
Sumatera Barat	1,08	2,21	96,71	100,00
Riau	0,01	1,16	98,83	100,00
Jambi	0,00	1,56	98,44	100,00
Sumatera Selatan	0,52	2,47	97,02	100,00
Bengkulu	0,67	4,03	95,31	100,00
Lampung	2,06	5,10	92,84	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,26	0,97	98,77	100,00
Kep. Riau	0,11	0,50	99,39	100,00
DKI Jakarta	0,33	2,98	96,69	100,00
Jawa Barat	3,01	9,73	87,26	100,00
Jawa Tengah	2,85	8,03	89,12	100,00
DI Yogyakarta	1,98	5,00	93,02	100,00
Jawa Timur	2,76	6,62	90,62	100,00
Banten	2,59	5,19	92,22	100,00
Bali	0,67	3,23	96,10	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,86	9,20	87,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,03	8,41	87,57	100,00
Kalimantan Barat	0,76	0,72	98,52	100,00
Kalimantan Tengah	0,00	4,07	95,93	100,00
Kalimantan Selatan	0,23	3,16	96,61	100,00
Kalimantan Timur	0,10	0,30	99,60	100,00
Sulawesi Utara	1,05	3,65	95,29	100,00
Sulawesi Tengah	0,48	5,01	94,51	100,00
Sulawesi Selatan	1,28	6,05	92,67	100,00
Sulawesi Tenggara	3,35	3,15	93,50	100,00
Gorontalo	2,46	12,41	85,13	100,00
Sulawesi Barat	2,50	13,40	84,10	100,00
Maluku	2,20	5,07	92,73	100,00
Maluku Utara	0,85	3,01	96,14	100,00
Papua Barat	0,00	1,12	98,88	100,00
Papua	0,23	2,09	97,68	100,00
Indonesia	2,17	6,43	91,40	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.2.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2014

Provinsi	Status kelayakan rumah tempat tinggal			Total
	Tidak layak huni	Hampir tidak layak huni	Rumah layak huni	
	(1)	(2)	(3)	
				(5)
Aceh	10,87	17,41	71,72	100,00
Sumatera Utara	5,82	13,27	80,91	100,00
Sumatera Barat	3,98	16,09	79,94	100,00
Riau	2,68	7,32	90,00	100,00
Jambi	2,61	11,67	85,72	100,00
Sumatera Selatan	3,87	17,11	79,02	100,00
Bengkulu	4,67	18,91	76,43	100,00
Lampung	5,12	12,12	82,76	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,64	5,63	92,73	100,00
Kep. Riau	0,84	8,18	90,98	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	11,32	22,55	66,13	100,00
Jawa Tengah	5,82	15,70	78,49	100,00
DI Yogyakarta	7,63	9,30	83,07	100,00
Jawa Timur	7,32	16,16	76,52	100,00
Banten	15,17	23,41	61,42	100,00
Bali	3,55	8,99	87,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	15,15	25,94	58,91	100,00
Nusa Tenggara Timur	40,38	20,64	38,98	100,00
Kalimantan Barat	6,24	16,79	76,96	100,00
Kalimantan Tengah	4,43	16,13	79,43	100,00
Kalimantan Selatan	5,72	15,69	78,59	100,00
Kalimantan Timur	1,90	12,61	85,49	100,00
Sulawesi Utara	6,19	11,64	82,18	100,00
Sulawesi Tengah	10,49	15,35	74,17	100,00
Sulawesi Selatan	6,24	17,86	75,90	100,00
Sulawesi Tenggara	8,12	14,35	77,52	100,00
Gorontalo	15,06	25,08	59,86	100,00
Sulawesi Barat	12,30	26,94	60,76	100,00
Maluku	15,08	20,45	64,47	100,00
Maluku Utara	15,83	20,85	63,32	100,00
Papua Barat	8,22	20,86	70,92	100,00
Papua	28,70	20,82	50,48	100,00
Indonesia	8,38	16,76	74,85	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.2.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2014

Laki-laki

Provinsi	Status kelayakan rumah tempat tinggal			Total
	Tidak layak huni	Hampir tidak layak huni	Rumah layak huni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	7,56	13,29	79,15	100,00
Sumatera Utara	3,47	8,33	88,20	100,00
Sumatera Barat	3,01	10,92	86,07	100,00
Riau	2,14	5,40	92,47	100,00
Jambi	2,07	8,78	89,15	100,00
Sumatera Selatan	2,36	10,96	86,68	100,00
Bengkulu	3,53	16,09	80,38	100,00
Lampung	4,32	9,73	85,95	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,65	2,83	96,51	100,00
Kep. Riau	0,23	2,57	97,20	100,00
DKI Jakarta	0,53	2,95	96,52	100,00
Jawa Barat	5,85	13,89	80,26	100,00
Jawa Tengah	3,88	11,55	84,57	100,00
DI Yogyakarta	4,43	6,47	89,10	100,00
Jawa Timur	4,13	11,57	84,30	100,00
Banten	7,36	12,30	80,34	100,00
Bali	2,35	6,42	91,23	100,00
Nusa Tenggara Barat	8,65	20,33	71,02	100,00
Nusa Tenggara Timur	34,39	18,69	46,91	100,00
Kalimantan Barat	5,22	12,59	82,19	100,00
Kalimantan Tengah	2,74	10,38	86,87	100,00
Kalimantan Selatan	4,23	9,15	86,61	100,00
Kalimantan Timur	1,22	6,20	92,58	100,00
Sulawesi Utara	4,54	8,09	87,37	100,00
Sulawesi Tengah	8,07	14,32	77,61	100,00
Sulawesi Selatan	4,44	13,96	81,60	100,00
Sulawesi Tenggara	7,35	10,01	82,64	100,00
Gorontalo	9,90	22,89	67,21	100,00
Sulawesi Barat	9,32	22,71	67,96	100,00
Maluku	10,31	15,78	73,91	100,00
Maluku Utara	11,55	16,39	72,06	100,00
Papua Barat	5,70	13,19	81,10	100,00
Papua	21,10	12,81	66,09	100,00
Indonesia	5,10	11,55	83,35	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.2.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2014

Provinsi	Status kelayakan rumah tempat tinggal			Total	
	Tidak layak huni	Hampir tidak layak huni	Rumah layak huni		
	(1)	(2)	(3)		
				(4)	(5)
Aceh	8,78	13,95	77,27	100,00	
Sumatera Utara	3,26	8,40	88,34	100,00	
Sumatera Barat	2,90	11,37	85,74	100,00	
Riau	1,20	4,62	94,18	100,00	
Jambi	1,57	8,45	89,98	100,00	
Sumatera Selatan	3,01	12,95	84,04	100,00	
Bengkulu	3,69	13,90	82,41	100,00	
Lampung	4,48	11,21	84,32	100,00	
Kep. Bangka Belitung	1,20	3,62	95,18	100,00	
Kep. Riau	0,41	2,71	96,88	100,00	
DKI Jakarta	0,14	3,02	96,84	100,00	
Jawa Barat	6,73	15,66	77,61	100,00	
Jawa Tengah	5,08	13,06	81,86	100,00	
DI Yogyakarta	4,35	7,12	88,53	100,00	
Jawa Timur	6,30	12,30	81,41	100,00	
Banten	7,44	12,05	80,51	100,00	
Bali	1,78	5,60	92,62	100,00	
Nusa Tenggara Barat	11,45	18,01	70,54	100,00	
Nusa Tenggara Timur	34,10	18,46	47,43	100,00	
Kalimantan Barat	3,75	10,68	85,57	100,00	
Kalimantan Tengah	3,26	14,16	82,59	100,00	
Kalimantan Selatan	2,94	11,99	85,07	100,00	
Kalimantan Timur	0,38	4,26	95,36	100,00	
Sulawesi Utara	3,52	8,37	88,11	100,00	
Sulawesi Tengah	8,52	11,86	79,62	100,00	
Sulawesi Selatan	4,84	14,22	80,94	100,00	
Sulawesi Tenggara	6,72	13,29	79,99	100,00	
Gorontalo	11,45	18,90	69,65	100,00	
Sulawesi Barat	10,58	24,67	64,75	100,00	
Maluku	10,20	13,68	76,11	100,00	
Maluku Utara	12,36	16,06	71,58	100,00	
Papua Barat	5,75	16,93	77,32	100,00	
Papua	12,75	14,31	72,94	100,00	
Indonesia	5,87	12,36	81,77	100,00	

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.2.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Status kelayakan rumah tempat tinggal			Total
	Tidak layak huni	Hampir tidak layak huni	Rumah layak huni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	8,23	13,65	78,12	100,00
Sumatera Utara	3,35	8,37	88,28	100,00
Sumatera Barat	2,95	11,17	85,88	100,00
Riau	1,67	5,01	93,32	100,00
Jambi	1,82	8,61	89,57	100,00
Sumatera Selatan	2,70	12,00	85,31	100,00
Bengkulu	3,61	14,98	81,41	100,00
Lampung	4,40	10,46	85,14	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,93	3,24	95,83	100,00
Kep. Riau	0,32	2,64	97,05	100,00
DKI Jakarta	0,33	2,98	96,69	100,00
Jawa Barat	6,31	14,81	78,88	100,00
Jawa Tengah	4,53	12,36	83,11	100,00
DI Yogyakarta	4,39	6,83	88,78	100,00
Jawa Timur	5,32	11,97	82,71	100,00
Banten	7,40	12,17	80,43	100,00
Bali	2,05	5,98	91,97	100,00
Nusa Tenggara Barat	10,13	19,11	70,76	100,00
Nusa Tenggara Timur	34,24	18,57	47,19	100,00
Kalimantan Barat	4,49	11,64	83,88	100,00
Kalimantan Tengah	2,99	12,22	84,79	100,00
Kalimantan Selatan	3,53	10,69	85,78	100,00
Kalimantan Timur	0,83	5,30	93,87	100,00
Sulawesi Utara	4,00	8,24	87,77	100,00
Sulawesi Tengah	8,30	13,08	78,62	100,00
Sulawesi Selatan	4,67	14,11	81,23	100,00
Sulawesi Tenggara	7,01	11,75	81,24	100,00
Gorontalo	10,74	20,73	68,53	100,00
Sulawesi Barat	9,99	23,75	66,26	100,00
Maluku	10,26	14,69	75,05	100,00
Maluku Utara	11,95	16,23	71,82	100,00
Papua Barat	5,72	14,86	79,41	100,00
Papua	17,51	13,46	69,03	100,00
Indonesia	5,51	11,98	82,51	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.3.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014

Provinsi	Status ekonomi rumah tangga			Total	
	40 Persen Ekonomi Terendah	40 Persen Ekonomi Menengah	20 Persen Ekonomi Tertinggi		
	(1)	(2)	(3)		
				(4)	(5)
Aceh	41,00	44,48	14,52	100,00	
Sumatera Utara	39,97	40,38	19,65	100,00	
Sumatera Barat	37,84	45,96	16,20	100,00	
Riau	45,28	39,32	15,40	100,00	
Jambi	43,17	40,01	16,82	100,00	
Sumatera Selatan	46,11	40,63	13,26	100,00	
Bengkulu	47,43	35,70	16,87	100,00	
Lampung	49,45	36,73	13,82	100,00	
Kep. Bangka Belitung	53,17	33,45	13,38	100,00	
Kep. Riau	49,29	36,09	14,62	100,00	
DKI Jakarta	32,53	40,38	27,09	100,00	
Jawa Barat	44,63	38,58	16,79	100,00	
Jawa Tengah	49,34	36,05	14,60	100,00	
DI Yogyakarta	51,85	35,47	12,68	100,00	
Jawa Timur	49,92	34,86	15,22	100,00	
Banten	50,62	34,33	15,05	100,00	
Bali	47,36	37,73	14,91	100,00	
Nusa Tenggara Barat	44,14	40,69	15,17	100,00	
Nusa Tenggara Timur	47,10	38,14	14,76	100,00	
Kalimantan Barat	49,62	36,30	14,08	100,00	
Kalimantan Tengah	44,98	39,69	15,32	100,00	
Kalimantan Selatan	40,20	45,45	14,34	100,00	
Kalimantan Timur	45,62	36,63	17,75	100,00	
Sulawesi Utara	44,15	39,74	16,10	100,00	
Sulawesi Tengah	51,71	31,42	16,87	100,00	
Sulawesi Selatan	43,85	42,10	14,04	100,00	
Sulawesi Tenggara	49,40	40,12	10,48	100,00	
Gorontalo	46,97	37,58	15,46	100,00	
Sulawesi Barat	40,25	42,48	17,27	100,00	
Maluku	49,36	39,20	11,45	100,00	
Maluku Utara	44,33	39,94	15,73	100,00	
Papua Barat	36,09	50,67	13,24	100,00	
Papua	41,58	43,25	15,17	100,00	
Indonesia	46,11	37,64	16,25	100,00	

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.3.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014

Provinsi	Status ekonomi rumah tangga			Total	
	40 Persen Ekonomi Terendah	40 Persen Ekonomi Menengah	20 Persen Ekonomi Tertinggi		
	(1)	(2)	(3)		
				(4)	(5)
Aceh	36,03	42,67	21,30	100,00	
Sumatera Utara	37,76	40,34	21,90	100,00	
Sumatera Barat	43,20	39,06	17,74	100,00	
Riau	40,92	39,06	20,02	100,00	
Jambi	47,90	35,64	16,46	100,00	
Sumatera Selatan	42,76	39,76	17,48	100,00	
Bengkulu	49,83	35,55	14,62	100,00	
Lampung	47,00	37,62	15,39	100,00	
Kep. Bangka Belitung	50,12	36,30	13,58	100,00	
Kep. Riau	37,14	44,99	17,87	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	
Jawa Barat	44,75	38,47	16,78	100,00	
Jawa Tengah	50,19	35,66	14,14	100,00	
DI Yogyakarta	49,11	36,07	14,82	100,00	
Jawa Timur	49,70	36,03	14,27	100,00	
Banten	43,19	38,45	18,36	100,00	
Bali	48,76	37,03	14,21	100,00	
Nusa Tenggara Barat	49,69	32,77	17,54	100,00	
Nusa Tenggara Timur	43,09	40,52	16,39	100,00	
Kalimantan Barat	44,35	39,10	16,55	100,00	
Kalimantan Tengah	43,00	39,05	17,95	100,00	
Kalimantan Selatan	47,52	36,08	16,40	100,00	
Kalimantan Timur	50,66	35,01	14,33	100,00	
Sulawesi Utara	42,85	38,00	19,15	100,00	
Sulawesi Tengah	40,21	41,95	17,85	100,00	
Sulawesi Selatan	46,26	37,95	15,79	100,00	
Sulawesi Tenggara	41,33	40,29	18,37	100,00	
Gorontalo	43,78	36,16	20,06	100,00	
Sulawesi Barat	42,41	39,58	18,01	100,00	
Maluku	43,38	40,06	16,55	100,00	
Maluku Utara	44,02	37,32	18,66	100,00	
Papua Barat	37,09	45,65	17,26	100,00	
Papua	32,67	46,25	21,07	100,00	
Indonesia	46,52	37,45	16,03	100,00	

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.3.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014

Laki-laki

Provinsi	Status ekonomi rumah tangga			Total
	40 Persen Ekonomi Terendah	40 Persen Ekonomi Menengah	20 Persen Ekonomi Tertinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	38,45	43,19	18,35	100,00
Sumatera Utara	38,14	41,11	20,75	100,00
Sumatera Barat	42,03	40,42	17,56	100,00
Riau	41,28	38,32	20,40	100,00
Jambi	44,23	37,17	18,60	100,00
Sumatera Selatan	42,94	40,46	16,60	100,00
Bengkulu	47,61	36,71	15,68	100,00
Lampung	46,61	39,11	14,28	100,00
Kep. Bangka Belitung	48,22	36,96	14,82	100,00
Kep. Riau	44,23	38,79	16,97	100,00
DKI Jakarta	33,20	41,13	25,67	100,00
Jawa Barat	44,57	38,93	16,50	100,00
Jawa Tengah	49,39	35,70	14,90	100,00
DI Yogyakarta	50,63	35,95	13,42	100,00
Jawa Timur	48,77	35,75	15,47	100,00
Banten	45,27	37,35	17,39	100,00
Bali	49,17	35,95	14,87	100,00
Nusa Tenggara Barat	48,01	35,59	16,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	44,15	41,57	14,28	100,00
Kalimantan Barat	46,29	38,04	15,66	100,00
Kalimantan Tengah	42,25	40,44	17,31	100,00
Kalimantan Selatan	42,44	40,50	17,07	100,00
Kalimantan Timur	48,35	34,98	16,67	100,00
Sulawesi Utara	42,81	38,53	18,66	100,00
Sulawesi Tengah	41,31	40,91	17,78	100,00
Sulawesi Selatan	45,01	39,15	15,84	100,00
Sulawesi Tenggara	42,22	40,57	17,21	100,00
Gorontalo	43,85	37,13	19,03	100,00
Sulawesi Barat	37,88	41,27	20,84	100,00
Maluku	45,80	39,57	14,63	100,00
Maluku Utara	44,21	37,92	17,88	100,00
Papua Barat	37,77	46,69	15,54	100,00
Papua	36,18	41,95	21,87	100,00
Indonesia	45,75	37,80	16,45	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.3.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014

Perempuan

Provinsi	Status ekonomi rumah tangga			Total
	40 Persen Ekonomi Terendah	40 Persen Ekonomi Menengah	20 Persen Ekonomi Tertinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	36,38	43,10	20,52	100,00
Sumatera Utara	39,36	39,75	20,89	100,00
Sumatera Barat	40,72	42,37	16,91	100,00
Riau	43,86	40,00	16,14	100,00
Jambi	48,70	36,76	14,55	100,00
Sumatera Selatan	44,84	39,69	15,47	100,00
Bengkulu	50,74	34,49	14,76	100,00
Lampung	48,56	35,68	15,76	100,00
Kep. Bangka Belitung	55,03	32,79	12,18	100,00
Kep. Riau	47,64	38,34	14,02	100,00
DKI Jakarta	31,91	39,68	28,41	100,00
Jawa Barat	44,79	38,16	17,05	100,00
Jawa Tengah	50,19	35,94	13,86	100,00
DI Yogyakarta	50,73	35,54	13,73	100,00
Jawa Timur	50,63	35,32	14,05	100,00
Banten	50,15	34,55	15,31	100,00
Bali	47,03	38,66	14,31	100,00
Nusa Tenggara Barat	46,90	36,37	16,73	100,00
Nusa Tenggara Timur	43,42	38,80	17,78	100,00
Kalimantan Barat	45,78	38,36	15,86	100,00
Kalimantan Tengah	45,11	38,01	16,88	100,00
Kalimantan Selatan	46,42	39,25	14,33	100,00
Kalimantan Timur	46,87	37,12	16,01	100,00
Sulawesi Utara	43,93	38,92	17,14	100,00
Sulawesi Tengah	44,13	38,38	17,48	100,00
Sulawesi Selatan	45,87	39,35	14,78	100,00
Sulawesi Tenggara	44,08	39,97	15,95	100,00
Gorontalo	45,75	36,24	18,01	100,00
Sulawesi Barat	45,45	39,37	15,18	100,00
Maluku	45,45	39,90	14,65	100,00
Maluku Utara	44,00	38,07	17,93	100,00
Papua Barat	35,57	47,78	16,65	100,00
Papua	36,17	49,22	14,62	100,00
Indonesia	46,83	37,31	15,85	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.3.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Status ekonomi rumah tangga			Total
	40 Persen Ekonomi Terendah	40 Persen Ekonomi Menengah	20 Persen Ekonomi Tertinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	37,32	43,14	19,54	100,00
Sumatera Utara	38,82	40,36	20,82	100,00
Sumatera Barat	41,30	41,51	17,20	100,00
Riau	42,56	39,16	18,28	100,00
Jambi	46,47	36,96	16,57	100,00
Sumatera Selatan	43,93	40,06	16,01	100,00
Bengkulu	49,19	35,59	15,22	100,00
Lampung	47,57	37,41	15,02	100,00
Kep. Bangka Belitung	51,69	34,84	13,47	100,00
Kep. Riau	45,90	38,57	15,53	100,00
DKI Jakarta	32,53	40,38	27,09	100,00
Jawa Barat	44,68	38,53	16,79	100,00
Jawa Tengah	49,82	35,83	14,34	100,00
DI Yogyakarta	50,68	35,72	13,59	100,00
Jawa Timur	49,79	35,52	14,69	100,00
Banten	47,78	35,91	16,32	100,00
Bali	48,03	37,40	14,57	100,00
Nusa Tenggara Barat	47,42	36,00	16,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	43,77	40,12	16,11	100,00
Kalimantan Barat	46,04	38,20	15,76	100,00
Kalimantan Tengah	43,64	39,26	17,10	100,00
Kalimantan Selatan	44,60	39,82	15,58	100,00
Kalimantan Timur	47,67	35,97	16,36	100,00
Sulawesi Utara	43,41	38,74	17,85	100,00
Sulawesi Tengah	42,72	39,64	17,63	100,00
Sulawesi Selatan	45,50	39,27	15,24	100,00
Sulawesi Tenggara	43,21	40,25	16,54	100,00
Gorontalo	44,88	36,65	18,48	100,00
Sulawesi Barat	41,90	40,26	17,83	100,00
Maluku	45,62	39,74	14,64	100,00
Maluku Utara	44,10	37,99	17,90	100,00
Papua Barat	36,79	47,18	16,04	100,00
Papua	36,17	45,07	18,75	100,00
Indonesia	46,33	37,54	16,13	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.4 Proporsi Lansia yang Pernah Bepergian Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	8,25	9,52	8,94	4,69	6,52	5,70	5,62	7,30	6,54
Sumatera Utara	10,61	9,69	10,11	8,55	9,27	8,96	9,55	9,47	9,51
Sumatera Barat	14,45	18,35	16,61	6,62	8,96	7,93	9,41	12,28	11,01
Riau	13,68	14,78	14,23	7,25	3,93	5,60	9,65	8,05	8,85
Jambi	13,43	9,81	11,59	6,03	3,36	4,70	8,24	5,33	6,79
Sumatera Selatan	6,84	6,31	6,56	6,31	4,21	5,23	6,49	4,96	5,70
Bengkulu	20,65	11,32	15,82	9,59	7,38	8,49	12,44	8,45	10,42
Lampung	8,67	2,79	5,65	6,71	4,05	5,40	7,16	3,74	5,46
Kep. Bangka Belitung	8,83	8,68	8,75	6,46	7,07	6,77	7,66	7,91	7,79
Kep. Riau	9,02	8,97	8,99	9,84	2,03	6,17	9,26	7,11	8,21
DKI Jakarta	21,75	17,50	19,55	-	-	-	21,75	17,50	19,55
Jawa Barat	7,83	7,00	7,40	5,67	3,02	4,29	6,97	5,42	6,17
Jawa Tengah	10,76	9,13	9,88	6,50	4,69	5,53	8,34	6,63	7,42
DI Yogyakarta	14,01	11,49	12,62	4,36	4,34	4,35	9,94	8,42	9,10
Jawa Timur	12,62	9,80	11,08	5,02	3,14	3,98	8,38	6,04	7,10
Banten	7,81	7,86	7,84	2,77	3,31	3,05	5,90	6,10	6,01
Bali	10,36	10,71	10,55	8,43	6,09	7,17	9,45	8,49	8,94
Nusa Tenggara Barat	6,73	3,97	5,26	2,54	1,47	1,98	4,23	2,51	3,32
Nusa Tenggara Timur	7,73	7,96	7,85	4,71	3,03	3,83	5,22	3,87	4,51
Kalimantan Barat	7,46	5,61	6,52	2,70	2,40	2,55	4,20	3,45	3,82
Kalimantan Tengah	16,12	9,37	12,80	7,76	4,97	6,41	10,44	6,42	8,48
Kalimantan Selatan	13,97	10,88	12,31	11,28	10,38	10,79	12,37	10,58	11,40
Kalimantan Timur	9,46	6,65	8,14	3,92	4,26	4,07	7,17	5,70	6,49
Sulawesi Utara	6,20	4,29	5,17	6,30	7,83	7,10	6,26	6,29	6,28
Sulawesi Tengah	11,17	10,30	10,71	10,10	5,89	8,01	10,32	6,90	8,60
Sulawesi Selatan	11,47	9,87	10,56	6,36	5,26	5,73	7,98	6,72	7,27
Sulawesi Tenggara	12,54	13,99	13,31	9,69	5,72	7,59	10,35	7,65	8,92
Gorontalo	9,93	5,72	7,54	12,85	7,02	9,77	11,90	6,56	9,01
Sulawesi Barat	13,11	9,63	11,19	10,56	5,68	8,00	11,13	6,65	8,75
Maluku	5,67	2,78	4,13	10,01	5,29	7,60	8,43	4,32	6,30
Maluku Utara	6,04	1,91	3,89	2,15	1,80	1,98	3,11	1,83	2,47
Papua Barat	8,84	8,85	8,84	9,14	5,43	7,50	9,05	6,49	7,91
Papua	6,22	2,55	4,59	3,56	1,50	2,70	4,58	1,93	3,44
Indonesia	10,97	9,28	10,07	6,06	4,45	5,20	8,33	6,69	7,46

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.5 Persentase Lansia Bepergian Menurut Provinsi dan Tujuan Bepergian, 2014

Provinsi	Tujuan Bepergian						Total
	Berlibur/ rekreasi	Profesi/ bisnis	Kesehatan	Berziarah/ keagamaan	Mengunjungi teman/ keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,25	3,46	15,37	3,37	67,80	6,75	100,00
Sumatera Utara	14,48	2,40	5,72	5,95	67,31	4,15	100,00
Sumatera Barat	13,31	5,07	5,44	5,33	66,76	4,09	100,00
Riau	4,46	5,66	12,42	5,38	64,16	7,91	100,00
Jambi	8,13	3,42	11,62	0,71	63,63	12,49	100,00
Sumatera Selatan	0,87	6,96	10,67	3,07	72,68	5,75	100,00
Bengkulu	7,12	2,04	16,59	1,68	71,02	1,56	100,00
Lampung	4,20	5,99	9,74	4,65	67,64	7,78	100,00
Kep. Bangka Belitung	22,74	3,71	9,46	0,03	55,63	8,43	100,00
Kep. Riau	14,31	18,02	13,89	-	46,42	7,36	100,00
DKI Jakarta	24,78	3,62	0,99	7,22	59,88	3,50	100,00
Jawa Barat	15,05	4,00	4,36	11,59	60,73	4,26	100,00
Jawa Tengah	12,26	3,39	2,68	14,16	62,42	5,08	100,00
DI Yogyakarta	12,74	1,52	2,97	6,67	70,03	6,07	100,00
Jawa Timur	11,58	2,41	3,82	14,82	63,50	3,87	100,00
Banten	24,22	3,54	1,59	10,16	60,49	0,00	100,00
Bali	3,84	7,28	3,65	47,12	36,00	2,11	100,00
Nusa Tenggara Barat	9,13	8,51	6,65	9,23	59,05	7,42	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,69	4,81	13,73	2,49	67,14	10,14	100,00
Kalimantan Barat	12,11	14,63	8,43	5,72	51,31	7,80	100,00
Kalimantan Tengah	2,45	6,58	20,27	4,04	55,15	11,52	100,00
Kalimantan Selatan	1,00	3,67	7,86	15,25	66,88	5,34	100,00
Kalimantan Timur	11,02	2,14	10,69	5,36	68,73	2,05	100,00
Sulawesi Utara	13,70	3,97	19,33	1,69	53,64	7,67	100,00
Sulawesi Tengah	2,63	4,87	15,05	5,77	67,39	4,30	100,00
Sulawesi Selatan	3,53	7,19	11,26	3,78	69,78	4,46	100,00
Sulawesi Tenggara	0,75	10,15	15,42	0,94	66,61	6,14	100,00
Gorontalo	6,36	19,99	16,48	7,99	46,36	2,82	100,00
Sulawesi Barat	0,00	7,25	17,50	9,32	58,64	7,29	100,00
Maluku	9,55	13,42	8,15	1,26	55,26	12,36	100,00
Maluku Utara	0,00	11,38	2,56	3,84	77,57	4,65	100,00
Papua Barat	21,08	8,47	8,77	0,51	48,17	13,01	100,00
Papua	15,18	15,62	15,94	3,34	41,10	8,81	100,00
Indonesia	12,05	4,10	5,53	10,93	62,66	4,73	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.6 Proporsi Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,92	0,94	1,18	0,73	0,93
Sumatera Utara	1,38	1,08	1,49	1,00	1,22
Sumatera Barat	2,01	1,50	2,04	1,40	1,68
Riau	1,58	1,78	2,24	1,16	1,70
Jambi	0,73	0,75	0,70	0,79	0,74
Sumatera Selatan	1,54	0,85	1,43	0,78	1,09
Bengkulu	2,07	2,52	3,67	1,16	2,40
Lampung	1,77	1,63	2,23	1,09	1,66
Kep. Bangka Belitung	1,24	0,59	1,30	0,56	0,92
Kep. Riau	0,40	0,85	1,03	0,00	0,53
DKI Jakarta	1,27	-	1,81	0,77	1,27
Jawa Barat	1,47	1,39	1,89	1,02	1,44
Jawa Tengah	1,60	0,87	1,38	1,01	1,18
DI Yogyakarta	1,30	0,57	1,22	0,81	0,99
Jawa Timur	1,41	0,62	1,33	0,67	0,97
Banten	1,11	0,93	1,44	0,66	1,04
Bali	0,13	0,55	0,55	0,14	0,33
Nusa Tenggara Barat	2,33	2,28	3,09	1,60	2,30
Nusa Tenggara Timur	1,48	2,37	3,26	1,28	2,22
Kalimantan Barat	1,98	0,60	1,34	0,75	1,05
Kalimantan Tengah	2,74	0,77	1,98	0,81	1,41
Kalimantan Selatan	0,09	0,91	0,70	0,49	0,58
Kalimantan Timur	0,85	0,66	1,12	0,37	0,77
Sulawesi Utara	1,86	0,90	2,27	0,47	1,31
Sulawesi Tengah	2,29	2,43	3,34	1,47	2,40
Sulawesi Selatan	1,91	0,83	1,66	0,79	1,17
Sulawesi Tenggara	1,99	1,57	2,92	0,57	1,67
Gorontalo	2,46	3,27	4,34	1,84	2,99
Sulawesi Barat	1,64	1,67	2,04	1,33	1,66
Maluku	1,31	0,29	0,87	0,49	0,67
Maluku Utara	0,24	0,65	1,00	0,07	0,54
Papua Barat	2,79	0,85	1,50	1,35	1,44
Papua	1,69	1,74	2,36	0,86	1,72
Indonesia	1,44	1,06	1,64	0,88	1,23

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 5.7 Persentase Lansia Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan, 2014

Provinsi	Jenis kejahatan				Total
	Pencurian	Perampokan	Penipuan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	89,19	4,76	2,52	3,53	100,00
Sumatera Utara	68,90	13,81	16,67	0,62	100,00
Sumatera Barat	69,81	11,32	16,90	1,97	100,00
Riau	72,50	11,01	16,49	0,00	100,00
Jambi	81,80	0,00	13,69	4,51	100,00
Sumatera Selatan	72,22	6,15	8,33	13,30	100,00
Bengkulu	79,10	5,33	15,57	0,00	100,00
Lampung	84,16	5,29	4,43	6,13	100,00
Kep. Bangka Belitung	78,80	4,04	17,16	0,00	100,00
Kep. Riau	95,23	0,00	4,77	0,00	100,00
DKI Jakarta	83,13	0,00	16,87	0,00	100,00
Jawa Barat	74,98	12,08	4,81	8,13	100,00
Jawa Tengah	75,30	6,74	13,65	4,30	100,00
DI Yogyakarta	86,63	0,00	2,46	10,91	100,00
Jawa Timur	66,78	9,33	19,13	4,76	100,00
Banten	80,55	8,96	10,49	0,00	100,00
Bali	94,06	0,00	5,94	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	70,77	0,00	22,88	6,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	78,67	8,20	5,88	7,25	100,00
Kalimantan Barat	69,56	27,84	2,59	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	84,38	7,63	0,59	7,40	100,00
Kalimantan Selatan	41,86	11,59	0,00	46,55	100,00
Kalimantan Timur	65,11	0,00	29,56	5,33	100,00
Sulawesi Utara	87,16	3,35	7,69	1,80	100,00
Sulawesi Tengah	70,97	13,59	10,01	5,43	100,00
Sulawesi Selatan	75,95	6,08	12,25	5,72	100,00
Sulawesi Tenggara	74,33	0,00	14,66	11,01	100,00
Gorontalo	96,57	0,00	3,43	0,00	100,00
Sulawesi Barat	86,70	0,00	9,20	4,10	100,00
Maluku	19,60	0,00	52,80	27,60	100,00
Maluku Utara	93,25	6,75	0,00	0,00	100,00
Papua Barat	72,80	12,56	14,64	0,00	100,00
Papua	47,87	7,78	44,35	0,00	100,00
Indonesia	74,33	8,26	12,02	5,39	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.1 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Menerima/Membeli Beras Miskin Menurut Provinsi Dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	51,24	82,69	74,51
Sumatera Utara	29,01	55,42	42,82
Sumatera Barat	24,49	46,64	38,89
Riau	28,40	52,24	43,30
Jambi	32,73	49,05	44,23
Sumatera Selatan	42,52	44,76	43,97
Bengkulu	32,04	49,90	44,98
Lampung	53,60	73,62	68,80
Kep. Bangka Belitung	19,98	36,33	28,12
Kep. Riau	32,55	50,03	37,25
DKI Jakarta	21,05	-	21,05
Jawa Barat	54,43	75,47	62,73
Jawa Tengah	63,37	84,83	75,42
DI Yogyakarta	41,43	80,18	58,14
Jawa Timur	55,50	81,98	70,34
Banten	46,26	78,50	58,72
Bali	22,14	45,03	33,21
Nusa Tenggara Barat	80,43	91,31	86,79
Nusa Tenggara Timur	16,33	57,81	50,84
Kalimantan Barat	25,53	53,22	44,35
Kalimantan Tengah	21,49	44,51	37,01
Kalimantan Selatan	20,97	41,41	33,34
Kalimantan Timur	18,67	44,88	29,19
Sulawesi Utara	25,37	52,57	40,91
Sulawesi Tengah	39,83	63,09	58,03
Sulawesi Selatan	24,09	46,81	39,52
Sulawesi Tenggara	34,46	63,17	56,21
Gorontalo	36,42	63,01	53,73
Sulawesi Barat	40,87	62,67	57,54
Maluku	28,35	58,49	47,29
Maluku Utara	14,02	41,89	34,53
Papua Barat	31,94	49,50	44,32
Papua	29,85	53,58	43,68
Indonesia	47,46	70,83	59,99

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.2 Rata-rata Kilogram Beras Miskin yang Diterima/Dibeli Rumah Tangga Lansia Per Bulan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,93	6,17	6,13
Sumatera Utara	8,60	7,54	7,88
Sumatera Barat	10,10	9,07	9,30
Riau	9,25	6,70	7,33
Jambi	8,64	7,79	7,97
Sumatera Selatan	6,23	6,67	6,52
Bengkulu	8,01	7,54	7,63
Lampung	6,38	5,47	5,64
Kep. Bangka Belitung	11,03	11,31	11,21
Kep. Riau	12,64	8,32	11,08
DKI Jakarta	8,30	-	8,30
Jawa Barat	4,26	4,67	4,46
Jawa Tengah	4,70	5,22	5,03
DI Yogyakarta	8,13	7,81	7,94
Jawa Timur	5,12	5,10	5,10
Banten	4,17	4,81	4,50
Bali	8,44	7,64	7,92
Nusa Tenggara Barat	4,74	4,89	4,83
Nusa Tenggara Timur	7,33	11,42	11,20
Kalimantan Barat	6,81	7,20	7,13
Kalimantan Tengah	10,30	7,05	7,67
Kalimantan Selatan	8,99	6,66	7,24
Kalimantan Timur	9,32	9,30	9,31
Sulawesi Utara	8,64	6,94	7,39
Sulawesi Tengah	7,96	7,10	7,23
Sulawesi Selatan	9,84	8,81	9,01
Sulawesi Tenggara	6,24	6,39	6,37
Gorontalo	8,91	8,66	8,72
Sulawesi Barat	4,98	5,31	5,25
Maluku	12,31	11,85	11,96
Maluku Utara	12,67	9,03	9,42
Papua Barat	10,43	11,21	11,05
Papua	15,03	14,42	14,59
Indonesia	5,42	5,91	5,73

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.3 Rata-rata Harga (Rupiah) Per Kilogram Beras Miskin yang Dibeli Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2 031,27	1 906,78	1 929,27
Sumatera Utara	2 102,78	2 195,91	2 165,83
Sumatera Barat	1 972,47	2 100,53	2 072,30
Riau	2 334,41	2 451,20	2 423,17
Jambi	2 262,91	2 253,99	2 255,94
Sumatera Selatan	2 589,60	2 510,23	2 537,17
Bengkulu	2 511,45	2 324,53	2 361,19
Lampung	2 308,21	2 158,09	2 186,23
Kep. Bangka Belitung	1 503,10	1 199,89	1 310,37
Kep. Riau	1 913,01	1 785,10	1 866,82
DKI Jakarta	2 267,30	-	2 267,30
Jawa Barat	2 581,42	2 472,73	2 529,38
Jawa Tengah	2 047,35	2 036,81	2 040,69
DI Yogyakarta	1 952,42	1 937,80	1 943,73
Jawa Timur	1 987,30	1 931,29	1 950,70
Banten	2 535,02	2 534,30	2 534,65
Bali	1 967,47	1 965,58	1 966,23
Nusa Tenggara Barat	2 041,32	1 977,01	2 001,79
Nusa Tenggara Timur	1 984,01	1 770,98	1 781,11
Kalimantan Barat	2 380,75	2 814,36	2 734,25
Kalimantan Tengah	2 231,75	2 325,87	2 308,05
Kalimantan Selatan	2 247,91	2 536,88	2 465,25
Kalimantan Timur	2 430,45	1 941,15	2 131,14
Sulawesi Utara	1 925,47	1 993,35	1 975,20
Sulawesi Tengah	1 896,42	1 950,97	1 942,84
Sulawesi Selatan	1 862,33	1 945,13	1 928,95
Sulawesi Tenggara	2 207,47	2 232,34	2 228,64
Gorontalo	1 577,43	1 892,87	1 822,77
Sulawesi Barat	3 172,72	2 352,02	2 489,16
Maluku	2 060,59	2 057,04	2 057,83
Maluku Utara	2 045,31	2 392,91	2 353,82
Papua Barat	2 620,04	2 172,07	2 270,15
Papua	2 462,18	2 530,32	2 510,30
Indonesia	2 215,25	2 114,72	2 151,56

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.4 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi Dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	11,79	3,90	5,95
Sumatera Utara	10,39	5,12	7,63
Sumatera Barat	12,67	4,23	7,18
Riau	10,73	2,75	5,75
Jambi	9,46	2,74	4,73
Sumatera Selatan	10,47	2,17	5,08
Bengkulu	15,21	2,59	6,07
Lampung	8,91	2,12	3,75
Kep. Bangka Belitung	7,27	3,54	5,41
Kep. Riau	7,81	1,75	6,18
DKI Jakarta	11,86	-	11,86
Jawa Barat	10,99	3,07	7,86
Jawa Tengah	10,17	3,37	6,35
DI Yogyakarta	12,73	5,23	9,50
Jawa Timur	9,65	2,12	5,43
Banten	9,29	4,61	7,48
Bali	9,16	7,70	8,45
Nusa Tenggara Barat	5,91	1,67	3,43
Nusa Tenggara Timur	16,49	2,85	5,14
Kalimantan Barat	9,28	1,87	4,24
Kalimantan Tengah	14,15	4,40	7,57
Kalimantan Selatan	12,72	4,60	7,80
Kalimantan Timur	11,35	4,91	8,77
Sulawesi Utara	10,27	7,60	8,74
Sulawesi Tengah	9,99	2,67	4,26
Sulawesi Selatan	11,29	4,40	6,61
Sulawesi Tenggara	18,75	3,33	7,07
Gorontalo	12,12	1,94	5,49
Sulawesi Barat	13,77	3,45	5,87
Maluku	24,60	3,13	11,11
Maluku Utara	8,95	2,15	3,94
Papua Barat	27,76	8,24	13,99
Papua	25,44	4,83	13,43
Indonesia	10,64	3,23	6,66

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.5.1 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Sosial, 2014

Provinsi	Jenis jaminan sosial					Perkotaan
	Jaminan Pensiun	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan Veteran	Pesangon PHK	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	10,98	0,58	0,24	0,31	0,00	
Sumatera Utara	9,66	0,89	0,53	0,50	0,11	
Sumatera Barat	12,17	0,81	0,24	0,27	0,00	
Riau	9,25	2,21	0,85	0,00	1,25	
Jambi	8,66	0,17	1,30	0,66	0,00	
Sumatera Selatan	10,40	0,41	0,54	0,05	0,00	
Bengkulu	14,92	0,83	0,00	0,37	0,09	
Lampung	8,28	0,34	0,64	0,23	0,30	
Kep. Bangka Belitung	6,58	0,79	0,33	0,34	0,08	
Kep. Riau	7,30	0,00	0,19	0,32	0,00	
DKI Jakarta	9,75	1,76	2,26	0,55	0,94	
Jawa Barat	9,58	0,78	1,30	0,32	0,15	
Jawa Tengah	9,06	0,81	0,53	0,28	0,11	
DI Yogyakarta	11,65	0,41	0,37	0,79	0,00	
Jawa Timur	8,41	0,64	0,86	0,43	0,19	
Banten	7,98	1,01	1,69	0,32	0,69	
Bali	7,84	1,54	0,54	0,50	0,05	
Nusa Tenggara Barat	5,81	0,14	0,10	0,00	0,00	
Nusa Tenggara Timur	15,62	0,70	0,00	0,18	0,00	
Kalimantan Barat	9,28	0,43	0,00	0,00	0,00	
Kalimantan Tengah	13,35	1,38	0,75	0,10	0,00	
Kalimantan Selatan	11,81	0,36	0,21	0,56	0,00	
Kalimantan Timur	9,25	1,51	2,18	0,25	0,00	
Sulawesi Utara	9,78	0,34	0,13	0,19	0,00	
Sulawesi Tengah	9,54	0,64	0,00	0,45	0,00	
Sulawesi Selatan	10,39	0,66	0,46	0,40	0,15	
Sulawesi Tenggara	14,74	5,40	0,18	0,41	0,00	
Gorontalo	12,12	0,42	0,00	0,00	0,00	
Sulawesi Barat	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maluku	23,08	0,74	0,81	0,00	0,00	
Maluku Utara	8,95	0,85	0,00	0,00	0,00	
Papua Barat	27,76	0,20	0,00	0,58	0,00	
Papua	24,42	5,55	0,24	1,02	0,00	
Indonesia	9,45	0,85	0,91	0,36	0,21	

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.5.2 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Sosial, 2014

Provinsi	Jenis Jaminan Sosial					Perdesaan
	Jaminan Pensiun	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan Veteran	Pesangon PHK	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)
Aceh	3,21	0,26	0,08	0,56	0,03	
Sumatera Utara	4,51	0,44	0,28	0,29	0,09	
Sumatera Barat	3,60	0,56	0,25	0,31	0,10	
Riau	1,88	0,44	0,58	0,10	0,37	
Jambi	2,50	0,11	0,29	0,00	0,00	
Sumatera Selatan	1,85	0,43	0,34	0,04	0,10	
Bengkulu	2,59	0,18	0,00	0,00	0,00	
Lampung	1,89	0,15	0,11	0,17	0,00	
Kep. Bangka Belitung	2,09	1,19	0,26	0,00	0,00	
Kep. Riau	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	2,48	0,23	0,23	0,45	0,00	
Jawa Tengah	3,01	0,11	0,18	0,15	0,00	
DI Yogyakarta	4,53	0,67	0,39	0,09	0,00	
Jawa Timur	1,72	0,12	0,31	0,04	0,02	
Banten	3,23	0,00	0,57	0,52	0,70	
Bali	4,51	0,39	0,44	2,74	0,00	
Nusa Tenggara Barat	1,46	0,46	0,00	0,14	0,00	
Nusa Tenggara Timur	2,68	0,48	0,10	0,00	0,04	
Kalimantan Barat	1,38	0,46	0,20	0,00	0,00	
Kalimantan Tengah	3,56	1,27	0,40	0,14	0,00	
Kalimantan Selatan	4,02	0,22	0,21	0,51	0,08	
Kalimantan Timur	2,58	0,28	0,77	0,42	1,07	
Sulawesi Utara	6,59	0,86	0,33	0,74	0,11	
Sulawesi Tengah	2,11	0,24	0,33	0,19	0,00	
Sulawesi Selatan	3,41	0,22	0,38	0,59	0,00	
Sulawesi Tenggara	2,79	0,45	0,11	0,00	0,15	
Gorontalo	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sulawesi Barat	2,67	0,00	0,00	0,60	0,18	
Maluku	2,99	0,00	0,00	0,14	0,01	
Maluku Utara	2,03	0,07	0,00	0,00	0,12	
Papua Barat	7,77	0,62	0,00	0,00	0,00	
Papua	4,66	0,13	0,00	0,17	0,00	
Indonesia	2,68	0,24	0,25	0,25	0,05	

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.5.3 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Sosial, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan				
	Jenis jaminan sosial				
	Jaminan Pensiun	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan Veteran	Pesangon PHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,23	0,34	0,12	0,49	0,02
Sumatera Utara	6,96	0,66	0,40	0,39	0,10
Sumatera Barat	6,60	0,64	0,25	0,30	0,07
Riau	4,64	1,11	0,68	0,06	0,70
Jambi	4,32	0,13	0,59	0,19	0,00
Sumatera Selatan	4,85	0,42	0,41	0,05	0,06
Bengkulu	5,99	0,36	0,00	0,10	0,02
Lampung	3,43	0,19	0,23	0,19	0,07
Kep. Bangka Belitung	4,34	0,99	0,29	0,17	0,04
Kep. Riau	5,81	0,00	0,14	0,23	0,00
DKI Jakarta	9,75	1,76	2,26	0,55	0,94
Jawa Barat	6,78	0,56	0,88	0,37	0,09
Jawa Tengah	5,66	0,42	0,34	0,21	0,05
DI Yogyakarta	8,58	0,53	0,38	0,49	0,00
Jawa Timur	4,66	0,35	0,56	0,21	0,09
Banten	6,15	0,62	1,26	0,40	0,69
Bali	6,23	0,98	0,49	1,58	0,03
Nusa Tenggara Barat	3,27	0,33	0,04	0,08	0,00
Nusa Tenggara Timur	4,85	0,52	0,09	0,03	0,03
Kalimantan Barat	3,91	0,45	0,14	0,00	0,00
Kalimantan Tengah	6,75	1,30	0,51	0,13	0,00
Kalimantan Selatan	7,09	0,28	0,21	0,53	0,05
Kalimantan Timur	6,57	1,02	1,62	0,32	0,43
Sulawesi Utara	7,96	0,64	0,24	0,50	0,06
Sulawesi Tengah	3,73	0,33	0,26	0,25	0,00
Sulawesi Selatan	5,65	0,36	0,40	0,53	0,05
Sulawesi Tenggara	5,69	1,65	0,13	0,10	0,12
Gorontalo	5,49	0,15	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Barat	5,28	0,00	0,00	0,46	0,13
Maluku	10,46	0,27	0,30	0,09	0,00
Maluku Utara	3,85	0,28	0,00	0,00	0,09
Papua Barat	13,66	0,50	0,00	0,17	0,00
Papua	12,90	2,39	0,10	0,53	0,00
Indonesia	5,82	0,52	0,56	0,30	0,12

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.6 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi Dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	88,58	86,87	87,31
Sumatera Utara	41,48	33,10	37,10
Sumatera Barat	56,90	43,33	48,08
Riau	48,98	43,80	45,74
Jambi	50,48	31,19	36,89
Sumatera Selatan	62,19	54,62	57,28
Bengkulu	55,39	36,03	41,36
Lampung	59,50	39,12	44,03
Kep. Bangka Belitung	57,59	62,64	60,11
Kep. Riau	51,42	62,68	54,45
DKI Jakarta	54,46	-	54,46
Jawa Barat	53,01	44,76	49,75
Jawa Tengah	58,08	53,89	55,73
DI Yogyakarta	72,67	85,96	78,40
Jawa Timur	46,15	43,60	44,72
Banten	52,98	46,32	50,41
Bali	88,47	96,58	92,39
Nusa Tenggara Barat	54,46	53,05	53,64
Nusa Tenggara Timur	67,67	71,32	70,71
Kalimantan Barat	39,12	35,49	36,66
Kalimantan Tengah	48,63	38,73	41,96
Kalimantan Selatan	51,08	49,71	50,25
Kalimantan Timur	72,57	65,28	69,64
Sulawesi Utara	56,40	49,32	52,35
Sulawesi Tengah	65,33	54,42	56,80
Sulawesi Selatan	67,15	68,53	68,09
Sulawesi Tenggara	63,03	58,13	59,32
Gorontalo	67,93	62,24	64,22
Sulawesi Barat	72,74	61,61	64,23
Maluku	64,56	59,36	61,29
Maluku Utara	57,14	61,95	60,68
Papua Barat	70,48	82,30	78,81
Papua	80,34	65,93	71,94
Indonesia	54,85	50,93	52,75

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.7.1 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2014

Provinsi	Jenis jaminan kesehatan					
	Jamkesmas	Jamkesda	Jaminan persalinan	JPK PNS/ Veteran/ Pensiun	JPK Jamsostek	Jaminan kesehatan lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	35,02	39,11	1,55	26,07	2,78	4,90
Sumatera Utara	17,24	1,52	0,23	15,86	5,79	4,17
Sumatera Barat	18,15	7,58	0,39	25,28	2,98	6,67
Riau	16,73	5,77	0,60	17,01	8,00	5,38
Jambi	16,96	4,52	0,21	23,15	4,95	4,03
Sumatera Selatan	19,84	15,24	0,11	20,14	9,90	9,56
Bengkulu	20,71	1,00	1,74	29,16	4,33	6,75
Lampung	25,44	17,18	1,47	16,51	3,29	3,97
Kep. Bangka Belitung	12,64	32,14	0,00	8,32	5,77	6,88
Kep. Riau	15,37	7,47	0,46	9,46	15,50	9,59
DKI Jakarta	3,59	2,55	0,05	14,22	17,93	27,33
Jawa Barat	28,13	3,08	0,16	12,37	8,34	6,31
Jawa Tengah	34,30	3,91	0,33	14,87	5,96	4,78
DI Yogyakarta	40,34	5,39	0,39	24,03	6,14	7,55
Jawa Timur	24,11	1,32	0,59	12,76	6,61	4,96
Banten	21,52	7,85	1,21	7,92	16,12	6,86
Bali	12,39	63,43	1,97	14,86	9,47	11,10
Nusa Tenggara Barat	39,83	0,41	0,13	11,39	1,20	3,50
Nusa Tenggara Timur	21,82	3,15	0,38	39,88	1,80	6,97
Kalimantan Barat	14,76	1,17	0,00	13,31	6,60	8,97
Kalimantan Tengah	15,67	2,90	0,96	25,59	4,71	4,59
Kalimantan Selatan	15,37	5,35	0,84	21,63	5,65	6,18
Kalimantan Timur	14,70	27,20	0,00	17,79	18,60	12,05
Sulawesi Utara	19,87	5,71	0,18	25,78	5,21	6,41
Sulawesi Tengah	30,69	3,05	0,68	31,00	3,40	2,06
Sulawesi Selatan	19,41	21,99	0,00	24,22	6,85	7,82
Sulawesi Tenggara	28,90	6,57	0,00	27,68	3,14	8,03
Gorontalo	31,91	7,80	2,10	18,15	5,10	11,11
Sulawesi Barat	24,57	7,21	0,14	24,48	0,95	26,21
Maluku	30,91	0,83	0,00	30,07	4,50	2,73
Maluku Utara	15,71	4,18	0,00	31,19	5,70	2,74
Papua Barat	39,38	0,89	0,00	33,52	5,17	4,14
Papua	48,92	9,91	1,73	33,67	3,42	3,20
Indonesia	24,87	6,08	0,42	15,22	7,90	7,28

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.7.2 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2014

Provinsi	Jenis jaminan kesehatan						Perdesaan
	Jamkesmas	Jamkesda	Jaminan persalinan	JPK PNS/Veteran/Pensiun	JPK Jamsostek	Jaminan kesehatan lainnya	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)
Aceh	57,57	32,67	0,33	7,12	0,55	3,18	
Sumatera Utara	22,98	2,46	0,40	5,43	1,76	1,53	
Sumatera Barat	27,88	7,61	0,56	7,05	0,89	2,26	
Riau	27,22	15,58	0,15	2,34	3,09	2,85	
Jambi	23,67	1,36	0,12	4,30	1,79	1,17	
Sumatera Selatan	21,17	30,21	0,09	3,32	1,31	4,75	
Bengkulu	29,08	0,25	0,27	5,14	1,04	0,96	
Lampung	31,23	3,21	0,14	3,75	0,27	2,01	
Kep. Bangka Belitung	13,04	46,40	0,12	3,98	2,63	9,22	
Kep. Riau	20,81	28,00	0,00	3,71	1,00	12,80	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	37,16	2,14	0,17	3,80	1,56	1,63	
Jawa Tengah	44,88	2,82	0,49	4,29	1,42	3,16	
DI Yogyakarta	70,74	4,12	0,62	7,17	1,68	10,39	
Jawa Timur	38,02	1,09	0,97	2,84	1,56	1,02	
Banten	39,18	0,12	0,00	3,02	5,01	0,39	
Bali	18,42	80,70	1,97	8,78	5,13	10,38	
Nusa Tenggara Barat	46,78	0,29	0,10	3,26	0,39	3,28	
Nusa Tenggara Timur	64,20	1,73	0,30	4,19	0,30	2,84	
Kalimantan Barat	26,42	3,71	0,22	3,19	1,00	3,03	
Kalimantan Tengah	23,69	7,45	0,32	5,03	2,95	2,79	
Kalimantan Selatan	25,16	13,94	0,24	7,25	2,82	3,39	
Kalimantan Timur	35,14	26,95	0,00	4,14	5,18	2,40	
Sulawesi Utara	32,20	4,09	0,71	10,44	1,01	4,70	
Sulawesi Tengah	40,47	7,14	0,34	6,26	0,72	2,06	
Sulawesi Selatan	35,91	31,34	0,07	6,75	0,79	4,92	
Sulawesi Tenggara	45,82	5,28	0,34	7,13	1,08	0,92	
Gorontalo	50,99	5,08	0,00	5,61	0,58	2,26	
Sulawesi Barat	40,04	5,29	0,09	5,52	0,00	22,85	
Maluku	50,02	2,19	0,18	9,34	0,40	0,47	
Maluku Utara	32,79	21,94	0,00	6,75	0,77	5,07	
Papua Barat	77,44	0,18	0,00	10,09	1,20	0,48	
Papua	56,12	9,88	0,00	6,43	0,31	2,42	
Indonesia	38,24	7,42	0,47	4,42	1,51	2,72	

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.7.3 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					
	Jenis jaminan kesehatan					
	Jamkesmas	Jamkesda	Jaminan persalinan	JPK PNS/ Veteran/ Pensiun	JPK Jamsostek	Jaminan kesehatan lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	51,70	34,35	0,65	12,05	1,13	3,63
Sumatera Utara	20,24	2,01	0,32	10,40	3,68	2,79
Sumatera Barat	24,47	7,60	0,50	13,43	1,62	3,81
Riau	23,29	11,90	0,32	7,84	4,93	3,80
Jambi	21,68	2,30	0,15	9,87	2,72	2,02
Sumatera Selatan	20,70	24,95	0,09	9,22	4,33	6,44
Bengkulu	26,78	0,45	0,67	11,75	1,95	2,56
Lampung	29,84	6,57	0,46	6,82	0,99	2,48
Kep. Bangka Belitung	12,84	39,24	0,06	6,15	4,20	8,05
Kep. Riau	16,83	12,99	0,34	7,91	11,60	10,46
DKI Jakarta	3,59	2,55	0,05	14,22	17,93	27,33
Jawa Barat	31,69	2,71	0,17	8,99	5,66	4,46
Jawa Tengah	40,24	3,30	0,42	8,92	3,41	3,87
DI Yogyakarta	53,45	4,84	0,49	16,76	4,22	8,78
Jawa Timur	31,90	1,19	0,81	7,20	3,78	2,75
Banten	28,35	4,86	0,74	6,03	11,82	4,36
Bali	15,31	71,78	1,97	11,92	7,37	10,75
Nusa Tenggara Barat	43,89	0,34	0,11	6,64	0,73	3,37
Nusa Tenggara Timur	57,09	1,97	0,31	10,18	0,55	3,53
Kalimantan Barat	22,69	2,90	0,15	6,43	2,80	4,94
Kalimantan Tengah	21,08	5,96	0,53	11,73	3,53	3,38
Kalimantan Selatan	21,30	10,55	0,47	12,93	3,94	4,49
Kalimantan Timur	22,91	27,10	0,00	12,31	13,21	8,17
Sulawesi Utara	26,92	4,78	0,48	17,01	2,81	5,43
Sulawesi Tengah	38,34	6,25	0,41	11,65	1,31	2,06
Sulawesi Selatan	30,62	28,34	0,05	12,35	2,73	5,85
Sulawesi Tenggara	41,72	5,59	0,26	12,12	1,58	2,65
Gorontalo	44,33	6,03	0,73	9,98	2,16	5,35
Sulawesi Barat	36,40	5,74	0,10	9,98	0,22	23,64
Maluku	42,92	1,69	0,11	17,05	1,92	1,31
Maluku Utara	28,28	17,26	0,00	13,20	2,07	4,46
Papua Barat	66,22	0,39	0,00	16,99	2,37	1,56
Papua	53,12	9,89	0,72	17,79	1,61	2,74
Indonesia	32,04	6,80	0,45	9,43	4,47	4,83

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.8 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha Setahun Terakhir Menurut Provinsi Dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,49	6,19	6,01
Sumatera Utara	3,16	4,67	3,95
Sumatera Barat	9,41	10,52	10,13
Riau	6,26	11,53	9,56
Jambi	2,68	3,72	3,42
Sumatera Selatan	2,82	2,68	2,73
Bengkulu	9,13	7,26	7,78
Lampung	5,09	3,76	4,08
Kep. Bangka Belitung	2,79	1,77	2,28
Kep. Riau	7,41	12,78	8,85
DKI Jakarta	2,00	-	2,00
Jawa Barat	4,52	6,30	5,22
Jawa Tengah	8,76	9,04	8,92
DI Yogyakarta	10,09	12,28	11,03
Jawa Timur	7,77	7,54	7,64
Banten	3,09	2,66	2,93
Bali	11,40	10,64	11,03
Nusa Tenggara Barat	3,53	8,89	6,66
Nusa Tenggara Timur	6,90	8,22	7,99
Kalimantan Barat	2,59	6,21	5,05
Kalimantan Tengah	5,11	6,24	5,87
Kalimantan Selatan	1,28	5,07	3,57
Kalimantan Timur	1,72	3,82	2,56
Sulawesi Utara	5,80	9,41	7,86
Sulawesi Tengah	5,02	10,60	9,39
Sulawesi Selatan	7,60	6,55	6,89
Sulawesi Tenggara	10,46	7,08	7,90
Gorontalo	10,22	12,82	11,92
Sulawesi Barat	8,49	6,14	6,69
Maluku	1,82	1,96	1,90
Maluku Utara	7,00	1,85	3,21
Papua Barat	6,26	5,62	5,81
Papua	4,59	6,76	5,86
Indonesia	6,04	7,23	6,68

Sumber: BPS, Susenas 2014

Tabel 6.9 Proporsi Rumah Tangga Lansia Penerima Kredit Pengembangan Usaha Menurut Provinsi dan Jenis Kredit, 2014

Provinsi	Jenis Kredit Pengembangan Usaha						
	PNPM	Program pemerintah lainnya	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Program Bank Selain KUR	Program Koperasi	Perorangan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,54	0,54	0,27	1,15	0,43	0,07	0,24
Sumatera Utara	0,84	0,13	0,72	1,06	0,72	0,48	0,55
Sumatera Barat	3,48	0,96	1,30	1,98	1,53	0,79	1,46
Riau	1,99	0,36	0,84	2,47	1,70	0,79	1,79
Jambi	1,21	0,21	0,24	1,26	0,37	0,26	0,11
Sumatera Selatan	0,47	0,11	0,34	0,93	0,24	0,45	0,29
Bengkulu	2,20	0,55	1,62	2,09	0,45	0,96	0,59
Lampung	0,41	0,15	1,09	0,42	0,44	1,43	0,71
Kep. Bangka Belitung	0,79	0,00	0,10	0,56	0,58	0,00	0,41
Kep. Riau	3,24	0,55	0,22	2,75	0,61	0,00	2,18
DKI Jakarta	0,15	0,27	0,24	0,69	1,00	0,15	0,00
Jawa Barat	1,43	0,27	0,74	1,59	0,45	0,63	0,48
Jawa Tengah	2,08	0,50	1,66	2,25	1,49	1,03	0,88
DI Yogyakarta	2,16	0,84	2,36	1,70	1,54	1,11	2,16
Jawa Timur	1,37	0,35	1,21	1,48	1,67	1,14	1,13
Banten	0,89	0,05	0,37	0,69	0,31	0,70	0,26
Bali	0,86	0,62	1,89	2,22	3,05	1,08	3,98
Nusa Tenggara Barat	1,88	0,07	0,70	1,21	1,03	1,38	0,75
Nusa Tenggara Timur	1,80	1,16	0,54	0,86	2,63	0,71	1,01
Kalimantan Barat	0,91	0,16	0,66	0,74	1,00	0,14	1,52
Kalimantan Tengah	2,09	0,16	1,03	1,45	0,53	0,46	1,10
Kalimantan Selatan	1,56	0,58	0,20	0,61	0,29	0,54	0,15
Kalimantan Timur	0,52	0,25	0,51	0,52	0,23	0,13	0,43
Sulawesi Utara	3,93	0,08	1,40	1,31	0,93	0,34	0,64
Sulawesi Tengah	3,05	0,43	2,67	2,43	0,68	0,58	0,25
Sulawesi Selatan	1,73	0,44	1,88	1,57	0,75	0,49	0,50
Sulawesi Tenggara	3,43	0,86	1,34	1,34	0,54	0,11	0,68
Gorontalo	6,03	0,52	1,93	1,90	1,08	1,03	0,41
Sulawesi Barat	1,63	0,00	1,30	1,09	1,19	0,83	0,93
Maluku	0,33	0,01	0,88	0,45	0,00	0,34	0,00
Maluku Utara	0,00	0,14	0,94	0,92	0,95	0,00	0,37
Papua Barat	0,29	0,19	0,99	3,00	0,55	0,22	0,57
Papua	2,04	0,23	0,62	2,05	0,36	0,35	0,56
Indonesia	1,58	0,37	1,10	1,53	1,10	0,81	0,84

Sumber: BPS, Susenas 2014

<http://www.bps.go.id>

HASIL PENGHITUNGAN
SAMPLING ERROR

Tabel A.1: Sampling Error Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Perkotaan Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	4,97	0,33	6,69	4,32	5,62	0,71	6.240	6,04	0,36	5,93	5,34	6,74	0,68	6.350	5,50	0,27	4,86	4,98	6,02	0,83	12.590
Sumatera Utara	5,60	0,24	4,27	5,13	6,07	1,59	16.324	6,74	0,30	4,49	6,14	7,33	2,17	16.337	6,17	0,23	3,70	5,73	6,62	2,66	32.661
Sumatera Barat	6,84	0,33	4,79	6,20	7,48	0,73	7.961	8,40	0,42	5,03	7,58	9,23	1,02	8.023	7,63	0,33	4,31	6,98	8,27	1,34	15.984
Riau	4,16	0,32	7,78	3,53	4,79	1,42	5.479	4,40	0,33	7,44	3,76	5,04	1,31	5.252	4,28	0,27	6,24	3,75	4,80	1,83	10.731
Jambi	5,81	0,45	7,80	4,92	6,69	0,84	3.238	6,10	0,49	7,99	5,15	7,06	0,91	3.169	5,95	0,40	6,73	5,17	6,74	1,27	6.407
Sumatera Selatan	5,94	0,38	6,43	5,19	6,69	1,63	5.872	6,88	0,46	6,74	5,97	7,78	2,08	5.940	6,41	0,36	5,61	5,70	7,11	2,68	11.812
Bengkulu	4,96	0,45	8,98	4,09	5,83	0,53	2.837	5,35	0,50	9,37	4,37	6,33	0,62	2.839	5,15	0,38	7,44	4,40	5,91	0,75	5.676
Lampung	6,52	0,42	6,40	5,70	7,34	1,32	4.522	7,00	0,42	6,02	6,17	7,83	1,23	4.487	6,76	0,36	5,30	6,06	7,46	1,86	9.009
Kep. Bangka Belitung	6,24	0,42	6,81	5,40	7,07	0,46	3.224	7,06	0,50	7,06	6,09	8,04	0,53	3.137	6,64	0,39	5,94	5,86	7,41	0,72	6.361
Kepulauan Riau	3,18	0,41	13,03	2,37	4,00	1,99	4.719	3,29	0,41	12,61	2,47	4,10	1,85	4.559	3,23	0,38	11,81	2,49	3,98	3,26	9.278
DKI Jakarta	5,65	0,29	5,19	5,08	6,23	3,57	9.043	6,13	0,29	4,78	5,56	6,71	3,25	9.128	5,89	0,25	4,28	5,40	6,38	5,03	18.171
Jawa Barat	6,52	0,17	2,65	6,18	6,86	3,32	26.169	7,26	0,19	2,60	6,89	7,63	3,48	26.103	6,89	0,15	2,19	6,59	7,18	4,73	52.272
Jawa Tengah	9,74	0,22	2,22	9,32	10,16	1,76	24.659	11,30	0,23	2,06	10,85	11,76	1,83	25.847	10,53	0,19	1,80	10,16	10,90	2,57	50.506
DI Yogyakarta	10,28	0,53	5,17	9,24	11,32	1,60	3.868	12,45	0,57	4,54	11,34	13,56	1,55	3.947	11,37	0,47	4,12	10,45	12,29	2,30	7.815
Jawa Timur	9,25	0,22	2,35	8,83	9,68	2,24	26.968	10,89	0,23	2,15	10,43	11,35	2,30	27.919	10,08	0,19	1,88	9,71	10,45	3,18	54.887
Banten	4,30	0,25	5,72	3,82	4,78	2,60	8.873	4,66	0,25	5,29	4,18	5,14	2,33	8.648	4,48	0,20	4,43	4,09	4,86	3,19	17.521
Bali	8,05	0,40	4,93	7,27	8,82	1,17	6.364	9,26	0,47	5,04	8,34	10,17	1,39	6.314	8,65	0,39	4,48	7,89	9,41	2,07	12.678
Nusa Tenggara Barat	6,93	0,43	6,24	6,09	7,78	1,23	4.576	7,43	0,40	5,44	6,64	8,22	1,07	4.833	7,19	0,35	4,89	6,50	7,88	1,62	9.409
Nusa Tenggara Timur	6,00	0,43	7,23	5,15	6,85	0,72	4.063	6,66	0,46	6,92	5,76	7,57	0,74	4.295	6,33	0,40	6,25	5,56	7,11	1,14	8.358
Kalimantan Barat	6,58	0,45	6,79	5,70	7,45	1,02	4.286	6,85	0,44	6,37	5,99	7,70	0,93	4.395	6,71	0,38	5,64	5,97	7,45	1,43	8.681
Kalimantan Tengah	4,64	0,36	7,67	3,95	5,34	0,53	4.291	4,76	0,38	7,98	4,02	5,51	0,56	4.120	4,70	0,31	6,52	4,10	5,30	0,76	8.411
Kalimantan Selatan	5,28	0,33	6,31	4,63	5,93	0,81	5.020	6,30	0,41	6,48	5,50	7,10	1,01	5.085	5,78	0,30	5,21	5,19	6,37	1,20	10.105
Kalimantan Timur	4,54	0,24	5,22	4,08	5,01	0,72	8.028	4,40	0,31	7,00	3,80	5,01	1,16	7.513	4,48	0,23	5,20	4,02	4,93	1,36	15.541
Sulawesi Utara	7,80	0,42	5,35	6,98	8,61	0,57	5.212	9,44	0,49	5,20	8,48	10,41	0,66	5.090	8,61	0,40	4,62	7,83	9,39	0,94	10.302
Sulawesi Tengah	5,82	0,49	8,48	4,85	6,79	0,67	2.851	6,48	0,60	9,30	5,30	7,66	0,90	2.715	6,15	0,43	6,94	5,31	6,99	0,95	5.566
Sulawesi Selatan	6,48	0,36	5,56	5,78	7,19	1,43	8.993	8,14	0,37	4,60	7,41	8,88	1,30	9.620	7,33	0,32	4,31	6,71	7,95	2,00	18.613
Sulawesi Tenggara	4,69	0,40	8,49	3,91	5,47	0,53	3.051	5,34	0,40	7,51	4,55	6,13	0,48	3.218	5,02	0,30	6,03	4,42	5,61	0,57	6.269
Gorontalo	5,81	0,49	8,48	4,84	6,77	0,36	2.013	7,33	0,62	8,45	6,12	8,54	0,48	1.998	6,58	0,48	7,29	5,64	7,52	0,63	4.011
Sulawesi Barat	5,87	0,73	12,50	4,44	7,31	0,60	1.279	7,04	0,83	11,81	5,41	8,66	0,67	1.356	6,46	0,58	9,01	5,32	7,60	0,70	2.635
Maluku	5,73	0,49	8,52	4,77	6,69	0,62	3.662	6,61	0,48	7,29	5,66	7,55	0,52	3.673	6,17	0,42	6,77	5,35	6,99	0,84	7.335
Maluku Utara	4,58	0,48	10,41	3,64	5,51	0,36	2.118	5,11	0,53	10,28	4,08	6,14	0,39	2.188	4,84	0,42	8,67	4,02	5,66	0,53	4.306
Papua Barat	3,55	0,34	9,52	2,89	4,21	0,19	2.844	3,33	0,38	11,52	2,58	4,08	0,23	2.742	3,44	0,31	9,07	2,83	4,06	0,31	5.586
Papua	3,86	0,41	10,61	3,06	4,66	0,84	4.236	3,57	0,39	10,92	2,81	4,34	0,71	3.982	3,73	0,32	8,46	3,11	4,35	0,96	8.218
Indonesia	6,91	0,07	1,04	6,77	7,05	2,20	232.883	7,93	0,08	0,98	7,77	8,08	2,26	234.822	7,41	0,06	0,85	7,29	7,54	3,16	467.705

Tabel A.2: Sampling Error Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Perdesaan Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	5,61	0,20	3,61	5,21	6,01	0,59	15.138	6,79	0,23	3,32	6,35	7,23	0,62	15.374	6,20	0,17	2,80	5,86	6,54	0,80	30.512
Sumatera Utara	5,73	0,19	3,33	5,36	6,11	1,03	20.310	7,26	0,24	3,31	6,79	7,73	1,30	20.623	6,50	0,18	2,82	6,14	6,85	1,68	40.933
Sumatera Barat	7,91	0,29	3,64	7,35	8,48	0,77	11.647	9,87	0,32	3,28	9,24	10,51	0,81	11.546	8,90	0,26	2,88	8,40	9,40	1,10	23.193
Riau	4,48	0,25	5,67	3,98	4,98	1,27	9.186	4,67	0,25	5,34	4,18	5,15	1,11	8.774	4,57	0,21	4,55	4,16	4,98	1,63	17.960
Jambi	5,90	0,25	4,21	5,42	6,39	0,58	8.246	6,14	0,28	4,55	5,59	6,68	0,67	7.862	6,02	0,22	3,69	5,58	6,45	0,88	16.108
Sumatera Selatan	6,37	0,22	3,44	5,94	6,80	0,91	12.388	7,03	0,27	3,77	6,51	7,55	1,16	11.748	6,69	0,20	2,98	6,30	7,08	1,42	24.136
Bengkulu	6,35	0,30	4,75	5,76	6,94	0,43	6.592	6,74	0,33	4,87	6,10	7,39	0,46	6.432	6,54	0,27	4,07	6,02	7,06	0,64	13.024
Lampung	7,63	0,24	3,16	7,15	8,10	1,10	12.733	7,85	0,27	3,42	7,32	8,37	1,24	12.128	7,73	0,21	2,74	7,32	8,15	1,62	24.861
Kep. Bangka Belitung	5,82	0,45	7,71	4,94	6,70	0,57	3.316	6,41	0,54	8,36	5,36	7,46	0,68	3.127	6,10	0,43	7,12	5,25	6,95	0,98	6.443
Kepulauan Riau	6,51	0,72	11,08	5,10	7,93	0,61	1.761	6,31	0,75	11,85	4,84	7,77	0,62	1.597	6,42	0,65	10,18	5,14	7,70	0,97	3.358
DKI Jakarta																					
Jawa Barat	8,47	0,26	3,01	7,97	8,97	2,86	13.426	9,44	0,29	3,11	8,86	10,01	3,34	13.424	8,95	0,23	2,59	8,49	9,40	4,43	26.850
Jawa Tengah	10,82	0,22	2,00	10,40	11,25	1,91	21.658	12,36	0,23	1,86	11,91	12,81	1,95	22.286	11,60	0,19	1,61	11,23	11,96	2,70	43.944
DI Yogyakarta	14,76	1,05	7,08	12,71	16,81	2,31	1.926	17,78	0,94	5,26	15,95	19,62	1,67	2.035	16,30	0,76	4,69	14,81	17,80	2,33	3.961
Jawa Timur	10,74	0,21	1,96	10,33	11,15	1,99	23.236	12,75	0,22	1,74	12,31	13,18	1,98	24.717	11,76	0,18	1,51	11,41	12,11	2,68	47.953
Banten	5,61	0,38	6,76	4,86	6,35	2,25	4.524	6,38	0,39	6,05	5,63	7,14	1,96	4.447	5,98	0,31	5,14	5,38	6,59	2,71	8.971
Bali	11,35	0,61	5,39	10,15	12,55	1,31	4.074	13,07	0,72	5,48	11,66	14,47	1,60	4.023	12,21	0,56	4,58	11,11	13,31	2,06	8.097
Nusa Tenggara Barat	7,37	0,39	5,30	6,61	8,14	1,31	6.130	7,69	0,38	4,94	6,94	8,43	1,26	6.536	7,54	0,32	4,29	6,90	8,17	1,81	12.666
Nusa Tenggara Timur	7,35	0,20	2,76	6,96	7,75	0,53	19.646	7,90	0,21	2,67	7,48	8,31	0,54	20.070	7,63	0,17	2,26	7,29	7,97	0,75	39.716
Kalimantan Barat	6,15	0,25	4,03	5,66	6,63	0,78	10.727	6,32	0,28	4,49	5,76	6,88	0,95	10.192	6,23	0,22	3,54	5,80	6,66	1,19	20.919
Kalimantan Tengah	4,93	0,28	5,74	4,37	5,48	0,63	8.654	5,13	0,30	5,91	4,54	5,72	0,63	7.949	5,02	0,25	4,89	4,54	5,50	0,89	16.603
Kalimantan Selatan	5,71	0,30	5,22	5,12	6,29	0,82	7.432	7,06	0,33	4,72	6,41	7,71	0,83	7.543	6,38	0,26	4,03	5,87	6,88	1,09	14.975
Kalimantan Timur	5,07	0,38	7,55	4,32	5,82	1,07	5.781	4,82	0,37	7,64	4,09	5,54	0,91	5.288	4,95	0,31	6,22	4,35	5,56	1,33	11.069
Sulawesi Utara	8,78	0,34	3,84	8,12	9,45	0,42	8.146	10,29	0,43	4,15	9,46	11,13	0,55	7.653	9,52	0,33	3,47	8,87	10,16	0,72	15.799
Sulawesi Tengah	6,97	0,29	4,16	6,41	7,54	0,62	9.337	7,26	0,29	3,93	6,70	7,82	0,55	8.830	7,11	0,23	3,30	6,65	7,57	0,78	18.167
Sulawesi Selatan	8,27	0,23	2,78	7,82	8,72	0,78	17.633	10,23	0,25	2,44	9,74	10,72	0,80	18.411	9,27	0,20	2,15	8,88	9,66	1,09	36.044
Sulawesi Tenggara	6,04	0,28	4,65	5,49	6,59	0,54	8.690	6,87	0,30	4,38	6,28	7,46	0,54	8.635	6,45	0,24	3,67	5,99	6,92	0,71	17.325
Gorontalo	6,14	0,42	6,83	5,32	6,97	0,49	3.947	7,04	0,43	6,15	6,19	7,88	0,45	3.858	6,58	0,34	5,22	5,91	7,26	0,61	7.805
Sulawesi Barat	5,84	0,42	7,20	5,02	6,67	0,69	4.268	6,55	0,41	6,26	5,75	7,35	0,58	4.086	6,19	0,33	5,31	5,55	6,84	0,79	8.354
Maluku	6,31	0,37	5,91	5,58	7,04	0,53	7.299	6,74	0,39	5,84	5,97	7,51	0,54	7.182	6,52	0,33	5,12	5,87	7,18	0,81	14.481
Maluku Utara	5,31	0,30	5,65	4,72	5,90	0,33	6.272	5,26	0,31	5,85	4,66	5,87	0,34	6.004	5,29	0,25	4,73	4,80	5,78	0,45	12.276
Papua Barat	3,92	0,30	7,60	3,34	4,50	0,28	5.262	3,46	0,33	9,56	2,81	4,11	0,35	5.079	3,70	0,25	6,62	3,22	4,18	0,38	10.341
Papua	2,19	0,17	7,88	1,85	2,53	0,73	17.864	1,76	0,17	9,85	1,42	2,10	0,82	15.867	1,99	0,16	7,95	1,68	2,30	1,28	33.731
Indonesia	8,05	0,06	0,80	7,92	8,18	1,56	317.249	9,26	0,07	0,77	9,12	9,40	1,65	313.326	8,65	0,06	0,65	8,54	8,76	2,20	630.575

Tabel A.3: Sampling Error Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Perkotaan+Perdesaan Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	5,43	0,17	3,19	5,09	5,77	0,62	21.378	6,58	0,19	2,90	6,20	6,95	0,63	21.724	6,00	0,15	2,43	5,72	6,29	0,81	43.102
Sumatera Utara	5,67	0,15	2,69	5,37	5,97	1,31	36.634	7,00	0,19	2,76	6,62	7,38	1,72	36.960	6,34	0,15	2,31	6,05	6,62	2,16	73.594
Sumatera Barat	7,50	0,22	2,91	7,07	7,92	0,76	19.608	9,30	0,26	2,79	8,79	9,81	0,90	19.569	8,40	0,20	2,43	8,00	8,80	1,21	39.177
Riau	4,35	0,20	4,59	3,96	4,75	1,33	14.665	4,56	0,20	4,35	4,17	4,95	1,19	14.026	4,45	0,16	3,69	4,13	4,78	1,71	28.691
Jambi	5,87	0,22	3,76	5,44	6,31	0,66	11.484	6,13	0,24	4,00	5,65	6,61	0,74	11.031	6,00	0,20	3,28	5,61	6,38	1,00	22.515
Sumatera Selatan	6,22	0,20	3,15	5,83	6,60	1,16	18.260	6,98	0,24	3,42	6,51	7,44	1,49	17.688	6,59	0,18	2,76	6,23	6,95	1,86	35.948
Bengkulu	5,92	0,25	4,25	5,43	6,42	0,47	9.429	6,30	0,28	4,41	5,76	6,84	0,51	9.271	6,11	0,22	3,61	5,67	6,54	0,68	18.700
Lampung	7,34	0,21	2,85	6,93	7,75	1,15	17.255	7,62	0,23	2,98	7,18	8,07	1,24	16.615	7,48	0,18	2,44	7,12	7,84	1,69	33.870
Kep. Bangka Belitung	6,02	0,31	5,13	5,42	6,63	0,51	6.540	6,73	0,37	5,43	6,02	7,45	0,60	6.264	6,37	0,29	4,61	5,79	6,94	0,85	12.804
Kepulauan Riau	3,74	0,38	10,05	3,00	4,47	1,68	6.480	3,77	0,38	9,96	3,03	4,50	1,58	6.156	3,75	0,35	9,20	3,08	4,43	2,76	12.636
DKI Jakarta	5,65	0,29	5,19	5,08	6,23	3,57	9.043	6,13	0,29	4,78	5,56	6,71	3,25	9.128	5,89	0,25	4,28	5,40	6,38	5,03	18.171
Jawa Barat	7,18	0,14	1,99	6,90	7,46	3,12	39.595	7,99	0,16	1,99	7,68	8,31	3,41	39.527	7,58	0,13	1,67	7,33	7,83	4,58	79.122
Jawa Tengah	10,33	0,15	1,49	10,03	10,63	1,84	46.317	11,88	0,16	1,38	11,55	12,20	1,90	48.133	11,11	0,13	1,20	10,85	11,37	2,64	94.450
DI Yogyakarta	11,79	0,49	4,14	10,83	12,74	1,81	5.794	14,29	0,49	3,40	13,34	15,24	1,55	5.982	13,05	0,39	3,00	12,28	13,82	2,16	11.776
Jawa Timur	10,03	0,15	1,51	9,73	10,32	2,11	50.204	11,87	0,16	1,36	11,55	12,18	2,13	52.636	10,96	0,13	1,19	10,70	11,21	2,92	102.840
Banten	4,72	0,21	4,36	4,31	5,12	2,44	13.397	5,20	0,21	4,00	4,79	5,61	2,19	13.095	4,95	0,17	3,35	4,63	5,28	2,97	26.492
Bali	9,33	0,34	3,63	8,67	10,00	1,23	10.438	10,77	0,40	3,67	9,99	11,54	1,45	10.337	10,05	0,32	3,18	9,42	10,67	2,02	20.775
Nusa Tenggara Barat	7,19	0,29	4,04	6,62	7,76	1,27	10.706	7,58	0,28	3,67	7,04	8,13	1,18	11.369	7,39	0,24	3,23	6,92	7,86	1,73	22.075
Nusa Tenggara Timur	7,08	0,18	2,59	6,72	7,44	0,56	23.709	7,66	0,19	2,50	7,28	8,03	0,57	24.365	7,37	0,16	2,15	7,06	7,68	0,81	48.074
Kalimantan Barat	6,28	0,22	3,49	5,85	6,71	0,86	15.013	6,48	0,24	3,67	6,02	6,95	0,94	14.587	6,38	0,19	3,01	6,00	6,75	1,27	29.600
Kalimantan Tengah	4,83	0,22	4,61	4,40	5,27	0,60	12.945	5,00	0,24	4,76	4,54	5,47	0,61	12.069	4,91	0,19	3,92	4,54	5,29	0,84	25.014
Kalimantan Selatan	5,53	0,22	4,02	5,09	5,96	0,82	12.452	6,74	0,26	3,84	6,23	7,25	0,90	12.628	6,13	0,20	3,19	5,74	6,51	1,14	25.080
Kalimantan Timur	4,75	0,21	4,37	4,34	5,16	0,87	13.809	4,56	0,24	5,20	4,09	5,02	1,06	12.801	4,66	0,19	3,99	4,29	5,02	1,34	26.610
Sulawesi Utara	8,34	0,26	3,16	7,83	8,86	0,48	13.358	9,91	0,32	3,26	9,27	10,54	0,59	12.743	9,11	0,26	2,80	8,61	9,61	0,82	26.101
Sulawesi Tengah	6,70	0,25	3,73	6,21	7,19	0,63	12.188	7,07	0,26	3,70	6,55	7,58	0,63	11.545	6,88	0,21	2,98	6,47	7,28	0,81	23.733
Sulawesi Selatan	7,60	0,20	2,64	7,21	8,00	1,03	26.626	9,46	0,21	2,25	9,04	9,88	1,00	28.031	8,55	0,18	2,06	8,21	8,90	1,46	54.657
Sulawesi Tenggara	5,66	0,23	4,09	5,21	6,12	0,54	11.741	6,44	0,24	3,79	5,96	6,92	0,53	11.853	6,05	0,19	3,16	5,68	6,43	0,69	23.594
Gorontalo	6,03	0,32	5,37	5,40	6,66	0,45	5.960	7,14	0,36	4,98	6,44	7,83	0,46	5.856	6,58	0,28	4,24	6,04	7,13	0,62	11.816
Sulawesi Barat	5,85	0,37	6,25	5,13	6,57	0,67	5.547	6,66	0,37	5,54	5,94	7,39	0,60	5.442	6,25	0,29	4,58	5,69	6,82	0,77	10.989
Maluku	6,09	0,30	4,88	5,50	6,67	0,56	10.961	6,69	0,30	4,56	6,09	7,28	0,53	10.855	6,38	0,26	4,09	5,87	6,90	0,82	21.816
Maluku Utara	5,11	0,25	4,97	4,61	5,61	0,34	8.390	5,22	0,27	5,09	4,70	5,74	0,35	8.192	5,17	0,21	4,16	4,74	5,59	0,47	16.582
Papua Barat	3,80	0,23	6,04	3,35	4,25	0,25	8.106	3,42	0,26	7,50	2,92	3,92	0,31	7.821	3,62	0,19	5,37	3,24	4,00	0,36	15.927
Papua	2,63	0,17	6,36	2,30	2,95	0,78	22.100	2,22	0,16	7,38	1,90	2,54	0,79	19.849	2,43	0,14	5,90	2,15	2,72	1,17	41.949
Indonesia	7,48	0,05	0,65	7,38	7,57	1,87	550.132	8,59	0,05	0,62	8,49	8,69	1,95	548.148	8,03	0,04	0,53	7,95	8,11	2,66	1.098.280

Tabel B: *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	19,18	0,91	4,74	17,40	20,96	0,86	3.226	21,59	0,57	2,65	20,46	22,71	0,66	7.770	20,90	0,48	2,32	19,95	21,85	0,74	10.996
Sumatera Utara	21,15	0,71	3,37	19,75	22,54	2,27	8.000	21,53	0,54	2,51	20,47	22,59	1,16	9.978	21,35	0,44	2,08	20,48	22,21	1,66	17.978
Sumatera Barat	25,19	0,99	3,92	23,26	27,12	1,16	3.913	29,73	0,75	2,54	28,25	31,21	0,81	5.746	27,96	0,61	2,17	26,78	29,15	0,97	9.659
Riau	14,26	0,84	5,92	12,61	15,92	1,64	2.630	15,29	0,65	4,28	14,01	16,57	1,20	4.468	14,89	0,52	3,48	13,87	15,90	1,39	7.098
Jambi	19,27	1,21	6,26	16,90	21,63	1,10	1.594	18,98	0,66	3,45	17,70	20,27	0,66	4.327	19,07	0,58	3,06	17,92	20,21	0,81	5.921
Sumatera Selatan	21,85	1,12	5,13	19,66	24,05	2,34	2.913	21,00	0,58	2,75	19,87	22,13	1,02	6.257	21,29	0,54	2,53	20,23	22,35	1,48	9.170
Bengkulu	16,46	1,22	7,39	14,08	18,85	0,76	1.467	19,50	0,75	3,86	18,02	20,97	0,47	3.440	18,56	0,65	3,48	17,29	19,82	0,57	4.907
Lampung	22,34	1,12	5,00	20,16	24,53	1,73	2.268	22,85	0,56	2,46	21,75	23,96	1,11	6.769	22,73	0,51	2,22	21,74	23,72	1,31	9.037
Kep. Bangka Belitung	19,53	1,04	5,33	17,49	21,57	0,57	1.728	18,33	1,18	6,43	16,02	20,64	0,67	1.765	18,91	0,79	4,17	17,37	20,46	0,63	3.493
Kepulauan Riau	8,96	1,02	11,33	6,97	10,96	2,65	2.481	18,46	1,85	10,04	14,83	22,10	0,71	894	10,40	0,94	8,99	8,57	12,24	2,12	3.375
DKI Jakarta	17,93	0,73	4,07	16,50	19,36	4,52	4.786								17,93	0,73	4,07	16,50	19,36	4,13	4.786
Jawa Barat	21,12	0,44	2,07	20,26	21,98	4,39	14.367	25,07	0,56	2,25	23,96	26,17	2,96	8.043	22,52	0,35	1,54	21,84	23,20	3,72	22.410
Jawa Tengah	30,91	0,49	1,60	29,94	31,88	2,24	14.010	32,72	0,47	1,43	31,80	33,64	1,96	12.600	31,90	0,34	1,07	31,23	32,57	2,11	26.610
DI Yogyakarta	26,89	1,22	4,52	24,51	29,27	2,71	2.475	43,70	1,87	4,29	40,03	47,37	2,00	1.150	32,23	1,01	3,14	30,25	34,22	2,27	3.625
Jawa Timur	29,50	0,51	1,74	28,50	30,51	3,03	15.403	33,54	0,45	1,35	32,65	34,43	2,07	13.900	31,64	0,34	1,08	30,97	32,31	2,52	29.303
Banten	15,48	0,70	4,52	14,11	16,85	3,42	4.280	21,47	1,02	4,77	19,46	23,47	2,15	2.178	17,35	0,58	3,33	16,22	18,48	2,83	6.458
Bali	21,93	1,04	4,72	19,90	23,96	2,07	3.415	33,90	1,34	3,95	31,28	36,53	1,34	2.213	26,45	0,84	3,19	24,79	28,10	1,78	5.628
Nusa Tenggara Barat	20,95	0,99	4,73	19,01	22,90	1,58	2.649	21,41	0,83	3,87	19,78	23,03	1,25	3.463	21,22	0,64	3,00	19,97	22,46	1,40	6.112
Nusa Tenggara Timur	23,01	1,46	6,34	20,15	25,87	1,22	1.799	27,82	0,56	2,03	26,72	28,93	0,55	8.711	26,88	0,54	2,00	25,83	27,93	0,69	10.510
Kalimantan Barat	23,60	1,25	5,28	21,15	26,04	1,34	2.074	20,41	0,70	3,41	19,05	21,78	0,95	5.248	21,33	0,61	2,87	20,13	22,53	1,09	7.322
Kalimantan Tengah	14,71	0,93	6,33	12,89	16,54	0,72	2.255	15,43	0,72	4,67	14,01	16,84	0,68	4.496	15,19	0,57	3,76	14,07	16,31	0,72	6.751
Kalimantan Selatan	17,33	0,87	4,99	15,63	19,03	1,15	2.886	19,58	0,72	3,68	18,17	20,99	0,82	4.310	18,63	0,56	2,98	17,54	19,72	0,97	7.196
Kalimantan Timur	14,61	0,74	5,06	13,16	16,06	1,29	3.957	15,71	0,91	5,78	13,93	17,49	0,95	2.828	15,04	0,57	3,82	13,91	16,16	1,13	6.785
Sulawesi Utara	25,07	1,19	4,75	22,73	27,40	1,01	2.719	28,37	0,92	3,26	26,56	30,18	0,55	4.160	26,85	0,75	2,78	25,39	28,31	0,76	6.879
Sulawesi Tengah	20,52	1,45	7,09	17,67	23,37	1,01	1.314	22,91	0,70	3,07	21,54	24,29	0,59	4.520	22,35	0,64	2,85	21,10	23,59	0,70	5.834
Sulawesi Selatan	24,98	1,06	4,23	22,91	27,06	2,07	4.471	30,54	0,59	1,93	29,39	31,69	0,82	8.918	28,51	0,55	1,94	27,42	29,59	1,30	13.389
Sulawesi Tenggara	18,09	1,22	6,72	15,70	20,47	0,76	1.495	21,85	0,71	3,26	20,45	23,24	0,49	4.193	20,80	0,62	2,98	19,58	22,01	0,58	5.688
Gorontalo	21,47	1,43	6,66	18,67	24,27	0,54	1.000	21,18	1,00	4,73	19,22	23,14	0,43	1.919	21,28	0,82	3,85	19,67	22,89	0,48	2.919
Sulawesi Barat	23,31	2,03	8,71	19,33	27,29	0,69	580	21,22	1,09	5,13	19,08	23,35	0,63	1.963	21,67	0,96	4,43	19,79	23,56	0,68	2.543
Maluku	21,75	1,39	6,37	19,03	24,47	0,74	1.610	24,08	1,13	4,71	21,86	26,30	0,59	3.080	23,16	0,88	3,80	21,43	24,88	0,66	4.690
Maluku Utara	18,04	1,44	7,97	15,22	20,85	0,46	974	20,21	0,93	4,61	18,39	22,04	0,37	2.684	19,59	0,78	3,99	18,06	21,12	0,41	3.658
Papua Barat	12,05	1,13	9,34	9,84	14,25	0,32	1.290	12,89	0,92	7,11	11,10	14,69	0,37	2.426	12,63	0,72	5,72	11,22	14,05	0,37	3.716
Papua	12,78	1,12	8,78	10,58	14,98	1,07	2.027	5,74	0,40	6,93	4,96	6,52	0,72	8.927	7,45	0,41	5,50	6,65	8,26	0,87	10.954
Indonesia	22,80	0,18	0,80	22,44	23,16	2,70	122.056	26,18	0,15	0,59	25,88	26,49	1,76	163.344	24,50	0,12	0,49	24,26	24,73	2,22	285.400

Tabel C.1: Sampling Error Angka Buta Huruf (ABH) Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	14,02	1,57	11,18	10,95	17,09	0,77	824	18,50	1,01	5,46	16,52	20,48	0,56	2,330	17,33	0,85	4,92	15,66	19,01	0,71	3,154
Sumatera Utara	2,68	0,57	21,32	1,56	3,81	2,60	2,599	7,83	0,71	9,07	6,44	9,22	1,21	3,134	5,36	0,46	8,50	4,46	6,25	1,70	5,733
Sumatera Barat	1,50	0,41	27,54	0,69	2,30	0,88	1,519	7,02	0,72	10,21	5,61	8,43	0,84	2,353	5,06	0,49	9,64	4,10	6,02	1,02	3,872
Riau	3,88	1,25	32,22	1,43	6,33	2,15	550	5,31	0,82	15,41	3,70	6,91	0,87	1,013	4,77	0,69	14,54	3,41	6,13	1,39	1,563
Jambi	4,60	1,09	23,78	2,46	6,75	0,82	487	12,40	1,20	9,66	10,06	14,75	0,71	1,256	10,04	0,90	8,96	8,28	11,81	0,86	1,743
Sumatera Selatan	6,93	1,31	18,83	4,38	9,49	2,40	957	8,94	0,87	9,70	7,24	10,64	1,20	1,942	8,24	0,73	8,81	6,82	9,66	1,74	2,899
Bengkulu	2,54	0,90	35,59	0,77	4,31	0,49	379	16,90	1,59	9,40	13,78	20,01	0,57	989	13,11	1,21	9,22	10,74	15,47	0,69	1,368
Lampung	12,38	1,40	11,31	9,64	15,13	1,27	763	23,68	1,07	4,50	21,59	25,77	1,10	2,218	21,02	0,90	4,28	19,26	22,78	1,39	2,981
Kep. Bangka Belitung	6,15	1,48	24,05	3,25	9,05	0,83	599	8,62	1,83	21,19	5,04	12,20	0,67	398	7,35	1,17	15,94	5,05	9,65	0,82	997
Kepulauan Riau	6,22	1,39	22,37	3,50	8,95	0,86	572	14,20	2,99	21,08	8,33	20,06	0,56	273	8,45	1,36	16,06	5,79	11,10	0,81	845
DKI Jakarta	1,89	0,42	22,33	1,06	2,72	2,83	1,372								1,89	0,42	22,33	1,06	2,72	2,71	1,372
Jawa Barat	6,39	0,62	9,74	5,17	7,60	6,76	4,604	8,91	0,83	9,34	7,28	10,54	4,50	3,104	7,39	0,50	6,76	6,41	8,37	6,05	7,708
Jawa Tengah	24,49	0,77	3,14	22,99	26,00	2,57	5,562	31,77	0,85	2,66	30,11	33,43	2,65	6,037	28,60	0,59	2,05	27,46	29,75	2,98	11,599
DI Yogyakarta	23,45	1,65	7,02	20,23	26,68	2,06	1,068	32,12	3,04	9,47	26,16	38,08	3,30	746	27,14	1,62	5,97	23,97	30,32	3,02	1,814
Jawa Timur	27,96	0,86	3,07	26,28	29,64	3,36	6,389	36,81	0,94	2,54	34,98	38,64	3,41	6,923	32,92	0,64	1,95	31,66	34,18	3,77	13,312
Banten	21,83	1,97	9,03	17,97	25,69	4,03	988	12,37	1,71	13,81	9,02	15,72	2,28	735	18,21	1,40	7,67	15,47	20,95	3,61	1,723
Bali	21,90	1,57	7,19	18,81	24,98	1,55	1,332	39,78	2,28	5,74	35,30	44,26	1,65	1,188	30,44	1,39	4,56	27,72	33,17	1,80	2,520
Nusa Tenggara Barat	43,61	2,75	6,31	38,22	49,00	2,20	868	55,10	2,22	4,03	50,74	59,46	1,59	1,125	50,41	1,74	3,46	46,99	53,82	2,04	1,993
Nusa Tenggara Timur	29,48	2,55	8,65	24,48	34,48	0,97	557	34,83	1,16	3,32	32,56	37,09	0,69	3,702	33,92	1,05	3,10	31,86	35,99	0,87	4,259
Kalimantan Barat	30,41	2,55	8,40	25,40	35,41	1,48	717	39,94	1,80	4,51	36,41	43,47	1,06	1,488	36,88	1,48	4,02	33,98	39,79	1,35	2,205
Kalimantan Tengah	7,55	1,80	23,91	4,01	11,09	0,90	478	5,30	0,92	17,31	3,50	7,10	0,52	1,079	6,03	0,86	14,24	4,35	7,72	0,74	1,557
Kalimantan Selatan	6,27	1,28	20,34	3,77	8,77	1,32	656	9,86	1,23	12,51	7,44	12,28	0,95	1,110	8,43	0,90	10,67	6,67	10,19	1,20	1,766
Kalimantan Timur	3,86	0,83	21,41	2,24	5,48	1,00	826	15,36	1,97	12,81	11,51	19,22	0,85	736	8,53	0,95	11,14	6,67	10,39	1,02	1,562
Sulawesi Utara	1,21	0,39	31,93	0,45	1,97	0,58	1,112	1,12	0,32	28,35	0,50	1,75	0,44	1,758	1,16	0,25	21,19	0,68	1,65	0,55	2,870
Sulawesi Tengah	6,69	1,78	26,54	3,21	10,17	1,07	336	10,80	1,01	9,33	8,82	12,77	0,61	1,412	9,90	0,88	8,88	8,18	11,62	0,80	1,748
Sulawesi Selatan	28,80	1,57	5,46	25,72	31,88	1,37	1,528	36,60	1,23	3,36	34,18	39,01	1,23	4,065	34,12	0,98	2,88	32,19	36,05	1,48	5,593
Sulawesi Tenggara	11,40	2,12	18,62	7,24	15,56	0,76	402	32,39	1,70	5,25	29,06	35,73	0,57	1,279	27,52	1,43	5,19	24,72	30,32	0,72	1,681
Gorontalo	2,36	1,07	45,36	0,26	4,46	0,62	271	4,88	1,06	21,63	2,81	6,95	0,44	555	4,02	0,79	19,65	2,47	5,56	0,57	826
Sulawesi Barat	24,40	4,06	16,66	16,43	32,37	0,82	170	30,49	2,77	9,08	25,06	35,91	0,83	602	29,05	2,33	8,01	24,49	33,61	0,98	772
Maluku	2,96	1,10	37,02	0,81	5,12	0,82	402	3,33	0,74	22,29	1,87	4,78	0,43	1,115	3,19	0,62	19,42	1,98	4,41	0,63	1,517
Maluku Utara	5,00	2,03	40,57	1,02	8,98	0,66	236	11,19	1,65	14,79	7,94	14,43	0,46	763	9,59	1,35	14,13	6,93	12,24	0,60	999
Papua Barat	1,19	0,66	55,16	-0,10	2,49	0,15	274	12,48	2,27	18,18	8,03	16,92	0,34	446	9,05	1,63	17,99	5,86	12,24	0,42	720
Papua	9,48	2,28	24,02	5,02	13,95	0,89	278	30,67	3,40	11,09	24,01	37,34	0,95	758	22,34	2,28	10,20	17,88	26,81	1,07	1,036
Indonesia	16,30	0,31	1,88	15,70	16,90	3,06	39.675	25,11	0,33	1,30	24,47	25,75	2,91	56.632	21,03	0,23	1,07	20,59	21,48	2,96	96.307

Tabel C.2: Sampling Error Angka Buta Huruf (ABH) Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	14,02	1,15	8,21	11,76	16,28	0,64	1.452	20,06	1,23	6,15	17,64	22,47	0,67	1.702	17,33	0,85	4,92	15,66	19,01	0,71	3.154
Sumatera Utara	2,55	0,35	13,87	1,86	3,25	0,86	2.603	7,62	0,72	9,50	6,20	9,04	1,57	3.130	5,36	0,46	8,50	4,46	6,25	1,70	5.733
Sumatera Barat	3,98	0,58	14,47	2,85	5,10	0,73	1.754	5,92	0,69	11,65	4,57	7,28	0,90	2.118	5,06	0,49	9,64	4,10	6,02	1,02	3.872
Riau	1,94	0,55	28,17	0,87	3,02	0,96	780	7,62	1,14	14,98	5,38	9,86	1,11	783	4,77	0,69	14,54	3,41	6,13	1,39	1.563
Jambi	7,75	0,98	12,62	5,83	9,67	0,59	883	12,33	1,39	11,27	9,61	15,06	0,78	860	10,04	0,90	8,96	8,28	11,81	0,86	1.743
Sumatera Selatan	4,16	0,69	16,50	2,82	5,51	1,31	1.417	11,99	1,14	9,53	9,75	14,23	1,47	1.482	8,24	0,73	8,81	6,82	9,66	1,74	2.899
Bengkulu	4,84	0,97	20,09	2,94	6,75	0,50	677	21,20	1,99	9,37	17,30	25,09	0,59	691	13,11	1,21	9,22	10,74	15,47	0,69	1.368
Lampung	18,64	1,17	6,27	16,35	20,93	1,20	1.543	23,44	1,42	6,05	20,66	26,22	1,46	1.438	21,02	0,90	4,28	19,26	22,78	1,39	2.981
Kep. Bangka Belitung	4,40	1,04	23,70	2,36	6,45	0,48	502	10,19	1,80	17,69	6,66	13,72	0,68	495	7,35	1,17	15,94	5,05	9,65	0,82	997
Kepulauan Riau	6,43	1,52	23,60	3,46	9,41	0,62	446	10,54	2,04	19,38	6,53	14,54	0,68	399	8,45	1,36	16,06	5,79	11,10	0,81	845
DKI Jakarta	0,68	0,40	58,89	-0,11	1,47	3,01	675	3,02	0,69	22,93	1,66	4,38	2,19	697	1,89	0,42	22,33	1,06	2,72	2,71	1.372
Jawa Barat	4,51	0,45	10,05	3,62	5,40	3,52	3.848	10,05	0,75	7,50	8,57	11,52	4,96	3.860	7,39	0,50	6,76	6,41	8,37	6,05	7.708
Jawa Tengah	20,72	0,64	3,10	19,46	21,98	1,90	5.420	35,35	0,83	2,36	33,72	36,98	2,66	6.179	28,60	0,59	2,05	27,46	29,75	2,98	11.599
DI Yogyakarta	18,24	1,51	8,28	15,28	21,20	1,44	831	34,34	2,43	7,07	29,58	39,09	3,02	983	27,14	1,62	5,97	23,97	30,32	3,02	1.814
Jawa Timur	28,71	0,74	2,56	27,26	30,15	2,22	6.020	36,39	0,87	2,38	34,70	38,09	3,28	7.292	32,92	0,64	1,95	31,66	34,18	3,77	13.312
Banten	12,55	1,44	11,46	9,73	15,37	2,33	859	23,55	2,00	8,48	19,64	27,47	2,88	864	18,21	1,40	7,67	15,47	20,95	3,61	1.723
Bali	19,07	1,56	8,17	16,01	22,12	1,34	1.212	40,42	2,10	5,21	36,30	44,55	1,77	1.308	30,44	1,39	4,56	27,72	33,17	1,80	2.520
Nusa Tenggara Barat	45,19	2,13	4,71	41,02	49,36	1,34	902	55,07	2,33	4,23	50,50	59,64	1,79	1.091	50,41	1,74	3,46	46,99	53,82	2,04	1.993
Nusa Tenggara Timur	28,53	1,26	4,43	26,05	31,00	0,61	2.030	38,83	1,44	3,70	36,01	41,64	0,74	2.229	33,92	1,05	3,10	31,86	35,99	0,87	4.259
Kalimantan Barat	28,93	1,73	6,00	25,53	32,33	0,97	1.140	44,89	2,03	4,52	40,91	48,87	1,09	1.065	36,88	1,48	4,02	33,98	39,79	1,35	2.205
Kalimantan Tengah	1,78	0,54	30,56	0,71	2,84	0,46	825	10,51	1,57	14,96	7,43	13,59	0,67	732	6,03	0,86	14,24	4,35	7,72	0,74	1.557
Kalimantan Selatan	2,38	0,59	25,01	1,21	3,54	0,74	779	13,52	1,47	10,86	10,64	16,40	1,05	987	8,43	0,90	10,67	6,67	10,19	1,20	1.766
Kalimantan Timur	5,26	0,93	17,71	3,44	7,09	0,76	875	12,30	1,63	13,25	9,10	15,49	0,92	687	8,53	0,95	11,14	6,67	10,39	1,02	1.562
Sulawesi Utara	0,43	0,15	36,18	0,12	0,73	0,25	1.354	1,81	0,44	24,05	0,96	2,66	0,54	1.516	1,16	0,25	21,19	0,68	1,65	0,55	2.870
Sulawesi Tengah	4,34	0,88	20,24	2,62	6,07	0,80	877	15,40	1,49	9,65	12,49	18,32	0,73	871	9,90	0,88	8,88	8,18	11,62	0,80	1.748
Sulawesi Selatan	27,52	1,16	4,23	25,24	29,81	0,94	2.488	39,18	1,35	3,46	36,52	41,83	1,37	3.105	34,12	0,98	2,88	32,19	36,05	1,48	5.593
Sulawesi Tenggara	12,75	1,51	11,87	9,78	15,71	0,63	779	40,62	2,18	5,37	36,35	44,89	0,68	902	27,52	1,43	5,19	24,72	30,32	0,72	1.681
Gorontalo	5,70	1,32	23,10	3,12	8,28	0,48	382	2,59	0,92	35,46	0,79	4,39	0,58	444	4,02	0,79	19,65	2,47	5,56	0,57	826
Sulawesi Barat	29,78	2,94	9,89	24,00	35,55	0,67	342	28,42	3,08	10,83	22,38	34,45	0,85	430	29,05	2,33	8,01	24,49	33,61	0,98	772
Maluku	1,43	0,60	42,14	0,25	2,61	0,58	730	4,82	1,00	20,63	2,87	6,77	0,52	787	3,19	0,62	19,42	1,98	4,41	0,63	1.517
Maluku Utara	4,41	1,38	31,38	1,70	7,12	0,60	517	14,87	2,17	14,60	10,62	19,13	0,48	482	9,59	1,35	14,13	6,93	12,24	0,60	999
Papua Barat	4,24	1,21	28,61	1,86	6,61	0,24	419	15,02	3,12	20,80	8,89	21,14	0,41	301	9,05	1,63	17,99	5,86	12,24	0,42	720
Papua	21,31	2,47	11,59	16,46	26,15	0,69	630	23,72	3,05	12,88	17,73	29,71	0,73	406	22,34	2,28	10,20	17,88	26,81	1,07	1.036
Indonesia	16,00	0,24	1,51	15,53	16,47	1,95	45.991	25,46	0,32	1,26	24,83	26,09	2,79	50.316	21,03	0,23	1,07	20,59	21,48	2,96	96.307

Tabel D.1: Sampling Error Rata-rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	6,78	0,23	3,45	6,32	7,24	1,06	824	4,21	0,10	2,40	4,01	4,41	0,69	2,330	4,88	0,10	2,03	4,68	5,07	0,89	3,154
Sumatera Utara	7,12	0,17	2,35	6,79	7,44	3,28	2.599	4,79	0,11	2,24	4,58	5,00	1,50	3.134	5,91	0,10	1,76	5,70	6,11	2,68	5.733
Sumatera Barat	7,14	0,25	3,46	6,66	7,63	2,15	1.519	4,22	0,12	2,74	3,99	4,44	1,15	2.353	5,25	0,12	2,32	5,02	5,49	1,74	3.872
Riau	6,55	0,25	3,85	6,06	7,04	1,83	550	3,38	0,14	4,17	3,10	3,66	1,26	1.013	4,57	0,14	3,10	4,29	4,85	1,69	1.563
Jambi	6,70	0,32	4,77	6,07	7,33	1,47	487	3,54	0,13	3,69	3,29	3,80	0,75	1.256	4,50	0,14	3,17	4,22	4,78	1,15	1.743
Sumatera Selatan	6,36	0,28	4,38	5,81	6,90	3,30	957	3,69	0,10	2,82	3,49	3,90	1,44	1.942	4,62	0,13	2,80	4,37	4,88	2,69	2.899
Bengkulu	6,56	0,35	5,37	5,87	7,25	0,88	379	3,26	0,14	4,32	2,98	3,53	0,56	989	4,13	0,15	3,56	3,84	4,42	0,74	1.368
Lampung	5,62	0,28	4,95	5,08	6,17	2,61	763	3,30	0,08	2,55	3,14	3,47	1,31	2.218	3,85	0,10	2,52	3,66	4,04	2,05	2.981
Kep. Bangka Belitung	5,05	0,23	4,59	4,59	5,50	0,76	599	2,92	0,20	6,74	2,54	3,31	0,77	398	4,01	0,15	3,85	3,71	4,32	0,75	997
Kepulauan Riau	5,37	0,43	8,08	4,52	6,22	2,68	572	3,34	0,45	13,50	2,46	4,23	1,46	273	4,81	0,32	6,68	4,18	5,44	2,09	845
DKI Jakarta	8,48	0,27	3,14	7,96	9,01	8,41	1.372								8,48	0,27	3,14	7,96	9,01	8,07	1.372
Jawa Barat	5,37	0,12	2,18	5,14	5,60	7,22	4.604	3,50	0,09	2,52	3,33	3,68	4,28	3.104	4,63	0,08	1,69	4,48	4,78	6,11	7.708
Jawa Tengah	4,58	0,10	2,18	4,39	4,78	3,95	5.562	2,80	0,06	2,17	2,68	2,91	2,91	6.037	3,57	0,06	1,57	3,46	3,68	3,63	11.599
DI Yogyakarta	6,18	0,24	3,93	5,71	6,66	3,08	1.068	3,27	0,22	6,86	2,83	3,71	2,96	746	4,94	0,18	3,69	4,59	5,30	3,33	1.814
Jawa Timur	4,91	0,11	2,25	4,69	5,13	5,53	6.389	2,47	0,06	2,26	2,36	2,58	3,04	6.923	3,54	0,06	1,70	3,42	3,66	4,67	13.312
Banten	5,23	0,30	5,74	4,64	5,82	6,02	988	2,39	0,16	6,89	2,07	2,71	2,78	735	4,14	0,20	4,73	3,76	4,53	4,94	1.723
Bali	4,30	0,20	4,62	3,91	4,69	2,09	1.332	2,52	0,15	6,12	2,21	2,82	1,65	1.188	3,45	0,13	3,76	3,20	3,70	2,00	2.520
Nusa Tenggara Barat	3,51	0,26	7,28	3,01	4,01	2,23	868	2,01	0,13	6,67	1,75	2,28	1,57	1.125	2,63	0,13	5,02	2,37	2,88	2,02	1.993
Nusa Tenggara Timur	6,76	0,28	4,08	6,22	7,30	1,06	557	2,92	0,07	2,57	2,77	3,06	0,66	3.702	3,57	0,09	2,40	3,40	3,73	0,91	4.259
Kalimantan Barat	5,12	0,30	5,78	4,54	5,70	1,84	717	2,26	0,11	5,02	2,04	2,49	1,16	1.488	3,18	0,13	4,14	2,92	3,44	1,65	2.205
Kalimantan Tengah	6,23	0,34	5,49	5,56	6,90	1,14	478	4,27	0,16	3,69	3,96	4,58	0,69	1.079	4,90	0,16	3,18	4,60	5,21	0,94	1.557
Kalimantan Selatan	6,02	0,27	4,55	5,48	6,56	1,65	656	3,13	0,14	4,41	2,86	3,40	0,96	1.110	4,28	0,14	3,36	4,00	4,56	1,37	1.766
Kalimantan Timur	6,63	0,24	3,55	6,17	7,10	1,57	826	3,49	0,19	5,31	3,13	3,86	0,94	736	5,36	0,18	3,34	5,01	5,71	1,56	1.562
Sulawesi Utara	8,03	0,21	2,58	7,62	8,43	1,13	1.112	5,64	0,13	2,31	5,38	5,89	0,65	1.758	6,66	0,13	1,88	6,41	6,90	1,02	2.870
Sulawesi Tengah	7,14	0,43	6,03	6,30	7,98	1,78	336	4,37	0,13	2,97	4,12	4,63	0,84	1.412	4,98	0,14	2,83	4,70	5,26	1,21	1.748
Sulawesi Selatan	6,59	0,24	3,66	6,11	7,06	2,57	1.528	2,72	0,09	3,38	2,54	2,90	1,24	4.065	3,95	0,12	2,95	3,72	4,17	2,30	5.593
Sulawesi Tenggara	6,18	0,33	5,38	5,53	6,83	0,83	402	3,17	0,14	4,54	2,89	3,46	0,68	1.279	3,87	0,14	3,68	3,59	4,15	0,84	1.681
Gorontalo	6,73	0,37	5,56	6,00	7,47	0,98	271	4,20	0,16	3,86	3,88	4,52	0,53	555	5,07	0,18	3,52	4,72	5,42	0,82	826
Sulawesi Barat	5,85	0,61	10,41	4,66	7,05	1,30	170	2,97	0,20	6,72	2,58	3,36	0,74	602	3,65	0,22	5,93	3,23	4,08	1,02	772
Maluku	7,83	0,33	4,23	7,18	8,48	1,24	402	5,02	0,18	3,60	4,67	5,38	0,65	1.115	6,08	0,18	3,03	5,71	6,44	1,05	1.517
Maluku Utara	7,18	0,47	6,57	6,25	8,10	0,81	236	4,10	0,18	4,42	3,75	4,46	0,47	763	4,90	0,20	4,11	4,50	5,29	0,72	999
Papua Barat	8,40	0,33	3,88	7,76	9,04	0,25	274	4,73	0,31	6,65	4,11	5,34	0,42	446	5,84	0,26	4,53	5,32	6,36	0,45	720
Papua	7,71	0,34	4,40	7,05	8,38	0,80	278	4,03	0,33	8,09	3,39	4,67	1,07	758	5,48	0,25	4,53	4,99	5,96	1,00	1.036
Indonesia	5,60	0,05	0,88	5,50	5,69	4,92	39.675	3,12	0,02	0,78	3,07	3,17	2,78	56.632	4,27	0,03	0,64	4,21	4,32	4,06	96.307

Tabel D.2: *Sampling Error* Rata-rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	6,07	0,13	2,16	5,82	6,33	0,65	1.452	3,89	0,12	3,09	3,66	4,13	0,76	1.702	4,88	0,10	2,03	4,68	5,07	0,89	3.154
Sumatera Utara	7,03	0,12	1,74	6,79	7,27	1,65	2.603	5,00	0,12	2,36	4,77	5,24	1,87	3.130	5,91	0,10	1,76	5,70	6,11	2,68	5.733
Sumatera Barat	5,97	0,15	2,49	5,68	6,26	1,03	1.754	4,68	0,13	2,86	4,42	4,95	1,14	2.118	5,25	0,12	2,32	5,02	5,49	1,74	3.872
Riau	5,63	0,18	3,21	5,28	5,99	1,25	780	3,50	0,17	4,94	3,16	3,84	1,40	783	4,57	0,14	3,10	4,29	4,85	1,69	1.563
Jambi	5,82	0,18	3,04	5,48	6,17	0,79	883	3,18	0,16	4,91	2,87	3,48	0,83	860	4,50	0,14	3,17	4,22	4,78	1,15	1.743
Sumatera Selatan	5,76	0,15	2,69	5,45	6,06	1,61	1.417	3,58	0,15	4,08	3,29	3,87	2,08	1.482	4,62	0,13	2,80	4,37	4,88	2,69	2.899
Bengkulu	5,29	0,20	3,69	4,91	5,67	0,55	677	2,99	0,15	5,16	2,69	3,30	0,50	691	4,13	0,15	3,56	3,84	4,42	0,74	1.368
Lampung	4,89	0,12	2,49	4,65	5,13	1,43	1.543	2,79	0,10	3,71	2,59	2,99	1,38	1.438	3,85	0,10	2,52	3,66	4,04	2,05	2.981
Kep. Bangka Belitung	5,08	0,20	4,00	4,68	5,48	0,56	502	2,99	0,17	5,66	2,66	3,32	0,53	495	4,01	0,15	3,85	3,71	4,32	0,75	997
Kepulauan Riau	5,68	0,40	7,02	4,90	6,46	1,44	446	3,90	0,34	8,68	3,24	4,56	1,23	399	4,81	0,32	6,68	4,18	5,44	2,09	845
DKI Jakarta	9,53	0,28	2,98	8,97	10,08	4,66	675	7,51	0,30	4,02	6,92	8,10	4,74	697	8,48	0,27	3,14	7,96	9,01	8,07	1.372
Jawa Barat	5,62	0,09	1,68	5,44	5,81	3,74	3.848	3,71	0,09	2,33	3,54	3,88	4,28	3.860	4,63	0,08	1,69	4,48	4,78	6,11	7.708
Jawa Tengah	4,73	0,07	1,50	4,59	4,87	2,30	5.420	2,58	0,06	2,25	2,47	2,69	2,43	6.179	3,57	0,06	1,57	3,46	3,68	3,63	11.599
DI Yogyakarta	6,48	0,23	3,55	6,03	6,93	2,20	831	3,70	0,20	5,28	3,32	4,08	2,28	983	4,94	0,18	3,69	4,59	5,30	3,33	1.814
Jawa Timur	4,77	0,07	1,55	4,62	4,91	2,70	6.020	2,53	0,06	2,46	2,41	2,66	3,22	7.292	3,54	0,06	1,70	3,42	3,66	4,67	13.312
Banten	5,26	0,24	4,64	4,78	5,74	3,13	859	3,09	0,20	6,52	2,70	3,49	3,08	864	4,14	0,20	4,73	3,76	4,53	4,94	1.723
Bali	4,91	0,16	3,31	4,59	5,23	1,25	1.212	2,17	0,13	6,04	1,91	2,42	1,41	1.308	3,45	0,13	3,76	3,20	3,70	2,00	2.520
Nusa Tenggara Barat	3,66	0,20	5,55	3,26	4,06	1,61	902	1,70	0,11	6,66	1,48	1,92	1,19	1.091	2,63	0,13	5,02	2,37	2,88	2,02	1.993
Nusa Tenggara Timur	4,46	0,12	2,66	4,23	4,69	0,66	2.030	2,76	0,09	3,32	2,58	2,94	0,66	2.229	3,57	0,09	2,40	3,40	3,73	0,91	4.259
Kalimantan Barat	4,09	0,16	4,01	3,77	4,41	1,10	1.140	2,26	0,14	6,35	1,98	2,54	1,12	1.065	3,18	0,13	4,14	2,92	3,44	1,65	2.205
Kalimantan Tengah	6,18	0,18	2,92	5,82	6,53	0,60	825	3,57	0,17	4,71	3,24	3,90	0,63	732	4,90	0,16	3,18	4,60	5,21	0,94	1.557
Kalimantan Selatan	5,58	0,19	3,44	5,21	5,96	0,96	779	3,18	0,16	4,92	2,88	3,49	1,04	987	4,28	0,14	3,36	4,00	4,56	1,37	1.766
Kalimantan Timur	6,55	0,22	3,31	6,12	6,97	1,11	875	3,99	0,22	5,49	3,56	4,42	1,27	687	5,36	0,18	3,34	5,01	5,71	1,56	1.562
Sulawesi Utara	7,17	0,15	2,06	6,88	7,46	0,61	1.354	6,20	0,15	2,43	5,91	6,50	0,74	1.516	6,66	0,13	1,88	6,41	6,90	1,02	2.870
Sulawesi Tengah	5,75	0,17	2,93	5,42	6,08	0,75	877	4,22	0,19	4,41	3,85	4,58	1,12	871	4,98	0,14	2,83	4,70	5,26	1,21	1.748
Sulawesi Selatan	5,13	0,16	3,16	4,81	5,45	1,49	2.488	3,04	0,11	3,66	2,82	3,25	1,47	3.105	3,95	0,12	2,95	3,72	4,17	2,30	5.593
Sulawesi Tenggara	5,29	0,20	3,82	4,90	5,69	0,66	779	2,61	0,14	5,26	2,34	2,88	0,53	902	3,87	0,14	3,68	3,59	4,15	0,84	1.681
Gorontalo	5,31	0,24	4,47	4,84	5,77	0,59	382	4,86	0,22	4,44	4,44	5,29	0,62	444	5,07	0,18	3,52	4,72	5,42	0,82	826
Sulawesi Barat	4,91	0,30	6,19	4,31	5,50	0,78	342	2,54	0,22	8,50	2,12	2,96	0,67	430	3,65	0,22	5,93	3,23	4,08	1,02	772
Maluku	6,68	0,23	3,38	6,24	7,12	0,74	730	5,51	0,22	3,98	5,08	5,94	0,70	787	6,08	0,18	3,03	5,71	6,44	1,05	1.517
Maluku Utara	6,05	0,25	4,18	5,56	6,55	0,51	517	3,72	0,22	5,80	3,29	4,14	0,48	482	4,90	0,20	4,11	4,50	5,29	0,72	999
Papua Barat	6,59	0,33	5,07	5,93	7,24	0,34	419	4,92	0,35	7,09	4,24	5,61	0,39	301	5,84	0,26	4,53	5,32	6,36	0,45	720
Papua	6,30	0,31	4,94	5,69	6,91	0,74	630	4,38	0,28	6,42	3,83	4,94	0,69	406	5,48	0,25	4,53	4,99	5,96	1,00	1.036
Indonesia	5,39	0,03	0,61	5,33	5,45	2,61	45.991	3,28	0,03	0,89	3,22	3,34	2,96	50.316	4,27	0,03	0,64	4,21	4,32	4,06	96.307

Tabel E.1: Sampling Error Persentase Lansia Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	59,95	2,59	4,32	54,88	65,02	1,06	824	68,09	1,43	2,10	65,29	70,89	0,78	2,330	65,98	1,26	1,91	63,50	68,45	0,99	3,154
Sumatera Utara	44,87	1,80	4,02	41,33	48,40	2,73	2.599	53,24	1,37	2,58	50,55	55,93	1,31	3,134	49,22	1,14	2,32	46,98	51,46	2,17	5,733
Sumatera Barat	56,04	2,07	3,69	51,98	60,10	1,32	1.519	60,90	1,44	2,36	58,08	63,72	0,93	2,353	59,18	1,18	2,00	56,86	61,49	1,19	3,872
Riau	46,21	3,00	6,50	40,32	52,09	1,86	550	56,56	2,21	3,90	52,23	60,89	1,30	1,013	52,67	1,79	3,39	49,17	56,17	1,68	1,563
Jambi	47,06	2,87	6,09	41,44	52,69	0,99	487	46,16	1,97	4,26	42,31	50,01	0,83	1,256	46,43	1,62	3,49	43,25	49,61	1,01	1,743
Sumatera Selatan	56,07	2,33	4,15	51,51	60,63	1,99	957	48,51	1,54	3,18	45,48	51,53	1,24	1,942	51,15	1,31	2,56	48,58	53,72	1,71	2,899
Bengkulu	58,25	3,35	5,74	51,69	64,81	0,68	379	58,66	2,13	3,63	54,49	62,82	0,59	989	58,55	1,80	3,07	55,03	62,07	0,71	1,368
Lampung	45,63	2,76	6,04	40,22	51,03	2,15	763	52,77	1,52	2,88	49,79	55,75	1,63	2,218	51,09	1,33	2,61	48,47	53,70	2,04	2,981
Kep. Bangka Belitung	56,10	2,98	5,31	50,26	61,93	0,79	599	56,13	3,88	6,91	48,53	63,73	0,97	398	56,11	2,43	4,33	51,35	60,87	0,97	997
Kepulauan Riau	41,47	5,34	12,89	30,99	51,95	3,03	572	46,30	4,35	9,39	37,77	54,82	0,58	273	42,82	4,02	9,39	34,94	50,69	2,26	845
DKI Jakarta	55,42	1,93	3,49	51,64	59,21	4,45	1.372								55,42	1,93	3,49	51,64	59,21	4,27	1,372
Jawa Barat	53,60	1,11	2,07	51,42	55,77	5,17	4.604	57,68	1,29	2,24	55,15	60,21	3,61	3,104	55,22	0,84	1,53	53,56	56,87	4,77	7,708
Jawa Tengah	54,29	0,95	1,75	52,42	56,15	2,92	5.562	48,34	0,93	1,93	46,51	50,16	2,79	6.037	50,92	0,67	1,32	49,61	52,24	3,18	11.599
DI Yogyakarta	54,44	1,92	3,54	50,67	58,22	2,04	1.068	52,57	2,85	5,43	46,98	58,17	2,54	746	53,65	1,65	3,07	50,42	56,87	2,48	1.814
Jawa Timur	49,97	0,91	1,82	48,18	51,76	3,07	6.389	49,33	0,86	1,73	47,65	51,00	2,65	6.923	49,61	0,62	1,26	48,39	50,83	3,14	13.312
Banten	51,90	2,27	4,37	47,45	56,34	3,65	988	64,04	2,35	3,67	59,43	68,64	2,03	735	56,55	1,66	2,94	53,28	59,81	3,10	1,723
Bali	51,08	2,28	4,46	46,62	55,55	2,23	1.332	62,24	2,58	4,15	57,18	67,30	2,14	1.188	56,41	1,69	3,00	53,10	59,73	2,29	2.520
Nusa Tenggara Barat	67,85	2,11	3,11	63,71	71,99	1,46	868	65,34	2,18	3,33	61,07	69,60	1,67	1.125	66,36	1,55	2,34	63,32	69,41	1,81	1.993
Nusa Tenggara Timur	52,84	2,79	5,29	47,37	58,32	0,97	557	58,84	1,24	2,10	56,41	61,26	0,75	3.702	57,82	1,13	1,95	55,61	60,04	0,93	4.259
Kalimantan Barat	52,57	2,47	4,71	47,72	57,42	1,18	717	57,31	1,89	3,31	53,60	61,03	1,15	1.488	55,79	1,52	2,72	52,82	58,76	1,33	2.205
Kalimantan Tengah	51,15	3,06	5,99	45,15	57,16	0,73	478	54,99	2,55	4,64	49,99	60,00	0,82	1.079	53,75	1,99	3,70	49,85	57,64	0,91	1.557
Kalimantan Selatan	60,17	2,72	4,52	54,84	65,50	1,47	656	61,07	2,02	3,31	57,11	65,04	0,95	1.110	60,71	1,63	2,68	57,52	63,91	1,27	1.766
Kalimantan Timur	41,39	2,61	6,31	36,27	46,51	1,54	826	50,00	3,21	6,41	43,72	56,28	1,18	736	44,88	2,03	4,53	40,90	48,87	1,47	1.562
Sulawesi Utara	40,45	2,30	5,70	35,93	44,96	1,01	1.112	51,52	1,85	3,60	47,89	55,15	0,65	1.758	46,80	1,47	3,15	43,92	49,69	0,90	2.870
Sulawesi Tengah	58,99	4,67	7,91	49,84	68,14	1,91	336	57,60	1,82	3,16	54,04	61,16	0,79	1.412	57,90	1,75	3,02	54,48	61,33	1,16	1.748
Sulawesi Selatan	45,08	2,00	4,44	41,16	49,00	1,84	1.528	51,05	1,23	2,41	48,64	53,46	1,14	4.065	49,15	1,06	2,16	47,07	51,23	1,54	5.593
Sulawesi Tenggara	54,15	3,32	6,13	47,64	60,65	0,76	402	56,73	1,89	3,32	53,03	60,42	0,63	1.279	56,13	1,64	2,93	52,91	59,35	0,77	1.681
Gorontalo	61,03	4,20	6,89	52,79	69,28	0,93	271	65,47	2,84	4,34	59,90	71,05	0,66	555	63,95	2,37	3,70	59,31	68,59	0,85	826
Sulawesi Barat	52,39	4,58	8,73	43,42	61,36	0,77	170	52,81	2,85	5,41	47,21	58,40	0,75	602	52,71	2,43	4,62	47,94	57,48	0,89	772
Maluku	38,59	3,92	10,16	30,90	46,27	1,27	402	43,51	2,73	6,28	38,16	48,86	0,77	1.115	41,67	2,25	5,40	37,26	46,08	1,05	1.517
Maluku Utara	35,84	4,22	11,79	27,56	44,12	0,59	236	41,03	2,62	6,38	35,90	46,16	0,47	763	39,69	2,22	5,60	35,33	44,04	0,58	999
Papua Barat	42,39	3,96	9,34	34,63	50,16	0,27	274	42,24	3,48	8,24	35,42	49,06	0,36	446	42,29	2,71	6,40	36,98	47,59	0,39	720
Papua	39,76	3,91	9,85	32,08	47,43	0,94	278	42,46	3,39	7,98	35,82	49,11	0,82	758	41,40	2,58	6,23	36,34	46,46	0,98	1.036
Indonesia	52,16	0,42	0,80	51,34	52,97	3,11	39.675	53,12	0,36	0,68	52,42	53,82	2,67	56.632	52,67	0,27	0,52	52,14	53,21	2,88	96.307

Tabel E.2: *Sampling Error* Persentase Lansia Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	62,85	1,73	2,75	59,47	66,23	0,75	1.452	68,55	1,50	2,20	65,60	71,50	0,74	1.702	65,98	1,26	1,91	63,50	68,45	0,99	3.154
Sumatera Utara	48,24	1,54	3,20	45,22	51,27	1,64	2.603	50,01	1,36	2,71	47,35	52,67	1,55	3.130	49,22	1,14	2,32	46,98	51,46	2,17	5.733
Sumatera Barat	59,35	1,57	2,65	56,26	62,43	0,87	1.754	59,04	1,48	2,51	56,14	61,94	0,95	2.118	59,18	1,18	2,00	56,86	61,49	1,19	3.872
Riau	50,14	2,27	4,53	45,70	54,59	1,26	780	55,21	2,24	4,05	50,83	59,60	1,21	783	52,67	1,79	3,39	49,17	56,17	1,68	1.563
Jambi	45,70	2,02	4,43	41,73	49,67	0,73	883	47,16	2,16	4,58	42,93	51,40	0,82	860	46,43	1,62	3,49	43,25	49,61	1,01	1.743
Sumatera Selatan	51,03	1,72	3,36	47,67	54,39	1,30	1.417	51,26	1,72	3,36	47,88	54,64	1,42	1.482	51,15	1,31	2,56	48,58	53,72	1,71	2.899
Bengkulu	57,86	2,30	3,97	53,35	62,36	0,53	677	59,23	2,36	3,99	54,59	63,86	0,58	691	58,55	1,80	3,07	55,03	62,07	0,71	1.368
Lampung	49,13	1,63	3,33	45,93	52,33	1,42	1.543	53,07	1,69	3,18	49,77	56,38	1,49	1.438	51,09	1,33	2,61	48,47	53,70	2,04	2.981
Kep. Bangka Belitung	50,39	2,96	5,87	44,60	56,19	0,65	502	61,62	2,97	4,82	55,80	67,43	0,71	495	56,11	2,43	4,33	51,35	60,87	0,97	997
Kepulauan Riau	41,59	4,92	11,82	31,96	51,23	1,61	446	44,08	4,59	10,41	35,09	53,08	1,32	399	42,82	4,02	9,39	34,94	50,69	2,26	845
DKI Jakarta	49,24	2,46	4,99	44,42	54,06	3,06	675	61,21	2,61	4,27	56,09	66,32	3,85	697	55,42	1,93	3,49	51,64	59,21	4,27	1.372
Jawa Barat	53,30	1,06	1,99	51,22	55,37	3,32	3.848	56,99	1,06	1,85	54,92	59,06	3,61	3.860	55,22	0,84	1,53	53,56	56,87	4,77	7.708
Jawa Tengah	50,90	0,86	1,68	49,23	52,58	2,21	5.420	50,94	0,81	1,60	49,34	52,54	2,33	6.179	50,92	0,67	1,32	49,61	52,24	3,18	11.599
DI Yogyakarta	51,96	2,24	4,31	47,57	56,35	1,89	831	55,01	2,25	4,08	50,61	59,42	2,36	983	53,65	1,65	3,07	50,42	56,87	2,48	1.814
Jawa Timur	48,30	0,81	1,67	46,72	49,88	2,19	6.020	50,69	0,77	1,52	49,18	52,20	2,41	7.292	49,61	0,62	1,26	48,39	50,83	3,14	13.312
Banten	54,60	2,12	3,88	50,45	58,76	2,25	859	58,38	2,20	3,76	54,07	62,69	2,58	864	56,55	1,66	2,94	53,28	59,81	3,10	1.723
Bali	54,18	1,99	3,68	50,27	58,08	1,36	1.212	58,38	2,02	3,47	54,41	62,35	1,63	1.308	56,41	1,69	3,00	53,10	59,73	2,29	2.520
Nusa Tenggara Barat	66,46	2,14	3,23	62,25	70,66	1,51	902	66,28	1,92	2,90	62,51	70,05	1,35	1.091	66,36	1,55	2,34	63,32	69,41	1,81	1.993
Nusa Tenggara Timur	56,98	1,39	2,43	54,26	59,70	0,61	2.030	58,59	1,41	2,41	55,83	61,35	0,70	2.229	57,82	1,13	1,95	55,61	60,04	0,93	4.259
Kalimantan Barat	52,31	1,92	3,68	48,54	56,08	0,99	1.140	59,29	1,97	3,32	55,44	63,15	1,05	1.065	55,79	1,52	2,72	52,82	58,76	1,33	2.205
Kalimantan Tengah	53,96	2,46	4,56	49,14	58,78	0,66	825	53,52	2,41	4,51	48,79	58,25	0,60	732	53,75	1,99	3,70	49,85	57,64	0,91	1.557
Kalimantan Selatan	58,04	2,07	3,56	53,99	62,09	0,85	779	62,96	1,97	3,13	59,10	66,82	0,95	987	60,71	1,63	2,68	57,52	63,91	1,27	1.766
Kalimantan Timur	45,05	2,57	5,71	40,01	50,09	1,17	875	44,69	2,70	6,04	39,40	49,98	1,11	687	44,88	2,03	4,53	40,90	48,87	1,47	1.562
Sulawesi Utara	47,72	1,78	3,73	44,23	51,20	0,57	1.354	46,00	1,78	3,87	42,52	49,49	0,64	1.516	46,80	1,47	3,15	43,92	49,69	0,90	2.870
Sulawesi Tengah	57,45	2,07	3,60	53,40	61,50	0,75	877	58,35	2,26	3,87	53,93	62,77	0,90	871	57,90	1,75	3,02	54,48	61,33	1,16	1.748
Sulawesi Selatan	48,03	1,38	2,88	45,32	50,74	1,05	2.488	50,01	1,25	2,50	47,57	52,46	1,11	3.105	49,15	1,06	2,16	47,07	51,23	1,54	5.593
Sulawesi Tenggara	54,81	2,16	3,94	50,58	59,05	0,58	779	57,29	2,10	3,67	53,17	61,42	0,62	902	56,13	1,64	2,93	52,91	59,35	0,77	1.681
Gorontalo	61,97	3,19	5,14	55,73	68,22	0,64	382	65,62	2,66	4,05	60,41	70,83	0,54	444	63,95	2,37	3,70	59,31	68,59	0,85	826
Sulawesi Barat	52,36	3,56	6,79	45,39	59,33	0,82	342	53,02	2,88	5,42	47,38	58,66	0,61	430	52,71	2,43	4,62	47,94	57,48	0,89	772
Maluku	41,69	2,79	6,68	36,23	47,15	0,72	730	41,65	2,75	6,60	36,26	47,03	0,75	787	41,67	2,25	5,40	37,26	46,08	1,05	1.517
Maluku Utara	38,11	2,78	7,30	32,66	43,57	0,43	517	41,29	2,86	6,92	35,69	46,90	0,43	482	39,69	2,22	5,60	35,33	44,04	0,58	999
Papua Barat	46,15	3,18	6,89	39,92	52,39	0,27	419	37,50	3,45	9,21	30,73	44,26	0,27	301	42,29	2,71	6,40	36,98	47,59	0,39	720
Papua	41,47	2,96	7,13	35,68	47,27	0,68	630	41,30	3,68	8,91	34,08	48,51	0,79	406	41,40	2,58	6,23	36,34	46,46	0,98	1.036
Indonesia	51,39	0,35	0,68	50,70	52,07	2,18	45.991	53,81	0,34	0,63	53,14	54,47	2,38	50.316	52,67	0,27	0,52	52,14	53,21	2,88	96.307

Tabel F.1: Sampling Error Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	30,23	2,43	8,05	25,46	35,00	1,07	824	39,64	1,47	3,70	36,77	42,51	0,75	2.330	37,20	1,26	3,38	34,73	39,66	0,95	3.154
Sumatera Utara	22,46	1,37	6,10	19,77	25,14	2,24	2.599	30,72	1,23	3,99	28,31	33,12	1,22	3.134	26,75	0,94	3,52	24,91	28,60	1,88	5.733
Sumatera Barat	25,37	1,91	7,51	21,64	29,11	1,46	1.519	30,29	1,35	4,45	27,65	32,93	0,92	2.353	28,54	1,10	3,85	26,39	30,70	1,22	3.872
Riau	20,69	2,38	11,50	16,03	25,36	1,77	550	29,36	1,87	6,36	25,70	33,02	1,10	1.013	26,10	1,48	5,67	23,20	29,00	1,49	1.563
Jambi	21,63	2,41	11,13	16,91	26,35	1,03	487	27,32	1,65	6,03	24,09	30,55	0,73	1.256	25,59	1,36	5,32	22,92	28,27	0,93	1.743
Sumatera Selatan	18,61	2,04	10,97	14,60	22,61	2,50	957	20,92	1,19	5,70	18,58	23,25	1,12	1.942	20,11	1,05	5,24	18,05	22,17	1,72	2.899
Bengkulu	29,57	2,93	9,91	23,83	35,31	0,61	379	35,85	1,97	5,50	31,99	39,72	0,54	989	34,19	1,65	4,83	30,96	37,43	0,65	1.368
Lampung	21,59	2,18	10,09	17,32	25,86	1,97	763	21,83	1,14	5,24	19,59	24,08	1,35	2.218	21,78	1,01	4,66	19,79	23,77	1,72	2.981
Kep. Bangka Belitung	21,66	2,47	11,38	16,83	26,49	0,78	599	26,55	3,53	13,30	19,63	33,47	1,02	398	24,04	2,15	8,93	19,83	28,24	1,03	997
Kepulauan Riau	20,96	4,21	20,07	12,71	29,21	2,75	572	22,42	3,53	15,76	15,50	29,35	0,55	273	21,37	3,19	14,93	15,12	27,62	2,07	845
DKI Jakarta	20,40	1,37	6,71	17,72	23,08	3,39	1.372								20,40	1,37	6,71	17,72	23,08	3,25	1.372
Jawa Barat	23,78	0,90	3,78	22,01	25,54	4,65	4.604	26,91	1,09	4,05	24,78	29,05	3,19	3.104	25,02	0,69	2,77	23,66	26,38	4,26	7.708
Jawa Tengah	23,67	0,83	3,52	22,04	25,30	3,08	5.562	20,82	0,72	3,43	19,42	22,22	2,49	6.037	22,06	0,54	2,46	21,00	23,13	3,03	11.599
DI Yogyakarta	19,57	1,59	8,12	16,46	22,69	2,19	1.068	22,88	2,40	10,51	18,17	27,59	2,55	746	20,98	1,38	6,58	18,27	23,69	2,62	1.814
Jawa Timur	23,20	0,77	3,32	21,69	24,71	3,08	6.389	25,57	0,72	2,83	24,15	26,99	2,50	6.923	24,53	0,53	2,16	23,50	25,57	3,04	13.312
Banten	23,64	1,87	7,90	19,98	27,30	3,42	988	28,80	2,51	8,70	23,89	33,72	2,59	735	25,61	1,50	5,85	22,68	28,55	3,24	1.723
Bali	24,58	1,81	7,34	21,04	28,12	1,89	1.332	38,55	2,38	6,18	33,88	43,21	1,81	1.188	31,26	1,47	4,72	28,37	34,15	1,99	2.520
Nusa Tenggara Barat	37,22	2,54	6,82	32,24	42,19	1,97	868	37,61	2,24	5,95	33,22	42,00	1,70	1.125	37,45	1,68	4,49	34,15	40,74	2,02	1.993
Nusa Tenggara Timur	23,81	2,52	10,59	18,87	28,76	1,09	557	32,19	1,15	3,57	29,93	34,45	0,72	3.702	30,78	1,05	3,41	28,72	32,83	0,91	4.259
Kalimantan Barat	27,06	2,29	8,47	22,57	31,56	1,28	717	30,48	1,79	5,88	26,97	33,99	1,19	1.488	29,38	1,42	4,84	26,60	32,17	1,40	2.205
Kalimantan Tengah	29,18	2,68	9,18	23,93	34,43	0,67	478	33,17	2,35	7,08	28,57	37,77	0,77	1.079	31,87	1,80	5,66	28,34	35,41	0,86	1.557
Kalimantan Selatan	24,47	2,25	9,19	20,07	28,88	1,30	656	26,89	1,71	6,38	23,53	30,25	0,83	1.110	25,93	1,37	5,27	23,25	28,60	1,11	1.766
Kalimantan Timur	15,56	1,58	10,15	12,47	18,66	1,04	826	30,52	2,47	8,09	25,68	35,37	0,82	736	21,63	1,41	6,50	18,88	24,39	1,03	1.562
Sulawesi Utara	19,52	1,69	8,63	16,22	22,83	0,83	1.112	33,53	1,77	5,29	30,05	37,01	0,67	1.758	27,56	1,28	4,63	25,06	30,06	0,84	2.870
Sulawesi Tengah	30,02	3,79	12,61	22,60	37,45	1,45	336	35,94	1,79	4,99	32,43	39,45	0,81	1.412	34,64	1,63	4,71	31,45	37,84	1,09	1.748
Sulawesi Selatan	20,90	1,67	7,98	17,63	24,17	1,91	1.528	26,52	1,00	3,76	24,57	28,48	0,96	4.065	24,74	0,87	3,50	23,04	26,43	1,38	5.593
Sulawesi Tenggara	26,59	2,98	11,21	20,75	32,44	0,78	402	35,29	1,81	5,14	31,74	38,85	0,63	1.279	33,27	1,56	4,69	30,21	36,33	0,77	1.681
Gorontalo	30,38	3,86	12,70	22,82	37,95	0,88	271	30,95	2,47	7,99	26,10	35,80	0,53	555	30,75	2,09	6,81	26,65	34,86	0,72	826
Sulawesi Barat	26,89	4,34	16,15	18,38	35,41	0,88	170	32,80	2,79	8,50	27,33	38,26	0,81	602	31,41	2,37	7,55	26,76	36,06	0,98	772
Maluku	21,57	2,93	13,59	15,83	27,32	1,00	402	24,12	1,90	7,88	20,40	27,85	0,50	1.115	23,17	1,62	6,97	20,00	26,34	0,74	1.517
Maluku Utara	28,13	4,41	15,69	19,48	36,78	0,73	236	26,71	2,05	7,68	22,69	30,74	0,36	763	27,08	1,91	7,05	23,34	30,82	0,52	999
Papua Barat	21,97	3,11	14,16	15,87	28,07	0,23	274	22,91	2,88	12,57	17,26	28,56	0,34	446	22,62	2,22	9,80	18,28	26,97	0,37	720
Papua	17,75	3,03	17,06	11,82	23,69	0,92	278	22,50	2,51	11,14	17,58	27,41	0,63	758	20,63	1,94	9,42	16,82	24,44	0,83	1.036
Indonesia	23,25	0,34	1,48	22,58	23,92	2,94	39.675	26,59	0,30	1,13	26,00	27,18	2,39	56.632	25,05	0,23	0,90	24,60	25,49	2,63	96.307

Tabel F.2: *Sampling Error* Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	36,08	1,61	4,47	32,92	39,23	0,66	1.452	38,12	1,55	4,07	35,08	41,15	0,72	1.702	37,20	1,26	3,38	34,73	39,66	0,95	3.154
Sumatera Utara	27,57	1,25	4,52	25,12	30,01	1,34	2.603	26,09	1,15	4,40	23,84	28,35	1,44	3.130	26,75	0,94	3,52	24,91	28,60	1,88	5.733
Sumatera Barat	29,75	1,45	4,86	26,91	32,58	0,85	1.754	27,59	1,30	4,71	25,04	30,14	0,89	2.118	28,54	1,10	3,85	26,39	30,70	1,22	3.872
Riau	25,70	1,83	7,12	22,11	29,29	1,07	780	26,51	1,91	7,20	22,77	30,25	1,12	783	26,10	1,48	5,67	23,20	29,00	1,49	1.563
Jambi	26,81	1,74	6,50	23,40	30,22	0,68	883	24,38	1,86	7,61	20,74	28,02	0,82	860	25,59	1,36	5,32	22,92	28,27	0,93	1.743
Sumatera Selatan	20,58	1,38	6,71	17,88	23,29	1,29	1.417	19,67	1,32	6,71	17,08	22,26	1,31	1.482	20,11	1,05	5,24	18,05	22,17	1,72	2.899
Bengkulu	34,87	2,12	6,09	30,71	39,03	0,49	677	33,53	2,20	6,56	29,21	37,84	0,54	691	34,19	1,65	4,83	30,96	37,43	0,65	1.368
Lampung	22,10	1,30	5,87	19,56	24,65	1,30	1.543	21,45	1,39	6,47	18,72	24,17	1,49	1.438	21,78	1,01	4,66	19,79	23,77	1,72	2.981
Kep. Bangka Belitung	21,98	2,35	10,70	17,37	26,59	0,60	502	26,02	2,90	11,15	20,33	31,70	0,83	495	24,04	2,15	8,93	19,83	28,24	1,03	997
Kepulauan Riau	21,72	3,64	16,78	14,57	28,86	1,26	446	21,01	3,80	18,08	13,56	28,45	1,34	399	21,37	3,19	14,93	15,12	27,62	2,07	845
DKI Jakarta	17,57	1,63	9,27	14,38	20,76	2,31	675	23,04	1,94	8,41	19,24	26,84	2,84	697	20,40	1,37	6,71	17,72	23,08	3,25	1.372
Jawa Barat	24,71	0,91	3,68	22,93	26,50	3,28	3.848	25,30	0,91	3,59	23,52	27,08	3,45	3.860	25,02	0,69	2,77	23,66	26,38	4,26	7.708
Jawa Tengah	22,73	0,70	3,09	21,35	24,11	2,13	5.420	21,49	0,66	3,09	20,19	22,79	2,28	6.179	22,06	0,54	2,46	21,00	23,13	3,03	11.599
DI Yogyakarta	19,85	1,92	9,66	16,09	23,61	2,17	831	21,90	1,81	8,25	18,35	25,44	2,21	983	20,98	1,38	6,58	18,27	23,69	2,62	1.814
Jawa Timur	24,28	0,69	2,84	22,93	25,63	2,18	6.020	24,74	0,66	2,66	23,45	26,03	2,35	7.292	24,53	0,53	2,16	23,50	25,57	3,04	13.312
Banten	25,21	1,85	7,36	21,57	28,84	2,26	859	26,00	2,09	8,03	21,91	30,09	2,94	864	25,61	1,50	5,85	22,68	28,55	3,24	1.723
Bali	30,67	1,85	6,02	27,05	34,29	1,37	1.212	31,77	1,80	5,66	28,25	35,30	1,44	1.308	31,26	1,47	4,72	28,37	34,15	1,99	2.520
Nusa Tenggara Barat	39,16	2,44	6,23	34,38	43,94	1,83	902	35,92	1,99	5,54	32,02	39,82	1,40	1.091	37,45	1,68	4,49	34,15	40,74	2,02	1.993
Nusa Tenggara Timur	30,19	1,28	4,24	27,68	32,70	0,61	2.030	31,31	1,30	4,16	28,75	33,86	0,67	2.229	30,78	1,05	3,41	28,72	32,83	0,91	4.259
Kalimantan Barat	31,11	1,79	5,74	27,61	34,61	0,99	1.140	27,65	1,80	6,51	24,12	31,18	1,06	1.065	29,38	1,42	4,84	26,60	32,17	1,40	2.205
Kalimantan Tengah	31,78	2,33	7,32	27,22	36,33	0,68	825	31,98	2,33	7,27	27,42	36,53	0,63	732	31,87	1,80	5,66	28,34	35,41	0,86	1.557
Kalimantan Selatan	25,65	1,80	7,03	22,11	29,18	0,82	779	26,16	1,79	6,83	22,66	29,67	0,94	987	25,93	1,37	5,27	23,25	28,60	1,11	1.766
Kalimantan Timur	21,09	1,78	8,44	17,61	24,58	0,83	875	22,26	2,10	9,44	18,14	26,38	0,96	687	21,63	1,41	6,50	18,88	24,39	1,03	1.562
Sulawesi Utara	29,61	1,67	5,63	26,34	32,88	0,60	1.354	25,76	1,47	5,71	22,88	28,65	0,57	1.516	27,56	1,28	4,63	25,06	30,06	0,84	2.870
Sulawesi Tengah	35,52	2,03	5,71	31,54	39,50	0,77	877	33,77	2,01	5,95	29,83	37,71	0,77	871	34,64	1,63	4,71	31,45	37,84	1,09	1.748
Sulawesi Selatan	24,69	1,12	4,54	22,50	26,89	0,93	2.488	24,77	1,03	4,15	22,76	26,79	1,01	3.105	24,74	0,87	3,50	23,04	26,43	1,38	5.593
Sulawesi Tenggara	33,34	2,05	6,14	29,33	37,35	0,58	779	33,21	2,01	6,05	29,27	37,15	0,62	902	33,27	1,56	4,69	30,21	36,33	0,77	1.681
Gorontalo	31,75	2,79	8,79	26,27	37,22	0,53	382	29,91	2,60	8,69	24,82	35,01	0,56	444	30,75	2,09	6,81	26,65	34,86	0,72	826
Sulawesi Barat	33,49	3,35	10,00	26,93	40,05	0,82	342	29,57	2,85	9,63	23,99	35,15	0,71	430	31,41	2,37	7,55	26,76	36,06	0,98	772
Maluku	23,72	2,11	8,91	19,58	27,86	0,55	730	22,66	2,09	9,23	18,56	26,76	0,60	787	23,17	1,62	6,97	20,00	26,34	0,74	1.517
Maluku Utara	28,40	2,37	8,33	23,76	33,04	0,36	517	25,73	2,65	10,28	20,55	30,92	0,47	482	27,08	1,91	7,05	23,34	30,82	0,52	999
Papua Barat	25,61	3,01	11,74	19,72	31,51	0,32	419	18,92	2,76	14,61	13,50	24,34	0,27	301	22,62	2,22	9,80	18,28	26,97	0,37	720
Papua	22,52	2,66	11,83	17,30	27,74	0,77	630	18,12	2,55	14,09	13,11	23,12	0,62	406	20,63	1,94	9,42	16,82	24,44	0,83	1.036
Indonesia	25,10	0,29	1,17	24,52	25,67	2,08	45.991	25,00	0,29	1,15	24,44	25,57	2,26	50.316	25,05	0,23	0,90	24,60	25,49	2,63	96.307

Tabel G.1: *Sampling Error* Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	37,06	2,16	5,82	32,84	41,29	0,46	744	46,26	1,80	3,89	42,73	49,79	0,76	1.393	43,93	1,45	3,30	41,09	46,77	0,78	2.137
Sumatera Utara	40,20	1,96	4,89	36,34	44,05	2,06	1.506	57,49	1,45	2,51	54,65	60,32	1,02	1.992	49,17	1,21	2,47	46,79	51,55	1,57	3.498
Sumatera Barat	39,56	2,05	5,17	35,55	43,58	0,82	1.072	49,38	1,52	3,08	46,40	52,36	0,68	1.395	45,91	1,24	2,70	43,49	48,34	0,82	2.467
Riau	33,21	2,65	7,98	28,02	38,40	1,04	461	52,69	2,36	4,49	48,06	57,33	1,01	555	45,21	1,79	3,97	41,70	48,73	1,11	1.016
Jambi	38,11	3,18	8,35	31,87	44,35	0,84	462	52,67	2,29	4,36	48,17	57,17	0,79	653	48,14	1,92	4,00	44,36	51,91	0,94	1.115
Sumatera Selatan	33,86	2,28	6,72	29,40	38,32	1,30	749	53,02	1,80	3,39	49,49	56,54	1,14	1.080	46,20	1,50	3,25	43,26	49,15	1,44	1.829
Bengkulu	39,18	3,76	9,60	31,81	46,56	0,56	284	55,72	2,51	4,51	50,80	60,65	0,58	657	51,38	2,15	4,18	47,17	55,58	0,66	941
Lampung	37,48	2,47	6,59	32,64	42,32	1,07	675	55,99	1,71	3,06	52,63	59,35	1,47	1.319	51,88	1,45	2,80	49,03	54,73	1,56	1.994
Kep. Bangka Belitung	34,64	2,60	7,51	29,54	39,74	0,40	384	45,41	3,58	7,88	38,39	52,43	0,56	245	39,87	2,19	5,49	35,58	44,16	0,52	629
Kepulauan Riau	31,34	4,64	14,82	22,24	40,44	1,74	253	48,87	3,09	6,33	42,81	54,93	0,20	261	35,94	3,63	10,11	28,82	43,06	1,35	514
DKI Jakarta	29,21	1,86	6,38	25,56	32,87	3,10	849							29,21	1,86	6,38	25,56	32,86	3,10	849	
Jawa Barat	36,36	1,17	3,22	34,07	38,66	3,84	2.845	50,85	1,37	2,68	48,18	53,53	2,73	2.031	42,11	0,91	2,16	40,33	43,90	3,66	4.876
Jawa Tengah	42,54	0,95	2,22	40,69	44,40	1,79	3.848	57,54	0,96	1,68	55,65	59,43	2,13	3.903	51,12	0,70	1,38	49,74	52,50	2,26	7.751
DI Yogyakarta	41,02	2,77	6,74	35,60	46,44	2,49	660	69,58	2,67	3,83	64,35	74,81	1,71	578	53,30	2,09	3,92	49,20	57,40	2,43	1.238
Jawa Timur	44,00	1,06	2,41	41,92	46,08	2,61	4.165	57,32	0,91	1,60	55,53	59,11	2,11	4.150	51,43	0,71	1,38	50,04	52,82	2,60	8.315
Banten	32,62	2,05	6,29	28,59	36,64	2,19	672	48,21	2,69	5,59	42,93	53,49	1,72	470	38,50	1,66	4,32	35,24	41,76	2,14	1.142
Bali	47,29	2,25	4,75	42,89	51,69	1,30	866	58,98	2,37	4,02	54,33	63,62	1,17	865	52,85	1,65	3,13	49,61	56,09	1,35	1.731
Nusa Tenggara Barat	44,15	3,10	7,03	38,07	50,23	1,69	534	50,50	2,81	5,57	44,99	56,02	1,72	635	47,92	2,09	4,36	43,82	52,02	1,87	1.169
Nusa Tenggara Timur	37,34	2,97	7,95	31,52	43,16	0,67	468	60,78	1,36	2,23	58,12	63,44	0,62	2.189	57,02	1,25	2,20	54,56	59,48	0,71	2.657
Kalimantan Barat	33,61	2,58	7,67	28,56	38,66	0,89	607	53,41	2,10	3,93	49,29	57,53	0,94	927	46,97	1,69	3,61	43,65	50,29	1,06	1.534
Kalimantan Tengah	41,59	3,28	7,88	35,16	48,02	0,53	388	56,07	2,72	4,86	50,73	61,41	0,65	672	51,42	2,17	4,22	47,17	55,67	0,70	1.060
Kalimantan Selatan	36,79	2,77	7,54	31,35	42,22	0,95	489	55,10	2,18	3,96	50,82	59,38	0,73	693	47,88	1,77	3,70	44,41	51,35	0,91	1.182
Kalimantan Timur	35,73	3,01	8,43	29,83	41,64	1,32	440	54,28	3,67	6,76	47,09	61,47	1,11	441	43,46	2,45	5,65	38,65	48,27	1,40	881
Sulawesi Utara	37,33	2,17	5,80	33,08	41,58	0,57	728	48,12	1,82	3,78	44,55	51,69	0,43	1.123	43,49	1,42	3,26	40,72	46,27	0,54	1.851
Sulawesi Tengah	36,44	3,71	10,18	29,16	43,71	0,76	307	51,86	2,25	4,34	47,45	56,28	0,81	785	48,54	1,94	4,00	44,74	52,34	0,89	1.092
Sulawesi Selatan	32,63	2,15	6,60	28,41	36,86	1,44	1.188	46,97	1,37	2,91	44,29	49,64	0,95	2.361	42,44	1,18	2,79	40,12	44,76	1,24	3.549
Sulawesi Tenggara	36,86	3,13	8,51	30,71	43,00	0,45	376	53,43	2,39	4,46	48,75	58,10	0,68	755	49,54	1,98	4,00	45,66	53,43	0,71	1.131
Gorontalo	39,18	4,73	12,08	29,90	48,46	0,63	136	45,32	2,95	6,51	39,53	51,10	0,48	358	43,48	2,50	5,75	38,58	48,38	0,57	494
Sulawesi Barat	45,47	5,51	12,13	34,66	56,28	0,67	123	57,16	2,57	4,50	52,12	62,20	0,41	346	54,39	2,38	4,38	49,72	59,06	0,53	469
Maluku	30,72	3,97	12,93	22,93	38,51	0,89	353	50,36	2,94	5,84	44,60	56,13	0,62	671	43,23	2,55	5,90	38,23	48,23	0,87	1.024
Maluku Utara	33,05	4,83	14,60	23,59	42,52	0,52	259	53,69	2,74	5,10	48,33	59,06	0,37	442	48,41	2,51	5,19	43,49	53,33	0,49	701
Papua Barat	40,10	5,68	14,16	28,97	51,24	0,32	114	64,25	4,30	6,70	55,81	72,69	0,44	317	57,68	3,51	6,08	50,81	64,56	0,44	431
Papua	41,44	4,21	10,15	33,19	49,69	0,69	197	60,19	3,45	5,73	53,43	66,95	0,63	535	52,92	2,77	5,23	47,50	58,35	0,74	732
Indonesia	38,90	0,45	1,14	38,02	39,77	2,39	27.202	54,84	0,38	0,70	54,09	55,59	1,98	34.797	47,48	0,30	0,63	46,89	48,06	2,24	61.999

Tabel G.2: *Sampling Error* Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	65,25	1,81	2,77	61,70	68,79	0,56	999	26,33	1,66	6,29	23,09	29,58	0,65	1.138	43,93	1,45	3,30	41,09	46,77	0,78	2.137
Sumatera Utara	63,78	1,72	2,69	60,41	67,14	1,46	1.582	36,96	1,48	4,00	34,07	39,86	1,25	1.916	49,17	1,21	2,47	46,79	51,55	1,57	3.498
Sumatera Barat	63,83	1,77	2,78	60,35	67,30	0,78	1.147	30,62	1,49	4,88	27,70	33,55	0,69	1.320	45,91	1,24	2,70	43,49	48,34	0,82	2.467
Riau	62,85	2,47	3,94	58,00	67,70	1,09	532	25,96	2,47	9,51	21,12	30,80	1,19	484	45,21	1,79	3,97	41,70	48,73	1,11	1.016
Jambi	66,80	2,29	3,43	62,31	71,28	0,71	586	28,97	2,44	8,42	24,19	33,75	0,83	529	48,14	1,92	4,00	44,36	51,91	0,94	1.115
Sumatera Selatan	63,88	1,99	3,11	59,99	67,77	1,24	914	29,21	1,84	6,30	25,60	32,82	1,22	915	46,20	1,50	3,25	43,26	49,15	1,44	1.829
Bengkulu	66,29	2,59	3,90	61,22	71,36	0,51	470	35,98	2,63	7,32	30,82	41,14	0,48	471	51,38	2,15	4,18	47,17	55,58	0,66	941
Lampung	69,12	1,68	2,43	65,83	72,42	1,18	1.054	33,46	1,89	5,64	29,76	37,16	1,31	940	51,88	1,45	2,80	49,03	54,73	1,56	1.994
Kep. Bangka Belitung	61,57	2,82	4,59	56,03	67,10	0,42	313	17,22	2,30	13,35	12,71	21,73	0,43	316	39,87	2,19	5,49	35,58	44,16	0,52	629
Kepulauan Riau	48,41	5,00	10,32	38,62	58,20	1,09	272	23,58	4,71	19,96	14,36	32,81	1,33	242	35,94	3,63	10,11	28,82	43,06	1,35	514
DKI Jakarta	41,94	2,62	6,25	36,80	47,08	2,32	414	17,67	2,00	11,30	13,76	21,59	2,44	435	29,21	1,86	6,38	25,56	32,86	3,10	849
Jawa Barat	60,27	1,18	1,96	57,95	62,59	2,82	2.451	25,38	1,04	4,10	23,34	27,42	2,93	2.425	42,11	0,91	2,16	40,33	43,90	3,66	4.876
Jawa Tengah	66,47	0,86	1,29	64,80	68,15	1,62	3.755	37,94	0,89	2,35	36,19	39,68	1,90	3.996	51,12	0,70	1,38	49,74	52,50	2,26	7.751
DI Yogyakarta	62,59	2,63	4,19	57,44	67,74	1,72	583	45,62	2,27	4,98	41,17	50,07	1,44	655	53,30	2,09	3,92	49,20	57,40	2,43	1.238
Jawa Timur	68,57	0,88	1,29	66,84	70,30	1,99	3.896	37,02	0,87	2,34	35,32	38,72	2,07	4.419	51,43	0,71	1,38	50,04	52,82	2,60	8.315
Banten	55,64	2,33	4,19	51,07	60,20	1,84	572	22,10	1,99	9,01	18,20	26,01	1,99	570	38,50	1,66	4,32	35,24	41,76	2,14	1.142
Bali	61,90	1,98	3,20	58,03	65,78	0,89	809	44,88	2,01	4,49	40,93	48,82	0,98	922	52,85	1,65	3,13	49,61	56,09	1,35	1.731
Nusa Tenggara Barat	62,59	2,56	4,09	57,57	67,60	1,34	568	34,30	2,72	7,93	28,97	39,64	1,67	601	47,92	2,09	4,36	43,82	52,02	1,87	1.169
Nusa Tenggara Timur	72,28	1,47	2,04	69,39	75,17	0,54	1.276	43,24	1,68	3,89	39,95	46,54	0,62	1.381	57,02	1,25	2,20	54,56	59,48	0,71	2.657
Kalimantan Barat	60,81	2,07	3,40	56,77	64,86	0,77	779	33,03	2,02	6,10	29,08	36,99	0,77	755	46,97	1,69	3,61	43,65	50,29	1,06	1.534
Kalimantan Tengah	64,65	2,48	3,83	59,80	69,51	0,50	571	36,56	2,49	6,82	31,67	41,45	0,43	489	51,42	2,17	4,22	47,17	55,67	0,70	1.060
Kalimantan Selatan	63,12	2,57	4,07	58,08	68,15	0,91	545	34,20	2,28	6,67	29,73	38,67	0,81	637	47,88	1,77	3,70	44,41	51,35	0,91	1.182
Kalimantan Timur	55,22	2,95	5,35	49,43	61,01	1,04	496	29,17	3,28	11,24	22,74	35,60	1,24	385	43,46	2,45	5,65	38,65	48,27	1,40	881
Sulawesi Utara	61,21	1,88	3,08	57,52	64,91	0,43	914	27,75	1,86	6,69	24,11	31,38	0,55	937	43,49	1,42	3,26	40,72	46,27	0,54	1.851
Sulawesi Tengah	66,61	2,33	3,50	62,04	71,18	0,67	559	30,85	2,57	8,32	25,82	35,88	0,85	533	48,54	1,94	4,00	44,74	52,34	0,89	1.092
Sulawesi Selatan	63,72	1,51	2,37	60,75	66,68	0,88	1.609	25,86	1,30	5,02	23,32	28,41	0,98	1.940	42,44	1,18	2,79	40,12	44,76	1,24	3.549
Sulawesi Tenggara	63,37	2,52	3,98	58,42	68,31	0,54	549	37,42	2,48	6,61	32,57	42,27	0,58	582	49,54	1,98	4,00	45,66	53,43	0,71	1.131
Gorontalo	63,48	3,53	5,57	56,55	70,41	0,53	242	25,89	2,75	10,62	20,50	31,28	0,43	252	43,48	2,50	5,75	38,58	48,38	0,57	494
Sulawesi Barat	71,73	3,16	4,40	65,54	77,92	0,52	239	38,18	3,58	9,36	31,17	45,19	0,60	230	54,39	2,38	4,38	49,72	59,06	0,53	469
Maluku	60,69	3,52	5,80	53,79	67,60	0,77	515	27,04	2,82	10,42	21,51	32,56	0,63	509	43,23	2,55	5,90	38,23	48,23	0,87	1.024
Maluku Utara	64,82	3,03	4,68	58,88	70,76	0,37	371	31,32	3,24	10,35	24,97	37,67	0,43	330	48,41	2,51	5,19	43,49	53,33	0,49	701
Papua Barat	68,12	4,18	6,13	59,93	76,31	0,38	242	43,55	4,14	9,51	35,43	51,66	0,24	189	57,68	3,51	6,08	50,81	64,56	0,44	431
Papua	62,53	3,11	4,97	56,44	68,62	0,54	444	39,65	3,86	9,73	32,09	47,21	0,58	288	52,92	2,77	5,23	47,50	58,35	0,74	732
Indonesia	63,81	0,38	0,59	63,07	64,55	1,81	30.268	32,88	0,36	1,10	32,17	33,58	1,94	31.731	47,48	0,30	0,63	46,89	48,06	2,24	61.999

Tabel H.1: *Sampling Error* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	37,45	2,17	5,79	33,20	41,69	0,46	744	46,50	1,79	3,85	42,99	50,01	0,75	1.393	44,20	1,44	3,27	41,37	47,03	0,77	2.137
Sumatera Utara	40,65	1,97	4,84	36,80	44,51	2,06	1.506	57,76	1,43	2,48	54,95	60,57	1,00	1.992	49,54	1,21	2,44	47,16	51,91	1,57	3.498
Sumatera Barat	39,90	2,05	5,13	35,88	43,91	0,82	1.072	49,66	1,51	3,04	46,70	52,61	0,67	1.395	46,21	1,23	2,67	43,79	48,63	0,81	2.467
Riau	33,33	2,66	7,97	28,12	38,54	1,04	461	52,76	2,37	4,48	48,12	57,40	1,01	555	45,30	1,80	3,97	41,78	48,82	1,11	1.016
Jambi	38,19	3,19	8,34	31,95	44,44	0,84	462	52,80	2,30	4,35	48,29	57,30	0,79	653	48,25	1,93	3,99	44,47	52,03	0,94	1.115
Sumatera Selatan	34,72	2,31	6,64	30,20	39,24	1,32	749	53,02	1,80	3,39	49,49	56,54	1,14	1.080	46,51	1,50	3,23	43,57	49,45	1,43	1.829
Bengkulu	39,18	3,76	9,60	31,81	46,56	0,56	284	55,72	2,51	4,51	50,80	60,65	0,58	657	51,38	2,15	4,18	47,17	55,58	0,66	941
Lampung	37,72	2,47	6,55	32,88	42,56	1,06	675	56,27	1,71	3,03	52,93	59,61	1,46	1.319	52,15	1,45	2,78	49,31	54,99	1,55	1.994
Kep. Bangka Belitung	34,64	2,60	7,51	29,54	39,74	0,40	384	45,41	3,58	7,88	38,39	52,43	0,56	245	39,87	2,19	5,49	35,58	44,16	0,52	629
Kepulauan Riau	31,96	4,70	14,71	22,74	41,17	1,76	253	49,09	3,09	6,29	43,03	55,14	0,20	261	36,45	3,67	10,07	29,26	43,65	1,37	514
DKI Jakarta	30,44	1,92	6,31	26,68	34,20	3,22	849								30,44	1,92	6,31	26,68	34,20	3,22	849
Jawa Barat	36,97	1,16	3,15	34,69	39,25	3,77	2.845	51,27	1,36	2,66	48,60	53,94	2,71	2.031	42,65	0,91	2,13	40,87	44,42	3,61	4.876
Jawa Tengah	42,81	0,95	2,21	40,96	44,67	1,79	3.848	57,63	0,96	1,67	55,75	59,52	2,12	3.903	51,29	0,70	1,37	49,91	52,66	2,25	7.751
DI Yogyakarta	41,71	2,71	6,49	36,40	47,02	2,37	660	69,58	2,67	3,83	64,35	74,81	1,71	578	53,69	2,06	3,83	49,66	57,72	2,35	1.238
Jawa Timur	44,30	1,05	2,38	42,23	46,36	2,57	4.165	57,46	0,91	1,59	55,67	59,25	2,11	4.150	51,64	0,71	1,37	50,26	53,03	2,58	8.315
Banten	33,03	2,05	6,21	29,01	37,05	2,17	672	48,42	2,65	5,47	43,23	53,61	1,66	470	38,84	1,65	4,26	35,60	42,08	2,11	1.142
Bali	47,48	2,27	4,77	43,04	51,92	1,32	866	58,98	2,37	4,02	54,33	63,62	1,17	865	52,95	1,66	3,13	49,70	56,21	1,36	1.731
Nusa Tenggara Barat	44,30	3,10	6,99	38,22	50,37	1,69	534	50,89	2,79	5,47	45,43	56,35	1,69	635	48,21	2,08	4,31	44,14	52,29	1,85	1.169
Nusa Tenggara Timur	37,34	2,97	7,95	31,52	43,16	0,67	468	60,81	1,36	2,23	58,15	63,46	0,62	2.189	57,04	1,25	2,20	54,59	59,50	0,71	2.657
Kalimantan Barat	34,27	2,60	7,60	29,17	39,38	0,90	607	53,62	2,12	3,95	49,46	57,77	0,96	927	47,33	1,71	3,61	43,98	50,68	1,08	1.534
Kalimantan Tengah	42,11	3,30	7,84	35,64	48,58	0,53	388	56,20	2,72	4,84	50,87	61,53	0,65	672	51,67	2,17	4,20	47,42	55,92	0,70	1.060
Kalimantan Selatan	37,21	2,78	7,48	31,75	42,67	0,95	489	55,27	2,18	3,95	50,99	59,55	0,73	693	48,15	1,77	3,68	44,67	51,62	0,91	1.182
Kalimantan Timur	36,32	3,02	8,31	30,41	42,24	1,32	440	54,28	3,67	6,76	47,09	61,47	1,11	441	43,80	2,45	5,60	38,99	48,61	1,40	881
Sulawesi Utara	37,54	2,16	5,76	33,30	41,78	0,57	728	48,12	1,82	3,78	44,55	51,69	0,43	1.123	43,59	1,42	3,25	40,81	46,36	0,54	1.851
Sulawesi Tengah	36,44	3,71	10,18	29,16	43,71	0,76	307	51,96	2,24	4,30	47,58	56,34	0,80	785	48,62	1,93	3,97	44,84	52,40	0,88	1.092
Sulawesi Selatan	32,88	2,16	6,56	28,66	37,11	1,44	1.188	47,06	1,36	2,90	44,38	49,73	0,95	2.361	42,58	1,18	2,78	40,26	44,90	1,24	3.549
Sulawesi Tenggara	37,36	3,17	8,49	31,14	43,58	0,46	376	53,48	2,39	4,46	48,80	58,15	0,68	755	49,70	1,98	3,99	45,81	53,59	0,71	1.131
Gorontalo	39,79	4,66	11,72	30,65	48,93	0,61	136	45,32	2,95	6,51	39,53	51,10	0,48	358	43,67	2,49	5,70	38,79	48,55	0,57	494
Sulawesi Barat	45,47	5,51	12,13	34,66	56,28	0,67	123	57,16	2,57	4,50	52,12	62,20	0,41	346	54,39	2,38	4,38	49,72	59,06	0,53	469
Maluku	30,86	3,99	12,91	23,05	38,68	0,89	353	50,36	2,94	5,84	44,60	56,13	0,62	671	43,28	2,55	5,90	38,28	48,29	0,88	1.024
Maluku Utara	33,93	4,79	14,12	24,54	43,32	0,51	259	53,69	2,74	5,10	48,33	59,06	0,37	442	48,63	2,50	5,14	43,73	53,53	0,48	701
Papua Barat	43,41	5,39	12,42	32,84	53,98	0,28	114	64,25	4,30	6,70	55,81	72,69	0,44	317	58,58	3,46	5,91	51,80	65,36	0,43	431
Papua	41,44	4,21	10,15	33,19	49,69	0,69	197	61,44	3,42	5,56	54,74	68,14	0,63	535	53,69	2,76	5,14	48,28	59,09	0,74	732
Indonesia	39,35	0,44	1,13	38,48	40,22	2,37	27.202	55,01	0,38	0,69	54,26	55,76	1,97	34.797	47,78	0,30	0,63	47,19	48,36	2,22	61.999

Tabel H.2: *Sampling Error* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	65,62	1,79	2,73	62,10	69,13	0,55	999	26,53	1,65	6,24	23,29	29,78	0,64	1.138	44,20	1,44	3,27	41,37	47,03	0,77	2.137
Sumatera Utara	64,23	1,70	2,65	60,90	67,56	1,43	1.582	37,25	1,47	3,95	34,36	40,14	1,24	1.916	49,54	1,21	2,44	47,16	51,91	1,57	3.498
Sumatera Barat	64,13	1,78	2,77	60,64	67,61	0,78	1.147	30,92	1,49	4,82	27,99	33,84	0,68	1.320	46,21	1,23	2,67	43,79	48,63	0,81	2.467
Riau	62,94	2,48	3,94	58,08	67,79	1,10	532	26,05	2,47	9,49	21,21	30,89	1,19	484	45,30	1,80	3,97	41,78	48,82	1,11	1.016
Jambi	67,02	2,29	3,42	62,53	71,52	0,71	586	28,97	2,44	8,42	24,19	33,75	0,83	529	48,25	1,93	3,99	44,47	52,03	0,94	1.115
Sumatera Selatan	64,50	1,97	3,05	60,65	68,35	1,23	914	29,21	1,84	6,30	25,60	32,82	1,22	915	46,51	1,50	3,23	43,57	49,45	1,43	1.829
Bengkulu	66,29	2,59	3,90	61,22	71,36	0,51	470	35,98	2,63	7,32	30,82	41,14	0,48	471	51,38	2,15	4,18	47,17	55,58	0,66	941
Lampung	69,53	1,66	2,39	66,26	72,79	1,17	1.054	33,59	1,89	5,63	29,89	37,30	1,32	940	52,15	1,45	2,78	49,31	54,99	1,55	1.994
Kep. Bangka Belitung	61,57	2,82	4,59	56,03	67,10	0,42	313	17,22	2,30	13,35	12,71	21,73	0,43	316	39,87	2,19	5,49	35,58	44,16	0,52	629
Kepulauan Riau	48,69	5,01	10,29	38,87	58,51	1,10	272	24,32	4,70	19,32	15,11	33,53	1,30	242	36,45	3,67	10,07	29,26	43,65	1,37	514
DKI Jakarta	44,16	2,71	6,14	38,84	49,47	2,45	414	18,00	2,01	11,14	14,07	21,93	2,43	435	30,44	1,92	6,31	26,68	34,20	3,22	849
Jawa Barat	60,98	1,18	1,93	58,68	63,28	2,80	2.451	25,75	1,04	4,06	23,70	27,79	2,93	2.425	42,65	0,91	2,13	40,87	44,42	3,61	4.876
Jawa Tengah	66,70	0,85	1,28	65,03	68,37	1,62	3.755	38,05	0,89	2,34	36,31	39,79	1,89	3.996	51,29	0,70	1,37	49,91	52,66	2,25	7.751
DI Yogyakarta	63,20	2,55	4,04	58,20	68,21	1,64	583	45,83	2,28	4,97	41,37	50,30	1,45	655	53,69	2,06	3,83	49,66	57,72	2,35	1.238
Jawa Timur	68,97	0,88	1,28	67,25	70,70	2,00	3.896	37,07	0,87	2,34	35,37	38,76	2,07	4.419	51,64	0,71	1,37	50,26	53,03	2,58	8.315
Banten	56,33	2,31	4,10	51,80	60,85	1,82	572	22,10	1,99	9,01	18,20	26,01	1,99	570	38,84	1,65	4,26	35,60	42,08	2,11	1.142
Bali	61,90	1,98	3,20	58,03	65,78	0,89	809	45,06	2,03	4,49	41,09	49,03	0,99	922	52,95	1,66	3,13	49,70	56,21	1,36	1.731
Nusa Tenggara Barat	63,11	2,52	3,99	58,17	68,04	1,31	568	34,38	2,72	7,92	29,05	39,72	1,67	601	48,21	2,08	4,31	44,14	52,29	1,85	1.169
Nusa Tenggara Timur	72,28	1,47	2,04	69,39	75,17	0,54	1.276	43,29	1,68	3,88	40,00	46,59	0,62	1.381	57,04	1,25	2,20	54,59	59,50	0,71	2.657
Kalimantan Barat	61,53	2,08	3,37	57,46	65,59	0,79	779	33,03	2,02	6,10	29,08	36,99	0,77	755	47,33	1,71	3,61	43,98	50,68	1,08	1.534
Kalimantan Tengah	64,97	2,48	3,82	60,10	69,84	0,50	571	36,74	2,49	6,78	31,86	41,62	0,43	489	51,67	2,17	4,20	47,42	55,92	0,70	1.060
Kalimantan Selatan	63,47	2,57	4,05	58,43	68,50	0,91	545	34,40	2,28	6,62	29,93	38,86	0,81	637	48,15	1,77	3,68	44,67	51,62	0,91	1.182
Kalimantan Timur	55,85	2,95	5,28	50,07	61,64	1,04	496	29,17	3,28	11,24	22,74	35,60	1,24	385	43,80	2,45	5,60	38,99	48,61	1,40	881
Sulawesi Utara	61,41	1,88	3,06	57,73	65,08	0,43	914	27,75	1,86	6,69	24,11	31,38	0,55	937	43,59	1,42	3,25	40,81	46,36	0,54	1.851
Sulawesi Tengah	66,61	2,33	3,50	62,04	71,18	0,67	559	31,00	2,55	8,24	25,99	36,01	0,84	533	48,62	1,93	3,97	44,84	52,40	0,88	1.092
Sulawesi Selatan	63,94	1,51	2,37	60,98	66,91	0,88	1.609	25,94	1,30	5,01	23,39	28,48	0,98	1.940	42,58	1,18	2,78	40,26	44,90	1,24	3.549
Sulawesi Tenggara	63,58	2,52	3,97	58,64	68,52	0,54	549	37,52	2,47	6,59	32,68	42,37	0,58	582	49,70	1,98	3,99	45,81	53,59	0,71	1.131
Gorontalo	63,87	3,54	5,54	56,94	70,80	0,54	242	25,89	2,75	10,62	20,50	31,28	0,43	252	43,67	2,49	5,70	38,79	48,55	0,57	494
Sulawesi Barat	71,73	3,16	4,40	65,54	77,92	0,52	239	38,18	3,58	9,36	31,17	45,19	0,60	230	54,39	2,38	4,38	49,72	59,06	0,53	469
Maluku	60,69	3,52	5,80	53,79	67,60	0,77	515	27,14	2,82	10,40	21,60	32,67	0,63	509	43,28	2,55	5,90	38,28	48,29	0,88	1.024
Maluku Utara	65,26	2,99	4,58	59,39	71,12	0,36	371	31,32	3,24	10,35	24,97	37,67	0,43	330	48,63	2,50	5,14	43,73	53,53	0,48	701
Papua Barat	69,68	4,07	5,84	61,71	77,66	0,37	242	43,55	4,14	9,51	35,43	51,66	0,24	189	58,58	3,46	5,91	51,80	65,36	0,43	431
Papua	63,48	3,08	4,85	57,45	69,51	0,54	444	40,16	3,86	9,61	32,59	47,72	0,58	288	53,69	2,76	5,14	48,28	59,09	0,74	732
Indonesia	64,28	0,38	0,59	63,54	65,02	1,80	30.268	33,03	0,36	1,10	32,32	33,74	1,94	31.731	47,78	0,30	0,63	47,19	48,36	2,22	61.999

Tabel I.1: Sampling Error Persentase Lansia Tinggal Sendiri Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	13,58	1,67	12,31	10,30	16,85	0,90	824	14,68	0,88	6,01	12,95	16,41	0,52	2,330	14,40	0,78	5,45	12,86	15,93	0,70	3,154
Sumatera Utara	8,20	0,78	9,51	6,67	9,73	1,68	2,599	14,81	0,76	5,10	13,33	16,29	0,78	3,134	11,64	0,55	4,73	10,56	12,72	1,22	5,733
Sumatera Barat	6,10	0,79	13,00	4,54	7,65	0,83	1,519	10,00	0,71	7,14	8,60	11,40	0,60	2,353	8,62	0,54	6,31	7,55	9,68	0,77	3,872
Riau	5,22	1,13	21,64	3,00	7,43	1,32	550	7,88	0,92	11,70	6,08	9,69	0,77	1,013	6,88	0,72	10,45	5,47	8,29	1,06	1,563
Jambi	4,01	0,88	21,98	2,28	5,74	0,61	487	8,58	0,95	11,08	6,71	10,44	0,62	1,256	7,20	0,72	9,95	5,79	8,60	0,73	1,743
Sumatera Selatan	4,39	0,78	17,80	2,86	5,92	1,32	957	7,66	0,68	8,89	6,32	8,99	0,85	1,942	6,51	0,52	8,05	5,49	7,54	1,12	2,899
Bengkulu	3,41	0,98	28,73	1,49	5,33	0,43	379	9,56	1,09	11,37	7,43	11,69	0,43	989	7,94	0,84	10,58	6,29	9,58	0,52	1,368
Lampung	5,51	0,97	17,55	3,62	7,41	1,26	763	8,03	0,66	8,17	6,75	9,32	1,02	2,218	7,44	0,55	7,41	6,36	8,52	1,26	2,981
Kep. Bangka Belitung	10,47	1,41	13,49	7,70	13,23	0,46	599	10,04	1,68	16,69	6,76	13,32	0,49	398	10,26	1,09	10,64	8,12	12,40	0,53	997
Kepulauan Riau	4,27	0,88	20,51	2,56	5,99	0,48	572	7,55	1,73	22,98	4,15	10,94	0,33	273	5,18	0,82	15,86	3,57	6,80	0,47	845
DKI Jakarta	5,64	0,72	12,76	4,23	7,05	2,86	1,372								5,64	0,72	12,76	4,23	7,05	2,75	1,372
Jawa Barat	10,65	0,57	5,33	9,53	11,76	3,53	4,604	15,66	0,77	4,94	14,14	17,17	2,39	3,104	12,63	0,46	3,66	11,73	13,54	3,21	7,708
Jawa Tengah	10,24	0,46	4,51	9,34	11,15	1,87	5,562	9,89	0,44	4,50	9,02	10,76	1,79	6,037	10,04	0,32	3,21	9,41	10,68	2,03	11,599
DI Yogyakarta	8,88	0,90	10,19	7,10	10,65	1,38	1,068	12,79	2,37	18,56	8,14	17,45	3,93	746	10,54	1,14	10,83	8,31	12,78	3,15	1,814
Jawa Timur	9,22	0,42	4,58	8,39	10,05	1,96	6,389	10,83	0,43	4,00	9,98	11,68	1,76	6,923	10,12	0,31	3,02	9,52	10,72	2,07	13,312
Banten	3,73	0,68	18,33	2,39	5,07	2,31	988	11,57	1,26	10,86	9,11	14,03	1,31	735	6,73	0,64	9,49	5,48	7,98	1,79	1,723
Bali	4,00	0,65	16,22	2,73	5,27	1,17	1,332	7,35	0,89	12,13	5,60	9,10	0,88	1,188	5,60	0,54	9,66	4,54	6,66	1,09	2,520
Nusa Tenggara Barat	12,28	1,34	10,93	9,65	14,91	1,19	868	11,47	1,14	9,91	9,24	13,70	1,01	1,125	11,80	0,87	7,35	10,10	13,50	1,21	1,993
Nusa Tenggara Timur	3,43	1,02	29,73	1,43	5,42	0,98	557	6,35	0,48	7,62	5,40	7,30	0,46	3,702	5,86	0,44	7,49	5,00	6,72	0,62	4,259
Kalimantan Barat	4,83	0,82	16,86	3,24	6,43	0,69	717	6,19	0,72	11,62	4,78	7,60	0,70	1,488	5,76	0,55	9,64	4,67	6,84	0,81	2,205
Kalimantan Tengah	8,88	1,63	18,39	5,68	12,09	0,64	478	10,75	1,25	11,61	8,30	13,20	0,50	1,079	10,15	1,00	9,84	8,19	12,10	0,62	1,557
Kalimantan Selatan	9,44	1,29	13,64	6,91	11,96	0,92	656	14,80	1,14	7,72	12,56	17,04	0,57	1,110	12,66	0,86	6,80	10,97	14,35	0,77	1,766
Kalimantan Timur	6,18	0,95	15,44	4,31	8,05	0,86	826	10,73	2,07	19,31	6,67	14,79	1,28	736	8,03	1,02	12,69	6,03	10,02	1,24	1,562
Sulawesi Utara	5,78	0,82	14,20	4,17	7,39	0,57	1,112	6,53	0,76	11,70	5,03	8,02	0,46	1,758	6,21	0,56	9,05	5,11	7,31	0,56	2,870
Sulawesi Tengah	3,58	1,43	39,94	0,78	6,39	1,25	336	7,64	0,74	9,68	6,19	9,09	0,45	1,412	6,75	0,66	9,75	5,46	8,04	0,64	1,748
Sulawesi Selatan	5,71	0,66	11,49	4,42	6,99	0,91	1,528	8,12	0,52	6,35	7,11	9,13	0,67	4,065	7,35	0,41	5,59	6,55	8,16	0,85	5,593
Sulawesi Tenggara	6,58	1,42	21,53	3,80	9,36	0,56	402	10,40	1,05	10,10	8,34	12,46	0,51	1,279	9,51	0,87	9,14	7,81	11,22	0,62	1,681
Gorontalo	4,54	1,43	31,42	1,74	7,34	0,59	271	5,04	0,89	17,76	3,28	6,79	0,31	555	4,87	0,76	15,72	3,37	6,36	0,44	826
Sulawesi Barat	3,06	0,95	31,22	1,19	4,93	0,28	170	5,43	0,94	17,37	3,58	7,28	0,40	602	4,87	0,75	15,45	3,40	6,35	0,46	772
Maluku	2,60	0,85	32,77	0,93	4,27	0,56	402	5,58	0,95	17,06	3,71	7,45	0,43	1,115	4,46	0,67	15,12	3,14	5,79	0,54	1,517
Maluku Utara	4,34	1,42	32,75	1,55	7,12	0,37	236	4,30	0,86	20,09	2,61	6,00	0,30	763	4,31	0,74	17,13	2,86	5,76	0,37	999
Papua Barat	1,41	0,68	48,56	0,07	2,74	0,14	274	5,66	1,22	21,47	3,28	8,05	0,20	446	4,37	0,86	19,74	2,68	6,06	0,23	720
Papua	4,88	1,69	34,61	1,57	8,20	0,90	278	6,39	1,03	16,13	4,37	8,41	0,31	758	5,80	0,91	15,71	4,01	7,58	0,54	1,036
Indonesia	8,51	0,19	2,26	8,14	8,89	2,12	39.675	10,65	0,19	1,75	10,28	11,01	1,88	56.632	9,66	0,13	1,39	9,40	9,92	1,98	96.307

Tabel I.2: *Sampling Error* Persentase Lansia Tinggal Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	4,07	0,63	15,45	2,84	5,31	0,59	1.452	22,88	1,22	5,32	20,49	25,27	0,59	1.702	14,40	0,78	5,45	12,86	15,93	0,70	3.154
Sumatera Utara	5,05	0,57	11,20	3,94	6,16	1,15	2.603	16,95	0,81	4,78	15,36	18,53	0,98	3.130	11,64	0,55	4,73	10,56	12,72	1,22	5.733
Sumatera Barat	2,67	0,42	15,75	1,84	3,49	0,57	1.754	13,35	0,86	6,42	11,67	15,03	0,67	2.118	8,62	0,54	6,31	7,55	9,68	0,77	3.872
Riau	3,35	0,67	20,01	2,04	4,66	0,84	780	10,44	1,18	11,31	8,13	12,76	0,89	783	6,88	0,72	10,45	5,47	8,29	1,06	1.563
Jambi	3,89	0,72	18,50	2,48	5,30	0,61	883	10,50	1,14	10,89	8,26	12,74	0,61	860	7,20	0,72	9,95	5,79	8,60	0,73	1.743
Sumatera Selatan	3,33	0,52	15,62	2,31	4,35	0,93	1.417	9,44	0,84	8,91	7,79	11,09	0,98	1.482	6,51	0,52	8,05	5,49	7,54	1,12	2.899
Bengkulu	3,12	0,78	25,03	1,59	4,65	0,49	677	12,66	1,47	11,60	9,78	15,53	0,48	691	7,94	0,84	10,58	6,29	9,58	0,52	1.368
Lampung	3,80	0,52	13,75	2,78	4,82	0,99	1.543	11,14	0,93	8,37	9,31	12,96	1,14	1.438	7,44	0,55	7,41	6,36	8,52	1,26	2.981
Kep. Bangka Belitung	5,84	1,10	18,77	3,69	7,98	0,40	502	14,52	1,79	12,31	11,01	18,02	0,49	495	10,26	1,09	10,64	8,12	12,40	0,53	997
Kepulauan Riau	2,76	0,73	26,25	1,34	4,18	0,32	446	7,70	1,42	18,46	4,91	10,49	0,44	399	5,18	0,82	15,86	3,57	6,80	0,47	845
DKI Jakarta	5,07	0,95	18,73	3,21	6,93	2,37	675	6,17	1,01	16,42	4,18	8,16	2,38	697	5,64	0,72	12,76	4,23	7,05	2,75	1.372
Jawa Barat	3,90	0,34	8,66	3,24	4,56	2,24	3.848	20,71	0,76	3,68	19,22	22,21	2,80	3.860	12,63	0,46	3,66	11,73	13,54	3,21	7.708
Jawa Tengah	3,91	0,28	7,26	3,35	4,47	1,62	5.420	15,29	0,52	3,38	14,28	16,31	1,81	6.179	10,04	0,32	3,21	9,41	10,68	2,03	11.599
DI Yogyakarta	6,03	2,10	34,81	1,92	10,15	7,32	831	14,18	1,25	8,81	11,74	16,63	1,48	983	10,54	1,14	10,83	8,31	12,78	3,15	1.814
Jawa Timur	4,21	0,28	6,75	3,65	4,76	1,68	6.020	14,99	0,48	3,23	14,04	15,94	1,86	7.292	10,12	0,31	3,02	9,52	10,72	2,07	13.312
Banten	3,09	0,68	22,04	1,76	4,43	1,92	859	10,17	1,03	10,12	8,16	12,19	1,51	864	6,73	0,64	9,49	5,48	7,98	1,79	1.723
Bali	3,26	0,52	16,01	2,24	4,29	0,74	1.212	7,65	0,81	10,58	6,06	9,23	0,89	1.308	5,60	0,54	9,66	4,54	6,66	1,09	2.520
Nusa Tenggara Barat	4,91	0,83	16,94	3,28	6,54	1,08	902	17,95	1,39	7,72	15,24	20,67	1,06	1.091	11,80	0,87	7,35	10,10	13,50	1,21	1.993
Nusa Tenggara Timur	3,05	0,44	14,29	2,19	3,90	0,50	2.030	8,41	0,72	8,53	7,00	9,82	0,57	2.229	5,86	0,44	7,49	5,00	6,72	0,62	4.259
Kalimantan Barat	2,99	0,53	17,72	1,95	4,03	0,64	1.140	8,54	0,98	11,49	6,62	10,46	0,81	1.065	5,76	0,55	9,64	4,67	6,84	0,81	2.205
Kalimantan Tengah	5,74	0,92	16,08	3,93	7,55	0,43	825	14,78	1,73	11,73	11,38	18,18	0,61	732	10,15	1,00	9,84	8,19	12,10	0,62	1.557
Kalimantan Selatan	5,09	0,86	16,90	3,40	6,77	0,74	779	19,03	1,34	7,06	16,39	21,66	0,67	987	12,66	0,86	6,80	10,97	14,35	0,77	1.766
Kalimantan Timur	6,10	1,05	17,28	4,03	8,16	0,85	875	10,25	1,70	16,62	6,91	13,59	1,18	687	8,03	1,02	12,69	6,03	10,02	1,24	1.562
Sulawesi Utara	3,70	0,61	16,38	2,51	4,89	0,46	1.354	8,41	0,87	10,38	6,70	10,12	0,50	1.516	6,21	0,56	9,05	5,11	7,31	0,56	2.870
Sulawesi Tengah	4,51	0,75	16,62	3,04	5,98	0,56	877	8,98	1,05	11,69	6,92	11,03	0,58	871	6,75	0,66	9,75	5,46	8,04	0,64	1.748
Sulawesi Selatan	3,86	0,45	11,53	2,99	4,73	0,74	2.488	10,03	0,60	5,96	8,86	11,20	0,71	3.105	7,35	0,41	5,59	6,55	8,16	0,85	5.593
Sulawesi Tenggara	4,08	0,80	19,59	2,51	5,65	0,50	779	14,33	1,40	9,80	11,58	17,08	0,55	902	9,51	0,87	9,14	7,81	11,22	0,62	1.681
Gorontalo	1,48	0,69	46,99	0,12	2,83	0,49	382	7,74	1,29	16,69	5,21	10,27	0,41	444	4,87	0,76	15,72	3,37	6,36	0,44	826
Sulawesi Barat	2,59	0,88	33,88	0,87	4,31	0,50	342	6,88	1,14	16,51	4,66	9,11	0,37	430	4,87	0,75	15,45	3,40	6,35	0,46	772
Maluku	4,72	1,14	24,28	2,47	6,96	0,65	730	4,23	0,72	16,92	2,83	5,63	0,30	787	4,46	0,67	15,12	3,14	5,79	0,54	1.517
Maluku Utara	2,79	0,82	29,41	1,18	4,39	0,33	517	5,87	1,18	20,12	3,55	8,18	0,32	482	4,31	0,74	17,13	2,86	5,76	0,37	999
Papua Barat	3,72	1,01	27,04	1,75	5,70	0,19	419	5,17	1,37	26,49	2,49	7,86	0,21	301	4,37	0,86	19,74	2,68	6,06	0,23	720
Papua	5,09	0,97	18,98	3,20	6,99	0,37	630	6,73	1,65	24,53	3,49	9,97	0,61	406	5,80	0,91	15,71	4,01	7,58	0,54	1.036
Indonesia	4,04	0,12	3,09	3,80	4,28	1,81	45.991	14,60	0,21	1,47	14,18	15,02	1,88	50.316	9,66	0,13	1,39	9,40	9,92	1,98	96.307

Tabel J.1: Sampling Error Persentase Lansia Bepergian Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	8,94	1,37	15,37	6,25	11,64	0,88	824	5,70	0,70	12,22	4,33	7,06	0,75	2,330	6,54	0,62	9,56	5,31	7,76	0,90	3,154
Sumatera Utara	10,11	0,98	9,69	8,19	12,03	2,19	2,599	8,96	0,77	8,56	7,45	10,46	1,25	3,134	9,51	0,62	6,47	8,30	10,71	1,83	5,733
Sumatera Barat	16,61	1,61	9,68	13,46	19,76	1,42	1,519	7,93	0,76	9,62	6,43	9,42	0,85	2,353	11,01	0,76	6,88	9,52	12,49	1,21	3,872
Riau	14,23	2,18	15,30	9,97	18,50	2,00	550	5,60	0,90	16,04	3,84	7,37	1,00	1,013	8,85	0,99	11,23	6,90	10,80	1,60	1,563
Jambi	11,59	2,07	17,86	7,53	15,65	1,26	487	4,70	0,85	18,15	3,03	6,37	0,87	1,256	6,79	0,87	12,89	5,07	8,50	1,15	1,743
Sumatera Selatan	6,56	1,13	17,17	4,35	8,76	1,88	957	5,23	0,63	11,98	4,00	6,46	1,03	1,942	5,70	0,56	9,90	4,59	6,80	1,47	2,899
Bengkulu	15,82	2,89	18,24	10,16	21,48	0,92	379	8,49	1,21	14,21	6,12	10,85	0,59	989	10,42	1,17	11,22	8,13	12,71	0,78	1,368
Lampung	5,65	1,12	19,77	3,46	7,85	1,64	763	5,40	0,60	11,04	4,24	6,57	1,22	2,218	5,46	0,53	9,64	4,43	6,50	1,53	2,981
Kep. Bangka Belitung	8,75	1,65	18,88	5,51	12,00	0,75	599	6,77	1,75	25,89	3,33	10,20	0,77	398	7,79	1,21	15,49	5,42	10,15	0,83	997
Kepulauan Riau	8,99	2,10	23,33	4,88	13,11	1,39	572	6,17	2,39	38,71	1,49	10,85	0,75	273	8,21	1,65	20,16	4,96	11,45	1,24	845
DKI Jakarta	19,55	1,75	8,95	16,13	22,98	5,73	1,372								19,55	1,75	8,95	16,13	22,98	5,49	1,372
Jawa Barat	7,40	0,54	7,25	6,35	8,45	4,38	4,604	4,29	0,43	10,02	3,45	5,13	2,38	3,104	6,17	0,37	5,94	5,45	6,88	3,84	7,708
Jawa Tengah	9,88	0,55	5,57	8,80	10,96	2,73	5,562	5,53	0,40	7,25	4,74	6,31	2,47	6,037	7,42	0,33	4,44	6,77	8,07	2,80	11,599
DI Yogyakarta	12,62	1,52	12,03	9,65	15,60	2,85	1,068	4,35	1,06	24,44	2,26	6,43	2,11	746	9,10	1,00	11,01	7,14	11,06	2,76	1,814
Jawa Timur	11,08	0,61	5,50	9,89	12,28	3,48	6,389	3,98	0,30	7,55	3,39	4,57	2,14	6,923	7,10	0,32	4,49	6,47	7,72	3,11	13,312
Banten	7,84	1,20	15,29	5,49	10,19	3,52	988	3,05	1,12	36,88	0,85	5,25	3,62	735	6,01	0,85	14,20	4,33	7,68	3,54	1,723
Bali	10,55	1,35	12,80	7,90	13,20	2,07	1,332	7,17	1,10	15,33	5,02	9,33	1,37	1,188	8,94	0,88	9,86	7,21	10,66	1,88	2,520
Nusa Tenggara Barat	5,26	0,97	18,36	3,37	7,15	1,34	868	1,98	0,51	25,99	0,97	2,99	1,09	1,125	3,32	0,50	14,99	2,34	4,29	1,29	1,993
Nusa Tenggara Timur	7,85	1,51	19,24	4,89	10,81	0,98	557	3,83	0,41	10,76	3,02	4,64	0,54	3,702	4,51	0,43	9,48	3,67	5,35	0,75	4,259
Kalimantan Barat	6,52	1,28	19,70	4,00	9,04	1,30	717	2,55	0,43	16,90	1,71	3,40	0,58	1,488	3,82	0,51	13,37	2,82	4,83	1,02	2,205
Kalimantan Tengah	12,80	1,87	14,63	9,13	16,46	0,61	478	6,41	0,98	15,30	4,49	8,33	0,50	1,079	8,48	0,90	10,62	6,72	10,25	0,60	1,557
Kalimantan Selatan	12,31	1,59	12,89	9,20	15,42	1,11	656	10,79	1,33	12,37	8,17	13,40	1,02	1,110	11,40	1,02	8,95	9,40	13,40	1,18	1,766
Kalimantan Timur	8,14	1,26	15,49	5,67	10,61	1,16	826	4,07	1,06	25,94	2,00	6,15	0,82	736	6,49	0,86	13,23	4,81	8,17	1,07	1,562
Sulawesi Utara	5,17	0,88	17,13	3,43	6,90	0,73	1,112	7,10	0,93	13,11	5,28	8,93	0,63	1,758	6,28	0,66	10,47	4,99	7,57	0,76	2,870
Sulawesi Tengah	10,71	2,02	18,89	6,75	14,68	0,91	336	8,01	0,91	11,33	6,23	9,79	0,65	1,412	8,60	0,83	9,63	6,98	10,23	0,81	1,748
Sulawesi Selatan	10,56	1,01	9,58	8,58	12,55	1,23	1,528	5,73	0,49	8,49	4,78	6,69	0,83	4,065	7,27	0,46	6,33	6,37	8,17	1,08	5,593
Sulawesi Tenggara	13,31	2,10	15,76	9,20	17,43	0,65	402	7,59	0,98	12,92	5,67	9,51	0,60	1,279	8,92	0,90	10,10	7,15	10,68	0,70	1,681
Gorontalo	7,54	2,32	30,72	3,00	12,09	0,96	271	9,77	1,71	17,49	6,42	13,12	0,61	555	9,01	1,38	15,28	6,31	11,71	0,81	826
Sulawesi Barat	11,19	3,62	32,34	4,10	18,29	1,21	170	8,00	1,53	19,18	4,99	11,00	0,73	602	8,75	1,45	16,62	5,90	11,60	0,99	772
Maluku	4,13	1,10	26,63	1,97	6,28	0,60	402	7,60	1,47	19,32	4,72	10,48	0,78	1,115	6,30	1,02	16,12	4,31	8,29	0,88	1,517
Maluku Utara	3,89	2,17	55,77	-0,36	8,15	0,96	236	1,98	0,60	30,21	0,81	3,15	0,31	763	2,47	0,72	29,28	1,05	3,90	0,61	999
Papua Barat	8,84	2,05	23,14	4,83	12,85	0,22	274	7,50	2,12	28,30	3,34	11,66	0,48	446	7,91	1,60	20,29	4,76	11,05	0,46	720
Papua	4,59	1,50	32,74	1,64	7,53	0,76	278	2,70	0,68	25,17	1,37	4,03	0,31	758	3,44	0,72	21,04	2,02	4,86	0,57	1,036
Indonesia	10,07	0,25	2,52	9,57	10,57	3,18	39.675	5,20	0,14	2,69	4,93	5,48	2,06	56.632	7,46	0,14	1,88	7,18	7,73	2,75	96.307

Tabel J.2: Sampling Error Persentase Lansia Bepergian Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	5,62	0,69	12,24	4,27	6,96	0,52	1.452	7,30	0,81	11,10	5,71	8,88	0,68	1.702	6,54	0,62	9,56	5,31	7,76	0,90	3.154
Sumatera Utara	9,55	0,78	8,20	8,02	11,09	1,22	2.603	9,47	0,70	7,38	8,10	10,84	1,20	3.130	9,51	0,62	6,47	8,30	10,71	1,83	5.733
Sumatera Barat	9,41	0,85	8,99	7,76	11,07	0,71	1.754	12,28	0,98	7,97	10,36	14,19	0,93	2.118	11,01	0,76	6,88	9,52	12,49	1,21	3.872
Riau	9,65	1,34	13,92	7,01	12,28	1,26	780	8,05	1,17	14,49	5,76	10,33	1,10	783	8,85	0,99	11,23	6,90	10,80	1,60	1.563
Jambi	8,24	1,10	13,35	6,08	10,40	0,71	883	5,33	0,94	17,57	3,50	7,17	0,76	860	6,79	0,87	12,89	5,07	8,50	1,15	1.743
Sumatera Selatan	6,49	0,72	11,03	5,09	7,89	0,93	1.417	4,96	0,69	13,81	3,62	6,31	1,19	1.482	5,70	0,56	9,90	4,59	6,80	1,47	2.899
Bengkulu	12,44	1,50	12,07	9,50	15,38	0,51	677	8,45	1,31	15,52	5,88	11,02	0,55	691	10,42	1,17	11,22	8,13	12,71	0,78	1.368
Lampung	7,16	0,78	10,88	5,63	8,68	1,21	1.543	3,74	0,59	15,76	2,59	4,90	1,26	1.438	5,46	0,53	9,64	4,43	6,50	1,53	2.981
Kep. Bangka Belitung	7,66	1,42	18,51	4,88	10,44	0,53	502	7,91	1,51	19,10	4,95	10,87	0,60	495	7,79	1,21	15,49	5,42	10,15	0,83	997
Kepulauan Riau	9,26	2,80	30,23	3,77	14,75	1,51	446	7,11	1,91	26,92	3,36	10,86	0,86	399	8,21	1,65	20,16	4,96	11,45	1,24	845
DKI Jakarta	21,75	2,22	10,19	17,41	26,10	3,65	675	17,50	1,86	10,62	13,86	21,14	3,20	697	19,55	1,75	8,95	16,13	22,98	5,49	1.372
Jawa Barat	6,97	0,49	6,97	6,02	7,93	2,69	3.848	5,42	0,43	7,97	4,57	6,27	2,88	3.860	6,17	0,37	5,94	5,45	6,88	3,84	7.708
Jawa Tengah	8,34	0,44	5,23	7,48	9,19	1,88	5.420	6,63	0,36	5,45	5,92	7,34	1,85	6.179	7,42	0,33	4,44	6,77	8,07	2,80	11.599
DI Yogyakarta	9,94	1,16	11,68	7,66	12,22	1,42	831	8,42	1,14	13,50	6,19	10,65	1,94	983	9,10	1,00	11,01	7,14	11,06	2,76	1.814
Jawa Timur	8,38	0,43	5,18	7,53	9,23	2,06	6.020	6,04	0,34	5,58	5,38	6,70	2,03	7.292	7,10	0,32	4,49	6,47	7,72	3,11	13.312
Banten	5,90	1,00	16,99	3,94	7,87	2,24	859	6,10	1,13	18,48	3,89	8,31	2,88	864	6,01	0,85	14,20	4,33	7,68	3,54	1.723
Bali	9,45	1,02	10,84	7,44	11,45	1,05	1.212	8,49	1,01	11,95	6,50	10,47	1,28	1.308	8,94	0,88	9,86	7,21	10,66	1,88	2.520
Nusa Tenggara Barat	4,23	0,77	18,19	2,72	5,74	1,07	902	2,51	0,44	17,66	1,64	3,37	0,65	1.091	3,32	0,50	14,99	2,34	4,29	1,29	1.993
Nusa Tenggara Timur	5,22	0,61	11,72	4,02	6,42	0,59	2.030	3,87	0,48	12,41	2,93	4,81	0,53	2.229	4,51	0,43	9,48	3,67	5,35	0,75	4.259
Kalimantan Barat	4,20	0,66	15,81	2,90	5,50	0,73	1.140	3,45	0,65	18,89	2,17	4,73	0,84	1.065	3,82	0,51	13,37	2,82	4,83	1,02	2.205
Kalimantan Tengah	10,44	1,24	11,92	8,01	12,88	0,45	825	6,42	1,07	16,66	4,32	8,51	0,49	732	8,48	0,90	10,62	6,72	10,25	0,60	1.557
Kalimantan Selatan	12,37	1,36	11,04	9,69	15,04	0,83	779	10,58	1,26	11,89	8,11	13,04	0,95	987	11,40	1,02	8,95	9,40	13,40	1,18	1.766
Kalimantan Timur	7,17	1,10	15,39	5,01	9,34	0,80	875	5,70	1,13	19,88	3,48	7,92	0,90	687	6,49	0,86	13,23	4,81	8,17	1,07	1.562
Sulawesi Utara	6,26	0,77	12,25	4,76	7,76	0,45	1.354	6,29	0,79	12,50	4,75	7,84	0,53	1.516	6,28	0,66	10,47	4,99	7,57	0,76	2.870
Sulawesi Tengah	10,32	1,17	11,37	8,02	12,62	0,64	877	6,90	0,94	13,67	5,05	8,75	0,59	871	8,60	0,83	9,63	6,98	10,23	0,81	1.748
Sulawesi Selatan	7,98	0,67	8,36	6,67	9,29	0,84	2.488	6,72	0,52	7,68	5,71	7,73	0,76	3.105	7,27	0,46	6,33	6,37	8,17	1,08	5.593
Sulawesi Tenggara	10,35	1,21	11,73	7,97	12,73	0,49	779	7,65	1,07	14,02	5,55	9,75	0,56	902	8,92	0,90	10,10	7,15	10,68	0,70	1.681
Gorontalo	11,90	2,17	18,20	7,66	16,15	0,67	382	6,56	1,23	18,81	4,14	8,97	0,43	444	9,01	1,38	15,28	6,31	11,71	0,81	826
Sulawesi Barat	11,13	1,91	17,11	7,40	14,87	0,60	342	6,65	1,58	23,78	3,55	9,74	0,73	430	8,75	1,45	16,62	5,90	11,60	0,99	772
Maluku	8,43	1,42	16,89	5,64	11,22	0,59	730	4,32	0,89	20,59	2,58	6,07	0,46	787	6,30	1,02	16,12	4,31	8,29	0,88	1.517
Maluku Utara	3,11	1,23	39,53	0,70	5,52	0,66	517	1,83	0,71	38,70	0,44	3,21	0,36	482	2,47	0,72	29,28	1,05	3,90	0,61	999
Papua Barat	9,05	1,85	20,46	5,42	12,67	0,28	419	6,49	1,94	29,86	2,69	10,30	0,33	301	7,91	1,60	20,29	4,76	11,05	0,46	720
Papua	4,58	1,02	22,19	2,59	6,57	0,45	630	1,93	0,90	46,47	0,17	3,68	0,60	406	3,44	0,72	21,04	2,02	4,86	0,57	1.036
Indonesia	8,33	0,18	2,20	7,97	8,69	1,98	45.991	6,69	0,16	2,34	6,38	6,99	2,01	50.316	7,46	0,14	1,88	7,18	7,73	2,75	96.307

Tabel K.1: Sampling Error Persentase Lansia Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	0,92	0,39	42,74	0,15	1,68	0,64	824	0,94	0,22	23,33	0,51	1,37	0,43	2.330	0,93	0,19	20,51	0,56	1,31	0,56	3.154
Sumatera Utara	1,38	0,39	28,28	0,61	2,14	2,32	2.599	1,08	0,24	22,19	0,61	1,55	0,93	3.134	1,22	0,22	18,38	0,78	1,66	1,73	5.733
Sumatera Barat	2,01	0,69	34,52	0,65	3,36	1,86	1.519	1,50	0,31	20,88	0,89	2,12	0,71	2.353	1,68	0,32	18,95	1,06	2,31	1,26	3.872
Riau	1,58	0,63	40,23	0,33	2,82	1,33	550	1,78	0,51	28,62	0,78	2,78	0,97	1.013	1,70	0,40	23,34	0,92	2,48	1,24	1.563
Jambi	0,73	0,41	56,09	-0,07	1,53	0,70	487	0,75	0,29	39,06	0,17	1,32	0,61	1.256	0,74	0,24	32,11	0,27	1,21	0,73	1.743
Sumatera Selatan	1,54	0,47	30,60	0,61	2,46	1,33	957	0,85	0,22	26,42	0,41	1,29	0,78	1.942	1,09	0,22	20,10	0,66	1,52	1,11	2.899
Bengkulu	2,07	0,96	46,22	0,19	3,94	0,67	379	2,52	0,56	22,26	1,42	3,63	0,41	989	2,40	0,48	20,15	1,45	3,35	0,54	1.368
Lampung	1,77	0,56	31,76	0,67	2,88	1,28	763	1,63	0,38	23,32	0,88	2,37	1,58	2.218	1,66	0,32	19,20	1,04	2,29	1,78	2.981
Kep. Bangka Belitung	1,24	0,64	51,54	-0,01	2,50	0,73	599	0,59	0,35	60,46	-0,11	1,28	0,34	398	0,92	0,37	40,35	0,19	1,65	0,62	997
Kepulauan Riau	0,40	0,23	57,95	-0,05	0,86	0,35	572	0,85	0,68	80,22	-0,49	2,18	0,42	273	0,53	0,26	48,74	0,02	1,03	0,43	845
DKI Jakarta	1,27	0,37	29,53	0,53	2,00	3,30	1.372								1,27	0,37	29,53	0,53	2,00	3,17	1.372
Jawa Barat	1,47	0,24	16,01	1,01	1,94	4,00	4.604	1,39	0,28	20,12	0,84	1,93	3,00	3.104	1,44	0,18	12,53	1,09	1,79	3,80	7.708
Jawa Tengah	1,60	0,22	13,59	1,17	2,02	2,40	5.562	0,87	0,13	15,46	0,60	1,13	1,68	6.037	1,18	0,12	10,23	0,95	1,42	2,22	11.599
DI Yogyakarta	1,30	0,36	27,43	0,60	2,01	1,36	1.068	0,57	0,26	45,59	0,06	1,09	0,93	746	0,99	0,23	23,57	0,53	1,45	1,27	1.814
Jawa Timur	1,41	0,20	14,16	1,02	1,81	2,65	6.389	0,62	0,10	16,64	0,42	0,82	1,56	6.923	0,97	0,11	10,89	0,76	1,17	2,33	13.312
Banten	1,11	0,46	41,13	0,22	2,01	3,36	988	0,93	0,34	36,61	0,26	1,60	1,07	735	1,04	0,31	29,82	0,43	1,65	2,58	1.723
Bali	0,13	0,08	57,85	-0,02	0,28	0,48	1.332	0,55	0,23	42,08	0,10	1,01	0,74	1.188	0,33	0,12	35,43	0,10	0,56	0,82	2.520
Nusa Tenggara Barat	2,33	0,59	25,43	1,17	3,49	1,10	868	2,28	0,52	22,56	1,27	3,29	0,95	1.125	2,30	0,39	16,90	1,54	3,07	1,13	1.993
Nusa Tenggara Timur	1,48	0,53	35,56	0,45	2,52	0,59	557	2,37	0,32	13,68	1,74	3,01	0,54	3.702	2,22	0,28	12,81	1,67	2,78	0,66	4.259
Kalimantan Barat	1,98	0,89	45,07	0,23	3,74	1,97	717	0,60	0,22	35,65	0,18	1,03	0,60	1.488	1,05	0,32	30,96	0,41	1,68	1,45	2.205
Kalimantan Tengah	2,74	0,89	32,56	0,99	4,49	0,58	478	0,77	0,34	44,19	0,10	1,44	0,47	1.079	1,41	0,37	26,22	0,69	2,13	0,56	1.557
Kalimantan Selatan	0,09	0,06	72,73	-0,04	0,21	0,22	656	0,91	0,38	42,17	0,16	1,67	0,90	1.110	0,58	0,23	40,25	0,12	1,04	1,09	1.766
Kalimantan Timur	0,85	0,38	45,16	0,10	1,60	0,95	826	0,66	0,37	56,06	-0,07	1,39	0,60	736	0,77	0,27	35,35	0,24	1,31	0,86	1.562
Sulawesi Utara	1,86	0,65	34,90	0,59	3,14	1,06	1.112	0,90	0,30	33,51	0,31	1,50	0,49	1.758	1,31	0,33	24,96	0,67	1,96	0,86	2.870
Sulawesi Tengah	2,29	0,84	36,90	0,63	3,94	0,67	336	2,43	0,57	23,36	1,32	3,54	0,79	1.412	2,40	0,48	20,03	1,46	3,34	0,91	1.748
Sulawesi Selatan	1,91	0,50	26,02	0,94	2,89	1,50	1.528	0,83	0,18	21,31	0,48	1,17	0,71	4.065	1,17	0,20	17,14	0,78	1,56	1,19	5.593
Sulawesi Tenggara	1,99	0,73	36,56	0,56	3,42	0,46	402	1,57	0,40	25,58	0,78	2,36	0,45	1.279	1,67	0,35	21,09	0,98	2,36	0,53	1.681
Gorontalo	2,46	0,98	39,91	0,53	4,38	0,50	271	3,27	1,07	32,76	1,17	5,36	0,67	555	2,99	0,78	26,06	1,46	4,51	0,73	826
Sulawesi Barat	1,64	0,91	55,68	-0,15	3,42	0,47	170	1,67	0,65	39,10	0,39	2,95	0,60	602	1,66	0,54	32,69	0,60	2,73	0,68	772
Maluku	1,31	0,98	74,85	-0,61	3,23	1,46	402	0,29	0,21	71,72	-0,12	0,71	0,38	1.115	0,67	0,39	58,19	-0,09	1,44	1,16	1.517
Maluku Utara	0,24	0,24	101,00	-0,23	0,71	0,18	236	0,65	0,43	65,66	-0,19	1,49	0,47	763	0,54	0,32	59,36	-0,09	1,18	0,54	999
Papua Barat	2,79	1,17	42,06	0,49	5,10	0,21	274	0,85	0,49	57,94	-0,11	1,80	0,21	446	1,44	0,50	34,53	0,46	2,41	0,23	720
Papua	1,69	0,77	45,64	0,18	3,20	0,52	278	1,74	0,97	55,97	-0,17	3,64	0,97	758	1,72	0,66	38,62	0,42	3,02	0,93	1.036
Indonesia	1,44	0,09	6,17	1,27	1,62	2,48	39.675	1,06	0,06	5,66	0,94	1,17	1,77	56.632	1,23	0,05	4,23	1,13	1,34	2,15	96.307

Tabel K.2: Sampling Error Persentase Lansia Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	1,18	0,30	25,48	0,59	1,77	0,46	1.452	0,73	0,24	32,76	0,26	1,19	0,55	1.702	0,93	0,19	20,51	0,56	1,31	0,56	3.154
Sumatera Utara	1,49	0,42	27,97	0,68	2,31	2,04	2.603	1,00	0,23	22,80	0,55	1,45	1,11	3.130	1,22	0,22	18,38	0,78	1,66	1,73	5.733
Sumatera Barat	2,04	0,47	22,81	1,13	2,95	0,91	1.754	1,40	0,31	22,02	0,79	2,00	0,72	2.118	1,68	0,32	18,95	1,06	2,31	1,26	3.872
Riau	2,24	0,63	28,22	1,00	3,48	1,11	780	1,16	0,41	35,90	0,34	1,97	0,90	783	1,70	0,40	23,34	0,92	2,48	1,24	1.563
Jambi	0,70	0,31	44,01	0,10	1,30	0,60	883	0,79	0,31	38,80	0,19	1,39	0,52	860	0,74	0,24	32,11	0,27	1,21	0,73	1.743
Sumatera Selatan	1,43	0,32	22,58	0,80	2,07	0,82	1.417	0,78	0,28	35,86	0,23	1,32	1,20	1.482	1,09	0,22	20,10	0,66	1,52	1,11	2.899
Bengkulu	3,67	0,87	23,70	1,97	5,38	0,53	677	1,16	0,38	32,30	0,43	1,90	0,30	691	2,40	0,48	20,15	1,45	3,35	0,54	1.368
Lampung	2,23	0,51	23,04	1,22	3,23	1,61	1.543	1,09	0,35	32,07	0,40	1,77	1,47	1.438	1,66	0,32	19,20	1,04	2,29	1,78	2.981
Kep. Bangka Belitung	1,30	0,60	46,42	0,12	2,48	0,52	502	0,56	0,37	65,00	-0,15	1,28	0,45	495	0,92	0,37	40,35	0,19	1,65	0,62	997
Kepulauan Riau	1,03	0,50	48,74	0,05	2,02	0,40	446	0,00							0,53	0,26	48,74	0,02	1,03	0,43	845
DKI Jakarta	1,81	0,70	38,53	0,44	3,17	3,45	675	0,77	0,33	43,57	0,11	1,42	1,97	697	1,27	0,37	29,53	0,53	2,00	3,17	1.372
Jawa Barat	1,89	0,26	13,93	1,38	2,41	2,76	3.848	1,02	0,21	20,44	0,61	1,43	3,40	3.860	1,44	0,18	12,53	1,09	1,79	3,80	7.708
Jawa Tengah	1,38	0,20	14,14	1,00	1,76	2,12	5.420	1,01	0,14	13,75	0,74	1,29	1,69	6.179	1,18	0,12	10,23	0,95	1,42	2,22	11.599
DI Yogyakarta	1,22	0,39	31,74	0,46	1,97	1,17	831	0,81	0,30	36,33	0,23	1,39	1,25	983	0,99	0,23	23,57	0,53	1,45	1,27	1.814
Jawa Timur	1,33	0,17	12,57	1,00	1,66	1,79	6.020	0,67	0,12	18,45	0,43	0,91	2,31	7.292	0,97	0,11	10,89	0,76	1,17	2,33	13.312
Banten	1,44	0,42	29,19	0,62	2,27	1,55	859	0,66	0,38	57,16	-0,08	1,40	2,83	864	1,04	0,31	29,82	0,43	1,65	2,58	1.723
Bali	0,55	0,22	40,24	0,12	0,98	0,76	1.212	0,14	0,10	70,16	-0,05	0,34	0,68	1.308	0,33	0,12	35,43	0,10	0,56	0,82	2.520
Nusa Tenggara Barat	3,09	0,68	21,96	1,76	4,42	1,13	902	1,60	0,43	26,92	0,76	2,45	0,96	1.091	2,30	0,39	16,90	1,54	3,07	1,13	1.993
Nusa Tenggara Timur	3,26	0,49	15,17	2,29	4,23	0,60	2.030	1,28	0,27	21,24	0,75	1,82	0,50	2.229	2,22	0,28	12,81	1,67	2,78	0,66	4.259
Kalimantan Barat	1,34	0,46	34,16	0,44	2,24	1,05	1.140	0,75	0,32	42,05	0,13	1,37	0,88	1.065	1,05	0,32	30,96	0,41	1,68	1,45	2.205
Kalimantan Tengah	1,98	0,64	32,17	0,73	3,24	0,57	825	0,81	0,36	44,57	0,10	1,51	0,41	732	1,41	0,37	26,22	0,69	2,13	0,56	1.557
Kalimantan Selatan	0,70	0,32	46,44	0,06	1,33	0,73	779	0,49	0,28	56,67	-0,05	1,02	0,89	987	0,58	0,23	40,25	0,12	1,04	1,09	1.766
Kalimantan Timur	1,12	0,40	35,37	0,34	1,89	0,62	875	0,37	0,37	99,65	-0,36	1,11	1,40	687	0,77	0,27	35,35	0,24	1,31	0,86	1.562
Sulawesi Utara	2,27	0,63	27,70	1,04	3,51	0,80	1.354	0,47	0,21	43,71	0,07	0,87	0,46	1.516	1,31	0,33	24,96	0,67	1,96	0,86	2.870
Sulawesi Tengah	3,34	0,77	23,13	1,83	4,85	0,79	877	1,47	0,43	29,18	0,63	2,30	0,54	871	2,40	0,48	20,03	1,46	3,34	0,91	1.748
Sulawesi Selatan	1,66	0,35	21,17	0,97	2,35	1,05	2.488	0,79	0,19	23,89	0,42	1,16	0,81	3.105	1,17	0,20	17,14	0,78	1,56	1,19	5.593
Sulawesi Tenggara	2,92	0,66	22,69	1,62	4,22	0,47	779	0,57	0,29	51,72	-0,01	1,14	0,52	902	1,67	0,35	21,09	0,98	2,36	0,53	1.681
Gorontalo	4,34	1,23	28,20	1,94	6,75	0,54	382	1,84	0,75	40,76	0,37	3,31	0,54	444	2,99	0,78	26,06	1,46	4,51	0,73	826
Sulawesi Barat	2,04	0,96	47,23	0,15	3,92	0,75	342	1,33	0,57	42,75	0,22	2,45	0,45	430	1,66	0,54	32,69	0,60	2,73	0,68	772
Maluku	0,87	0,50	57,50	-0,11	1,85	0,65	730	0,49	0,36	73,34	-0,22	1,20	0,64	787	0,67	0,39	58,19	-0,09	1,44	1,16	1.517
Maluku Utara	1,00	0,63	63,10	-0,24	2,25	0,53	517	0,07	0,07	100,20	-0,07	0,22	0,10	482	0,54	0,32	59,36	-0,09	1,18	0,54	999
Papua Barat	1,50	0,69	45,64	0,16	2,85	0,21	419	1,35	0,67	49,88	0,03	2,67	0,18	301	1,44	0,50	34,53	0,46	2,41	0,23	720
Papua	2,36	0,87	36,68	0,66	4,05	0,61	630	0,86	0,56	64,64	-0,23	1,96	0,52	406	1,72	0,66	38,62	0,42	3,02	0,93	1.036
Indonesia	1,64	0,08	5,04	1,48	1,80	1,90	45.991	0,88	0,06	6,65	0,76	0,99	2,01	50.316	1,23	0,05	4,23	1,13	1,34	2,15	96.307

Tabel L.1: *Sampling Error* Persentase Lansia Ekonomi Bawah Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	41,00	2,99	7,29	35,14	46,86	1,40	824	36,03	1,44	4,01	33,20	38,85	0,75	2.330	37,32	1,32	3,54	34,73	39,91	1,05	3.154
Sumatera Utara	39,97	2,01	5,04	36,02	43,92	3,51	2.599	37,76	1,46	3,86	34,90	40,62	1,57	3.134	38,82	1,23	3,16	36,41	41,23	2,63	5.733
Sumatera Barat	37,84	2,17	5,75	33,58	42,10	1,53	1.519	43,20	1,58	3,65	40,11	46,29	1,08	2.353	41,30	1,29	3,11	38,78	43,82	1,40	3.872
Riau	45,28	3,16	6,99	39,08	51,48	2,07	550	40,92	2,11	5,15	36,79	45,06	1,21	1.013	42,56	1,78	4,17	39,08	46,04	1,69	1.563
Jambi	43,17	3,60	8,33	36,12	50,22	1,59	487	47,90	2,05	4,28	43,88	51,91	0,90	1.256	46,47	1,80	3,88	42,93	50,00	1,25	1.743
Sumatera Selatan	46,11	3,19	6,91	39,87	52,35	3,71	957	42,76	1,70	3,98	39,43	46,09	1,54	1.942	43,93	1,57	3,58	40,85	47,01	2,50	2.899
Bengkulu	47,43	4,30	9,07	39,00	55,86	1,09	379	49,83	2,21	4,43	45,50	54,15	0,62	989	49,19	1,98	4,03	45,31	53,08	0,84	1.368
Lampung	49,45	3,10	6,28	43,37	55,53	2,70	763	47,00	1,63	3,47	43,80	50,19	1,87	2.218	47,57	1,44	3,04	44,74	50,41	2,39	2.981
Kep. Bangka Belitung	53,17	3,03	5,70	47,23	59,11	0,80	599	50,12	3,34	6,66	43,58	56,66	0,71	398	51,69	2,25	4,35	47,28	56,10	0,83	997
Kepulauan Riau	49,29	6,05	12,28	37,43	61,15	3,78	572	37,14	5,51	14,82	26,35	47,93	0,99	273	45,90	4,78	10,40	36,54	55,26	3,15	845
DKI Jakarta	32,53	2,16	6,65	28,29	36,77	6,28	1.372								32,53	2,16	6,65	28,29	36,77	6,02	1.372
Jawa Barat	44,63	1,25	2,80	42,18	47,09	6,61	4.604	44,75	1,36	3,03	42,09	47,41	3,92	3.104	44,68	0,93	2,07	42,86	46,50	5,76	7.708
Jawa Tengah	49,34	1,08	2,19	47,23	51,46	3,74	5.562	50,19	0,98	1,95	48,27	52,12	3,09	6.037	49,82	0,73	1,46	48,40	51,25	3,73	11.599
DI Yogyakarta	51,85	2,47	4,77	47,00	56,69	3,34	1.068	49,11	3,62	7,37	42,02	56,21	4,08	746	50,68	2,10	4,14	46,57	54,79	4,00	1.814
Jawa Timur	49,92	1,09	2,18	47,78	52,05	4,38	6.389	49,70	0,95	1,91	47,83	51,57	3,28	6.923	49,79	0,72	1,44	48,39	51,20	4,14	13.312
Banten	50,62	2,57	5,07	45,59	55,65	4,67	988	43,19	2,77	6,41	37,77	48,62	2,64	735	47,78	1,91	4,00	44,04	51,52	4,02	1.723
Bali	47,36	2,22	4,70	43,00	51,72	2,13	1.332	48,76	2,77	5,67	43,34	54,18	2,32	1.188	48,03	1,76	3,67	44,58	51,48	2,45	2.520
Nusa Tenggara Barat	44,14	2,63	5,96	38,98	49,30	2,01	868	49,69	2,45	4,93	44,89	54,49	1,92	1.125	47,42	1,81	3,82	43,87	50,98	2,21	1.993
Nusa Tenggara Timur	47,10	3,42	7,26	40,40	53,81	1,46	557	43,09	1,33	3,09	40,48	45,70	0,85	3.702	43,77	1,25	2,85	41,32	46,21	1,12	4.259
Kalimantan Barat	49,62	2,95	5,94	43,84	55,40	1,67	717	44,35	1,98	4,47	40,46	48,24	1,25	1.488	46,04	1,65	3,59	42,80	49,27	1,57	2.205
Kalimantan Tengah	44,98	3,61	8,03	37,90	52,07	1,02	478	43,00	2,82	6,56	37,47	48,52	1,00	1.079	43,64	2,24	5,13	39,26	48,03	1,16	1.557
Kalimantan Selatan	40,20	2,60	6,46	35,11	45,29	1,33	656	47,52	2,20	4,63	43,20	51,84	1,07	1.110	44,60	1,69	3,79	41,29	47,91	1,32	1.766
Kalimantan Timur	45,62	2,60	5,69	40,53	50,71	1,48	826	50,66	3,60	7,11	43,60	57,72	1,49	736	47,67	2,14	4,50	43,47	51,87	1,62	1.562
Sulawesi Utara	44,15	2,33	5,27	39,59	48,72	1,01	1.112	42,85	2,19	5,10	38,57	47,14	0,93	1.758	43,41	1,60	3,69	40,27	46,55	1,08	2.870
Sulawesi Tengah	51,71	4,78	9,25	42,33	61,08	1,94	336	40,21	1,83	4,54	36,63	43,79	0,81	1.412	42,72	1,79	4,18	39,23	46,22	1,21	1.748
Sulawesi Selatan	43,85	2,07	4,72	39,79	47,91	1,98	1.528	46,26	1,24	2,68	43,83	48,69	1,17	4.065	45,50	1,07	2,36	43,39	47,60	1,60	5.593
Sulawesi Tenggara	49,40	3,58	7,25	42,38	56,42	0,88	402	41,33	2,09	5,05	37,24	45,43	0,78	1.279	43,21	1,81	4,18	39,67	46,75	0,94	1.681
Gorontalo	46,97	4,50	9,59	38,14	55,79	1,02	271	43,78	3,31	7,55	37,30	50,26	0,82	555	44,88	2,66	5,94	39,65	50,10	1,00	826
Sulawesi Barat	40,25	6,34	15,75	27,82	52,67	1,53	170	42,41	3,17	7,47	36,20	48,62	0,94	602	41,90	2,85	6,79	36,32	47,48	1,25	772
Maluku	49,36	3,96	8,02	41,59	57,12	1,23	402	43,38	2,89	6,66	37,72	49,05	0,86	1.115	45,62	2,33	5,11	41,05	50,19	1,10	1.517
Maluku Utara	44,33	4,66	10,52	35,19	53,48	0,67	236	44,02	3,06	6,96	38,02	50,03	0,64	763	44,10	2,57	5,83	39,07	49,14	0,75	999
Papua Barat	36,09	4,47	12,39	27,33	44,86	0,36	274	37,09	3,81	10,27	29,62	44,56	0,46	446	36,79	2,98	8,10	30,95	42,62	0,50	720
Papua	41,58	4,12	9,90	33,51	49,65	1,02	278	32,67	3,36	10,27	26,09	39,25	0,89	758	36,17	2,61	7,22	31,06	41,29	1,06	1.036
Indonesia	46,11	0,48	1,04	45,17	47,05	4,14	39.675	46,52	0,39	0,83	45,76	47,27	3,10	56.632	46,33	0,30	0,66	45,73	46,92	3,58	96.307

Tabel L.2: *Sampling Error* Persentase Lansia Ekonomi Bawah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Province	Male							Female							Male + Female						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	38,45	1,69	4,38	35,15	41,76	0,70	1.452	36,38	1,50	4,12	33,44	39,32	0,69	1.702	37,32	1,32	3,54	34,73	39,91	1,05	3.154
Sumatera Utara	38,14	1,44	3,78	35,32	40,97	1,51	2.603	39,36	1,42	3,62	36,57	42,16	1,79	3.130	38,82	1,23	3,16	36,41	41,23	2,63	5.733
Sumatera Barat	42,03	1,51	3,59	39,07	44,99	0,79	1.754	40,72	1,46	3,58	37,86	43,58	0,93	2.118	41,30	1,29	3,11	38,78	43,82	1,40	3.872
Riau	41,28	2,17	5,26	37,02	45,53	1,18	780	43,86	2,13	4,85	39,69	48,02	1,10	783	42,56	1,78	4,17	39,08	46,04	1,69	1.563
Jambi	44,23	2,06	4,66	40,19	48,27	0,76	883	48,70	2,16	4,43	44,46	52,93	0,82	860	46,47	1,80	3,88	42,93	50,00	1,25	1.743
Sumatera Selatan	42,94	1,80	4,20	39,40	46,47	1,47	1.417	44,84	1,79	3,99	41,33	48,35	1,54	1.482	43,93	1,57	3,58	40,85	47,01	2,50	2.899
Bengkulu	47,61	2,23	4,69	43,24	51,98	0,49	677	50,74	2,31	4,55	46,22	55,27	0,53	691	49,19	1,98	4,03	45,31	53,08	0,84	1.368
Lampung	46,61	1,68	3,61	43,31	49,90	1,51	1.543	48,56	1,66	3,42	45,30	51,81	1,44	1.438	47,57	1,44	3,04	44,74	50,41	2,39	2.981
Kep. Bangka Belitung	48,22	2,71	5,63	42,90	53,53	0,55	502	55,03	2,65	4,82	49,83	60,22	0,54	495	51,69	2,25	4,35	47,28	56,10	0,83	997
Kepulauan Riau	44,23	5,00	11,30	34,44	54,03	1,64	446	47,64	5,22	10,95	37,41	57,86	1,68	399	45,90	4,78	10,40	36,54	55,26	3,15	845
DKI Jakarta	33,20	2,48	7,47	28,34	38,06	3,50	675	31,91	2,45	7,68	27,11	36,71	3,70	697	32,53	2,16	6,65	28,29	36,77	6,02	1.372
Jawa Barat	44,57	1,07	2,41	42,46	46,67	3,44	3.848	44,79	1,08	2,40	42,68	46,89	3,70	3.860	44,68	0,93	2,07	42,86	46,50	5,76	7.708
Jawa Tengah	49,39	0,86	1,75	47,70	51,09	2,26	5.420	50,19	0,81	1,61	48,61	51,77	2,28	6.179	49,82	0,73	1,46	48,40	51,25	3,73	11.599
DI Yogyakarta	50,63	2,36	4,66	46,01	55,25	2,10	831	50,73	2,47	4,87	45,88	55,58	2,83	983	50,68	2,10	4,14	46,57	54,79	4,00	1.814
Jawa Timur	48,77	0,84	1,73	47,12	50,43	2,39	6.020	50,63	0,80	1,59	49,06	52,21	2,62	7.292	49,79	0,72	1,44	48,39	51,20	4,14	13.312
Banten	45,27	2,25	4,97	40,86	49,67	2,53	859	50,15	2,15	4,29	45,93	54,37	2,41	864	47,78	1,91	4,00	44,04	51,52	4,02	1.723
Bali	49,17	1,91	3,89	45,42	52,92	1,25	1.212	47,03	2,03	4,31	43,06	51,00	1,59	1.308	48,03	1,76	3,67	44,58	51,48	2,45	2.520
Nusa Tenggara Barat	48,01	2,26	4,71	43,58	52,44	1,50	902	46,90	2,02	4,31	42,94	50,86	1,33	1.091	47,42	1,81	3,82	43,87	50,98	2,21	1.993
Nusa Tenggara Timur	44,15	1,47	3,33	41,26	47,04	0,68	2.030	43,42	1,42	3,26	40,64	46,19	0,69	2.229	43,77	1,25	2,85	41,32	46,21	1,12	4.259
Kalimantan Barat	46,30	1,90	4,10	42,57	50,02	0,97	1.140	45,78	1,94	4,24	41,97	49,58	1,00	1.065	46,04	1,65	3,59	42,80	49,27	1,57	2.205
Kalimantan Tengah	42,25	2,60	6,15	37,16	47,34	0,75	825	45,11	2,61	5,79	39,99	50,23	0,70	732	43,64	2,24	5,13	39,26	48,03	1,16	1.557
Kalimantan Selatan	42,44	2,10	4,96	38,32	46,56	0,87	779	46,42	2,00	4,31	42,50	50,34	0,92	987	44,60	1,69	3,79	41,29	47,91	1,32	1.766
Kalimantan Timur	48,35	2,52	5,21	43,41	53,29	1,11	875	46,87	2,61	5,57	41,76	51,99	1,03	687	47,67	2,14	4,50	43,47	51,87	1,62	1.562
Sulawesi Utara	42,81	1,82	4,25	39,24	46,38	0,61	1.354	43,93	1,86	4,23	40,29	47,57	0,71	1.516	43,41	1,60	3,69	40,27	46,55	1,08	2.870
Sulawesi Tengah	41,31	1,94	4,69	37,51	45,10	0,66	877	44,13	2,21	5,01	39,80	48,47	0,85	871	42,72	1,79	4,18	39,23	46,22	1,21	1.748
Sulawesi Selatan	45,01	1,30	2,88	42,47	47,56	0,94	2.488	45,87	1,21	2,65	43,49	48,25	1,06	3.105	45,50	1,07	2,36	43,39	47,60	1,60	5.593
Sulawesi Tenggara	42,22	2,30	5,45	37,71	46,73	0,66	779	44,08	2,06	4,68	40,04	48,13	0,59	902	43,21	1,81	4,18	39,67	46,75	0,94	1.681
Gorontalo	43,85	3,25	7,42	37,47	50,23	0,64	382	45,75	2,90	6,35	40,06	51,44	0,59	444	44,88	2,66	5,94	39,65	50,10	1,00	826
Sulawesi Barat	37,88	3,43	9,05	31,17	44,60	0,81	342	45,45	3,34	7,35	38,90	51,99	0,82	430	41,90	2,85	6,79	36,32	47,48	1,25	772
Maluku	45,80	2,62	5,72	40,67	50,93	0,62	730	45,45	2,62	5,76	40,32	50,58	0,66	787	45,62	2,33	5,11	41,05	50,19	1,10	1.517
Maluku Utara	44,21	3,01	6,80	38,31	50,10	0,48	517	44,00	2,90	6,58	38,32	49,68	0,44	482	44,10	2,57	5,83	39,07	49,14	0,75	999
Papua Barat	37,77	3,44	9,10	31,03	44,51	0,34	419	35,57	3,74	10,52	28,24	42,90	0,33	301	36,79	2,98	8,10	30,95	42,62	0,50	720
Papua	36,18	2,70	7,48	30,88	41,48	0,60	630	36,17	3,51	9,69	29,29	43,04	0,75	406	36,17	2,61	7,22	31,06	41,29	1,06	1.036
Indonesia	45,75	0,35	0,78	45,06	46,45	2,28	45.991	46,83	0,35	0,74	46,15	47,51	2,47	50.316	46,33	0,30	0,66	45,73	46,92	3,58	96.307

Tabel M: Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia Membeli/Memperoleh Beras Miskin (Raskin) Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	51,24	2,91	5,68	45,53	56,94	1,10	699	82,69	1,32	1,59	80,11	85,28	0,85	1.930	74,51	1,31	1,76	71,94	77,08	1,06	2.629
Sumatera Utara	29,01	1,85	6,39	25,37	32,64	2,76	2.029	55,42	1,59	2,88	52,29	58,54	1,42	2.482	42,82	1,31	3,05	40,26	45,38	2,28	4.511
Sumatera Barat	24,49	2,17	8,87	20,23	28,75	1,52	1.171	46,64	1,74	3,74	43,22	50,05	1,03	1.851	38,89	1,40	3,60	36,14	41,63	1,32	3.022
Riau	28,40	2,85	10,03	22,81	33,98	1,67	441	52,24	2,61	5,00	47,12	57,36	1,46	823	43,30	2,01	4,65	39,35	47,24	1,74	1.264
Jambi	32,73	3,79	11,58	25,30	40,16	1,55	377	49,05	2,22	4,54	44,69	53,41	0,86	999	44,23	1,93	4,36	40,44	48,01	1,15	1.376
Sumatera Selatan	42,52	3,50	8,23	35,66	49,39	3,64	744	44,76	1,86	4,16	41,11	48,41	1,44	1.519	43,97	1,72	3,92	40,60	47,35	2,35	2.263
Bengkulu	32,04	3,88	12,10	24,44	39,65	0,83	301	49,90	2,84	5,70	44,33	55,47	0,78	759	44,98	2,36	5,24	40,37	49,60	0,93	1.060
Lampung	53,60	3,21	5,99	47,31	59,89	2,33	596	73,62	1,45	1,97	70,78	76,46	1,47	1.724	68,80	1,38	2,00	66,10	71,50	1,95	2.320
Kep. Bangka Belitung	19,98	2,42	12,13	15,23	24,73	0,62	447	36,33	3,35	9,21	29,77	42,89	0,61	326	28,12	2,10	7,48	24,00	32,25	0,69	773
Kepulauan Riau	32,55	5,82	17,88	21,14	43,96	3,03	450	50,03	6,81	13,61	36,68	63,38	1,02	207	37,25	4,44	11,91	28,55	45,95	2,13	657
DKI Jakarta	21,05	1,76	8,38	17,59	24,51	4,39	1.078								21,05	1,76	8,38	17,59	24,51	4,14	1.078
Jawa Barat	54,43	1,34	2,45	51,82	57,05	6,07	3.652	75,47	1,28	1,69	72,96	77,97	3,70	2.428	62,73	0,96	1,52	60,86	64,61	5,13	6.080
Jawa Tengah	63,37	1,15	1,81	61,12	65,63	3,60	4.419	84,83	0,78	0,92	83,30	86,35	2,92	4.586	75,42	0,67	0,89	74,10	76,74	3,33	9.005
DI Yogyakarta	41,43	2,49	6,00	36,56	46,31	2,58	786	80,18	3,00	3,74	74,31	86,06	3,31	546	58,14	2,06	3,55	54,09	62,19	2,94	1.332
Jawa Timur	55,50	1,25	2,25	53,05	57,94	4,65	5.076	81,98	0,86	1,05	80,30	83,66	3,58	5.385	70,34	0,75	1,07	68,87	71,82	4,30	10.461
Banten	46,26	2,77	5,99	40,83	51,69	4,56	817	78,50	2,76	3,52	73,08	83,92	3,22	604	58,72	1,99	3,39	54,82	62,63	3,72	1.421
Bali	22,14	2,17	9,81	17,89	26,40	2,08	936	45,03	3,11	6,90	38,94	51,12	2,12	838	33,21	1,86	5,61	29,55	36,86	2,17	1.774
Nusa Tenggara Barat	80,43	2,26	2,81	76,00	84,87	1,90	690	91,31	1,28	1,41	88,80	93,83	1,30	863	86,79	1,21	1,39	84,42	89,16	1,68	1.553
Nusa Tenggara Timur	16,33	2,99	18,32	10,47	22,19	1,60	432	57,81	1,80	3,12	54,27	61,34	1,23	2.825	50,84	1,62	3,18	47,67	54,01	1,43	3.257
Kalimantan Barat	25,53	2,87	11,25	19,90	31,16	1,67	570	53,22	2,41	4,53	48,49	57,95	1,45	1.184	44,35	1,93	4,34	40,57	48,13	1,70	1.754
Kalimantan Tengah	21,49	3,18	14,81	15,25	27,73	0,96	391	44,51	2,90	6,52	38,82	50,19	0,86	872	37,01	2,25	6,08	32,60	41,42	1,00	1.263
Kalimantan Selatan	20,97	2,30	10,97	16,46	25,48	1,27	555	41,41	2,28	5,51	36,93	45,88	1,00	935	33,34	1,70	5,09	30,02	36,67	1,23	1.490
Kalimantan Timur	18,67	2,12	11,36	14,51	22,83	1,33	670	44,88	3,61	8,04	37,80	51,95	1,21	581	29,19	1,98	6,78	25,31	33,07	1,34	1.251
Sulawesi Utara	25,37	2,42	9,54	20,63	30,11	1,09	831	52,57	2,24	4,27	48,17	56,97	0,72	1.289	40,91	1,75	4,28	37,49	44,34	0,98	2.120
Sulawesi Tengah	39,83	4,92	12,35	30,19	49,47	1,69	268	63,09	2,19	3,48	58,79	67,39	0,95	1.106	58,03	2,06	3,55	53,99	62,07	1,27	1.374
Sulawesi Selatan	24,09	1,74	7,22	20,68	27,50	1,50	1.221	46,81	1,38	2,95	44,11	49,51	1,12	3.109	39,52	1,11	2,81	37,35	41,70	1,38	4.330
Sulawesi Tenggara	34,46	3,66	10,61	27,29	41,62	0,85	330	63,17	2,64	4,17	58,01	68,34	1,03	1.009	56,21	2,19	3,89	51,92	60,49	1,09	1.339
Gorontalo	36,42	3,68	10,11	29,21	43,64	0,59	218	63,01	3,11	4,94	56,90	69,11	0,60	430	53,73	2,46	4,57	48,92	58,54	0,66	648
Sulawesi Barat	40,87	6,27	15,35	28,57	53,16	1,19	137	62,67	3,64	5,81	55,53	69,81	1,03	470	57,54	3,18	5,52	51,31	63,77	1,21	607
Maluku	28,35	4,20	14,83	20,11	36,59	1,30	314	58,49	3,62	6,19	51,40	65,58	1,04	846	47,29	2,89	6,11	41,63	52,95	1,27	1.160
Maluku Utara	14,02	3,28	23,39	7,59	20,45	0,56	195	41,89	3,41	8,15	35,19	48,58	0,64	598	34,53	2,68	7,76	29,28	39,79	0,71	793
Papua Barat	31,94	4,96	15,54	22,21	41,67	0,38	217	49,50	4,86	9,83	39,96	59,03	0,58	372	44,32	3,65	8,24	37,16	51,48	0,58	589
Papua	29,85	3,97	13,30	22,07	37,63	0,95	238	53,58	3,55	6,62	46,63	60,53	0,68	617	43,68	2,65	6,07	38,48	48,88	0,82	855
Indonesia	47,46	0,52	1,09	46,44	48,47	3,75	31.296	70,83	0,37	0,52	70,11	71,54	2,61	44.113	59,99	0,32	0,53	59,37	60,60	3,12	75.409

Tabel N: *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	11,79	1,76	14,90	8,35	15,24	0,96	699	3,90	0,53	13,73	2,85	4,95	0,54	1.930	5,95	0,61	10,33	4,75	7,16	0,79	2.629
Sumatera Utara	10,39	1,04	9,99	8,35	12,42	1,91	2.029	5,12	0,59	11,53	3,96	6,28	0,99	2.482	7,63	0,58	7,66	6,48	8,78	1,59	4.511
Sumatera Barat	12,67	1,54	12,12	9,66	15,68	1,27	1.171	4,23	0,55	13,04	3,15	5,31	0,63	1.851	7,18	0,65	9,05	5,91	8,46	1,01	3.022
Riau	10,73	1,90	17,73	7,00	14,46	1,59	441	2,75	0,66	24,08	1,45	4,05	0,88	823	5,75	0,84	14,61	4,10	7,39	1,37	1.264
Jambi	9,46	2,20	23,20	5,16	13,77	1,34	377	2,74	0,54	19,81	1,68	3,80	0,48	999	4,73	0,76	16,11	3,24	6,22	0,98	1.376
Sumatera Selatan	10,47	1,68	16,05	7,17	13,76	2,19	744	2,17	0,41	18,74	1,37	2,97	0,80	1.519	5,08	0,65	12,87	3,80	6,36	1,73	2.263
Bengkulu	15,21	3,33	21,92	8,67	21,75	1,04	301	2,59	0,66	25,34	1,31	3,88	0,41	759	6,07	1,06	17,43	3,99	8,14	0,81	1.060
Lampung	8,91	1,59	17,89	5,78	12,03	1,76	596	2,12	0,41	19,24	1,32	2,92	1,09	1.724	3,75	0,49	13,05	2,79	4,71	1,47	2.320
Kep. Bangka Belitung	7,27	1,78	24,54	3,77	10,76	0,79	447	3,54	1,61	45,48	0,38	6,69	0,96	326	5,41	1,20	22,12	3,06	7,76	0,88	773
Kepulauan Riau	7,81	1,94	24,85	4,00	11,61	1,03	450	1,75	1,72	98,30	-1,62	5,11	0,95	207	6,18	1,47	23,74	3,30	9,05	0,94	657
DKI Jakarta	11,86	1,19	10,06	9,52	14,20	3,19	1.078								11,86	1,19	10,06	9,52	14,20	3,01	1.078
Jawa Barat	10,99	0,69	6,24	9,64	12,33	4,06	3.652	3,07	0,43	13,83	2,24	3,91	2,54	2.428	7,86	0,45	5,70	6,99	8,74	3,64	6.080
Jawa Tengah	10,17	0,59	5,85	9,01	11,34	2,45	4.419	3,37	0,30	8,99	2,78	3,97	1,75	4.586	6,35	0,31	4,94	5,74	6,97	2,26	9.005
DI Yogyakarta	12,73	1,67	13,14	9,45	16,01	2,55	786	5,23	1,06	20,24	3,16	7,31	1,32	546	9,50	1,08	11,34	7,39	11,61	2,27	1.332
Jawa Timur	9,65	0,63	6,48	8,42	10,87	3,31	5.076	2,12	0,24	11,50	1,64	2,60	2,05	5.385	5,43	0,31	5,71	4,82	6,04	2,96	10.461
Banten	9,29	1,33	14,27	6,69	11,88	3,08	817	4,61	0,95	20,72	2,74	6,48	1,47	604	7,48	0,89	11,93	5,73	9,23	2,61	1.421
Bali	9,16	1,35	14,79	6,50	11,81	1,67	936	7,70	1,83	23,75	4,12	11,29	2,55	838	8,45	1,13	13,31	6,25	10,66	2,27	1.774
Nusa Tenggara Barat	5,91	1,14	19,24	3,68	8,14	1,36	690	1,67	0,57	34,28	0,55	2,79	1,25	863	3,43	0,58	16,78	2,30	4,56	1,33	1.553
Nusa Tenggara Timur	16,49	3,25	19,72	10,12	22,87	1,88	432	2,85	0,38	13,24	2,11	3,59	0,47	2.825	5,14	0,66	12,87	3,85	6,44	1,23	3.257
Kalimantan Barat	9,28	1,77	19,12	5,80	12,75	1,43	570	1,87	0,49	26,17	0,91	2,83	0,81	1.184	4,24	0,66	15,47	2,96	5,53	1,20	1.754
Kalimantan Tengah	14,15	2,77	19,56	8,72	19,58	1,01	391	4,40	1,03	23,50	2,37	6,42	0,64	872	7,57	1,15	15,23	5,31	9,84	0,88	1.263
Kalimantan Selatan	12,72	1,82	14,28	9,16	16,29	1,19	555	4,60	0,91	19,79	2,81	6,38	0,88	935	7,80	0,91	11,64	6,02	9,58	1,09	1.490
Kalimantan Timur	11,35	1,75	15,40	7,93	14,78	1,37	670	4,91	1,37	27,82	2,23	7,59	0,92	581	8,77	1,18	13,51	6,45	11,09	1,24	1.251
Sulawesi Utara	10,27	1,50	14,56	7,34	13,20	0,85	831	7,60	1,09	14,29	5,47	9,73	0,60	1.289	8,74	0,89	10,17	7,00	10,49	0,77	2.120
Sulawesi Tengah	9,99	2,83	28,29	4,45	15,53	1,49	268	2,67	0,48	18,00	1,73	3,61	0,41	1.106	4,26	0,76	17,76	2,78	5,75	1,02	1.374
Sulawesi Selatan	11,29	1,39	12,29	8,57	14,01	1,75	1.221	4,40	0,50	11,31	3,43	5,38	0,87	3.109	6,61	0,56	8,50	5,51	7,71	1,37	4.330
Sulawesi Tenggara	18,75	2,86	15,26	13,14	24,36	0,77	330	3,33	0,68	20,55	1,99	4,67	0,50	1.009	7,07	0,87	12,32	5,36	8,77	0,65	1.339
Gorontalo	12,12	3,22	26,59	5,80	18,44	0,98	218	1,94	0,72	37,11	0,53	3,35	0,39	430	5,49	1,26	22,95	3,02	7,96	0,83	648
Sulawesi Barat	13,77	3,92	28,48	6,08	21,45	0,95	137	3,45	0,99	28,59	1,52	5,38	0,53	470	5,87	1,18	20,11	3,66	8,19	0,74	607
Maluku	24,60	4,14	16,84	16,48	32,72	1,39	314	3,13	0,64	20,42	1,88	4,39	0,26	846	11,11	1,76	15,82	7,66	14,56	1,19	1.160
Maluku Utara	8,95	2,75	30,71	3,56	14,33	0,58	195	2,15	0,69	32,10	0,80	3,50	0,30	598	3,94	0,89	22,58	2,20	5,69	0,47	793
Papua Barat	27,76	4,62	16,65	18,70	36,83	0,36	217	8,24	2,27	27,54	3,79	12,68	0,41	372	13,99	2,20	15,70	9,69	18,30	0,43	589
Papua	25,44	4,59	18,02	16,45	34,43	1,41	238	4,83	1,05	21,67	2,78	6,89	0,32	617	13,43	2,19	16,29	9,14	17,71	1,18	855
Indonesia	10,64	0,27	2,52	10,11	11,16	2,64	31.296	3,23	0,12	3,67	3,00	3,46	1,81	44.113	6,66	0,14	2,10	6,39	6,94	2,38	75.409

Tabel O: Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Province	Urban							Rural							Urban + Rural						
	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation	Estimated Indicator	Standard Error	Relative Standard Error	95% Confidence Interval		Design Effect	Number of Observation
				Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound						Lower Bound	Upper Bound		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	88,58	2,03	2,30	84,59	92,57	1,32	699	86,87	1,06	1,22	84,79	88,94	0,69	1,930	87,31	0,94	1,08	85,46	89,16	0,94	2,629
Sumatera Utara	41,48	2,02	4,86	37,52	45,43	2,77	2,029	33,10	1,38	4,17	30,40	35,80	1,19	2,482	37,10	1,21	3,27	34,72	39,48	2,07	4,511
Sumatera Barat	56,90	2,11	3,71	52,77	61,04	1,08	1,171	43,33	1,48	3,42	40,43	46,24	0,75	1,851	48,08	1,22	2,53	45,70	50,47	0,95	3,022
Riau	48,98	2,97	6,07	43,15	54,81	1,48	441	43,80	2,33	5,31	39,24	48,36	1,17	823	45,74	1,82	3,99	42,17	49,32	1,42	1,264
Jambi	50,48	3,71	7,35	43,20	57,75	1,31	377	31,19	1,91	6,13	27,44	34,93	0,73	999	36,89	1,77	4,79	33,43	40,35	1,02	1,376
Sumatera Selatan	62,19	2,95	4,74	56,41	67,96	2,68	744	54,62	2,01	3,69	50,68	58,57	1,68	1,519	57,28	1,67	2,92	54,00	60,55	2,23	2,263
Bengkulu	55,39	3,95	7,12	47,65	63,12	0,76	301	36,03	2,17	6,02	31,78	40,28	0,49	759	41,36	1,99	4,80	37,47	45,25	0,67	1,060
Lampung	59,50	3,14	5,27	53,36	65,65	2,30	596	39,12	1,69	4,32	35,81	42,44	1,63	1,724	44,03	1,51	3,43	41,07	46,98	2,04	2,320
Kep. Bangka Belitung	57,59	3,40	5,90	50,92	64,25	0,79	447	62,64	4,19	6,69	54,43	70,85	0,95	326	60,11	2,71	4,51	54,79	65,42	0,97	773
Kepulauan Riau	51,42	4,00	7,77	43,58	59,26	1,26	450	62,68	5,54	8,84	51,81	73,54	0,72	207	54,45	3,25	5,97	48,08	60,82	1,08	657
DKI Jakarta	54,46	2,16	3,97	50,22	58,70	4,43	1,078								54,46	2,16	3,97	50,22	58,70	4,18	1,078
Jawa Barat	53,01	1,15	2,16	50,77	55,26	4,44	3,652	44,76	1,37	3,07	42,06	47,45	3,20	2,428	49,75	0,88	1,78	48,02	51,49	4,11	6,080
Jawa Tengah	58,08	0,95	1,63	56,22	59,94	2,34	4,419	53,89	1,01	1,88	51,91	55,88	2,55	4,586	55,73	0,70	1,26	54,35	57,11	2,74	9,005
DI Yogyakarta	72,67	2,03	2,79	68,69	76,65	2,10	786	85,96	2,09	2,43	81,87	90,04	2,11	546	78,40	1,51	1,93	75,44	81,36	2,26	1,332
Jawa Timur	46,15	1,02	2,22	44,15	48,16	3,11	5,076	43,60	0,93	2,13	41,78	45,42	2,52	5,385	44,72	0,69	1,54	43,37	46,07	3,03	10,461
Banten	52,98	2,22	4,20	48,62	57,34	2,94	817	46,32	2,70	5,83	41,03	51,61	2,08	604	50,41	1,71	3,39	47,05	53,76	2,66	1,421
Bali	88,47	1,55	1,75	85,43	91,51	1,79	936	96,58	0,76	0,78	95,10	98,07	0,94	838	92,39	0,89	0,96	90,65	94,13	1,56	1,774
Nusa Tenggara Barat	54,46	2,51	4,62	49,53	59,39	1,49	690	53,05	2,17	4,08	48,80	57,29	1,18	863	53,64	1,64	3,06	50,42	56,85	1,43	1,553
Nusa Tenggara Timur	67,67	2,99	4,42	61,81	73,53	1,00	432	71,32	1,14	1,60	69,09	73,56	0,59	2,825	70,71	1,07	1,52	68,60	72,81	0,76	3,257
Kalimantan Barat	39,12	2,90	7,42	33,44	44,81	1,36	570	35,49	1,98	5,58	31,61	39,37	1,06	1,184	36,66	1,64	4,47	33,45	39,87	1,31	1,754
Kalimantan Tengah	48,63	3,37	6,92	42,03	55,23	0,72	391	38,73	2,72	7,01	33,41	44,06	0,78	872	41,96	2,15	5,12	37,74	46,17	0,88	1,263
Kalimantan Selatan	51,08	2,92	5,71	45,37	56,79	1,36	555	49,71	2,19	4,41	45,41	54,00	0,90	935	50,25	1,75	3,49	46,81	53,69	1,17	1,490
Kalimantan Timur	72,57	2,31	3,18	68,05	77,10	1,20	670	65,28	3,50	5,36	58,42	72,13	1,24	581	69,64	1,96	2,81	65,81	73,48	1,29	1,251
Sulawesi Utara	56,40	2,41	4,27	51,67	61,12	0,83	831	49,32	1,97	4,00	45,45	53,18	0,56	1,289	52,35	1,53	2,93	49,35	55,35	0,73	2,120
Sulawesi Tengah	65,33	3,60	5,51	58,28	72,39	0,96	268	54,42	1,97	3,63	50,55	58,29	0,72	1,106	56,80	1,75	3,09	53,36	60,24	0,91	1,374
Sulawesi Selatan	67,15	2,30	3,43	62,64	71,66	2,18	1,221	68,53	1,42	2,07	65,76	71,31	1,37	3,109	68,09	1,21	1,78	65,71	70,47	1,81	4,330
Sulawesi Tenggara	63,03	3,57	5,67	56,03	70,04	0,79	330	58,13	1,93	3,33	54,34	61,93	0,53	1,009	59,32	1,71	2,88	55,97	62,67	0,68	1,339
Gorontalo	67,93	3,75	5,52	60,59	75,28	0,65	218	62,24	3,19	5,13	55,98	68,49	0,62	430	64,22	2,46	3,83	59,40	69,04	0,72	648
Sulawesi Barat	72,74	5,28	7,25	62,40	83,09	1,03	137	61,61	3,58	5,82	54,58	68,63	0,98	470	64,23	3,00	4,68	58,34	70,12	1,15	607
Maluku	64,56	3,60	5,58	57,49	71,62	0,85	314	59,36	2,25	3,79	54,95	63,76	0,40	846	61,29	1,95	3,18	57,47	65,11	0,61	1,160
Maluku Utara	57,14	4,87	8,52	47,59	66,69	0,61	195	61,95	3,16	5,11	55,74	68,15	0,57	598	60,68	2,67	4,39	55,45	65,90	0,67	793
Papua Barat	70,48	4,38	6,22	61,89	79,07	0,31	217	82,30	3,00	3,65	76,42	88,18	0,38	372	78,81	2,50	3,18	73,91	83,72	0,40	589
Papua	80,34	3,23	4,02	74,01	86,67	0,84	238	65,93	3,30	5,01	59,46	72,41	0,66	617	71,94	2,43	3,38	67,17	76,71	0,84	855
Indonesia	54,85	0,45	0,81	53,97	55,72	2,81	31.296	50,93	0,39	0,77	50,17	51,70	2,47	44.113	52,75	0,29	0,56	52,17	53,33	2,62	75.409

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

